



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan yang mendasar yakni bencana non-alam (pandemi *covid-19*), krisis ekonomi, perubahan kebijakan nasional, dan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
2019 Nomor 1) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Mei 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

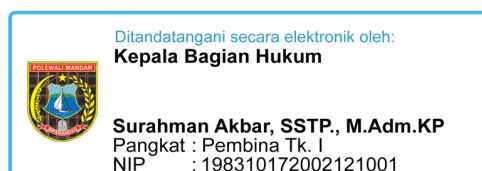
ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 16 / TAHUN 2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Mei 2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini, dan terjadi perubahan yang mendasar.

Alasan perubahan RPJMD dalam konteks Polewali Mandar karena terjadi perubahan yang mendasar mencakup bencana non-alam (pandemi *Covid-19*), krisis ekonomi, perubahan kebijakan nasional, dan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan.

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak bagi sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pun terkena imbasnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan aktivitas dan *refocussing* anggaran ke penanganan *Covid-19*.

Krisis ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 6,22 (enam koma dua dua) persen pada Tahun 2019 menjadi -1,56 (minus satu koma lima enam) persen pada Tahun 2020. Sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bertumbuh negatif. Para pelaku di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terdampak dan mengalami krisis.

Perubahan kebijakan nasional terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga ada beberapa perubahan kebijakan nasional yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten.

Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah, dan program perangkat daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 32.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBARxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 7

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 18

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 19

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....21

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 21

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 57

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 77

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 157

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 166

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 166

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 184

3.3 KERANGKA PENDANAAN 192

BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.... 197

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 197

4.2 ISU STRATEGIS 214

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN.....224

5.1 V I S I 224

5.2 M I S I 225

5.3 TUJUAN DAN SASARAN 226

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH232

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 232

6.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 242

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 242

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH281

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH475

BAB IX PENUTUP496

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	23
Tabel 2. 2	Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	24
Tabel 2. 3	Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	25
Tabel 2. 4	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	26
Tabel 2. 5	Luas Kawasan Hutan dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	31
Tabel 2. 6	Sebaran Hutan Mangrove Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	35
Tabel 2. 7	Luas Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	36
Tabel 2. 8	Luas Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	37
Tabel 2. 9	Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	39
Tabel 2. 10	Produksi Buah-buahan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	40
Tabel 2. 11	Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	41
Tabel 2. 12	Jumlah Ternak Yang Keluar Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	42
Tabel 2. 13	Produksi Perikanan Tangkap Komoditi Andalan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	43
Tabel 2. 14	Produksi Perikanan Budidaya dan Rumput Laut Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	44
Tabel 2. 15	Jumlah, Jenis dan Intensitas Bencana menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	52
Tabel 2. 16	Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk per Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	54
Tabel 2. 17	Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	56
Tabel 2. 18	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021	58
Tabel 2. 19	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 (dalam Milyar)	60
Tabel 2. 20	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 – 2021	61

Tabel 2. 21 Persentase Balita Underweight Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 73

Tabel 2. 22 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 74

Tabel 2. 23 Jumlah Organisasi Kesenian dan Pemuda Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 76

Tabel 2. 24 Jumlah Kegiatan Pemuda Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 77

Tabel 2. 25 Jumlah PAUD Terlayani dan Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 78

Tabel 2. 26 Angka Melanjutkan Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 80

Tabel 2. 27 Sekolah dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 81

Tabel 2. 28 Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru/Murid Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 81

Tabel 2. 29 Guru Aparat Sipil Negara yang bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 82

Tabel 2. 30 Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 84

Tabel 2. 31 Rasio Posyandu per satuan Balita Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 84

Tabel 2. 32 Prevalensi Stunting Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2021 85

Tabel 2. 33 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 86

Tabel 2. 34 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 86

Tabel 2. 35 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 87

Tabel 2. 36 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 88

Tabel 2. 37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 89

Tabel 2. 38 Cakupan Pelayanan kesehatan penyakit menular (DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 ... 91

Tabel 2. 39 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021. 93

Tabel 2. 40 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 93

Tabel 2. 41 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 94

Tabel 2. 42 Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021..... 96

Tabel 2. 43 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 96

Tabel 2. 44 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021. 97

Tabel 2. 45 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 97

Tabel 2. 46 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 98

Tabel 2. 47 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 99

Tabel 2. 48 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021..... 99

Tabel 2. 48 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 100

Tabel 2. 50 Persentase luas areal permukiman kumuh Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 102

Tabel 2. 51 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 103

Tabel 2. 52 Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 105

Tabel 2. 53 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 106

Tabel 2. 54 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 107

Tabel 2. 55 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 108

Tabel 2. 56 Persentase PMKS yang tertangani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 109

Tabel 2.57 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 112

Tabel 2. 58 Jumlah Penganggur Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 113

Tabel 2. 59 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 113

Tabel 2. 60 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 116

Tabel 2. 61 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 117

Tabel 2. 62 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 117

Tabel 2. 63 Jumlah Sertifikat dan Konflik Tanah yang ditindaklanjuti Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 119

Tabel 2. 64 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 120

Tabel 2. 65 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 120

Tabel 2. 66 Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 121

Tabel 2. 67 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 121

Tabel 2. 68 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 123

Tabel 2. 69 Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021 125

Tabel 2. 70 Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 126

Tabel 2. 71 Rasio Izin Trayek terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 128

Tabel 2. 72 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 129

Tabel 2. 73 Jaringan Komunikasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 129

Tabel 2. 74 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 130

Tabel 2. 75 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 130

Tabel 2. 76 Jumlah PMA dan PMDN Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 132

Tabel 2. 77 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 132

Tabel 2. 78 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 134

Tabel 2. 79 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 135

Tabel 2. 80 Indikator Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 136

Tabel 2. 81 Indikator Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 137

Tabel 2. 82 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 137

Tabel 2. 83 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 138

Tabel 2. 84 Indikator Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 138

Tabel 2. 85 Capaian produksi perikanan, jumlah konsumsi ikan dan kelompok nelayan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 139

Tabel 2. 86 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 140

Tabel 2. 87 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 141

Tabel 2. 88 Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 143

Tabel 2. 89 Perkembangan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 143

Tabel 2. 90 Jumlah Produksi Komoditi Andalan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 144

Tabel 2. 91 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 145

Tabel 2. 92 Luas Kawasan Hutan Mandardirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali, Tahun 2021 146

Tabel 2. 93 Luas Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021 147

Tabel 2. 94 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 149

Tabel 2. 95 Persentase Industri Kecil Berdasarkan Komoditi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021 150

Tabel 2. 96 Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 150

Tabel 2. 97 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 151

Tabel 2. 98 Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 152

Tabel 2. 99 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2017-2021 152

Tabel 2. 100 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 154

Tabel 2. 101 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 154

Tabel 2. 102 Kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun
2017-2021 155

Tabel 2. 103 Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021
..... 156

Tabel 2. 104 Kinerja pengawasan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021
..... 157

Tabel 2. 105 Angka Konsumsi rata-rata Rumah tangga Per Kapita Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2017-2021 158

Tabel 2. 107 Angka Konsumsi rata-rata Rumah tangga Per Kapita Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2017-2021 159

Tabel 2. 107 Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen Kabupaten Polewali Mandar,
Tahun 2017-2021 160

Tabel 2. 108 Angka Kriminalitas Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 161

Tabel 2. 109 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021
..... 162

Tabel 2. 110 Lama Proses Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021 162

Tabel 2. 111 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung
Iklim Investasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 163

Tabel 2. 112 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 164

Tabel 2. 113 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun
2017-2021 165

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
Tahun 2017-2021 168

Tabel 3. 2 Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2017 - 2021 173

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Belanja Modal Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali
Mandar, Tahun 2017-2022 178

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tak Terduga Kabupaten Polewali Mandar,
Tahun 2017–2021 179

Tabel 3. 5 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Polewali Mandar, Tahun
2017–2021 179

Tabel 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017–2021 180

Tabel 3. 7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah (Milyar Rupiah) Kabupaten Polewali Mandar,Tahun 2017-2021 182

Tabel 3. 8 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 184

Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021 185

Tabel 3. 10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021 186

Tabel 3. 11 Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 188

Tabel 3. 12 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2022 189

Tabel 3. 13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 190

Tabel 3. 14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021 191

Tabel 3. 15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024 193

Tabel 3. 16 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024 194

Tabel 3. 17 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019 – 2024 195

Tabel 3. 18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024 196

Tabel 5. 1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 225

Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 226

Tabel 5. 3 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pembangunan Daerah Polewali Mandar Tahun 2019-2024 227

Tabel 5. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 229

Tabel 6. 1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 233

Tabel 6. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 235

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2020 243

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 261

Tabel 7. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Urusan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2020 282

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Urusan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 – 2024 309

Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar330

Tabel 7. 4 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah..... 376

Tabel 7. 5 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah..... 428

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 476

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024 476

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar	22
Gambar 2. 2 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Polewali Mandar ..	27
Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Polewali Mandar	29
Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Polewali Mandar	30
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Polewali Mandar	34
Gambar 2. 6 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	55
Gambar 2. 7 Piramida Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	56
Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	59
Gambar 2. 9 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017- 2021	63
Gambar 2. 10 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021	64
Gambar 2. 11 Indeks Ketimpangan	65
Gambar 2. 12 Angka Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017- 2021	66
Gambar 2. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	67
Gambar 2. 14 Indikator kemiskinan P1, P2 dan P0 Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	69
Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	70
Gambar 2. 16 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	71
Gambar 2. 17 Umur Harapan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017- 2021	72
Gambar 2. 18 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	72

Gambar 2. 19 Angka Melek Huruf Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	75
Gambar 2. 20 APK, APM dan APS Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	76
Gambar 2. 21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	79
Gambar 2. 22 Angka Putus Sekolah untuk SD dan SMP Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	80
Gambar 2. 23 Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	90
Gambar 2. 24 Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021	95
Gambar 2. 25 Peta Capaian Akses Air Minum Aman Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021	101
Gambar 2. 26 Peta Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019	103
Gambar 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	111
Gambar 2. 28 Jumlah Tenaga Kerja yang sudah mendapatkan Pelatihan Kerja Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	114
Gambar 2. 29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	115
Gambar 2. 30 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	124
Gambar 2. 31 Penumpang angkutan Umum	127
Gambar 2. 32 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021	127
Gambar 2.32 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	131
Gambar 2. 34 Jumlah Perkembangan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2022	141

Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	145
Gambar 2. 36 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	148
Gambar 2. 37 Persentase Belanja SILPA terhadap Total APBD Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	153
Gambar 2. 38 Belanja bagi hasil kepada Provinsi dan Pemerintah desa Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	153
Gambar 2. 39 Kondisi Jalan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	160
Gambar 3. 1 Proporsi Pendapatan Daerah	169
Gambar 3. 2 Proporsi PAD (%)	170
Gambar 3. 3 Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	171
Gambar 3. 4 Proporsi Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	175
Gambar 3. 5 Proporsi Anggaran Belanja Operasi Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	176
Gambar 3. 6 Proporsi Komposisi Belanja Modal Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021	177

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi perekonomian lebih baik, berkembang dan maju, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan target peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah melaksanakan pembangunan bersama dengan stakeholder terkait dengan melalui beberapa tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD). RPJP/RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM/RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP/RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sudah memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Alasan perubahan mendasar RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah :

1. Bencana non-alam (pandemi Covid-19);

World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai *Publik Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi, jumlah kasus positif terinfeksi Covid-19 semakin meningkat termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Pandemi ini memberikan dampak bagi sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pun terkena imbasnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan aktivitas dan *refocussing* anggaran ke penanganan Covid-19. Dampak terhadap

kehidupan sosial yang jika tidak terkendali berpotensi menyebabkan krisis di bidang politik. Situasi tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan apabila pandemi ini berlangsung dalam durasi yang lama.

2. Krisis ekonomi;

Krisis ekonomi adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara. Gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali oleh penurunan belanja dari pemerintah, pengangguran yang meningkat, kenaikan harga pokok yang meroket, penurunan konsumsi yang rendah dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah perluasan Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya aktivitas ekonomi yang mengalami penurunan drastis. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa sektor di bidang ekonomi mengalami stagnasi karena tidak adanya kegiatan perekonomian. Para pelaku di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat terdampak dan mengalami krisis. Beberapa pelaku usaha menghentikan aktivitas dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Kondisi ini akan memberikan pengaruh besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Akibatnya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami penurunan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, inflasi meningkat dan pengangguran juga meningkat. Hampir semua daerah mengalami keterpurukan kegiatan ekonomi termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Pembatasan aktivitas menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi turun drastis.

3. Perubahan Kebijakan Nasional;

Perubahan kebijakan nasional terkait dengan terbitnya RPJMN 2020-2024, dimana pada penyusunan RPJMD pokok masih berpedoman pada RPJMN 2014-2019, sehingga ada beberapa perubahan kebijakan nasional yang perlu disesuaikan dengan

kebijakan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 bahwa, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud, wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Sedangkan pada pasal 259 sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis (kortek). Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya;
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
4. Terbitnya berbagai peraturan perundangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) . Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah antar instansi pusat dan daerah. Data-data yang terkumpul dari berbagai sumber harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, dan data induk.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Pasal 14 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik diantaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Anggaran Daerah;
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
5. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Pengawasan Keuangan Daerah; dan
7. Analisis Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada tahun 2023 dan 2024 mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD sesuai pasal 17 sampai dengan pasal 40 sebagaimana disebutkan dalam pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu meliputi : (1) persiapan penyusunan RPJMD; (2) penyusunan rancangan awal RPJMD; (3) penyusunan rancangan RPJMD; (4) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (6) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dokumen Perubahan RPJMD ini tetap memperhatikan konsepsi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk memastikan tujuan target dan indikator TPB telah terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD, termasuk mengakomodir rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan berpijak pada kondisi tersebut maka dampak dari pandemi baik terkait pemulihan ekonomi maupun pemulihan sosial menjadi fokus utama dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah

diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

32. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
33. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulansgan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

46. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 24);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

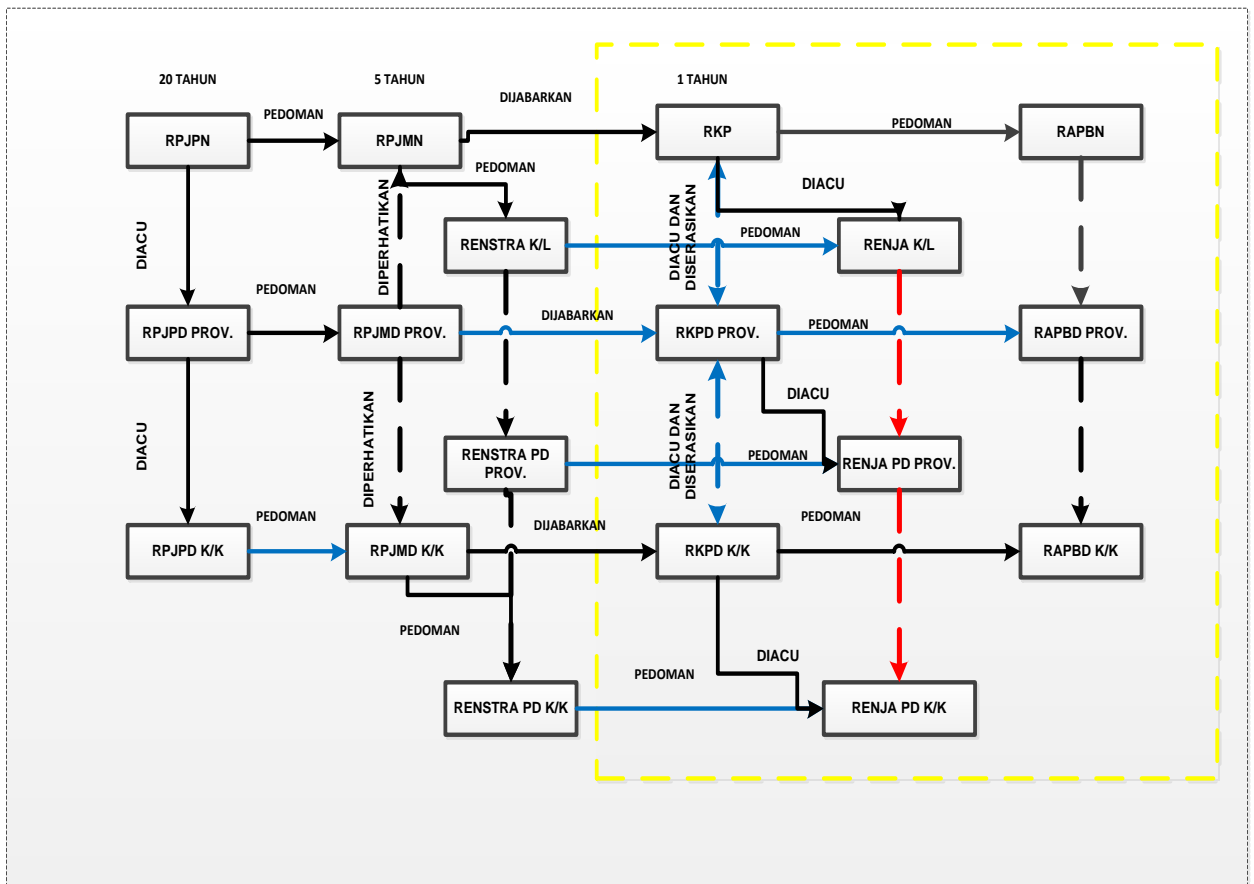
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam penyusunannya Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Agar Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Dokumen perencanaan pembangunan mulai dari jangka Panjang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan Jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut menjadi Bahan dan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah untuk menyesuaikan kebijakan 2 (dua) tahun ke depan dalam memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang telah direview dan dievaluasi untuk menjadi acuan dan diimplementasikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD .

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat uraian beberapa hal yang menjadi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi umum Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing;

Bab III Gambaran Keuangan Daerah, pada bab ini diuraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan;

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, membahas analisis isu-isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi dan isu strategis yang merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif dan negatif terhadap daerah di masa yang akan datang;

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, memuat visi beserta penjabarannya, misi, tujuan dan sasaran yang terukur untuk periode Tahun 2019-2024;

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi;

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan;

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan;

Bab IX Penutup, menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI

Kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah keadaan geografi dan demografi yang merupakan gambaran dari; luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, hidrologi, penggunaan lahan, kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah, wilayah bencana dan demografi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Masing-masing keadaan geografi dan demografik dapat dijelaskan sebagai berikut :

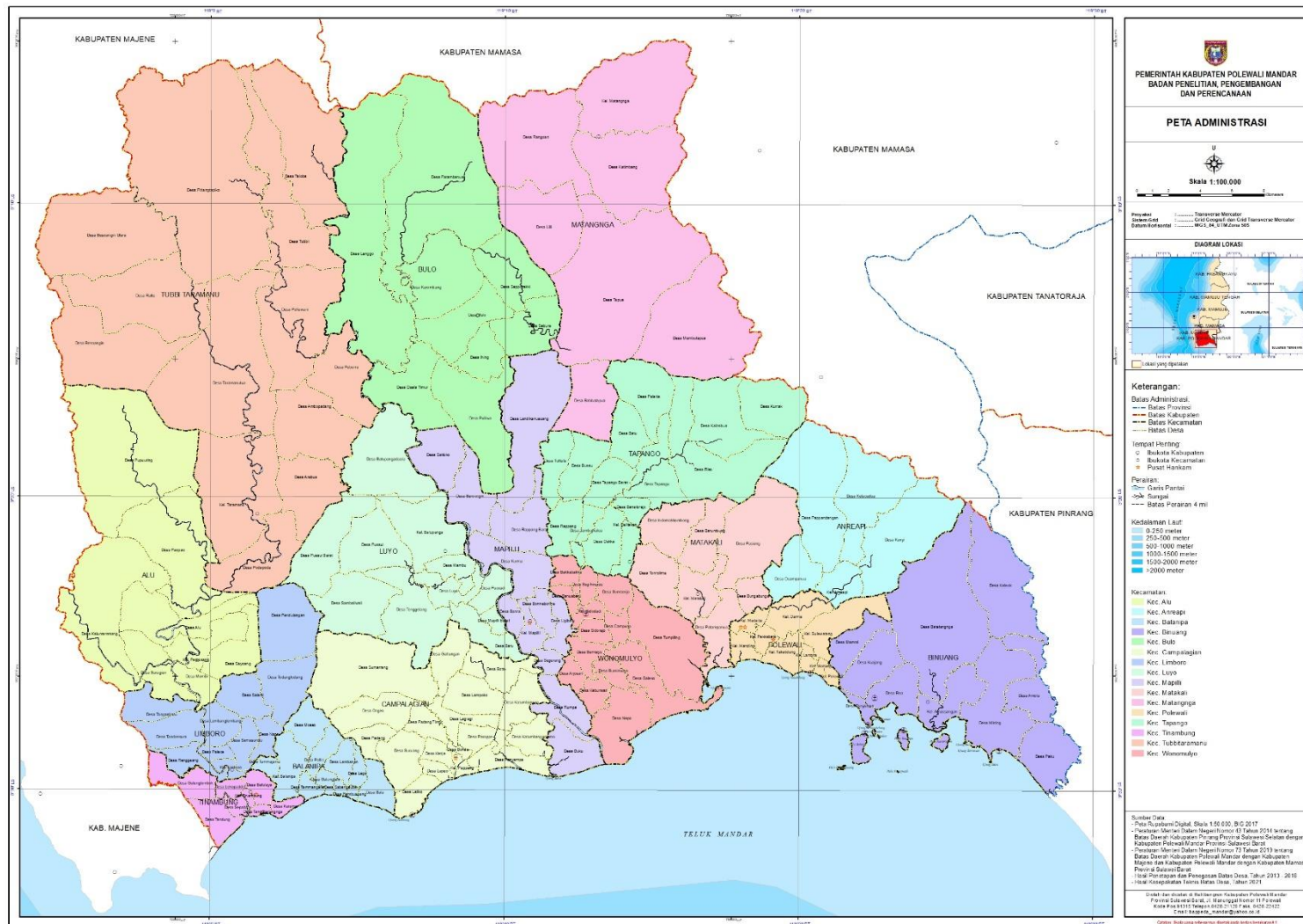
2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Polewali Mandar dengan ibukota Polewali merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, secara geografis memiliki luas dan batas Wilayah serta peta administrasi.

Luas Kabupaten Polewali Mandar meliputi luas wilayah darat dan luas wilayah laut serta panjang pantai. Luas wilayah darat $\pm 2.074,76 \text{ Km}^2$ dan luas wilayah laut $\pm 460 \text{ km}^2$, serta panjang garis pantai $\pm 101,99 \text{ Km}^2$. Batas wilayah Administrasi berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Sumber data : Peta Revisi RTRW Tahun 2012-2032



Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan dengan luas wilayah 2074,76 Km². Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 430,56 Km² atau 20,75% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 22,02 Km² atau hanya 1,06% dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten Polewali Mandar (%)
1	Tinambung	22,02	1,06
2	Balanipa	33,03	1,59
3	Limboro	65,06	3,14
4	Tubbi Taramanu	430,56	20,75
5	Alu	173,63	8,37
6	Campalagian	116,01	5,59
7	Luyo	123,71	5,96
8	Wonomulyo	75,56	3,64
9	Mapilli	102,53	4,94
10	Tapango	125,81	6,06
11	Matakali	72,70	3,50
12	Polewali	30,36	1,46
13	Binuang	145,82	7,03
14	Anreapi	91,09	4,39
15	Matangnga	236,83	11,41
16	Bulo	228,38	11,01
Kabupaten Polewali Mandar		2.074,76	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.1.1.2 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFI

Letak geografi Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 0304'7,83" - 3032' 3,79" Lintang Selatan dan 118053' 57,55"-1190 29' 33,31" Bujur Timur. Kecamatan dengan ketinggian dari permukaan laut terletak dengan satuan ukuran meter diatas permukaan laut (mdpl) pada wilayah kecamatan Bulu yaitu 480 mdpl dan kecamatan terendah dari permukaan laut terletak pada wilayah kecamatan Polewali yaitu 12 mdpl. Letak geografi dan ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Letak Geografi		Ketinggian meter dari permukaan laut (mdpl)
		Lintang Selatan	Bujur Timur	
1	Tinambung	03° 30' 10,3"	119° 01' 36,6"	20
2	Balanipa	03° 30' 08,9"	119° 02' 48,0"	26
3	Limboro	03° 29' 12,6"	119° 00' 38,7"	24
4	Tubbi Taramanu	03° 20' 34,6"	119° 01' 33,1"	123
5	Alu	03° 25' 36,6"	118° 59' 34,0"	47
6	Campalagian	03° 28' 13,2"	119° 08' 26,0"	22
7	Luyo	03° 22' 24,8"	119° 08' 09,2"	28
8	Wonomulyo	03° 23' 51,0"	119° 12' 36,4"	15
9	Mapilli	03° 24' 14,8"	119° 10' 52,3"	21
10	Tapango	03° 19' 18,2"	119° 14' 54,2"	46
11	Matakali	03° 23' 00,1"	119° 16' 59,3"	24
12	Polewali	03° 24' 27,2"	119° 18' 33,5"	12
13	Binuang	03° 26' 53,8"	119° 24' 09,6"	14
14	Anreapi	03° 23' 01,3"	119° 21' 04,7"	42
15	Matangnga	03° 07' 41,4"	119° 13' 03,6"	314
16	Bulu	03° 13' 50,1"	119° 09' 06,6"	480

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.1.1.3 TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu bentuk permukaan bumi Polewali Mandar yaitu datar, landai, bergelombang dan bukit serta bergunung. Luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng sebagian besar atau 41-60% dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung dengan luas 69,50% dari luas topografi kabupaten, dan sisanya sekitar 2% dari luas kabupaten memiliki topografi datar atau sebesar 26,55 dari luas topografi kabupaten.

Kondisi topografi Polewali Mandar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten dilaksanakan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. Luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng di wilayah kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

Topografi	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persen (%)
Datar	0-2	33.773,38	16
Agak datar	>2-8	26.022,10	13
Landai	>8-15	18.941,29	9
Agak curam / bergelombang	>15-25	22.104,35	11
Curam / Berbukit	>25-40	46.200,19	22
Sangat curam / bergunung	>40	60.435,36	29
Jumlah		207.476,67	100

Sumber Data : Hasil Olahan Balitbangren, 2022

2.1.1.4 HIDROLOGI

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul serta mengalir melalui sungai, di Kabupaten Polewali Mandar seluas 207.477,56 ha, Daerah Aliran Sungai terbesar terdapat pada daerah Maloso yaitu sebesar 98.894,60 ha dan DAS terkecil terdapat di daerah Pulau yaitu 317,44 ha. Daerah Aliran Sungai terhadap lima sungai di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

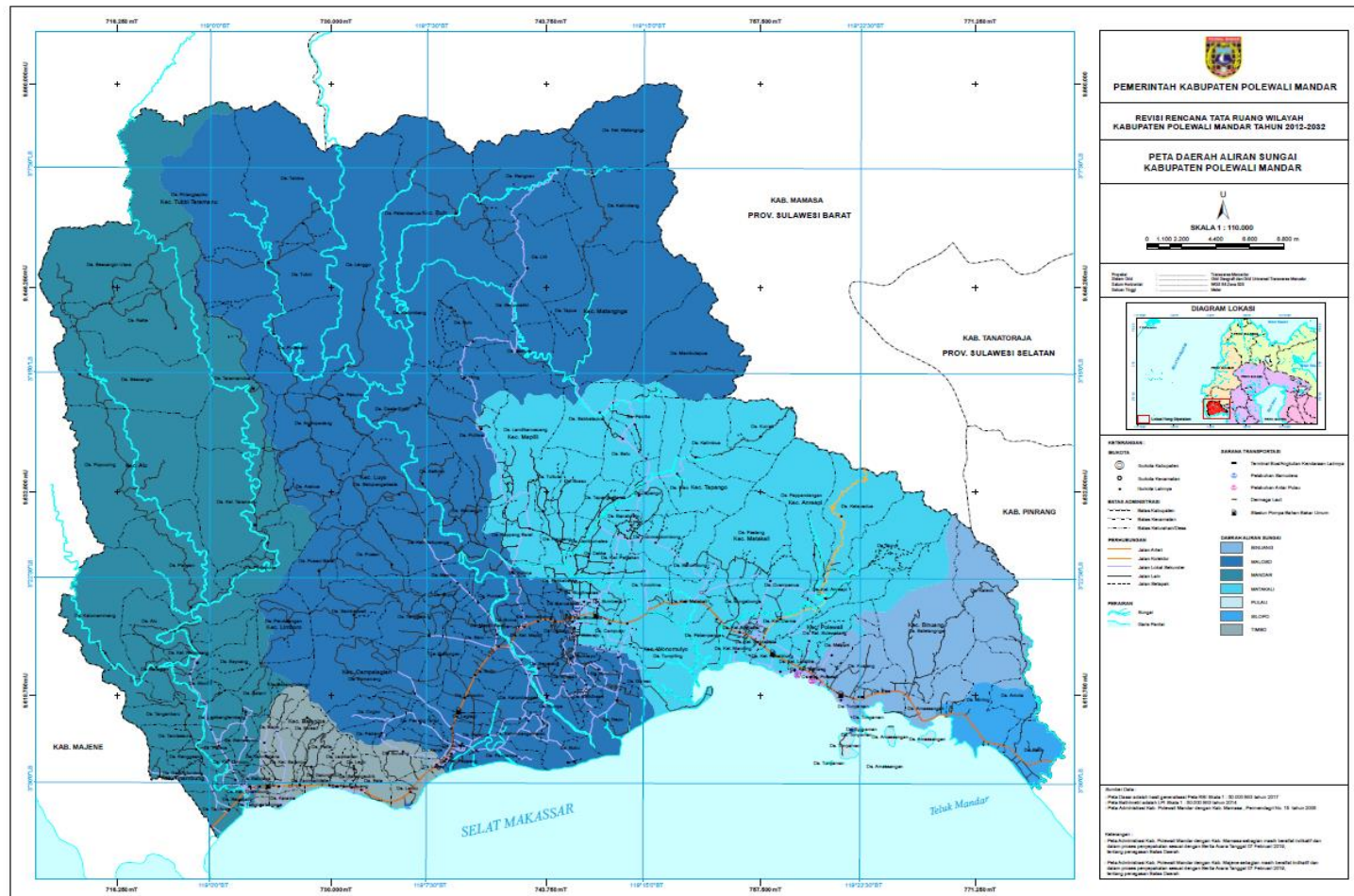
Tabel 2. 4 Daerah Aliran Sungai
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
1	Binuang	10.374,72
2	Maloso	98.894,60
3	Mandar	46.482
4	Matakali	42.820,12
5	Pulau	317,44
6	Silopo	2.997,20
7	Timbo	5.591,48
Jumlah		207.477,56

Sumber data : Peta Revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032

Hidrologi wilayah geografis Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa sungai yang merupakan sumber air. Sungai tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan vital, diantaranya sebagai sumber air minum, industri, pertanian atau juga pusat listrik tenaga air, serta sebagai sarana rekreasi air. Pada peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Polewali Mandar Wilayah terlihat Sungai Kalukku Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan Daerah Aliran Sungai sampai ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana diperlihatkan pada peta berikut :

Sumber data : Peta Revisi RTRW Kabupaten Polman 2012-2032



2.1.1.5 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari kegiatan intervensi terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan lahan di Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar berupa lahan perbukitan dan pegunungan yang ditutupi hutan dan semak belukar, sebagian kecilnya berupa lahan datar digunakan untuk usaha di bidang pertanian yang terdiri dari persawahan irigasi, sawah tadah hujan, tambak, tegalan, perkebunan kakao rakyat, perkebunan cengkeh rakyat, pertanian lahan kering/tegalan, dan kebun campuran. Lahan non-pertanian terdiri atas hutan, semak belukar dan rerumputan, gawir dan lahan miring curam, lahan pemukiman/pekarangan, dan pulau karang.

Penyebaran hutan primer dan sekunder masih dijumpai di daerah perbukitan dan pegunungan. Dari hasil pengamatan di lapangan, juga ditemukan beberapa perbukitan/gunung yang telah gundul akibat penebangan kayu serta aktivitas petani pada perkebunan kakao, durian, langsung, dan cengkeh.

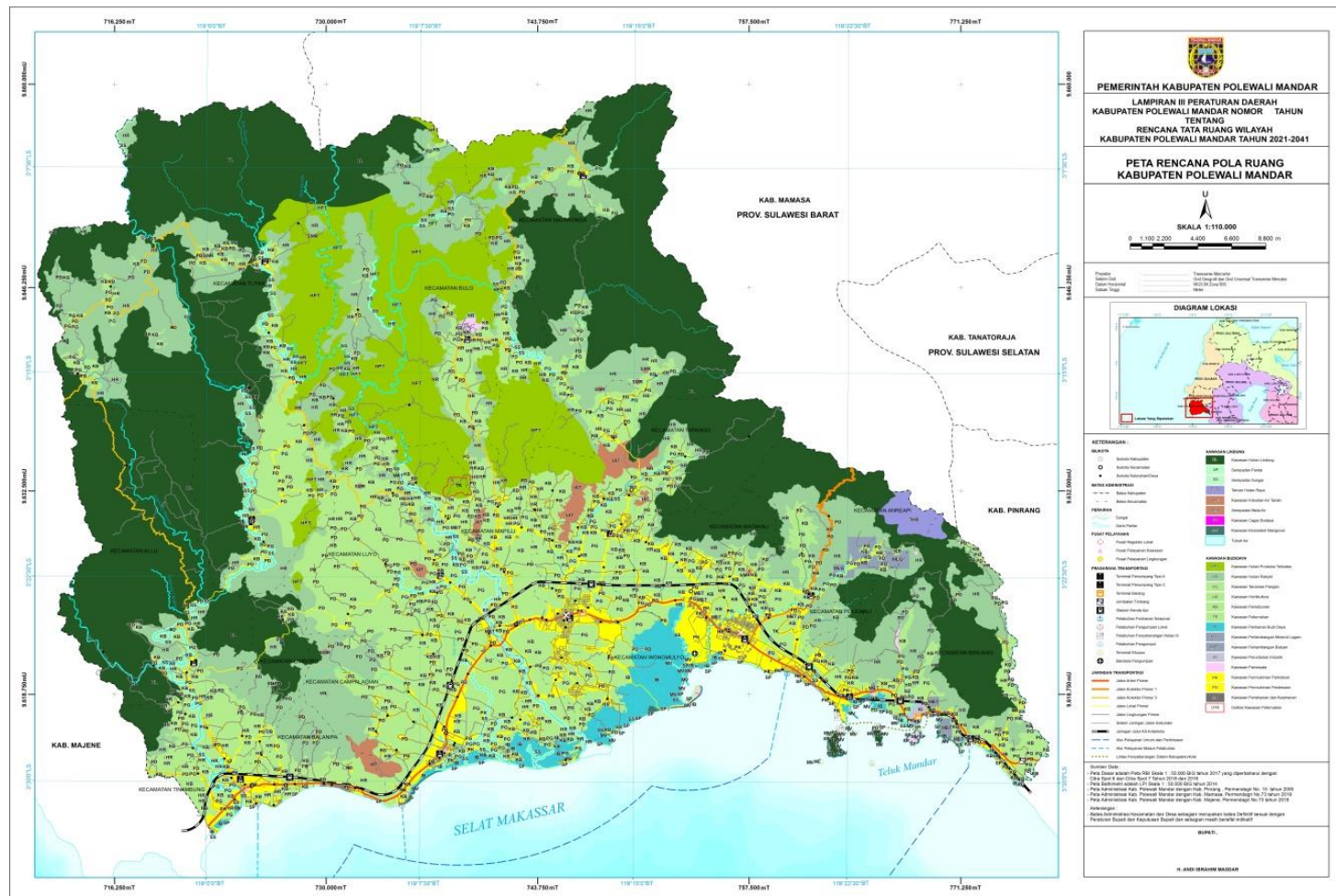
2.1.1.6 KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk kegiatan budidaya sesuai kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Pengembangan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa kawasan yang merupakan kawasan budidaya strategis, antara lain: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

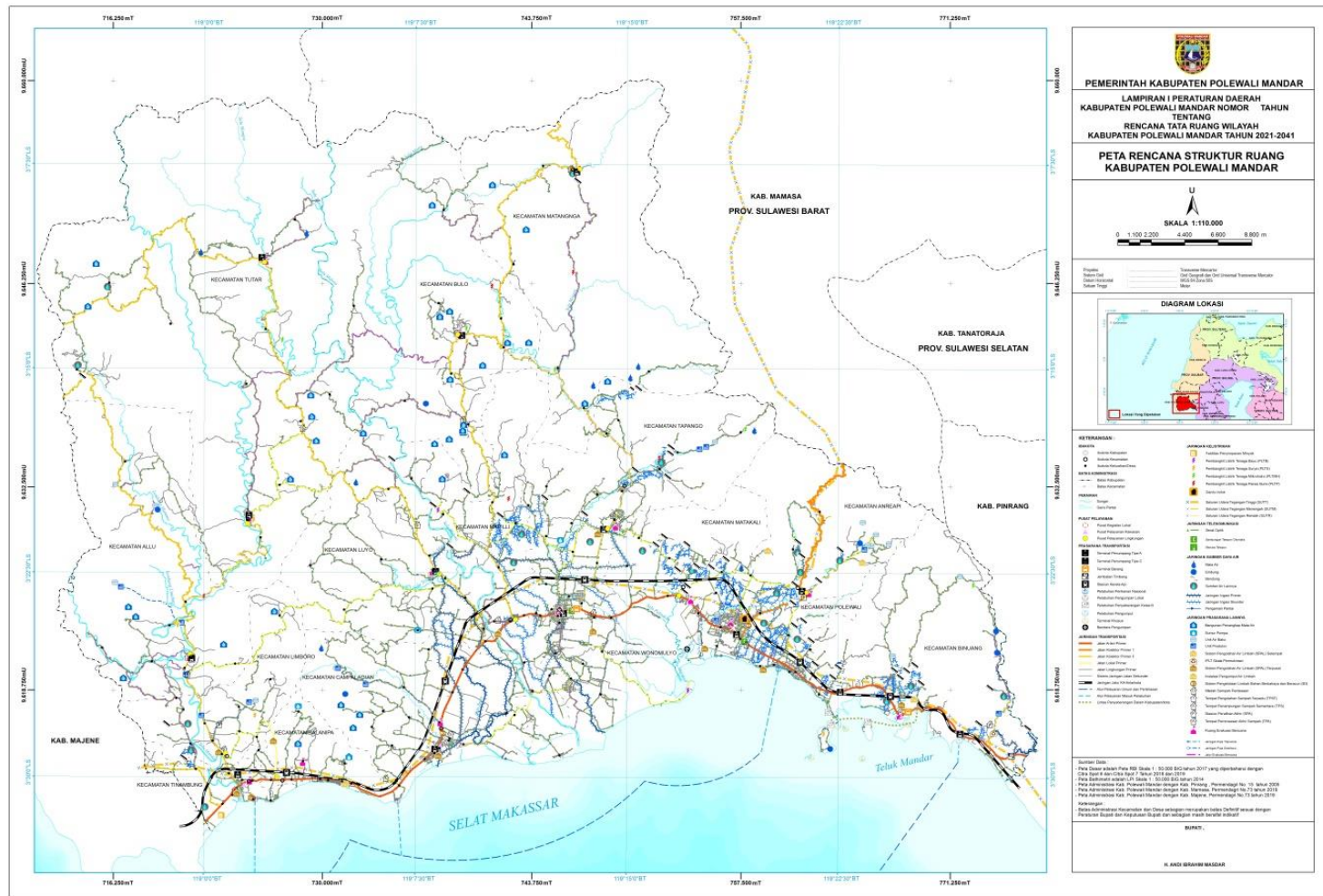
Kawasan budidaya akan diuraikan secara rinci pada sub bab yang membahas tentang potensi pengembangan wilayah, untuk lebih jelas mengenai sebaran penggunaan lahan sesuai rencana pola ruang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Polewali Mandar



Sumber data : Peta Revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032

Gambar 2. 4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Polewali Mandar



Sumber data : Peta Revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032

2.1.1.7 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan potensi wilayah yang dikembangkan diantaranya kegiatan budidaya strategis, antara lain : kawasan Lindung, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, serta kawasan peruntukan lainnya.

Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan data tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RTRW Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012-2032 kawasan lindung yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain : kawasan hutan lindung, kawasan sempadan (pantai, sungai, jurang, dan sekitar mata air), kawasan pelestarian alam (kawasan pantai berhutan bakau, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil), kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, dan kawasan rawan bencana alam.

Total luas kawasan hutan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 adalah $\pm 93.195,21$ ha dan 74,52 persen dari total luas hutan yang ada merupakan hutan lindung, yaitu $\pm 69.450,26$ ha, data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 5 Luas Kawasan Hutan dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persen
1	Alu	13.547,35	14,54
2	Anreapi	3.730,38	4,00
3	Balanipa	-	0.00
4	Binuang	4.884	5,2
5	Bulo	13.689,48	14,69
6	Campalagian	96,72	0.10
7	Limboro	2.446,69	2,63
8	Luyo	403,25	0,43
9	Mapilli	3.255,86	3,49

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persen
10	Matakali	1.716,02	1,84
11	Matangnga	15.952,57	17,12
12	Polewali	136,43	0,15
13	Tapango	5.563,99	5,97
14	Tinambung	23,05	0.02
15	Tubbi Taramanu	27.749,42	29,78
16	Wonomulyo	-	0.00
Jumlah		93.195,21	100

Sumber Data : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020
(SK.6625/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)

Data Luas Kawasan Hutan dan Peta Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa hutan lindung paling banyak terdapat di Kecamatan Tubbi Taramanu sebesar 22.885,01 ha, sementara Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Polewali Mandar terluas di Kecamatan Bulu yaitu sebesar 11.170, 79 ha.

Kawasan sempadan pantai berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditetapkan bahwa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat adalah kawasan sempadan pantai. Kawasan ini mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, ketentuan ini ditetapkan semata-mata bertujuan untuk melindungi sumberdaya air yang ada.

Kabupaten Polewali Mandar dengan panjang garis pantai $\pm 94,12$ kilometer memiliki kawasan sempadan pantai yang memanjang dari pesisir pantai di Kecamatan Binnuang sampai ke Kecamatan Tinambung yang berbatasan dengan Kabupaten Majene.

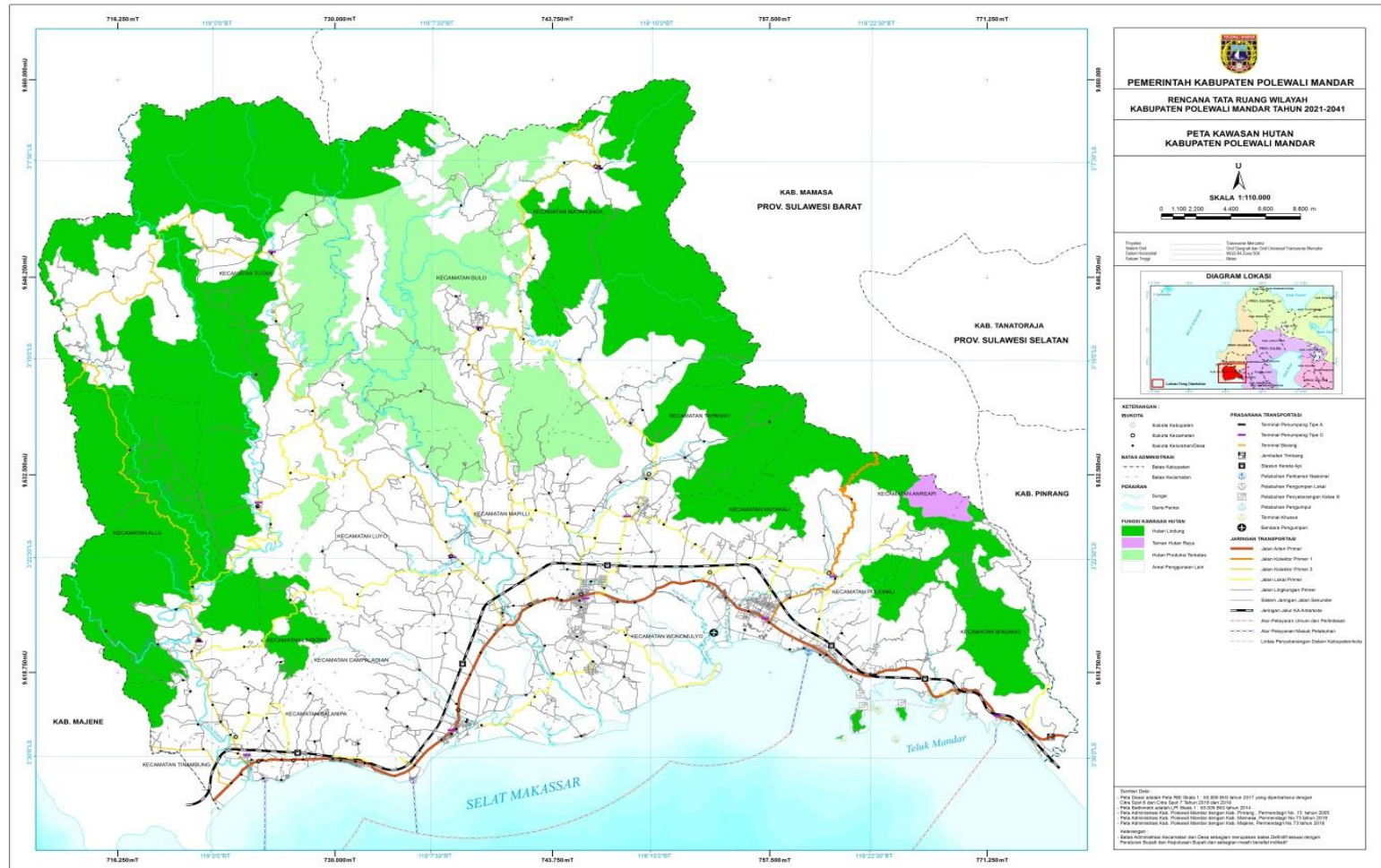
Pemanfaatan lahan di sepanjang kawasan lindung sempadan pantai Kabupaten Polewali Mandar saat ini didominasi oleh kebun campuran, tambak dan sebagian permukiman. Diperlukan adanya pengaturan ruang yang terukur untuk kawasan sempadan pantai sehingga tidak terjadi pengrusakan zona lindung bagi ekosistem perairan laut khususnya di perairan Teluk Mandar akibat dari usaha dan kegiatan manusia yang terjadi di darat.

Secara fungsional, kawasan sempadan pantai di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagian merupakan kawasan hutan mangrove yang tersebar

di sepanjang wilayah pesisir laut dan merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada mahluk hidup di wilayah pantai dan lautan.

Hutan mangrove pada umumnya berada di sekitar muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai system perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob.

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Polewali Mandar



Sumber data : Peta Revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012-2032

Hutan mangrove di Kabupaten Polewali Mandar umumnya terdapat Kecamatan Binuang seluas $\pm 143,25$ ha, selain itu juga terdapat di Kecamatan Wonomulyo seluas $\pm 86,40$ ha, Kecamatan Campalagian seluas ± 32 ha, Kecamatan Matakali seluas $\pm 10,61$ ha, dan Kecamatan Tinambung seluas $\pm 7,37$ ha, Jenis-jenis mangrove yang ada di pesisir pantai Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari: Bakau (*rhizophora* sp.) Api-api (*avicennia* sp.) Tanjung (*Bruguiera* sp.) Ceriops Tagal Agar lebih jelas, data mengenai sebaran hutan mangrove di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Sebaran Hutan Mangrove
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Binuang	143,25
2	Matakali	10,61
3	Wonomulyo	86,40
4	Campalagian	32,78
5	Tinambung	7,37
	Jumlah	280,41

Sumber Data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Tabel 2.6 memberikan informasi bahwa total luas hutan mangrove di Kabupaten Polewali Mandar adalah $\pm 280,41$ ha, Kecamatan Binuang memiliki kawasan hutan mangrove paling luas yaitu 143,25 ha.

Kondisi eksisting yang ada menunjukkan bahwa hutan mangrove di Kabupaten Polewali Mandar sebagian telah mengalami kerusakan sehingga jumlahnya mulai berkurang. Hal ini tentunya akan berdampak pada abrasi pantai, intrusi air laut lebih jauh ke daratan, mengakibatkan banjir, menurunkan potensi sumberdaya perikanan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi perikanan atau menurunnya sumber mata pencaharian penduduk.

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan

terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Wilayah yang dialiri tidak kurang dari 40 (empat puluh) sungai yang tersebar pada 16 kecamatan. Kondisi pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan sungai-sungai ini hampir tidak ada lagi yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Sebagian besar lahan di area sempadan sungai didominasi oleh lahan budidaya berupa kebun, sawah dan permukiman. Pengaturan dan pengelolaan ruang di sepanjang sempadan sungai sangat penting agar manfaatnya sebagai kawasan lindung dapat tetap optimal.

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang terletak di Kecamatan Binuang terdiri dari Pulo Battoa, Pulo Karemasang, Pulo Tangnga, Pulo Deadea, Pulo Panampeang, Pulo Tarrusan, Pulo Landea, dan Pulo Pasirputih, daftar nama pulau-pulau kecil beserta luasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Luas Pulau-pulau Kecil
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Pulo Battoa	160,27	Binuang
2	Pulo Karemasang	74,63	Binuang
3	Pulo Tangnga	64,48	Binuang
4	Pulo Deadea	6,16	Binuang
5	Pulo Panampeang	5,88	Binuang
6	Pulo Tarrusan	3,91	Binuang
7	Pulo Landea	1,46	Binuang
8	Pulo Pasir Putih	0,63	Binuang

Sumber Data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Kawasan Lindung Lainnya, terdiri atas : kawasan terumbu karang mencakup wilayah perairan Teluk Mandar; dan kawasan koridor migrasi atau tempat berkembang biak bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi, mencakup perlindungan habitat penyu di kawasan pesisir Tanjung Mampie Kecamatan Wonomulyo dan Tanjung Buku Kecamatan Mapilli.

b. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Berdasarkan olahan Balitbangren dan perhitungan di atas peta digital yang didelineasi dengan batas wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, didapatkan gambaran informasi mengenai kawasan hutan produksi di Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 8 Luas Kawasan Hutan Produksi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen
1	Binuang	-	-
2	Bulo	22.928,59	31,87
3	Luyo	1.946,85	2,71
4	Mapilli	12.374,70	17,20
5	Matangnga	16.865,85	23,44
6	Tapango	11.635,30	16,17
7	Tubbi Taramanu	6.200,46	8,62
Jumlah		71.951,75	100.00

Sumber Data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pemanfaatan hutan dan pelestarian hasil hutan (kayu dan non kayu), sehingga diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimal bagi masyarakat yang tinggal atau berdiam di sekitar kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan pada areal kawasan hutan produksi di Kabupaten Polewali Mandar dapat berupa :

- Pemanfaatan kawasan;
- Pemanfaatan jasa lingkungan;
- Pemanfaatan hasil hutan kayu;
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- Pemungutan hasil hutan kayu; atau
- Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dengan tidak merusak fungsi ekosistem atau tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem antara lain:

- Usaha wisata alam;
- Usaha olahraga tantangan;
- Usaha pemanfaatan air;
- Usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau
- Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan merupakan lahan persawahan yang secara teknis diperuntukan dan dipergunakan sebagai pertanian lahan basah, dan dapat memberikan manfaat pangan diantaranya :

- Meningkatkan produksi pangan, ekspor dan pendayagunaan investasi;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
- Menciptakan kesempatan kerja.

Total luas lahan sawah di Kabupaten Polewali Mandar adalah ± 17.990 ha, Kecamatan Wonomulyo merupakan daerah yang memiliki lahan sawah paling luas yaitu $\pm 18,57\%$ dari total luas lahan sawah di Kabupaten Polewali Mandar yaitu seluas 3.340 ha. Selain itu lahan sawah juga banyak terdapat di Kecamatan Mapilli, Campalagian, Matakali, Tapango, Binuang, dan Kecamatan Luyo.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah penghasil tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Barat yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No	Kecamatan	2019				2020				2021			
		Lahan Pertanian Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Lahan Pertanian Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Lahan Pertanian Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
1	Tinambung	335	1.562	237	2.134	335	1.562	237	2.314	335	1.562	237	2.134
2	Balanipa	-	3.413	329	3.742	-	3.413	329	3.742	-	3.413	329	3.742
3	Limboro	63	4.629	63	4.755	63	4.629	63	4.755	63	4.629	63	4.755
4	Tutar	600	34.076	1.019	35.695	600	34.076	1.019	35.695	600	34.076	1.019	35.695
5	Alu	-	22.114	716	22.830	-	22.114	716	22.830	-	22.114	716	22.830
6	Campalagian	2.227	5.464	1.092,84	8.784	2.279	5.412	1.093	8.784	2.279	5.412	1.093	8.784
7	Luyo	1.899	13.603	158	15.660	1.714	13.195	751	15.660	1.714	13.195	751	15.660
8	Wonomulyo	3.340	2.978	1.299	7.617	3.340	2.643	1.299	4.276	3.340	2.643	1.299	7.282
9	Mapilli	2.992	5.164	1.019	9.175	2.992	5.164	1.019	9.175	2.992	5.164	1.019	9.175
10	Tapango	1.405	10.086	1.090	12.581	1.485	10.006	1.090	11.600	1.485	10.006	1.090	12.581
11	Matakali	2.100	3.104	558	5.762	2.100	3.104	558	3.664,10	2.100	3.104	558	5.762
12	Polewali	1.023	1.228	376	2.627	1.013	1.228	386	2.627	1.013	1.228	386	2.627
13	Binuang	1.231	9.040	2.063	12.334	1.231	9.040	2.063	4.198	1.231	9.040	2.063	12.334
14	Anreapi	409	11.373	680	12.462	411	11.371	680	12.462	411	11.371	680	12.462
15	Matangnga	341	22.637	514	23.492	341	22.637	514	23.492	341	22.637	514	23.492
16	Bulo	185	19.899	2.831	22.915	86	19.998	2.831	22.915	86	19.998	2.831	22.915
	Jumlah	18.150	170.370	14.045	202.565	17.990	169.592	14.648	188.009	17.990	169.592	14.648	202.230

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

d. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura adalah kawasan budidaya tanam kebun, yang meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura di Kabupaten Polewali Mandar tersebar di Kecamatan: Binuang, Anreapi, Matakali, Tapango, Bulo, Matangnga, Wonomulyo, Polewali, Campalagian dan Tubbi Taramanu. Perkembangan produksi Pertanian Hortikultura di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Produksi Buah-buahan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Tanaman Holtikultura	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belimbing/ <i>Star Fruit</i>	Ton	15,3	16,4	-	26,6	-.
2	Duku/ <i>Langsat/ Duku</i>	Ton	1,9	1165,4	104,131	18530,4	2.882,9
3	Durian/ <i>Durian</i>	Ton	-	39438,8	36,203	5005,3	25.270,8
4	Jambu Biji/ <i>Guava</i>	Ton	23,9	18,6	443	544,4	282
5	Jambu Air/ <i>Rose Apple</i>	Ton	30,3	20,6	-	3,2	-
6	Jeruk/ <i>Orange</i>	Ton	4,5	-	120	2	288,6
7	Mangga/ <i>Mango</i>	Ton	1354,3	-	7,944	3273,6	37.191
8	Nangka/ <i>Jack Fruit</i>	Ton	28,7	100,8	2,412	2622,4	318,9
9	Nanas/ <i>Pineapple</i>	Ton	7,7	19,9	1,314	882,5	48,6
10	Pepaya/ <i>Papaya</i>	Ton	16,7	115,3	5,168	2488,2	398,7
11	Pisang/ <i>Banana</i>	Ton	374,7	1024,2	79,75	12390,5	3.438,7
12	Rambutan/ <i>Rambutan</i>	Ton	244,1	448,3	152,006	3545,1	612,4
13	Salak/ <i>Salacca</i>	Ton	0,8	2,4	95	3	0,3
14	Bawang Merah/ <i>Shallot</i>	Ton	141,5	129,1	1,156	402,9	213,5
15	Bawang Daun/ <i>Welch</i>	Ton	39	-	162	-	13,1
16	Sawi/ <i>Collards</i>	Ton	238,1	197,4	507	16,9	27,3
17	Kacang Panjang	Ton	212,2	135,9	1,085	342,3	96,6
18	Cabe	Ton	273,2	276,6	2,979	191,4	189,7
19	Tomat	Ton	91,9	255,9	957	50,1	82,8
20	Terong	Ton	113,6	107	602	67,7	56,6
21	Ketimun	Ton	257,6	140	717	214	150,4
22	Kangkung	Ton	83,5	135,9	2,278	127,2	99,4
23	Bayam	Ton	116,9	366,9	1,54	40,9	70,2

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

e. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik lahan basa atau lahan kering yang diperuntukan untuk produksi perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup tiga kawasan, yaitu: (1) kawasan peruntukan perkebunan kakao tersebar di Kecamatan Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Limboro, Campalagian, Bulu dan Mapilli; (2) kawasan peruntukan perkebunan kelapa tersebar di Kecamatan Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Tinambung, Tubbi Taramanu, Matakali, Limboro, Campalagian, Bulu dan Mapilli; dan (3) kawasan peruntukan perkebunan kopi

robusta tersebar di Kecamatan Binuang, Anreapi, Tapango, Bulu, Alu, Limboro, Tubbi Taramanu dan Matangnga.

Pembangunan pada sektor perkebunan ini menempuh strategi pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan organisasi modern berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria lahan yang dibutuhkan bagi pengembangan tanaman perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya, pada dasarnya berbagai jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian antara 0-2.500 meter di atas permukaan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 11 Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Kriteria	Sesuai	Sesuai Bersyarat	Tidak Sesuai
1	Jenis Tanah	Litosol, Andosol, Podsolik	Alluvial, Grumosol, Regosol	Mediterranean, Litosol
2	Kelerengan	0-15%	15-40%	>40%
3	Solum Tanah	>60 cm	30-60 cm	>30 cm
4	Tekstur Tanah	Berliat, Berdebu, halus	Berliat, Berdebu, Kasar	Berkuarsa
5	Prositas	Tinggi-Sangat Tinggi	Sedang dan Rendah	Sangat Rendah
6	Curah Hujan	400-500 mm	-	<400
7	Drainase	Baik	Agak Cepat	Sangat Cepat
8	Banjir genangan musiman, genangan	Tanpa Genangan	Antara 24 Bulan	>4 Bulan

Sumber Data : RTRW Kabupaten Polewali Mandar, 2012-2032

Luas areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2007 ±81.804,51 ha, terdiri atas komoditi kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, jambu mente, pala, kemiri, kapuk, vanili, sagu, dan enau. Luas sebesar ±63.668,70 ha merupakan luas tanaman perkebunan rakyat yang menghasilkan. Produksi tanaman perkebunan selama tahun 2007 yang terbesar produksinya adalah tanaman kakao dan kelapa masing-masing sebesar 30.364,51 ton dan 20.170,50 ton.

f. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan terbagi atas tiga kawasan budidaya, yaitu: (1) kawasan budidaya ternak besar tersebar di Kecamatan Binuang, Matakali, Anreapi, Wonomulyo, Mapilli, Tapango, Bulu, Campalagian, Tubbi Taramanu dan Matangnga; (2) kawasan budidaya ternak kecil tersebar di Kecamatan Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu; dan (3) kawasan budidaya ternak unggas tersebar di Kecamatan Binuang, Matakali, Wonomulyo, Campalagian, Tinambung dan Limboro.

Kesesuaian lahan untuk peternakan hanya mengacu pada kelas untuk padang penggembalaan (pasture), hal ini disebabkan komoditas peternakan tidak mengharuskan persyaratan tanah dan iklim yang spesifik. Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi pengembangan ternak besar maupun ternak kecil dan unggas.

Khusus untuk ternak besar pemasarannya melalui perdagangan antar pulau, sedangkan ternak kecil sebagai konsumsi lokal. Dari kurun waktu tahun 2017-2021 jenis ternak yang paling banyak keluar dari Kabupaten Polewali Mandar adalah Kambing dan Ayam. Pada tahun 2017 jumlah ayam yang keluar 30.848 ekor mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 69.421 ekor. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6.261 ekor. Untuk jenis ternak Kambing setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 13.416 ekor menjadi 25.514 ekor.

Data peternakan kambing menunjukkan perkembangan yang pesat di Kabupaten Polewali Mandar, namun peternakan ayam mengalami penurunan. Selain ternak Kambing, ternak sapi juga selalu mengalami peningkatan dari 769 ekor menjadi 864 ekor pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 471 ekor namun pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 864 ekor.

Data jenis dan jumlah ternak yang keluar di kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2017-2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 12 Jumlah Ternak Yang Keluar
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi/ Cow	769	746	471	602	864

No.	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021
2	Kerbau/ <i>Buffalo</i>	2	23	14	25	1
3	Kuda/ <i>Horse</i>	138	104	13	21	6
4	Kambing/ <i>Goat</i>	13.416	22.187	21.088	25.435	25.514
5	Ayam/ <i>Hens</i>	30.848	-	69.421	21.841	6.261
6	Itik/ <i>Duck</i>	63.622	3.050	34.880	2.720	3.410

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

g. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang terdiri atas tiga kawasan perikanan yaitu : kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya serta kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Polewali Mandar tersebar di 8 kecamatan dan 27 Desa/Kelurahan dengan panjang garis pantai $\pm 101,99$ kilometer yang membentang dari Desa Paku Kecamatan Binuang hingga Desa Tandung Kecamatan Tinambung yang di dalamnya terdapat 7 buah pulau.

Produksi perikanan tangkap komoditi andalan di Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan komoditi perikanan tangkap unggulan, terbesar pada komoditi Ikan Bandeng yaitu sebesar 11.500,92 Ton, dalam lima tahun terakhir jumlah produksi ikan bandeng terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sehingga menjadi produk terbesar dari 10 jenis komoditi perikanan andalan.

Peningkatan yang cukup baik jenis komoditi perikanan andalan pertahunnya adalah ikan cakalang dimana di tahun 2017 hanya sebesar 4.720,81 ton menjadi sebesar 6.404,24 ton ditahun 2021. Sementara produk komoditi perikanan andalan adalah telur ikan terbang yaitu hanya didapat sebesar 7.70 ton ditahun 2021.

Secara keseluruhan 10 jenis produksi perikanan tangkap komoditi andalan di Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 13 Produksi Perikanan Tangkap Komoditi Andalan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Komoditi Perikanan Andalan	Produksi (Ton/Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tuna	3.579,00	3.474,71	3.966,46	3.916,94	2.690,05
2	Cakalang	4.720,81	4.845,58	5.293,90	6.269,96	6.404,24
3	Tongkol	2.485,81	2.571,90	2.285,60	2.309,66	3.122,55
4	Telur Ikan Terbang	7,65	7,65	7,70	7,70	7,7
5	Layang	1.328,03	1.379,04	1.783,13	1.756,31	1.286,26
6	Kakap/Kerapu	200,61	228,34	304,90	352,89	562,48
7	Cumi-cumi	17,30	15,18	17,86	20,6	23,78
8	Udang Windu	972,87	976,44	993,29	3.769,73	3.773,50
9	Rumput Laut	1.316,00	1.276,43	1.289,89	1.437,73	12.998,39
10	Bandeng	9.735,00	9.669,83	9.156,86	11.489,43	11.500,92

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Kawasan peruntukan perikanan berupa kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar, budidaya tambak dan budidaya rumput laut. Hasil produksi perikanan ini capaian selama lima tahun terakhir 2017-2021 menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun.

Budidaya air tawar, yang terdiri dari perikanan ikan Nila, Mas dan Lele, didominasi oleh produksi Ikan Nila yang mencapai 636,2 pada tahun 2021. Sementara pada budidaya tambak produksi Ikan bandeng sebanyak 11.500,92 ha.

Budidaya tambak, berupa produksi ikan Bandeng dan Udang menunjukan bahwa produksi Udang pada tahun 2017 dibandingkan dengan produkdi tahun 2021 menunjukan peningkatan diatas 500%.

Budidaya rumput laut, berupa produksi rumput laut basa dan kering menunjukkan produksi rumput laut basah jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi rumput laut kering.

Produksi perikanan Budidaya dan Rumput laut Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 14 Produksi Perikanan Budidaya dan Rumput Laut Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Budidaya	2017	2018	2019	2020	2021
1	Budidaya Air Tawar					
	Luas Kolam (ha)	840	576	608	608,00	608
	Produksi Ikan Nila (Ton)	329	644,55	609,78	627,33	636,2
	Produksi Ikan Mas (Ton)	184	296,82	301,48	335,78	342,4
	Produksi Ikan Lele (Ton)	73,5	44,85	46,88	101,37	103,6
2	Budidaya Tambak					
	Luas Tambak (Ha)	5.123,33	5.123,33	5.116,75	5.116,75	5.116,75
	Produksi Bandeng (Ton)	9.220,00	9.669,83	9.725,86	11.489,43	11.500,92
	Produksi Udang (Ton)	630	1.964,63	2.005,48	6.302,11	6.314,04
3	Budidaya Rumput Laut					
	Luas Lahan Budidaya (Ha)	1.370,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144
	Produksi Rumput Laut Basah (Ton)	1.472,00	11.487,00	11.609,00	12.939,60	12.998,39
	Produksi Rumput Laut Kering (Ton)	1.430,00	1.276,33	1.289,89	1.437,73	1.299,84

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

h. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas tiga kawasan, yaitu: 1) kawasan pertambangan mineral dan batubara, 2) kawasan pertambangan gas dan minyak bumi, dan 3) kawasan pertambangan panas bumi.

Komoditi pertambangan andalan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari tambang tembaga, biji besi, granit dan sienit, mika, lempung, pasir kuarsa dan zeloit. Lahan pertambangan ini pada umumnya memiliki luas 5.000 Ha dan tersebar di beberapa kecamatan. Gambaran kawasan peruntukan pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kawasan peruntukan tambang biji besi terdapat di Kecamatan: Tubbitaramanu, Tapango, Matakali, Binuang, Anreapi, dan Matangnga;
- Kawasan peruntukan tambang gipsum terdapat di Kecamatan: Tinambung, Tubbitaramanu, dan Alu;
- Kawasan peruntukan tambang galena terdapat di Kecamatan Anreapi;
- Kawasan peruntukan pertambangan gas dan minyak bumi terdapat di wilayah perairan Teluk Mandar;

- Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terletak di Kecamatan: Matangnga, Tapango, Mapilli, Luyo, Alu, dan Balanipa.

Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan beberapa hal yang menjadi perhatian kepentingan taraf hidup masyarakat dengan pertimbangan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dari setiap kawasan diantaranya yaitu:

- Penetapan batas kawasan;
- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan meliputi pemanfaatan kawasan yang dinilai berdasarkan AMDAL, tidak merusak lingkungan serta tetap dilakukan pengawasan, monitoring, pengamanan aset dan pengenaan sanksi jika terjadi pelanggaran dan dapat dilakukan penutupan aktifitas dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi;
- Koordinasi antar sektor dan instansi terutama pada kawasan pertambangan yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
- Penetapan aspek hukum kawasan guna mengamankan aset-aset daerah yang potensial
- Pemanfaatan potensi tambang yang penting bagi pembangunan daerah dan masyarakat yang terdapat di kawasan, perlu penelitian (survei) sesuai peraturan yang berlaku;
- Pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

i. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015, tentang Kawasan Industri).

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Polewali Mandar terbagi atas tiga kawasan, yaitu: kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian di

Kecamatan Polewali, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Binuang; kawasan peruntukan industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Anreapi, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Tapango, dan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Polewali.

Perhatian arahan pembangunan untuk kawasan industri adalah :

- Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan berjalannya aktifitas industri;
- Pengendalian kawasan yang merusak dilakukan penutupan aktifitas, pemindahan (relokasi), rehabilitasi apabila terjadi kerusakan dan penertiban;
- Optimalisasi koordindasi antar sektor dan instansi meliputi: perizinan, pemanfaatan pengawasan/monitoring dan pelaporan;
- Pengembangan investasi dan kemudahan administrasi kawasan industri meliputi kawasan yang sesuai dengan kriteria kawasan deliniasi kawasan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sarana dan prasarana.

j. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan hidup. Kawasan Pariwisata ini terbagi atas dua kawasan, yaitu: kawasan wisata budaya dan kawasan wisata alam.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya terdiri dari :

- Pariwisata Budaya Tradisional Mandar di Kecamatan: Tinambung, Limboro, Balanipa, Alu, Campalagian, Luyo, dan Tubbi Taramanu;
- Pariwisata Budaya Tradisional Jawa di Kecamatan Wonomulyo.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam terdiri dari :

- Wisata Pantai Pulau Pasir Putih di Kecamatan Binuang, Pantai Bahari di Kecamatan Polewali, Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa, Tanjung Mampie di Kecamatan Wonomulyo;

- Wisata Bawah Laut (penyelaman/snorkling) di sebelah Utara Pulau Pasir Putih Kecamatan Binuang, perairan Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, Perairan Palippis di Kecamatan Balanipa;
- Wisata Air Terjun di Kecamatan Tapango, Kecamatan Binuang dan Kecamatan Anreapi;
- Wisata Agro di Kecamatan Anreapi, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Matakali.

Perhatian Arahkan pengelolaan kawasan pariwisata :

- Penetapan batas kawasan/objek wisata;
- Pengendalian aktifitas objek wisata yang merusak melalui monitoring/pengawasan, pelaporan dan peneakan sanksi;
- Peningkatan pengelolaan kawasan wisata dan Peningkatan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;
- Kegiatan pariwisata yang akan dilakukan dan sedang dilaksanakan sebelumnya telah memenuhi syarat AMDAL;
- Partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan dan Pemeliharaan kawasan-kawasan wisata;
- Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, booklet maupun poster-poster, dan Optimalisasi koordinasi antar sektor dalam mengembangkan objek pariwisata.

k. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Satuan lingkungan permukiman berupa kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Deliniasi Kawasan Permukiman di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Kemiringan lereng relatif rendah (0-15%);

- Tidak berada pada daerah banjir;
- Tidak berada pada daerah resapan air;
- Tersedia air baku yang cukup;
- Bebas dari gangguan bahaya dan gangguan geologi lingkungan;
- Mempunyai tingkat aksesibilitas dan dapat dijangkau;
- Tidak berada pada daerah rawan gempa;
- Berada dekat dengan pusat kota;
- Tidak berada dalam kawasan lindung.

Kawasan permukiman di Kabupaten Polewali Mandar lokasinya menyebar mengikuti pola jalur jalan di berbagai kecamatan. Jenis permukiman pada umumnya bervariasi ada yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, namun ada pula yang dibangun secara formal oleh pemerintah dan developer.

Berdasarkan kriteria kawasan permukiman, maka hampir semua wilayah di Kabupaten Polewali Mandar berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman karena memiliki topografi yang relatif landai di beberapa wilayah Kecamatan: Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, Campalagian, Luyo, Tubbitaramanu, Bulu, Matangnga, Anreapi, Wonomulyo, Polewali, Matakali dan Binuang.

Beberapa wilayah di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tubbitaramanu diarahkan sebagai kawasan permukiman transmigrasi untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Adapun arah pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan meliputi :

1. Sistem pusat permukiman perdesaan diarahkan sebagai pusat pengelolaan sumberdaya wilayah yang berpotensi;
2. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas antar sistem pusat permukiman perdesaan dan antar pusat permukiman perdesaan dengan pusat permukiman perkotaan;

3. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang sistem pusat permukiman dengan mempertimbangkan skala pelayanan dan kebutuhan;
4. Menyusun rencana pengembangan prasarana untuk keterpaduan program dalam kawasan dengan pusat-pusat permukiman seperti air bersih, jaringan jalan, drainase, jaringan listrik dan telekomunikasi;
5. Mengembangkan sistem transportasi yang sinergis dengan sistem permukiman terutama dengan pusat distribusi hasil pengelolaan sumber daya dan pengembangan kegiatan usaha;
6. Mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi dalam pengembangan/kegiatan usaha dan prasarana.
7. Arah pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi:
8. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas antar sistem pusat permukiman perkotaan, dan antar pusat permukiman perkotaan dengan pusat permukiman perdesaan;
9. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem pusat permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan skala pelayanan dan kebutuhan;
10. Sistem pusat permukiman perkotaan pengembangannya diarahkan sebagai pusat pelayanan dan pusat perekonomian, selain pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa dan penunjang perkembangan sistem pusat permukiman perdesaan;
11. Menyusun rencana pengembangan prasarana untuk keterpaduan program kawasan dengan pusat-pusat permukiman seperti air bersih, jaringan jalan, drainase, jaringan listrik dan telekomunikasi;
12. Mengembangkan sistem transportasi yang sinergis dengan sistem permukiman dan pengembangan kegiatan usaha;
13. Mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi prasarana.

2.1.1.8 WILAYAH RAWAN BENCANA

Wilayah Rawan Bencana adalah wilayah yang memiliki kondisi atau kareakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,

budaya politik, ekonomi dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Posisi geografis, topografi wilayah, dan kondisi alam, Kabupaten Polewali Mandar cukup rentan terhadap bencana alam. Wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

- Bencana tanah longsor meliputi wilayah Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Balanipa, Mapilli, Anreapi, Bulu, Tapango, Matangnga dan Binuang;
- Abrasi dan erosi pantai tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang;
- Kawasan gelombang pasang dan banjir rob tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang;
- Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kecamatan Tinambung, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Binuang dan Polewali;
- Kawasan rawan gempa bumi berdasarkan riwayat kegempaan terutama di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu;
- Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal tersebar di Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Bulu, Anreapi, dan Matangnga;
- Kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian <10 meter di atas permukaan laut, terutama di bagian pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang;
- Kawasan rawan intrusi air laut meliputi wilayah pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang.

Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 15 Jumlah, Jenis dan Intensitas Bencana menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
1	Matangga	1. Kebakaran	-	-	-	-	-
		2. Angin Puting Beliung	-	-	-	-	-
		3. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
2	Bulo	1. Kebakaran	-	1	-	1	3
		2. Angin Puting Beliung	-	-	1	-	-
		3. Tanah Longsor	-	-	-	-	2
3	Tubbi Taramanu	1. Kebakaran	2	1	1	1	-
		2. Angin Puting Beliung	1	-	1	-	-
		3. Tanah Longsor	2	2	-	1	1
4	Alu	1. Kebakaran	-	1	2	1	-
		2. Angin Puting Beliung	-	-	-	1	-
		3. Tanah Longsor	-	-	-	1	1
5	Anreapi	1. Kebakaran	3	4	1	1	1
		2. Angin Puting Beliung	1	-	1	2	2
		3. Tanah Longsor	-	-	1	2	3
6	Tapango	1. Kebakaran	1	3	1	-	-
		2. Angin Puting Beliung	-	2	-	1	-
		3. Tanah Longsor	-	-	-	-	1
		4. Banjir	-	-	-	-	2
7	Luyo	1. Kebakaran	5	4	3	1	1
		2. Angin Puting Beliung	1	-	-	2	2
		3. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		4. Banjir	-	-	-	-	1
8	Balanipa	1. Kebakaran	2	-	3	1	-
		2. Angin Puting Beliung	-	-	2	2	2
		3. Abrasi Pantai	-	-	-	-	-
9	Limboro	1. Kebakaran	-	-	-	-	-
		2. Angin Puting Beliung	3	-	3	-	1
		3. Banjir	1	-	-	1	-
		4. Tanah longsor	-	-	-	1	-
10	Binuang	1. Kebakaran	1	4	1	1	2
		2. Angin Puting Beliung	1	6	3	1	3
		3. Tanah longsor	-	-	-	1	-
		4. Banjir	-	-	-	1	-
		5. Gelombang ekstrim dan Abrasi Pantai	-	-	-	-	1
11	Campalagian	1. Kebakaran	-	1	-	-	1

No	Kecamatan	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Angin Puting Beliung	-	2	1	6	3
		3. Banjir	-	-	-	1	-
12	Wonomulyo	1. Kebakaran	2	2	2	1	1
		2. Angin Puting Beliung	-	2	-	-	4
		3. Gelombang ekstrim dan Abrasi Pantai	-	-	-	1	-
13	Tinambung	1. Kebakaran	1	1	1	1	-
		2. Angin Puting Beliung	-	-	2	1	2
		3. Banjir	1	-	-	1	-
		4. Gelombang ekstrim dan Abrasi Pantai	1	-	-	1	-
14	Matakali	1. Kebakaran	1	-	1	-	1
		2. Angin Puting Beliung	1	-	1	1	3
		3. Abrasi Pantai	-	-	-	-	-
		4. Banjir	-	-	-	1	1
15	Mapilli	1. Kebakaran	5	3	1	1	3
		2. Angin Puting Beliung	4	2	1	5	2
		3. Tanah Longsor	-	-	-	-	-
		4. Banjir	-	-	-	1	1
16	Polewali	1. Kebakaran	1	5	2	1	-
		2. Angin Puting Beliung	5	1	2	4	4
		3. Gelombang ekstrim dan Abrasi Pantai	-	-	-	-	2
		4. Banjir	-	-	-	1	-
Jumlah			46	47	38	52	57

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.1.2 DEMOGRAFI

Demografi adalah gambaran kependudukan yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah penduduk setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Beberapa data gambaran kependudukan tahun 2021 yang disajikan dalam Demografi Kabupaten Polewali Mandar adalah Jumlah Penduduk per luas wilayah dan kepadatan per kecamatan, piramida penduduk dan jumlah penduduk per jenis kelamin, per jumlah rumah tangga, rata-rata laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 berdasarkan Buku Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022 yang diterbitkan BPS sebanyak 483.920 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2021 206 jiwa/km², dimana kepadatan tertinggi di Kecamatan Polewali yaitu sebesar 2.531 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Matangnga yaitu 25 jiwa/km². Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis wilayah, dimana Kecamatan Polewali merupakan kawasan perkotaan dengan luas wilayah 26,27 km² sementara Kecamatan Matangnga dengan luas wilayah 234,92 km² di daerah perdesaan yang memiliki banyak pegunungan.

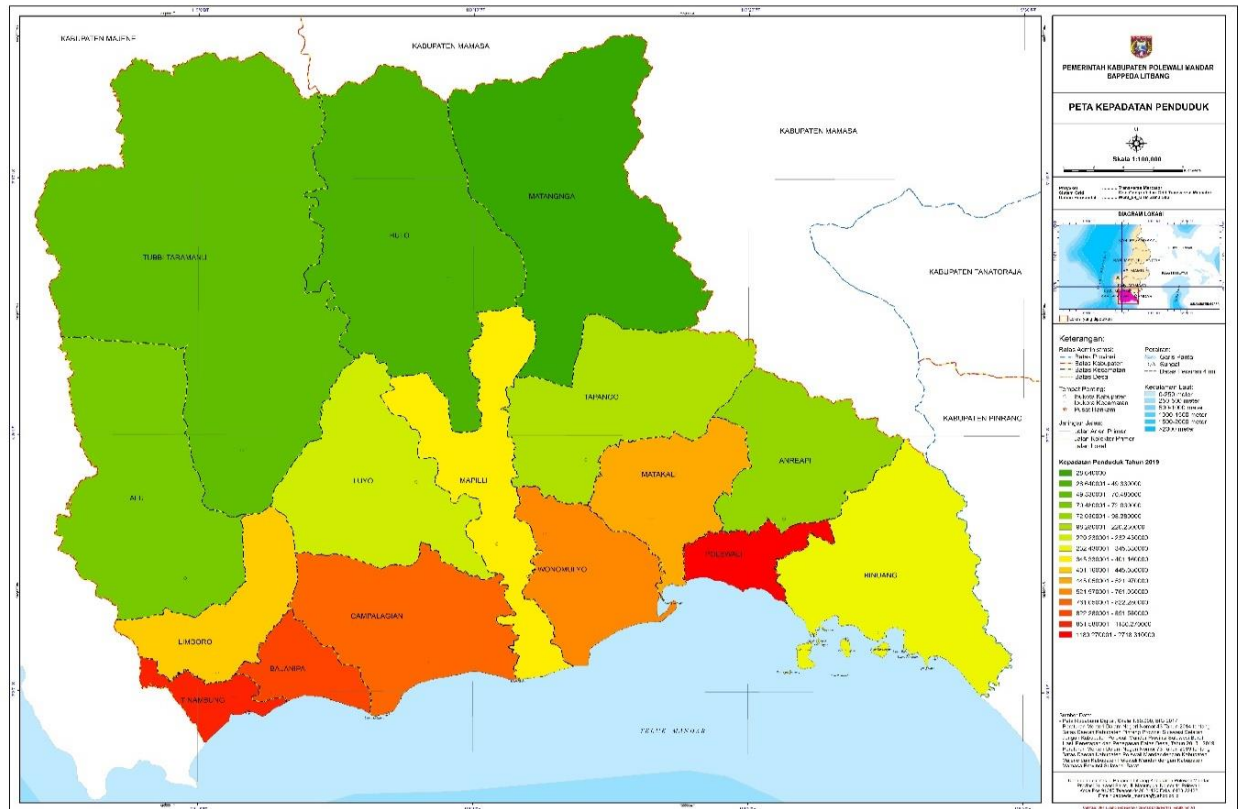
Tabel 2. 16 Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk per Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Tinambung	25.034	22,02	1.137
2	Balanipa	29.451	33,03	892
3	Limboro	19.462	65,06	299
4	Tubbi Taramanu	23.424	430,56	54
5	Alu	14.869	173,63	86
6	Campalagian	64.709	116,01	558
7	Luyo	33.171	123,71	268
8	Wonomulyo	51.616	75,56	683
9	Mapilli	33.975	102,53	331
10	Tapango	25.961	125,81	206
11	Matakali	27.994	72,7	385
12	Bulo	10.575	30,36	348
13	Polewali	66.483	145,82	456
14	Binuang	40.011	91,09	439
15	Anreapi	11.306	236,83	48
16	Matangnga	5.879	228,38	26
Kabupaten Polewali Mandar		483.920	2.074,76	233

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 terdapat dua kecamatan yang padat penduduknya yaitu Kecamatan Polewali dan Tinambung, sementara yang paling rendah kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Alu, Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matangnga. Ketiga kecamatan ini terletak didaerah pegunungan, dimana luas wilayah yang terbangun masih lebih kecil dibanding yang belum terbangun.

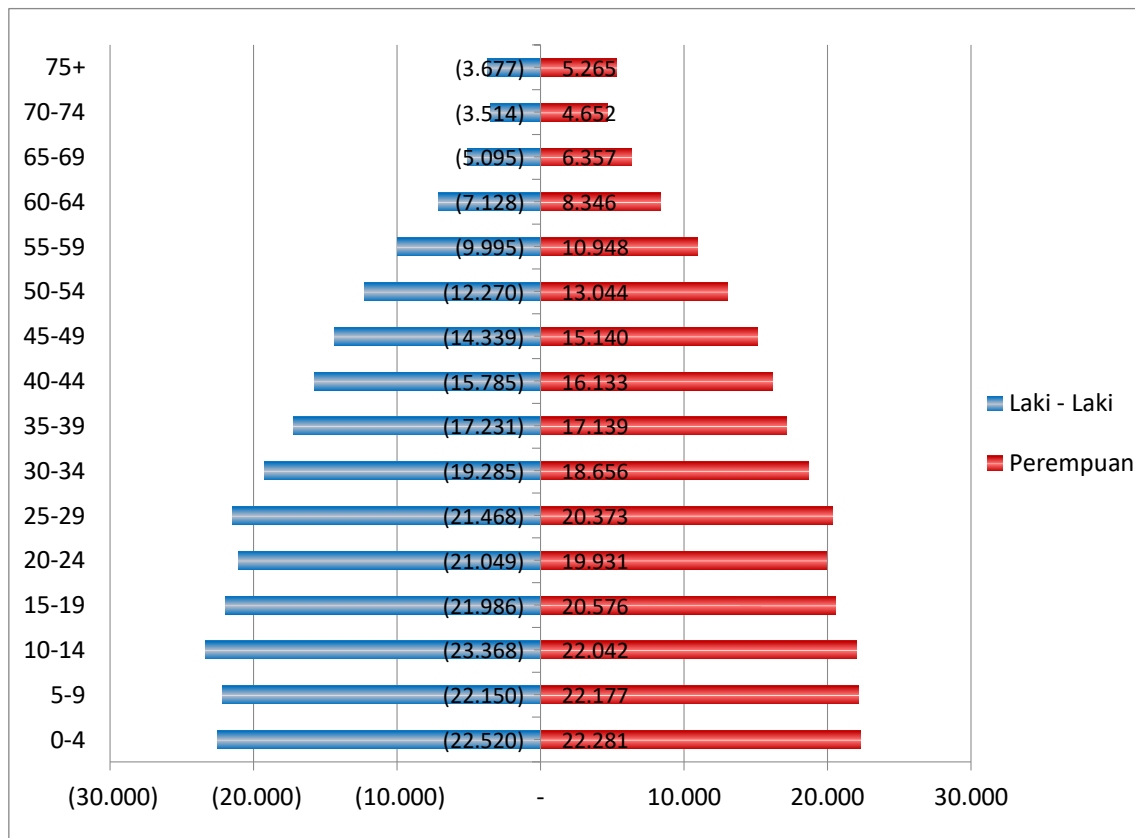
Gambar 2. 6 Peta Kepadatan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021



Sumber data : Hasil Olahan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Kelompok umur diatas 64 tahun menunjukkan nilai mengerucut tapi terkendali. Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu umur 15-64 tahun sebanyak 315.909 jiwa yang terdiri dari laki-laki 157.967 jiwa perempuan 157.942 jiwa.

Gambar 2. 7 Piramida Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir berada dikisaran 1,25%-1,50% dengan perbandingan jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada persentase terhadap jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 49,79% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 49 penduduk laki-laki. Jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4-5 orang dalam satu rumah tangga, ada peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
2.	Laki-laki	212.264	214.684	217.597	238.274	240.860
3.	Perempuan	220.428	222.978	224.979	240.260	243.060

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Jumlah Rumah tangga	97.368	98.677	98.929	106.340	107.537,8
5.	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	1,25%	1,24%	1,23%	1,85%	1,50%
6.	Kepadatan Penduduk	214	216,42	258,49	237	241

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran kondisi umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar meliputi; 1) gambaran fokus kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, 2) fokus pada kesejahteraan sosial, 3) fokus pada seni budaya dan olahraga, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMERATAAN EKONOMI

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pemerataan ekonomi adalah kunci pendorong pertumbuhan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Fokus kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar diukur dengan melihat capaian beberapa indikator variabel yaitu Variabel pertumbuhan PDRB, nilai PDRB Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan dan Ketimbangan. Masing-masing Variabel dapat di jelaskan berikut :

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB merupakan Indikator untuk mengetahui 1). pertumbuhan ekonomi suatu daerah; 2). Bahan

analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa; 3). Bahan analisis produktivitas secara sektoral 4). Alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dengan berdasar pada harga konstan tahun 2010 trend perkembangan ekonomi Selama kurun tahun 2017-2021 di Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai 7,39% pada tahun 2017 namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2021 turun menjadi 1,42%.

Tabel 2. 18 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021

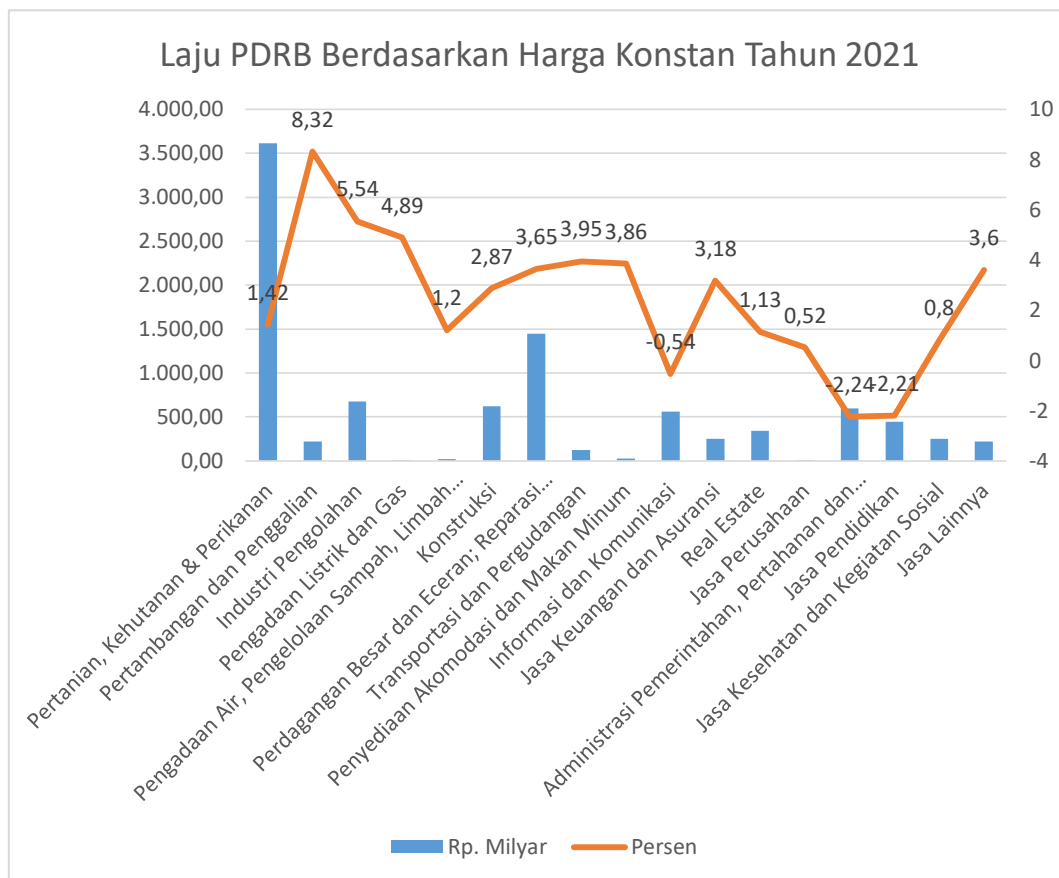
No.	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.143,64	7,39	3.324,50	5,75	3.533,09	6,27	3.562,66	0,84	3.613,15	1,42
2	Pertambangan dan Penggalian	189	7,04	203,31	7,57	213,43	4,97	202,91	-4,93	219,8	8,32
3	Industri Pengolahan	543,93	7,21	593,77	9,16	637,43	7,35	637,66	0,04	672,96	5,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	7	6,29	6,44	6,86	8,99	7,29	6,26	7,64	4,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,78	13,42	14,88	7,97	16,17	8,7	16,41	1,47	16,6	1,2
6	Konstruksi	625,28	6,04	658,08	5,24	688,61	4,64	601,09	-12,71	618,36	2,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.284,10	7,51	1.363,16	6,16	1.428,58	4,8	1.393,60	-2,45	1.444,49	3,65
8	Transportasi dan Pergudangan	112,15	3,7	119,26	6,34	127,62	7,01	119,87	-6,07	124,6	3,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,21	5,05	24,02	8,14	26,2	9,09	24,64	-5,98	25,45	3,86
10	Informasi dan Komunikasi	452,04	9,81	486,15	7,55	534,66	9,98	561,07	4,94	558,02	-0,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	214,38	9,32	222,22	3,66	233,22	4,95	244,19	4,7	251,95	3,18
12	Real Estate	292	5,85	310,47	6,32	333,12	7,29	338,88	1,73	342,73	1,13
13	Jasa Perusahaan	9,23	4,76	9,67	4,68	10,62	9,92	10,11	-4,8	10,15	0,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	598,6	2,66	640,72	7,04	673,46	5,11	617,94	-8,24	598,23	-2,24

No.	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
15	Jasa Pendidikan	420,36	7,21	437,55	4,09	468,5	7,07	452,32	-3,45	442,31	-2,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213,14	6,94	229,94	7,88	240,26	4,49	245,73	2,28	247,7	0,8
17	Jasa Lainnya	190,69	8,39	202,2	6,04	224,54	11,05	213,18	-5,06	220,85	3,6
PDRB		8.330,45	7,01	8.846,18	6,19	9.396,37	6,22	9.249,54	-1,56	9.243,36	1,86

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Pada tahun 2021 sektor konstruksi mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari -12,71% menjadi 2,87% atau naik sebesar 15,58%. Sementara sektor informasi dan komunikasi mengalami kontraksi sebesar -5,48% dari tahun 2020 4,94% menjadi -0,54% pada tahun 2021 . Sektor-sektor lain secara umum mengalami kenaikan diatas 5%, kecuali sektor pendidikan hanya 1,24% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,58%.

Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB
atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku pertumbuhan riil ekonomi menurut sektor mengalami peningkatan yang signifikan. Pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu mendominasi dari tahun 2017-2021 dengan nilai lebih dari 5 milyar. Namun demikian sampai dengan tahun 2021 peningkatannya sangat kecil dengan nilai Rp5.710,08 milyar atau kontribusi sebesar 41,38% sementara pada tahun 2017 sudah memiliki nilai sebesar Rp4.562,00 milyar atau kontribusi sebesar 40,25%. Sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dengan kontribusi dari Tahun 2021 sebesar 15,52%, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 19 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021 (dalam Milyar)

No.	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.562,00	40,25	5.063,76	40,7	5.413,11	40,49	5.497,64	41,43	5.710,08	41,38
2	Pertambangan dan Penggalian	255,48	2,25	278,06	2,23	296,27	2,22	287,04	2,16	313,73	2,27
3	Industri Pengolahan	699,85	6,17	768,3	6,17	838,8	6,27	853,62	6,43	924,41	6,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,53	0,04	4,81	0,04	5,07	0,04	5,38	0,04	5,64	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,54	0,15	17,89	0,14	19,09	0,14	19,4	0,15	19,79	0,14
6	Konstruksi	886,13	7,82	953,35	7,66	1015,95	7,6	888,48	6,69	950,79	6,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.768,00	15,6	1.936,24	15,56	2.048,54	15,32	2.025,76	15,26	2.142,56	15,52
8	Transportasi dan Pergudangan	139,22	1,23	149,13	1,2	162,27	1,21	154,53	1,16	161,73	1,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,48	0,26	32,55	0,26	35,84	0,27	34,06	0,26	35,49	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	495,11	4,37	548,36	4,41	609,02	4,56	645,22	4,86	636,83	4,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	308,08	2,72	329,04	2,64	350	2,62	365,68	2,76	397,62	2,88
12	Real Estate	384,86	3,4	412,47	3,31	442,83	3,31	453,89	3,42	462,89	3,35
13	Jasa Perusahaan	9,91	0,09	10,46	0,08	11,57	0,09	11,16	0,08	11,33	0,08

No.	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	745,29	6,58	819,06	6,58	896,07	6,7	828	6,24	810,88	5,88
15	Jasa Pendidikan	528,14	4,66	574,33	4,62	636,9	4,76	619,12	4,67	618,22	4,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268,7	2,37	294,34	2,37	309,65	2,32	316,82	2,39	320,93	2,33
17	Jasa Lainnya	233,23	2,06	250,57	2,01	278,14	2,08	265,13	2	277,78	2,01
PDRB		11.334,57	100	12.442,69	100	13.369,14	100	13.270,94	100	13.800,78	100

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa sektor pertanian dengan Harga Berlaku sebesar 41,38% ditahun 2021 dan masih merupakan kontribusi persentase terbesar dari 9 sektor penilaian PDRB selama 5 tahun terakhir, disusul dengan sektor Perdagangan, hotel dan Restoran sebesar 15.62% dan Jasa-jsa lainnya sebesar 14,78%.

Sementara berdasarkan Harga Konstan perkembangan kontribusi terbesar terdapat pada sektor Pertambangan dan penggalian dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, yaitu masing-masing 8,32% dan 8,17% dari 9 sektor penilaian PDRB selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan trend yang berbeda dari tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi masyarakat di masa pandemi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia usaha. Sektor yang paling lambat perkembangannya adalah jasa-jasa yang hanya berkontribusi 0,47% serta sektor pertanian 1,42%. Kondisi ini menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat sebagian besar masyarakat kita berusaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 – 2021

No.	SEKTOR	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1.	Pertanian	40,36	8,08	40,69	5,75	40,51	6,27	41,43	0,84	41,38	1,42
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,26	7,78	2,23	7,57	2,22	4,97	2,16	-4,93	2,27	8,32

No.	SEKTOR	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
3.	Industri Pengolahan	6,16	7,42	6,17	9,16	6,27	7,35	6,43	0,04	6,7	5,54
4.	Listrik , gas dan air bersih	0,19	20,42	0,18	14,41	0,18	17,69	0,19	7,73	0,18	6,09
5.	Konstruksi	7,89	6,97	7,72	5,24	7,66	4,64	6,69	-12,71	6,89	2,87
6.	Perdagangan , Hotel dan Restoran	15,51	7,26	15,55	6,13	15,32	4,8	15,52	-8,43	15,62	3,65
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,83	8,75	5,95	22,03	5,95	16,1	6,02	-1,13	5,78	3,41
8.	Keuangan sewa dan jasa perusahaan	6,18	29,74	6,02	21,7	6,02	31,11	6,26	1,63	6,49	8,17
9.	Jasa-jasa	15,6	25,2	15,86	18,01	15,86	27,95	15,3	-14,47	14,78	0,47
PDRB		100	7,01	100	6,19	100	6,17	100	-1,56	100	1,86

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

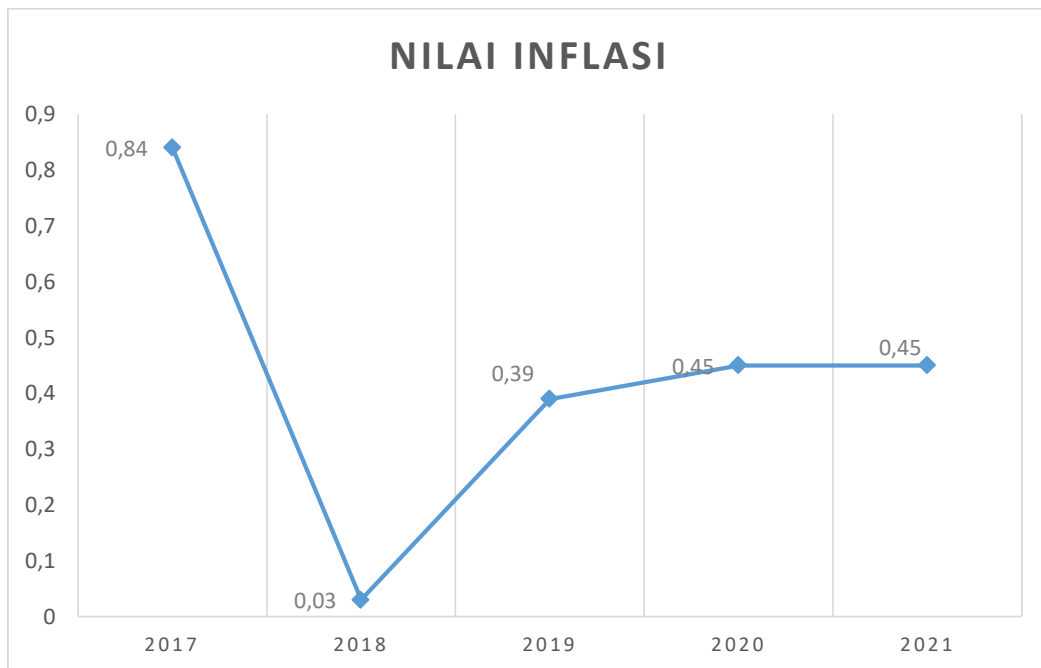
a. Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Di Kabupaten Polewali Mandar terjadi perubahan terhadap laju inflasi pada tahun 2021. Nilai rata-rata inflasi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2021 di kisaran 0.84-0,45. Nilai rata-rata inflasi tertinggi tahun 2017 yaitu 0,84 dan terendah tahun 2018 yaitu 0,03.

Gambar 2. 9 Nilai Inflasi Rata-rata
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : TPID, 2022

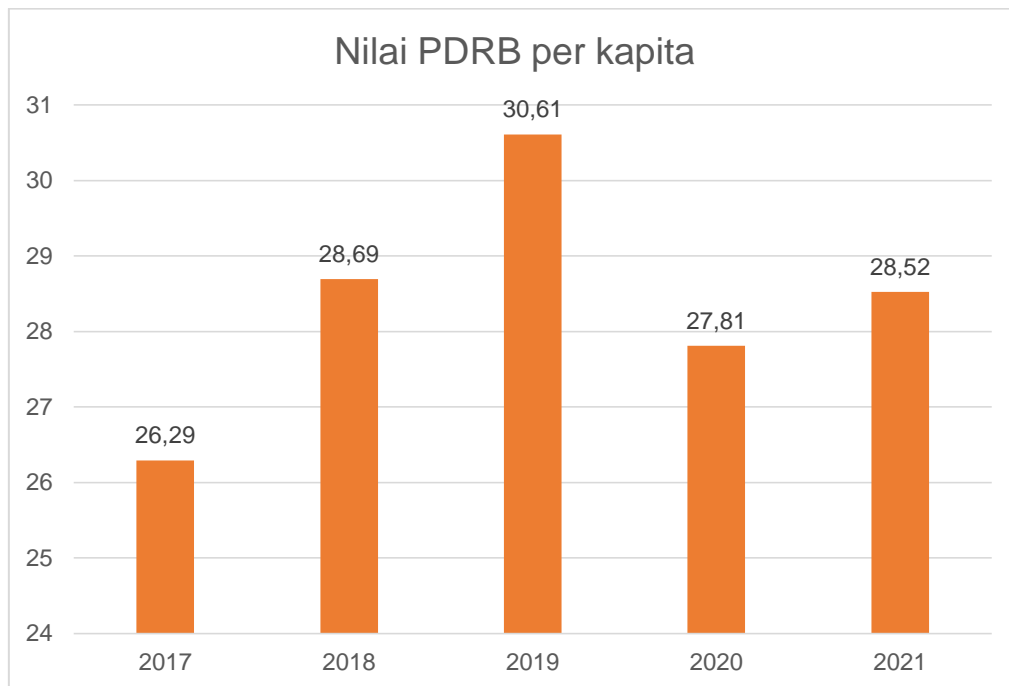
b. PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui atau menunjukan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

PDRB Per kapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 seperti pada Gambar 2.9. mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,29 juta rupiah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,52 juta rupiah tahun 2021. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 3 poin menjadi 27,81 juta rupiah.

Gambar 2. 10 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

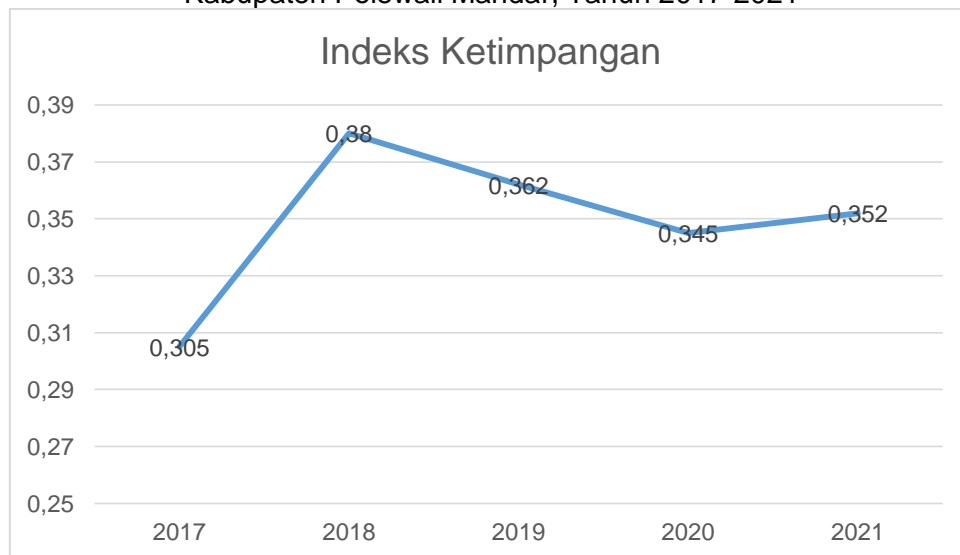
c. Ketimpangan

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 atau mendekati nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 atau mendekati nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran.

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Polewali Mandar yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,352. Angka pertumbuhannya meningkat sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini

Ratio September 2020 sebesar 0,345. Hal ini menunjukkan semakin melebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Polewali Mandar. Selama 5 tahun terakhir angka Gini ratio terendah pada tahun 2017 sebesar 0,305 dan tertinggi tahun 2018 sebesar 0,380. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,362 dan 0,345 pada tahun 2020. Adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 menjadi penyebab utama dari meningkatnya angka gini ratio pada maret 2021. Hal ini disebabkan banyaknya sektor lapangan usaha yang tidak beroperasi dengan baik dan cenderung mengalami kerugian sehingga banyak pekerja yang harus berhenti dari pekerjaannya. Dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran yang membuat pendapatan menurun.

Gambar 2. 11 Indeks Ketimpangan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022

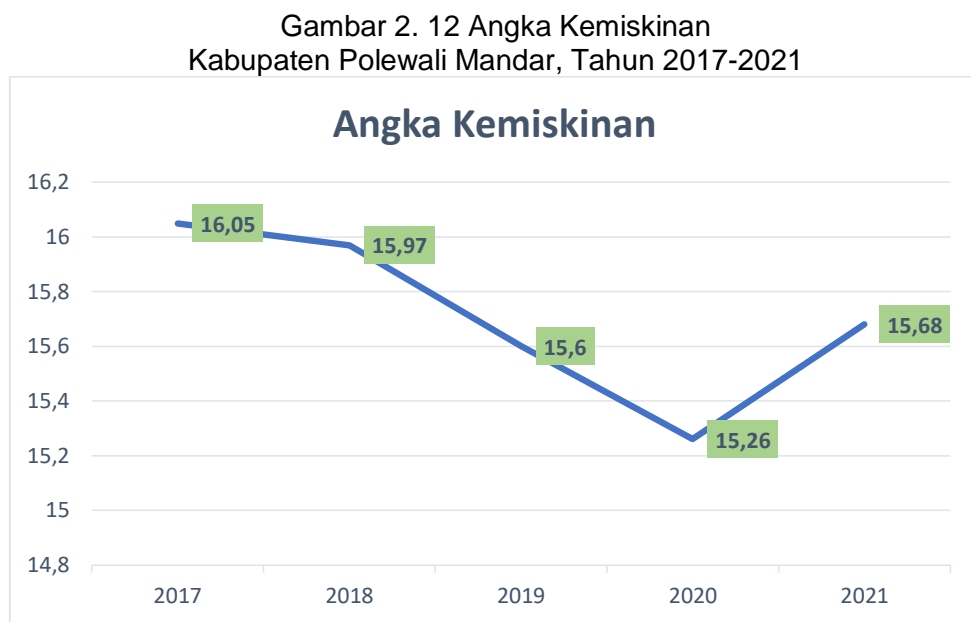
d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan kesehatan dan determinan penyebab kemiskinan lainnya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari

jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

1). Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang dibawah angka garis kemiskinan yang dinyatakan miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 sebesar 16,05%. Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 menjadi 15,26%, terjadi penurunan sebesar 1,8%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 15,68%.

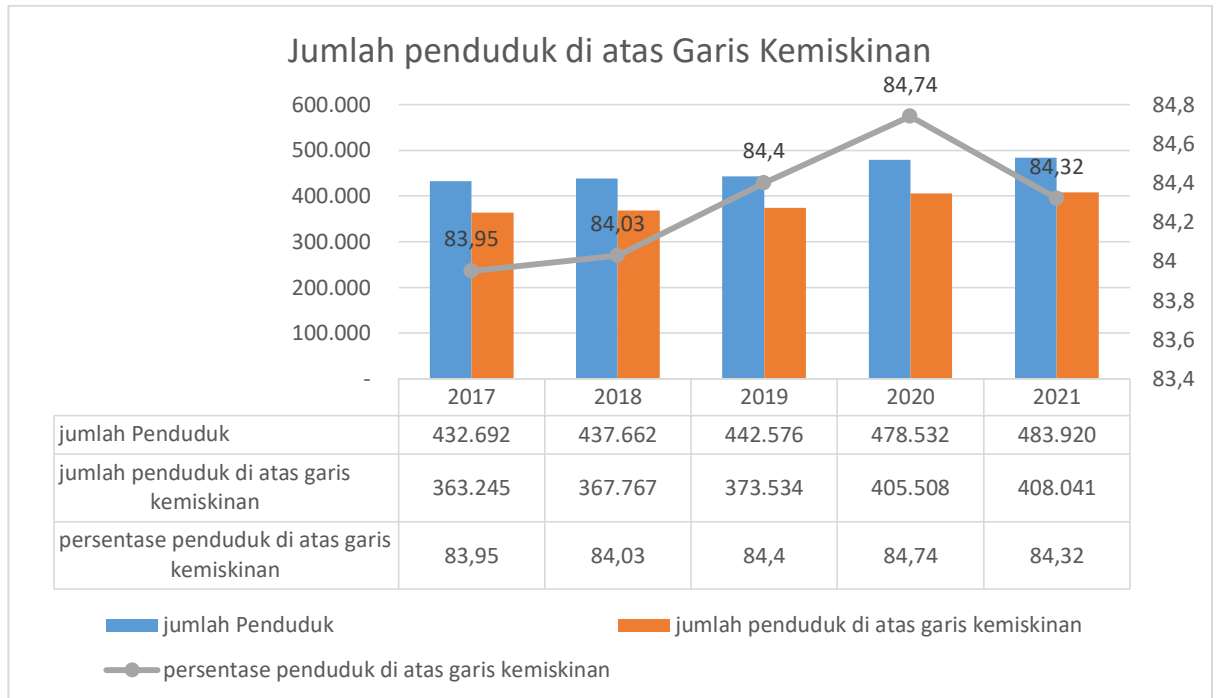


Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 2. 13 Jumlah dan Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

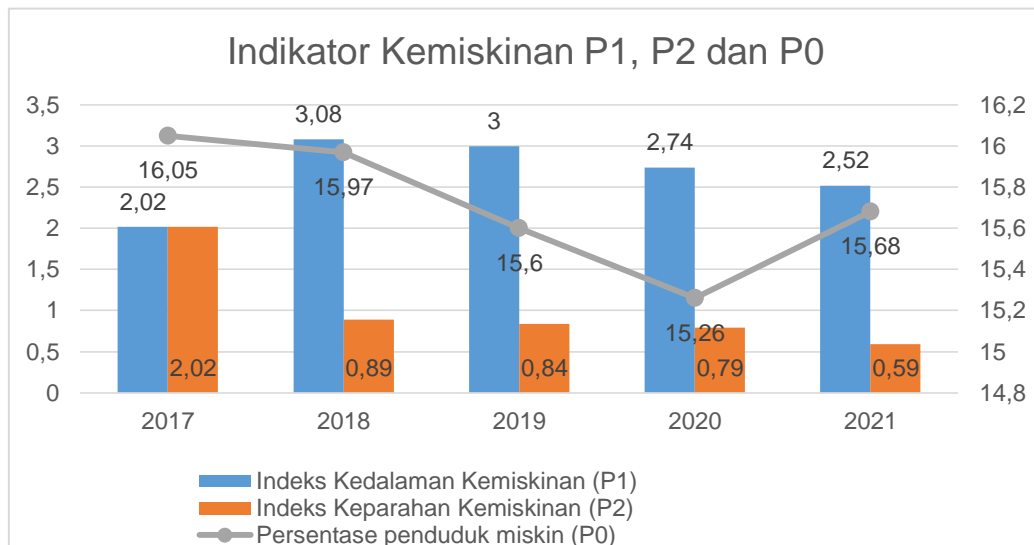
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan diukur dengan cara; angka 100 dikurangi dengan angka kemiskinan, pada gambar diatas angka kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2017-2021. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2017 sebanyak 363.245 jiwa meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 408.041 jiwa. Peningkatan ini terjadi karena jumlah penduduk yang meningkat, namun dari segi persentase menunjukkan penurunan samapai dengan tahun 2021. Adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini menyebabkan adanya stagnasi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini tidak dapat dihindari, sehingga dibutuhkan strategi untuk memperbaiki keadaan sehingga setidaknya kita mampu bertahan dengan kondisi yang sekarang.

3) Indeks Ketimpangan Kemiskinan

Dalam mengukur ketimpangan kemiskinan menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan data BPS Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 di Kabupaten Polewali Mandar ada tahun 2021 sebesar 2,52, menurun sebanyak 0,22 poin dari tahun 2020. Nilai ini merupakan nilai tertinggi di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya nilai P1 kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan masih lebar. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis. Jika dilihat dari trend selama 5 tahun terakhir, Indeks kedalaman kemiskinan cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 memiliki angka tertinggi sebesar 3,08 dan pada tahun 2017 memiliki angka terendah sebesar 2,02.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan digunakan untuk mengetahui keberagaman jumlah pengeluaran penduduk miskin di suatu daerah. nilai indeks mengindikasikan penyebaran/ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara masyarakat miskin dengan garis kemiskinannya. Data Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Maret 2021 sebesar 0,59 menurun sebanyak 0,2 poin. Hal ini memberikan gambaran positif pada kinerja pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian angka ini masih sangat tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Tingginya angka Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinannya. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan trend penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 2. 14 Indikator kemiskinan P1, P2 dan P0
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Polewali Mandar merupakan gambaran kinerja capaian yang dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Balita Underweight (Gizi Buruk dan Gizi Kurang), Angka Melek Huruf dan Angka partisipasi Kasar, Angka Partispasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

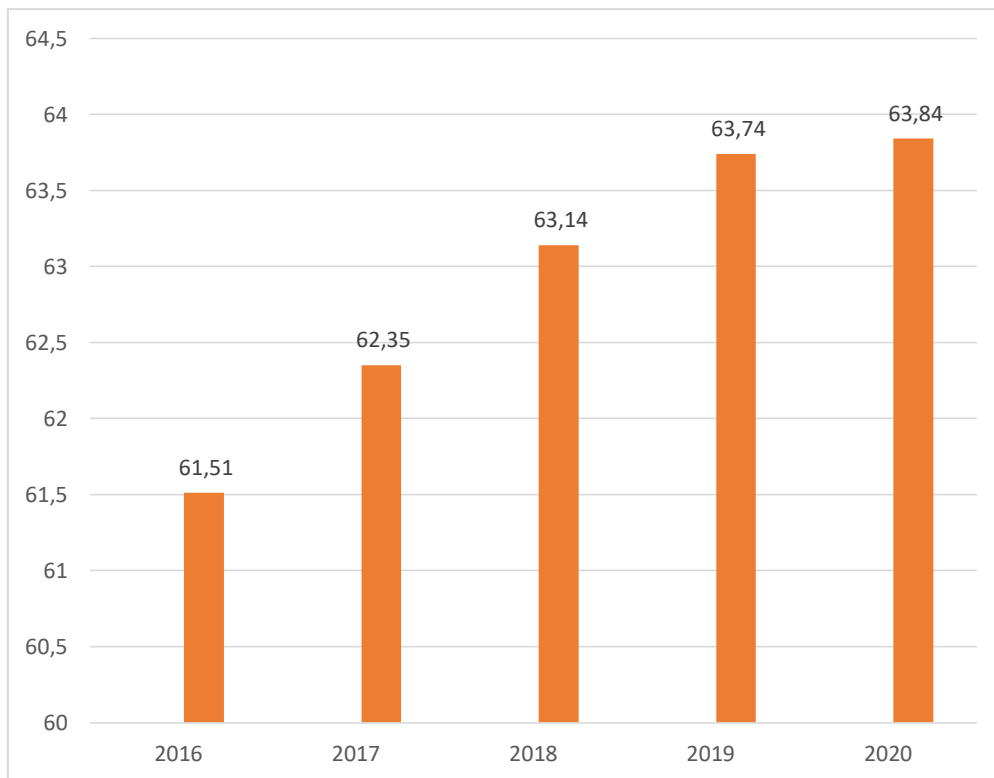
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*) merupakan sebuah indeks kinerja pembangunan yang dikembangkan oleh *United Nations for Development Program* (UNDP). Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan tingkat pengelompokan kinerja pembangunan dan Komponen yang diukur dalam IPM: 1) *Income* (pengeluaran per kapita), 2) *Expectation of life* (angka harapan hidup). 3) *Years of scholly* (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), capaiannya berada pada kelompok dengan tingkat pembangunan menengah yaitu capaian sebesar 63.84 ditahun 2021 atau berada diantara 50-79 lima tahun terakhir 2017-2021, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



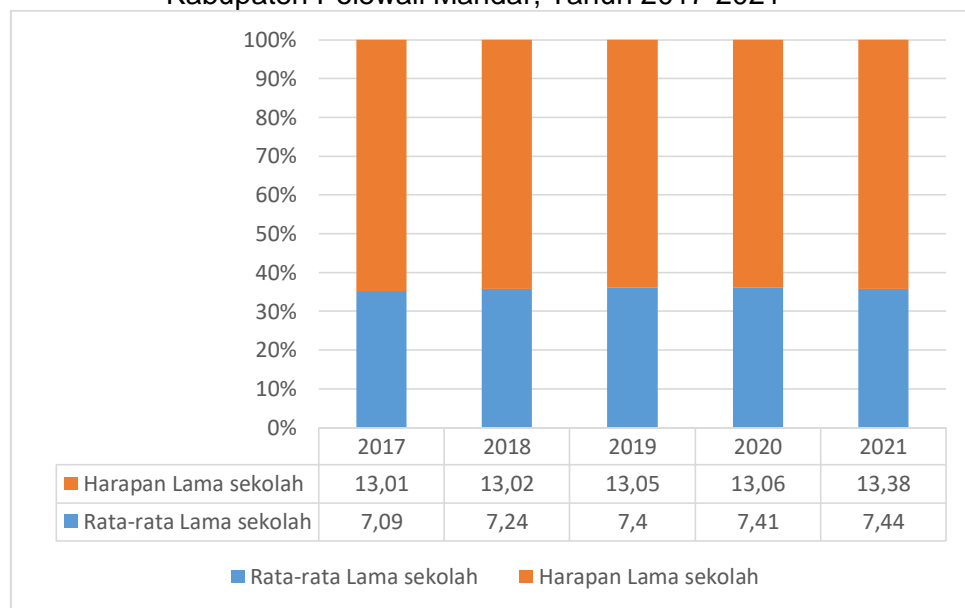
Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

IPM juga diukur dari aspek pendidikan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan kecenderungan di kisaran angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,44 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII atau tidak tamat SMP pada tahun 2021.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2021 berada di kecenderungan kisaran angka 13 tahun. Angka ini menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara dengan Diploma I.

Gambar 2. 16 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

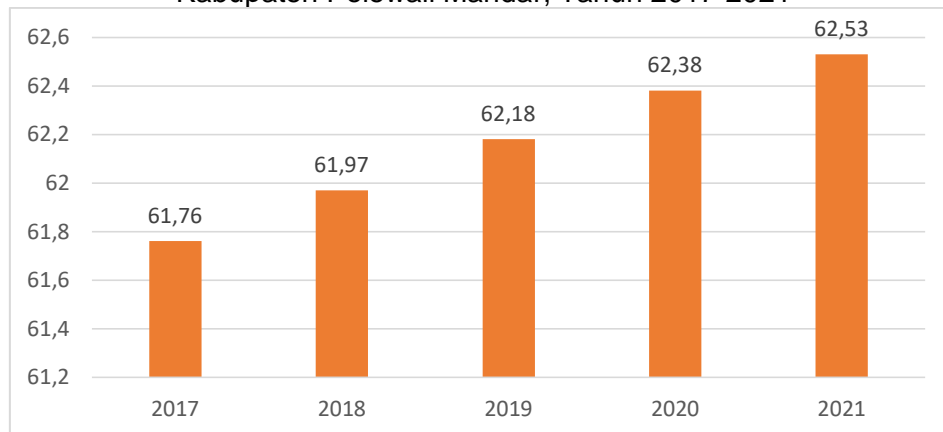
c. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup berdasarkan rumusan dari Badan Pusat Statistik yang adalah angka rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Di Kabupaten Polewali Mandar Umur Harapan Hidup sejak tahun 2017-2021 seperti pada Gambar 2.17 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu

61,76 tahun di Tahun 2017 meningkat di tahun 2021 menjadi 62,54 tahun. Hal ini berarti Umur Harapan Hidup yang terhitung tahun 2017 adalah 61,76 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2017 (periode 2013-2016) akan dapat hidup sampai 61 atau 62 tahun. Angka ini meningkat dengan umur harapan hidup bagi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2021 (periode 2017-2020) yaitu 62 atau 63 tahun.

Gambar 2. 17 Umur Harapan Hidup
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

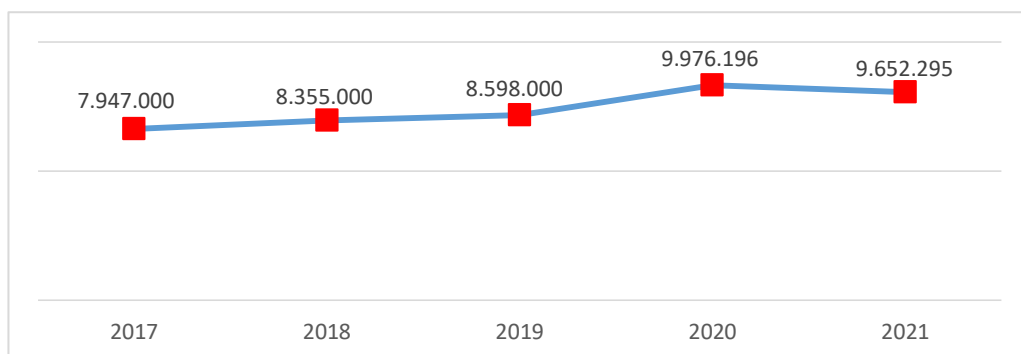


Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita sebagai salah komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari Pengeluaran per kapita di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 jumlah Rp7.947.000,- meningkat secara signifikan tahun 2021 sebesar 17,67 persen menjadi Rp9.652.295,- seperti terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 18 Pengeluaran Per Kapita
Kabupaten Polewali Mandar,Tahun 2017-2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2021

e. Persentase Balita Underweight (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)

Bayi dan Anak Dibawah Umur Lima Tahun (Balita) Underweight adalah Berat Badan bayi dan anak dibawah umur lima tahun yang berdasarkan hasil penguran Berat Badan Per Umur menunjukan dibawah berat badan yang dinyatakan dengan kategori gizi buruk dan kurang.

Persentase balita underweight yaitu jumlah balita dengan gizi buruk dan gizi kurang dibagi jumlah seluruh Balita. Pada Tabel 2.21 menunjukkan jumlah balita underweight yaitu balita yang bergizi buruk dan bergizi kurang terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2021 yaitu dari 22,7% menjadi 11,3%. Hal ini berarti penanganan balita dengan gizi buruk dan gizi kurang semakin membaik.

Tabel 2. 21 Persentase Balita Underweight
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah balita Underweight (gizi buruk + gizi kurang)	8431	4473	3789	3694	4351
2.	Jumlah balita	42.279	52.149	52.790	52.790	56.277
Persentase balita Underweight (gizi buruk + gizi kurang)		21.7%	12.1%	11.45%	11,3%	11,3%

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

f. Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes 2009). Suatu kelurahan/ desa dikatakan sebagai kelurahan/ desa siaga aktif jika :

1. Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari.
2. Penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
3. Melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) :
 - a. Pemantauan penyakit,

- b. Pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA),
 - c. Pemantauan gizi, dan
 - d. Pemantauan lingkungan dan perilaku.
4. Penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan.
 5. Penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana.
 6. Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Cakupan desa siaga aktif adalah jumlah desa siaga aktif dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Pada tahun 2017 telah dibentuk desa siaga sebanyak 111 desa/kel. dan 3 desa yang aktif. Secara signifikan mengalami peningkatan jumlah desa siaga aktif tahun 2017-2021 hingga mencapai 163 desa/kel. Pada tahun 2018-2020 terjadi lonjakan jumlah desa siaga menjadi 163 desa/kel., namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 153 desa/kel. seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2. 22 Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

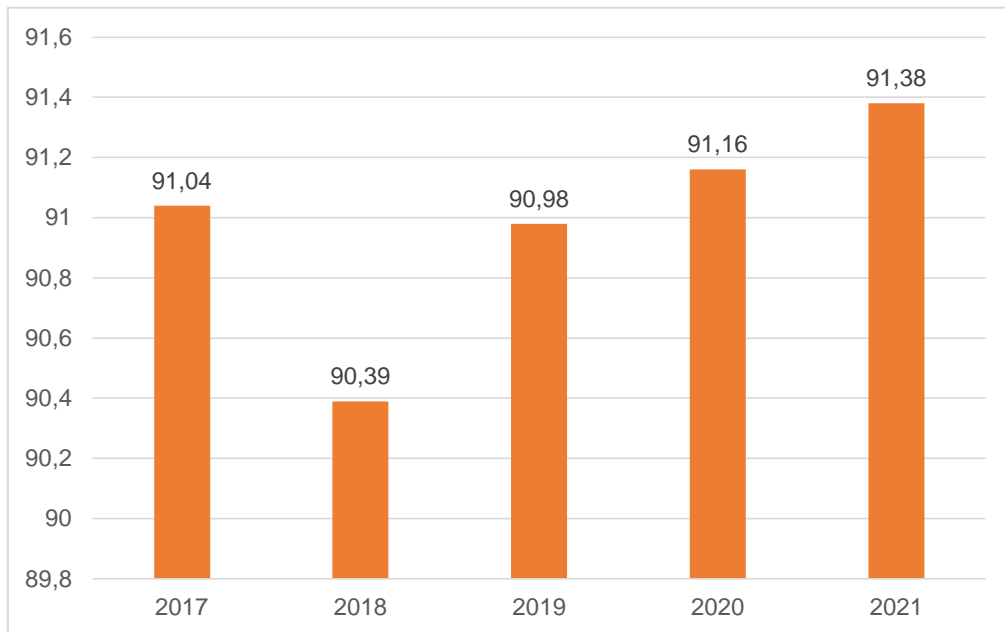
No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa siaga aktif	Desa	3	5	5	133	163
2.	Jumlah desa siaga yang dibentuk	Desa	111	163	162	163	153
Cakupan Desa Siaga Aktif		Persen	2.7	3.1	3.1	81	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

g. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Capaian angka melek huruf Kabupaten Polewali Mandar selama periode lima tahun 2017-2021, menunjukkan capaian di tahun 2021 yaitu sebesar 91,38% merupakan capaian terbaik selama lima tahun terakhir, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut :

Gambar 2. 19 Angka Melek Huruf
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

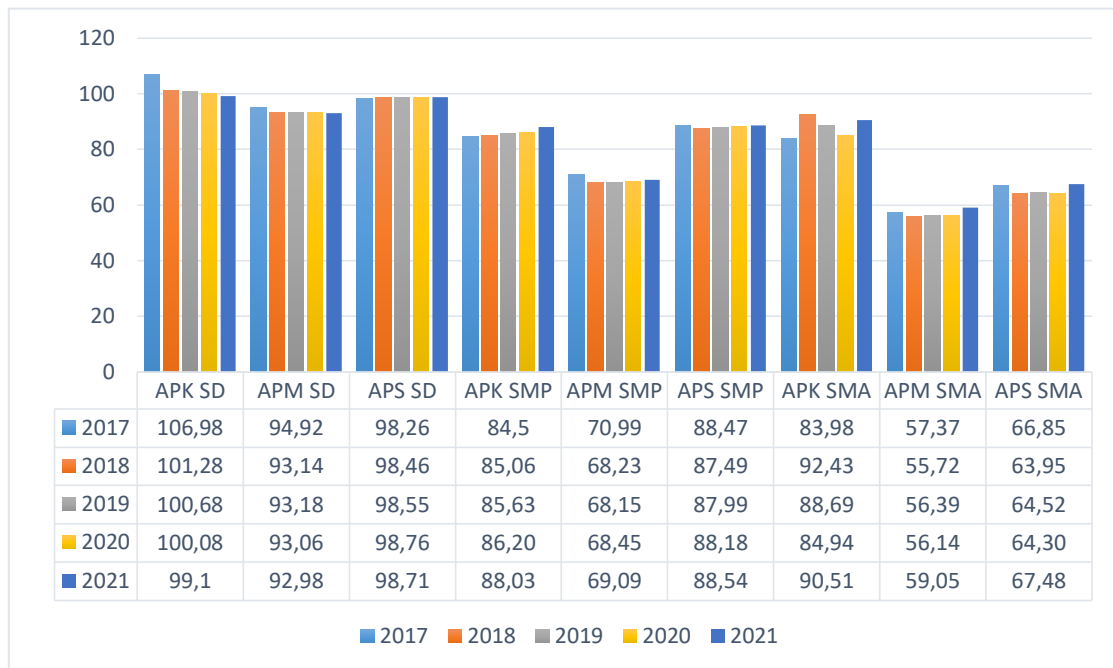


Sumber Data : diolah oleh Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

h. Angka Partispasi Kasar (APK), Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partispasi Sekolah (APS)

Keberhasilan program pendidikan dasar dapat dilihat dari APK, APM dan APS pada jenjang Sekolah Dasar dan Menengah. Capaian APK untuk semua jenjang pendidikan menunjukkan trend positif dari tahun 2017-2021. Peningkatan paling signifikan terjadi pada APK SMP, yang meningkat dari 84,5% pada tahun 2017 menjadi 88,03% pada tahun 2021. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya akses penduduk usia sekolah terhadap layanan pendidikan. Penurunan terjadi pada APK SD yang hanya meningkat dari 106,98% menjadi 99,1% pada periode yang sama. Paralel dengan peningkatan APK, APM di Kabupaten Polewali Mandar juga cenderung meningkat untuk semua jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2. 20 APK, APM dan APS
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Fokus Pembangunan pada bidang seni budaya dan olahraga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin banyak organisasi kesenian dan organisasi pemuda, dan jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan akan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.

a. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi kesenian, pemuda dan olah raga menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 2.23 peningkatan paling tajam tampak pada jumlah organisasi Pemuda dimana pada tahun 2017 terdapat 86 organisasi dan ditahun 2021 menjadi 87 organisasi. Hal ini berarti adanya peningkatan keaktifan dan partisipasi kegiatan kepemudaan.

**Tabel 2. 23 Jumlah Organisasi Kesenian dan Pemuda
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Kesenian	93	93	93	93	93
2	Jumlah Organisasi Pemuda	86	87	87	87	87

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Organisasi Olah Raga	26	26	26	26	28

Sumber Data : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan jumlah organisasi pemuda dan olahraga tampaknya tidak berjalan paralel dengan peningkatan kegiatan kepemudaan. Jumlah kegiatan kepemudaan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 24 Jumlah Kegiatan Pemuda
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kegiatan Pemuda	12	12	12	1	6
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	3	5	5	1	4
3	Jumlah Lapangan Olahraga	368	370	370	370	373

Sumber Data : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi layanan urusan wajib Dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan dan penunjang urusan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan,

2.3.1 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

a. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan sebuah strategi sebagai cerminan tingginya peradaban bangsa. Bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang sadar akan siapa dirinya (jati diri) dan apa yang menjadi tujuan bersama

sebagai bangsa (cita-cita nasional). Berapa indikator penilaian bidang pendidikan adalah, capaian pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, angka melek huruf, angka melanjutnya sekolah dan fasilitas pendidikan.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pergerakan Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat tipis bila dilihat dari partisipasi anak usia 0-6 tahun seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 25 Jumlah PAUD Terlayani dan Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

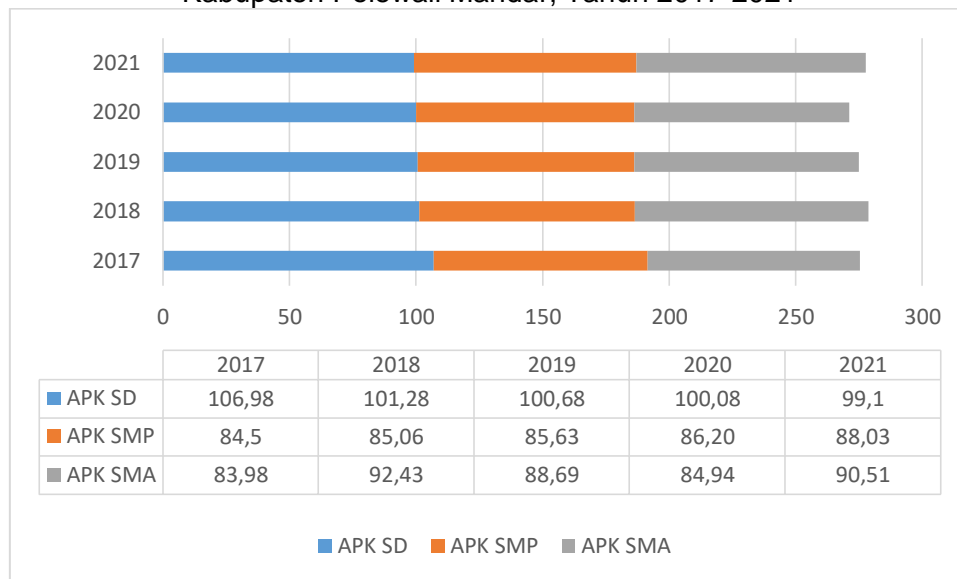
Kecamatan	Jumlah Penduduk 0-6 Thn					Jumlah PAUD Terlayani					APK PAUD				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tinambung	4.363	2.709	2.695	2.695	2.695	4.075	2.437	2.334	1.441	1.097	93,41	89,96	86,6	53%	53%
Balanipa	5.721	2.913	2.898	2.898	2.898	5.07	2.636	2.524	1.489	949	88,63	90,49	87,09	51%	51%
Limboro	3.669	1.973	1.963	1.963	1.963	3.122	1.723	1.65	859	544	85,1	87,33	84,06	44%	44%
Tubbi Taramanu	5.751	2.874	2.86	2.86	2.86	4.726	2.18	2.087	1.089	969	82,17	75,85	72,97	38%	38%
Alu	3.382	1.696	1.687	1.687	1.687	2.97	1.452	1.39	850	762	87,82	85,61	82,39	50%	50%
Campalagian	11.97	6.227	6.195	6.195	6.195	11.225	5.727	5.484	1.538	3.074	93,78	91,97	88,52	25%	25%
Luyo	4.237	3.56	3.541	3.541	3.541	3.747	3.158	3.024	2.188	1.898	88,44	88,71	85,4	62%	62%
Wonomulyo	9.128	5.893	5.862	5.862	5.862	8.729	5.442	5.211	1.861	1.710	95,63	92,35	88,89	32%	32%
Mapilli	6.33	3.601	3.582	3.582	3.582	5.549	3.196	3.06	1.171	912	87,66	88,75	85,43	33%	33%
Tapango	4.101	2.788	2.773	2.773	2.773	3.591	2.526	2.419	1.259	927	87,56	90,6	87,23	45%	45%
Matakali	5.305	2.676	2.662	2.662	2.662	4.945	2.439	2.336	1.388	1.098	93,22	91	87,75	52%	52%
Polewali	11.341	6.907	6.871	6.871	6.871	11.012	6.616	6.335	2.3	2.426	97,09	95,79	92,2	33%	33%
Binuang	6.917	3.749	3.729	3.729	3.729	5.938	3.184	3.049	1.733	1.133	85,85	84,93	81,76	46%	46%
Anreapi	2.394	1.248	1.241	1.241	1.241	1.931	1.112	1.065	724	606	80,66	89,1	85,82	58%	58%
Matangnga	1.049	653	650	650	650	1.007	501	480	530	472	96,02	76,72	73,85	82%	82%
Bulo	2.639	1.217	1.211	1.211	1.211	2.153	1.053	1.008	659	646	81,6	86,52	83,24	54%	54%
Kabupaten Polewali Mandar	88.295	50684	50.42	50.42	50.42	79.79	45.382	43.456	21.115	19.233	90,37	89,54	86,2	42%	42%

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Gambar 2. 21 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



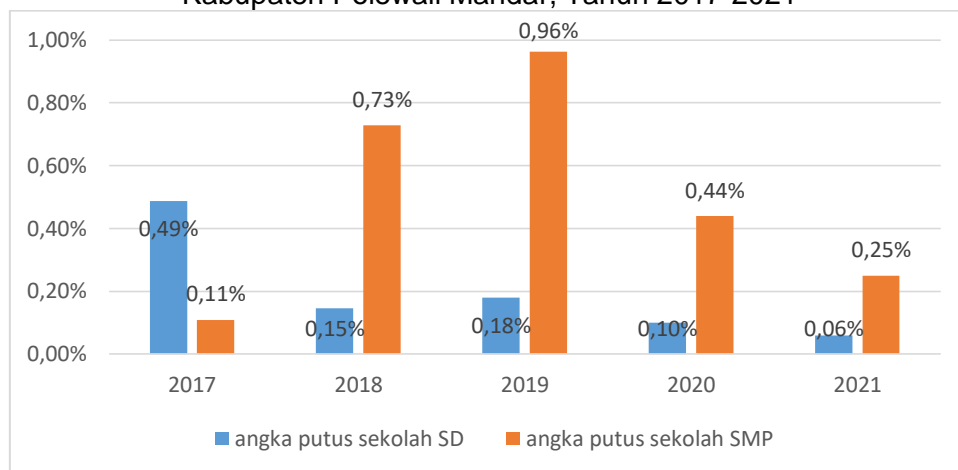
Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka putus sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017 sampai dengan 2021 untuk pendidikan dasar dan menengah masih menunjukkan trend Positif.

Pada tahun 2017 persentase angka putus sekolah di pendidikan dasar sebesar 0,49 persen dan pendidikan menengah sebesar 0,11 persen. Pada pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase angka putus sekolah di pendidikan dasar sebesar 0,18 persen, namun pada pendidikan menengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 0,96 persen. Namun pada tahun 2021 menunjukkan trend positif dimana persentase angka putus sekolah dasar mengalami penurunan menjadi 0,06 persen dan untuk persentase angka putus sekolah di pendidikan menengah sebesar 0,25 persen.

Gambar 2. 22 Angka Putus Sekolah untuk SD dan SMP
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah persentase jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka ini digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi.

Di Kabupaten Polewali Mandar angka melanjutkan sejak tahun 2017-2021 rata-rata 95,08%, artinya terdapat 95% anak SD yang melanjutkan ke pendidikan SMP. Sebaliknya masih ada 5% anak SD yang tidak melanjutkan ke pendidikan SMP. Angka ini mengalami peningkatan secara positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,74% artinya tinggal 1,26% lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 86,62% artinya terdapat 13% anak yang tidak melanjutkan sekolah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Angka Melanjutkan Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Siswa Baru SMP/MTS Sederajat	8530	8683	9492	7087	5327
2	Lulusan SD/MI Sederajat	8816	9072	9262	8182	7536
	Persentase	96,76	95,71	97,58	86,62	98,74

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

5. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari kondisi sarana pendidikan. Semakin baik kondisinya, maka semakin kondusif suasana belajar mengajar di sekolah. Berdasarkan Tabel dibawah jumlah sekolah dalam kondisi baik mengalami peningkatan untuk level SD/MI dan SMP/MTs, namun mengalami penurunan di level Pra Sekolah. Pada tahun 2017 sarana pendidikan pra sekolah dalam kondisi baik sebanyak 408 unit mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2018 sebanyak 621 unit namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 563 unit.

Tabel 2. 27 Sekolah dalam Kondisi Baik
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sarana Pendidikan Pra Sekolah(PAUD/KB/TK/RA/PLB)	408	621	563	563	563
2	Sarana Pendidikan SD/MI	409	409	458	349	349
3	Sarana Pendidikan SMP/Mts	142	656	342	160	160

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

6. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru/Murid Pendidikan SD dan SMP

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2. 28 Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru/Murid Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	416	413	415	416	406
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	58.399	58.044	56.971	54.177	52.222
1.3	Rasio ketersediaan sekolah	71,23	71,15	72,84	76,79	77,75
1.4	Jumlah Guru	4.022	4.038	4.352	4.410	4.334
1.5	Jumlah Murid	57.383	57.151	55.258	53.506	51.548
1.7	Rasio Guru terhadap murid	70,09	70,65	78,76	82,42	84,08
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	143	147	149	149	143
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	28.956	30.149	30.227	29.569	27.938
2.3	RasioKetersediaan sekolah	49,39	48,76	49,29	50,39	51,18
2.4	Jumlah Guru	1.995	2.722	2.351	2.341	2.564

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
2.5	Jumlah Murid	25.617	26.377	26.597	26.974	24.736
2.6	Rasio Guru terhadap Murid	77,88	103,20	88,39	86,79	103,65

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama jangka waktu tahun 2017-2021, terlihat bahwa rasio guru terhadap murid untuk pendidikan SD maupun SMP mengalami peningkatan di. Hal ini berarti masih adanya kekurangan guru SD dan SMP.

7. Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidikan

Jumlah Guru Aparat Sipil negara yang bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk guru jenjang pendidikan SMP pada tahun 2017 terdapat 524 guru yang bersertifikat meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 1.318 guru. Sementara untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2017 sebanyak 1.300 guru meningkat menjadi 2.978 guru yang bersertifikat pada tahun 2021. Berbeda dengan tingkat pendidikan PAUD jumlah guru yang bersertifikat pada tahun 2017 sebanyak 113 guru meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 665 guru , namun pada tahun 2021 menurun menjadi 513 guru.

Tabel 2. 29 Guru Aparat Sipil Negara yang bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

NO	JENJANG	2017	2018	2019	2020	2021
1	PAUD	113	113	110	665	513
2	SD	1.300	1.326	1.364	1.042	2.978
3	SMP	524	530	585	531	1.318

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

8. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar untuk Bidang Pendidikan pada tahun 2022 yaitu Pendidikan Dasar Usia Dini sebesar 93,47 persen, Pendidikan Kesetaraan 31,91 persen dan Pendidikan Dasar sebesar 93,27 persen. Capaian untuk pendidikan kesetaraan masih sangat jauh dari target sehingga perlu upaya yang lebih untuk melakukan akselerasi dalam pencapaian target 100 persen, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30 Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2022

No.	Uraian	Target SPM		Capaian SPM	
		Sasaran	Persen (%)	Realisasi	Persen (%)
1.	Pendidikan dasar usia dini	17.028	100	15.914	93,47
2.	Pendidikan dasar	83.430	100	77.829	93,27
3.	Pendidikan kesetaraan	2.789	100	890	31,91

Sumber data : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023

b. Bidang Urusan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan adalah pembangunan kesehatan yang diukur dengan capaian Derajat Kesehatan meliputi Angka Kematian Bayi, status kesakitan dan status pelayanan kesehatan termasuk kesediaan sarana dan prasana kesehatan.

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) mengukur kasus kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kecenderungan staganan dari 11 bayi (2017) dan juga 10 bayi per 1.000 kelahiran hidup (2021).

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. AKHB ditahun 2017 – 2021 tidak jauh berbeda dari tahun ketahun, Ini mudah dipahami karena AKHB berkebalikan dengan AKB, dimana daerah dengan AKB yang tinggi akan memperlihatkan AKHB yang rendah, demikian pula sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 31 Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lahir Hidup	8.322	8.319	8.584	8.294	8.234
2	Jumlah Kematian Bayi	93	94	98	98	86
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	11	11	11	12	10
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 KH	989	989	989	988	990

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah mengukur perbandingan antara jumlah Posyandu terhadap jumlah Balita. Di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan rasio rata-rata tahun 2017-2021 sebanyak 12 Posyandu per 1000 Balita atau 1 Posyandu melayani 83 Bayi. Hal ini masih perlu penambahan hingga 1 Posyandu melayani 50 Balita.

Tabel 2. 32 Rasio Posyandu per satuan Balita
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Posyandu	635	646	644	657	657
2.	Jumlah Balita	42.279	52.149	52.790	52.790	56.277
3.	Rasio per 1000 Balita (1/2)	15	12	12	12	12

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Angka Prevalensi Anak Stunting

Percepatan penurunan stunting pada balita merupakan program prioritas pemerintah, sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024 prevalensi stunting turun hingga 14%. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi pembedaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan penguatan tingkat implementasinya sampai ke tingkat rumah tangga melalui posyandu. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menetapkan 5 (lima) pilar utama dalam percepatan penurunan stunting, yaitu :

- Komitmen Politik dan kepemimpinan nasional dan daerah;
- Kampanye nasional dan perubahan perilaku;
- Konvergensi program pusat, daerah, dan masyarakat;
- Ketahanan pangan dan gizi;
- Monitoring dan evaluasi.

Angka prevalensi anak stunting mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Angka Prevalensi stunting di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 39,45% tahun 2019 menjadi 36,00%. Angka ini diukur berdasarkan metode perhitungan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Metode ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan Nasional bidang kesehatan untuk mengetahui status gizi balita.

Tabel 2. 33 Prevalensi Stunting
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun			2021 (SSGI)	2022 (SSGI)
	2018 (SSGBI)	2019 (SSGBI)	2020		
Prevalensi Stunting	32,9	39,4	NA	36	39,26

Sumber data : Olahan Balitbangren Tahun 2023

4. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustur per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk adalah mengukur perbandingan jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk. Berdasarkan data Tabel 2.33 menunjukkan tahun 2021 rasio sebesar 17,27 per 100.000 penduduk, artinya rata-rata satu Puskesmas/Poliklinik/Pustu melayani 5.000 penduduk.

Tabel 2. 34 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Poliklinik	8	8	8	8	8
3.	Jumlah Pustu/Poskesdes	56	56	56	56	56
4.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	84	84	84	84	84
5.	Jumlah Penduduk	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
6.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	19,41	19,19	18,98	17,55	17,36

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

5. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, walaupun telah mengalami penambahan dua unit Rumah Sakit, yang terdiri atas Rumah Sakit Hajjah Andi Depu yang berada di Kecamatan Polewali dan Rumah Sakit Pratama yang berada di Kecamatan Wonomulyo. Tetapi rasio Rumah Sakit terhadap penduduk tetap tidak berubah dikarenakan jumlah penduduk terus meningkat.

Pada tahun 2021 rasio Rumah Sakit terhadap penduduk adalah 0,0001. Atau dengan adanya tiga Rumah Sakit dapat melayani, satu rumah sakit dapat melayani sepertiga dari jumlah penduduk yaitu 1 Rumah sakit \pm 150.000 penduduk. Rasio ini tampaknya masih terlalu besar dan masih jauh dari kondisi ideal 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 35 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	2
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Parudan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	0	0	0	0	0

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah RumahSakitAD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta)	0	2	2	2	2
5	Jumlah seluruh RumahSakit	1	3	3	3	3
6	Jumlah Penduduk	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
7	Rasio (5/6)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

6. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokter umum, ahli dan gigi per satuan jumlah penduduk. Sejak tahun 2017 jumlah dokter di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 99 orang mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2021 menjadi 159 orang. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2021 adalah 2,93 artinya 2-3 dokter melayani 10.000 penduduk.

Tabel 2. 36 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter (Umum, Ahli, Gigi)	99	105	120	140	159
2	Jumlah Penduduk	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
3	Rasio Penduduk- Dokter	2,29	2,40	2,71	2,93	32,86

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

7. Rasio Tenaga Medis Per Satuan

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah seluruh tenaga medis dengan jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa tahun 2017 di Kabupaten Polewali Mandar jumlah tenaga medis 641 orang yang melayani 422.793 penduduk, artinya 1-2 tenaga medis melayani 1000 penduduk. Tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah tenaga medis menjadi 2.725 orang, rasio tenaga medis per 1000 penduduk meningkat menjadi 2,05.

Tabel 2. 37 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dokter Umum	44	53	62	45	89
2.	Dokter Gigi	20	23	23	24	28
3.	Dokter Ahli	35	29	35	34	42
4.	Dokter PTT	-	-	-	-	-
5.	Bidan	222	239	264	214	974
6.	Bidan PTT	10	-	-	-	-
7.	Perawat	310	346	385	642	1.030
8.	Tejana Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	562
8	Jumlah tenaga Medis	641	690	769	982	2.725
10.	Jumlah Penduduk	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk		1,49	1,57	1,73	1,87	2,05

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan dasar lainnya seperti Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan desa UCI, Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, Cakupan Balita pneumonia yang ditangani.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan kinerja baik setiap tahun dari tahun 2017-2021 yaitu dari 86% menjadi 88,5%. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana pada tahun 2017 memiliki nilai 80,82% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 93,1%.

Cakupan layanan lainnya adalah cakupan layanan desa UCI yaitu desa dengan imunisasi dasar lengkap. Untuk cakupan desa *UCI (Universal Child Immunization)* di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 terdapat 78,40% desa UCI atau sebanyak 167 desa/kel. mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 38,82 desa/kel. Atau hanya 40,08%, sementara target nasional adalah 90% hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19. Untuk imunisasi campak juga mengalami penurunan dari tahun 2017-2021 dimana

pada tahun 2017 sebesar 91,30% dan pada tahun 2021 sebesar 73,8% dengan penurunan sebesar 17,50% hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19. Sementara cakupan Balita pneumonia yang ditangani memiliki nilai yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 memiliki kinerja 4,02% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 9,37% Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	86,00	82,00	86,00	81,00	88,50
2	Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80,82	76,08	83,26	82,20	93,10
3	Cakupan desa UCI	78,40	80,80	80,20	43,70	38,32
4	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	91,30	91,46	90,07	48,70	73.80
5	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	4,02	45,69	40,44	14,21	9,37

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

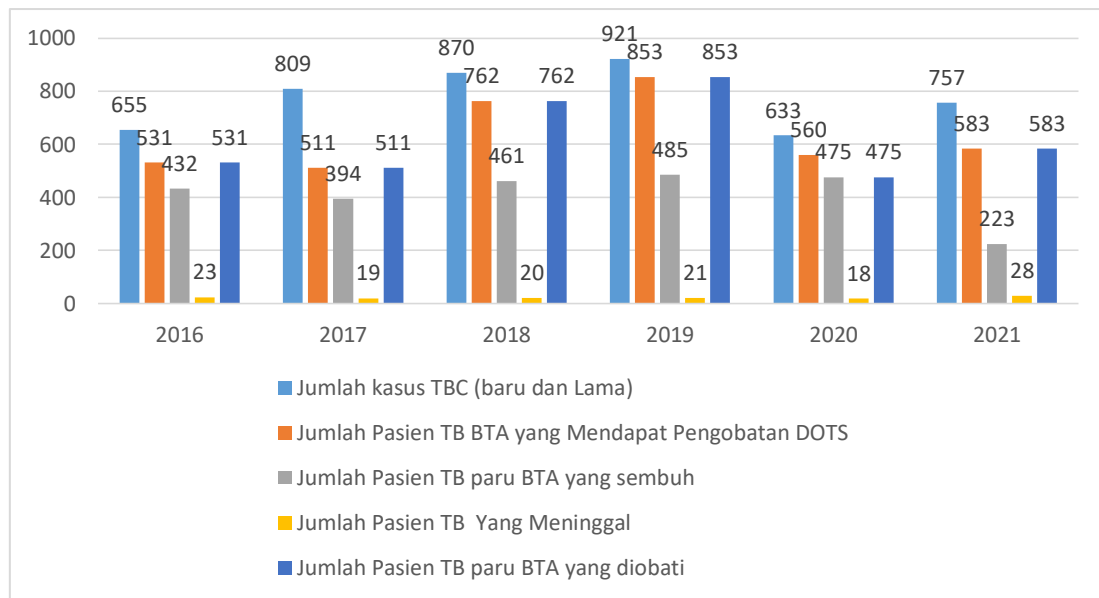
9. Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB

Jumlah Kasus TBC dan TB adalah salah satu indikator status kesehatan terhadap penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan kasus penyakit TBC dan pasien TB menggunakan kriteria identifikasi BTA (Bakteri Tahan Asam) yang mendapat pengobatan melalui strategi *DOTS (Directly, Observed, Treatment, Short Course)*, sehingga dapat diketahui kasus TBC baru dan Lama, Pasien TBC yang meninggal, TB-BTA yang mendapatkan pengobatan melalui DOTS, Pasien TB paru BTA yang sembuh, dan Pasien TB Paru yang diobati.

Jumlah kasus TBC (baru dan lama) di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 sebanyak 809 kasus dan turun menjadi 757 kasus pada tahun 2021. Jumlah pasien TB (tuberculosis) dengan identifikasi BTA (Bakteri Tahan Asam) yang mendapat pengobatan melalui strategi *DOTS (Directly, Observed, Treatment, Short Course)* pada tahun 2017 sebanyak 511 pasien. Penggunaan metode DOTS mengalami peningkatan secara signifikan dimana pada tahun

2021 sebanyak 583 pasien yang ditangani. Jumlah pasien BTA yang diobati pada tahun 2021 sebanyak 583 pasien tetapi yang sembuh justru mengalami penurunan sebanyak 223 orang.

Gambar 2. 23 Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

10. Cakupan Pelayanan kesehatan penyakit menular (DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS)

Pelayanan kesehatan penyakit menular (DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS) adalah penanganan penyakit menular yang mempunyai potensi peningkatan kasus kesakitan, penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit lainnya serta dapat menyebabkan kematian. Penyakit menular tersebut adalah penyakit DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS. Dihitung dengan melihat status pelayanan dan status kematian.

Status pelayanan selama lima tahun terakhir (2017-2021) yaitu cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang dapat ditangani 100%, Cakupan penyakit diare yang ditangani tertinggi pada tahun 2017 sebesar 80,32% dan terendah ditahun 2021 yaitu sebesar 26,09%.

Angka kesakitan malaria terendah ditahun 2017 yaitu sebesar 1.16 per 1000 penduduk dan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8.59 per seribu penduduk, tidak ditemukan kematian yang disebabkan oleh penyakit malaria.

Prevalensi HIV/AIDS dari tahun 2017-2018 sebesar 0%, namun tahun 2018-2021 ditemukan prevalensi masing-masing sebesar 25,3% (25 per 100.000 penduduk) dan 11,98% (12 per 100.000 penduduk). Secara keseluruhan cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 39 Cakupan Pelayanan kesehatan penyakit menular
(DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2	Penderita diare balita yang ditangani	80,32	73,57	72,46	39,24	26,09
3	Angka kesakitan malaria per 1.000 Penduduk	1,16	3,2	8,59	0,88	4,9
4	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,000	0,4	2,09	1,22	0,82

Sumber data : Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

11. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar untuk Bidang Kesehatan terdapat 12 Jenis Layanan Dasar. Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan capaian tertinggi yakni 100 persen dan Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan capaian terendah yakni 50 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 40 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM			
		Target	Persen	Realisasi	Persen
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	9.274	100	7.123	76,81
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	8.851	100	7.970	90,05
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	8.144	100	8.046	98,80
4	Pelayanan kesehatan Balita	41.352	100	39.978	96,68
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.202	100	12.101	50,00
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	301.074	100	157.364	52,27
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	34.141	100	19.579	57,35
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	24.966	100	17.506	70,12
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6.662	100	4.385	65,82
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	957	100	822	85,89
11	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.616	100	8.616	100
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV)	11.739	100	8.264	70,40

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah pekerjaan pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang, beberapa indikator kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan berupa:

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, Rasio panjang jalan dan jumlah penduduk serta Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik dan Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik
- Persentase rumah tinggal bersanitasi dan Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
- Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Rasio jaringan Irigasi
- Persentase penduduk berakses air minum layak dan Peta Capaian Akses Air Minum aman
- Luas areal permukiman kumuh, Dan rasio Tempat Ibadah

Indikator capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Polewali Mandar selama periode 5 Tahun 2017-2021 dapat di sajikan sebagai berikut :

1. Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dihitung berdasarkan panjang jalan secara keseluruhan dalam kondisi baik dan sedang. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yakni dari 60,34% di tahun 2017 menjadi 78,95% di tahun 2021, sebaliknya persentase panjang jalan rusak semakin menurun dari 14,00% pada tahun 2017 menjadi 4,616% pada tahun 2021 dan persentase panjang jalan dalam kondisi rusak berat mengalami hal yang sama dengan tingkat penurunan

sebesar 35,00% ditahun 2017 menjadi 21,875% pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 41 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021.

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kondisi Jalan Baik	Km	341,159	366,439	470,579	570,561	580,098
2.	Kondisi Jalan Sedang	Km	104,972	86,077	87,699	54,685	62,937
3.	Kondisi Jalan Rusak	Km	122,467	114,857	57,214	49,855	40,375
4.	Kondisi Jalan Rusak Berat	Km	306,168	307,393	259,274	199,665	191,356
5	Total	Km	874,766	874,766	874,766	874,766	874,766
Proporsi Jaringan Jalan kondisi Mantap (1/5)			51,00%	51,73%	63,82%	71,48%	73,51%

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Rasio Panjang Jalan Dan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Di Kabupaten Polewali Mandar panjang jalan kabupaten di tahun 2017 dapat melayani 2,02 km/jiwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka ditahun 2021 panjang jalan kabupaten hanya dapat melayani 1,82 Km/jiwa dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 42 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang Jalan Kabupaten	Km	874.766	874.766	874.766	874.766	874.766
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920
3.	Rasio Jalan	Km/jiwa	2,02	2,00	1,98	1,82	2,0

Sumber data: Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Total panjang jalan di Kabupaten Polewali Mandar 874,766 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yakni dari 341,159 Km di tahun 2017 menjadi 580,098 Km di tahun 2021, sedangkan panjang jalan rusak semakin menurun dari 122,467 Km pada tahun 2017 menjadi 40,375 Km pada tahun 2021 dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat mengalami hal yang

sama dengan tingkat penurunan sebesar 306,168 ditahun 2017 menjadi 191,356 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

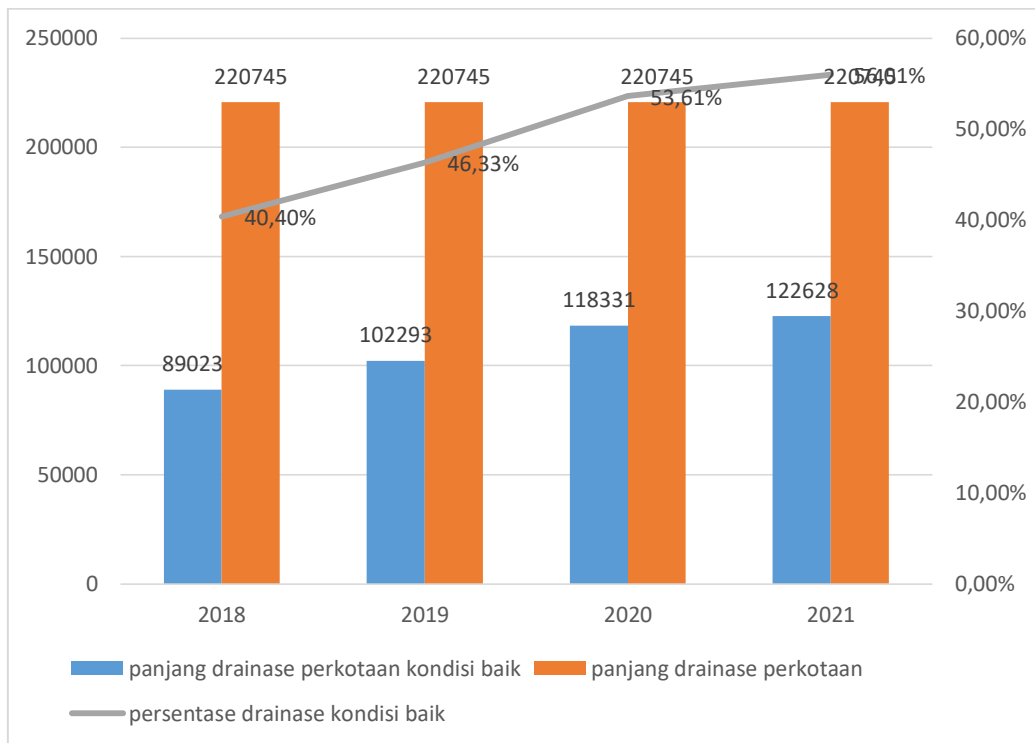
No	Uraian	Sat.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kondisi Jalan Baik	Km	341,159	366,439	470,579	570,561	580,098
2	Kondisi Jalan Sedang	Km	104,972	86,077	87,699	54,685	62,937
3	Kondisi Jalan Rusak	Km	122,467	114,857	57,214	49,855	40,375
4	Kondisi Jalan Rusak Berat	Km	306,168	307,393	259,274	199,665	191,356
Total		Km	874,766	874,766	874,766	874,766	874,766
Proporsi Jaringan Jalan kondisi Mantap (1/5)			51,00%	51,73%	63,82%	71,48%	73,51%

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Persentase Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik

Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik dari Tahun 2018-2019, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu panjang drainase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 89.203 meter menjadi 102.293 meter dengan persentase 40,40% meningkat menjadi 46,33%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar berikut :

**Gambar 2. 24 Persentase Drainase Perkotaan dalam kondisi baik
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021**



Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar , 2022

5. Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik

Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik adalah panjang dalam satuan meter dalam kawasan perkotaan dalam kondisi baik dibandingkan dengan keseluruhan panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan hasilnya dinyatakan dengan persentase.

Jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik, dari tahun 2018-2021, panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 38.375 meter menjadi 67.197 meter dengan persentase 34,76% meningkat menjadi 60,88%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 44 Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021.

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	Meter	-	38.375	53.402	66.115	67.197
2.	Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan	Meter	-	110.372	110.372	110.372	110.372
Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik		Persen		34,76	48,38	59,90	60,88

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

6. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga dalam satu periode perhitungan dan dinyatakan dalam persentase. Selama kurun waktu 2017-2021, jumlah rumah tinggal yang bersanitasi di Kabupaten Polewali Mandar meningkat cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 72.607 RT, meningkat menjadi 96.318 RT pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan dari 74,57% menjadi 92,54%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 45 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	RT	72.607	81.566	86.919	87.279	96.318
2	Jumlah rumah tangga	RT	97.368	98.677	98.929	106.340	104.084
Persentase rumah tangga berakses sanitasi		Persen	74,57	82,66	87,86	82,07	92,54

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

7. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio Bangunan ber-IMB adalah perbandingan jumlah bangunan yang ber-IMB terhadap jumlah Bangunan dalam wilayah Kabupaten Polewali

Mandar. Rasio bangunan di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, peningkatannya masih kecil, dari 5,01% pada tahun 2017 meningkat menjadi 9,42% di tahun 2021 dengan jumlah bangunan sebanyak 106.219 unit, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 46 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021.

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	5.049	6.732	7.937	9.094	10.015
2.	Jumlah bangunan	Unit	100.723	102.406	103.611	105.298	106.219
Rasio Bangunan ber-IMB		Persen	5,01	6,57	7,7	8,64	9,42

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

8. Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik

Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik adalah capaian panjang jaringan dalam kondisi baik terhadap panjang keseluruhan jaringan irigasi dan hasilnya dinyatakan dalam persentase.

Kondisi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, baik saluran primer, sekunder maupun tersier dari tahun ke tahun selama periode 2017-2021, panjang saluran dalam kondisi baik bertambah dari 70.027 meter menjadi 115.621 meter, dengan demikian persentase saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 46,37% kemudian pada tahun 2021 persentase saluran irigasi dalam kondisi baik adalah 63,22%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 47 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jaringan dalam Kondisi Baik	Meter	70.027	76.210	94.666	113.339	115.621
2	Panjang Keseluruhan Jaringan Irigasi	Meter	151.016	162.150	171.187	183.031	182,874
3	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	46,37	47,00	55,30	61,92	63,22

9. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun selama periode 2017-2021, masih cukup rendah yaitu rasio jaringan irigasi pada tahun 2017 adalah 8,25 meter perhektar, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 10,92 meter per hektar, kondisi ini disebabkan bertambahnya luas lahan sawah melalui program cetak sawah baru dari pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 48 Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jaringan Irigasi	meter	152.163	152.163	152.163	169.253	182.874
2	Luas Areal Sawah	hektar	18.453	18.490	18.509	18.509	16.738
3	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	8,25	8,23	8,22	9,14	10,92

Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

10. Perumahan

Program pengembangan perumahan terjadi karena adanya permasalahan pelayanan dimana masih banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum ditangani, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, yaitu karena adanya batasan kewenangan Pemda untuk menangani RTLH (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), alokasi anggaran yang terbatas, pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan RTLH tidak maksimal dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan. Selain faktor penghambat juga ada faktor pendorong, yaitu komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH semakin baik/ tinggi. Pada tahun 2017 jumlah RTLH di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 8.682 unit, dimana terdapat 675 unit yang tertangani atau sebesar 7,77%. Pada tahun 2018 jumlah rumah tidak layak huni yang

tertangani sebesar 1.277 unit atau sebesar 15,95%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan penanganan rumah tidak layak huni yang sangat signifikan yaitu hanya 399 unit atau sebesar 8,31%. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan refocussing penganggaran ke penanganan pandemi covid-19. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat juga berpengaruh terhadap jumlah rumah yang tidak layak huni.

Tabel 2. 49 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Database RTLH	Unit	8.682	8.007	6.730	5.899	4.799
RTLH Tertangani	Unit	675	1.277	831	1100	399
Jumlah RTLH Belum Tertangani	Unit	8.007	6.730	5.899	4.799	4.400

Sumber data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Selain itu dalam urusan perumahan masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mendorong adanya program pemberdayaan komunitas perumahan. Adanya komitmen Pemerintah Pusat melalui Program-program nasional, seperti pengurangan rumah kumuh melalui Program KOTAKU dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi kawasan melalui PISEW menjadi faktor pendorong untuk terlaksananya program ini. Jumlah perumahan yang sudah didukung dengan PSU pada tahun 2017 sebesar 90%, namun kebutuhan hunian yang meningkat menyebabkan berkembangnya jumlah perumahan yang terbangun. Sampai dengan tahun 2021 jumlah perumahan yang terbangun sebanyak 39 lokasi dengan jumlah PSU yang terbangun sebanyak 17 perumahan.

Tabel 2. 50 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PSU	9	13	14	14	17
Jumlah Perumahan	10	20	33	35	39
Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	90,0	65,0	42,4	40,0	43,6

Sumber data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

11. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Persentase Penduduk Berakses Air Mium Layak adalah Jumlah penduduk yang berakses air minum layak terhadap jumlah penduduk dalam periode tahun kerja dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2018-2019, jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak sebesar 376.742 jiwa atau sebesar 86,02% dan ditahun 2019 sebesar 80,52%.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami perbaikan kinerja dengan adanya peningkatan akses menjadi 83,78% ditahun 2020 dan 85,37% ditahun 2021, meskipun demikian data ini menunjukkan bahwa masih ada 19,78% masyarakat kita yang tidak memiliki akses air minum layak persen penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 51 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk berakses air minum layak	jiwa	346.240	376.742	356.373	400.993	410.242
2	Jumlah Penduduk	jiwa	432.692	437.662	442.574	478.534	483.920
Persentase penduduk berakses air minum layak		persen	80,02	86,02	80,52	83,78	83,78

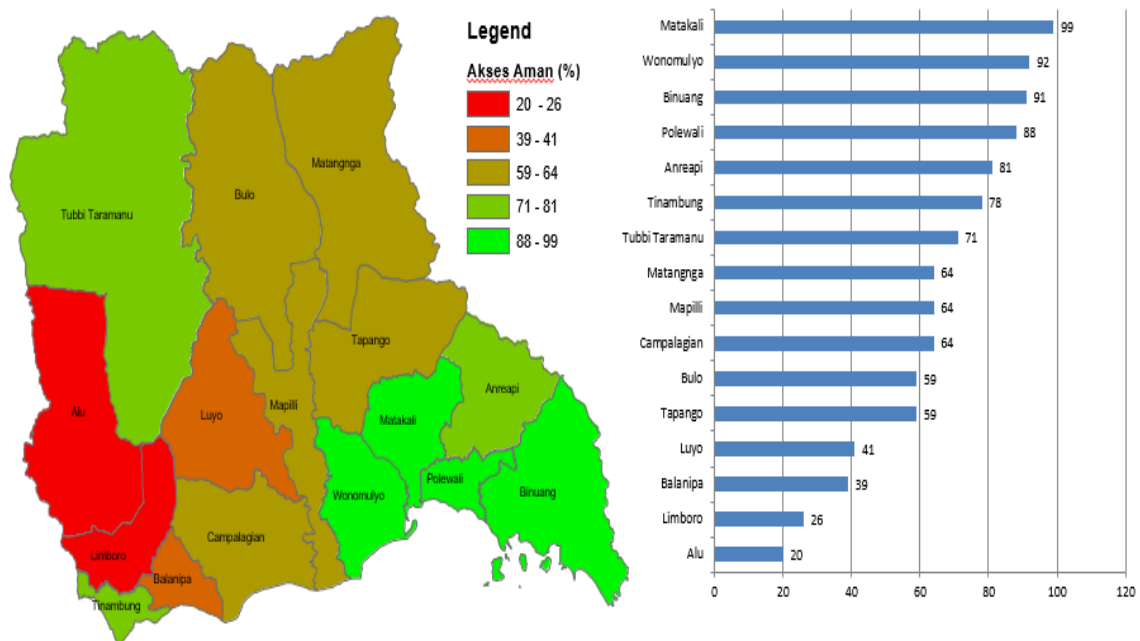
Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

12. Peta Capaian Akses Air Minum Aman

Peta capaian Akses Air Minum Aman adalah Pemetaan wilayah kecamatan terhadap capaian akses air minum dengan yang 5 kategori yaitu Tidak Sangat Aman, Tidak aman, Aman dan Cukup Aman, Sangat Aman. Hasil pemetaan capaian Akses Air Minum yang dikategorikan sangat tidak aman berada di wilayah kecamatan Limboro dan Kecamatan Alu. Kecamatan dengan Capaian Akses Air Minum dengan Kategori Sangat Aman adalah kecamatan

Matakali, Wonomulyo, Binuang, dan Polewali. Hasil pemetaan terhadap capaian akses air minum pada 16 kecamatan, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 25 Peta Capaian Akses Air Minum Aman Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021



Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

13. Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh

Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh adalah luas permukiman kumuh yang berada diwilayah perkotaan yang ditangani terhadap luas keseluruhan permukiman kumuh, hasilnya dinyatakan dalam persentase. Luas Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2017 adalah 131,48 ha dan Penanganan terhadap kawasan kumuh pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan luas 280,22 ha dengan Kawasan tersebut terbagi tiga kewenangan yaitu : Pusat 234,96 ha, Provinsi 14,96 ha dan Kabupaten 30,32 ha seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2. 52 Persentase luas areal permukiman kumuh
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

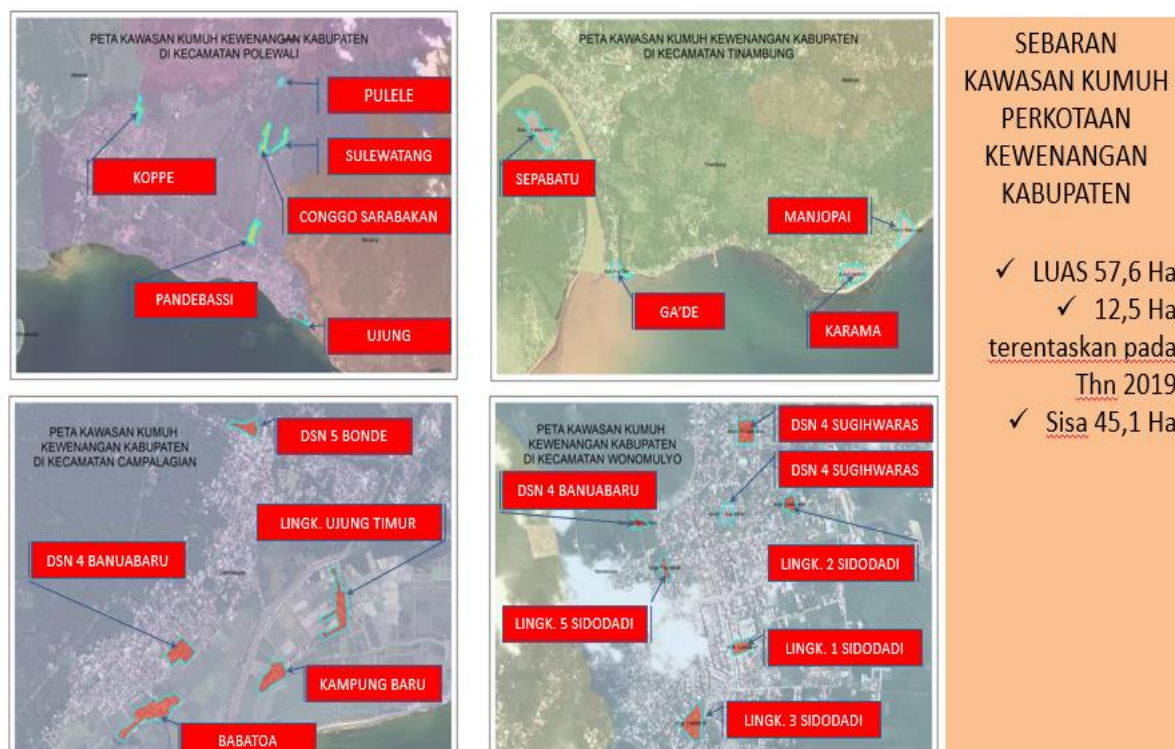
No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas permukiman kumuh yang tertangani	ha	1,91	2,28	27,5	15,42	90,08
2	Luas permukiman kumuh	ha	131,48	132,07	132,07	280,22	280,22
	Persentase luasan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani	Persen	1,45	1,73	20,82	1,81	32,14

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022

14. Peta Lokasi Kawasan Kumuh

Peta Lokasi kawasan Kumuh adalah hasil pemetaan sebaran kawasan kumuh perkotaan yang menjadi kewenangan kabupupaten. Hasil pemetaan terhadap 4 kecamatan perkotaan yaitu Kecamatan Polewali terdapat 6 lokasi, Kecamatan Tinambung terdapat 4 lokasi, Kecamatan Campalagian terdapat 5 lokasi dan Kecamatan Wonomulyo terdapat 7 lokasi. Luas secara keseluruhan lokasi yang terdapat di 4 kecamatan seluas 57,6 ha dengan 12,4 ha yang terentaskan ditahun 2019, sisa 45,1 ha yang belum dientaskan, Lokasi kawasan kumuh yang terdapat di 4 kecamatan dapat dilihat pada pemetaan berikut :

Gambar 2. 26 Peta Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021



Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

15. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten

Rasio tempat ibadah adalah perbandingan tempat ibadah terhadap jumlah penduduk. Data selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan bahwa rata-rata setiap tempat ibadah dapat melayani 237 jiwa penduduk. Mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Polewali Mandar beragama Islam, maka jumlah tempat ibadah juga didominasi oleh Masjid dan Musholla. Sampai tahun 2021 jumlah tempat ibadah sebanyak 1.146. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dan tabel berikut :

Tabel 2. 53 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat ibadah	unit	1.063	1.003	1.003	1.003	1.146
2.	Jumlah penduduk	jiwa	432.692	437.662	442.576	478.534	483.920

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	persen	2,46	2,29	2,27	2,10	2,37
---	--------	------	------	------	------	------

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

16. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar memiliki empat unsur jenis layanan dasar diantaranya Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari dengan capaian sebesar 61,24 persen, untuk penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 60,00 persen, dan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni Bagi Korban Bencana sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM			
		Target	Persen	Realisasi	Persen
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	12.125	100	7.425	61,24
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.250	100	750	60,00
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2	100	2	100
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-

Sumber data : Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, 2023

d. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diukur dengan 3 indikator kinerja yaitu 1) cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Ketenteraman; 2) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); dan 3) Persentase Penegakan PERDA Masing-masing dapat dijelaskan berikut :

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Pelayanan bencana kebakaran wilayah adalah jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran pada unit pelayanan kebakaran. Dihitung dengan cakupan luas wilayah manajemen kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam satuan hektar. Hasilnya selama tahun 2017-2021, cakupan pelayanan bencana kebakaran relatif sama sebesar 59%, untuk wilayah pengunungan karena sulit dijangkau dan masih tercatat sebagai bukan jangkauan wilayah dengan manajemen kebakaran. Secara keseluruhan Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah di kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 55 Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Sat	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	ha	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137
2.	Luas Wilayah kabupaten	ha	202.230	202.230	202.230	202.230	202.230
Cakupan pelayanan bencana		persen	59	59	59	59	59

No.	Uraian	Sat	2017	2018	2019	2020	2021
	kebakaran kabupaten/kota						

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah waktu tanggap yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kebakaran yaitu maksimal 15 menit dalam wilayah manajemen kebakaran.

Cakupannya dihitung dengan jumlah kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit terhadap jumlah keseluruhan kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran. Hasilnya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir 2017-2021 mengalami penurunan yang dapat ditangani 86,3% dilihat dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Hal ini dikarenakan lokasi kebakaran lahan yang sulit dijangkau oleh kendaraan Pemadam Kebakaran. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 56 Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kali	40	45	73	20	19
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	kali	40	45	73	23	22
Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK		persen	100	100	100	86,9	86,3

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan peraturan daerah adalah tindak lanjut pemberlakuan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat Polewali Mandar, dihitung

dengan jumlah penyelesaian penegakan peraturan daerah terhadap jumlah keseluruhan pelanggaran peraturan daerah. Indikator keberhasilan jika seluruh kasus pelanggaran dapat diselesaikan (Target 100%).

Hasilnya selama lima Tahun 2017-2021 penyelesaian pelanggaran peraturan daerah mengalami Fluktuasi, dimana pada tahun 2021 hanya dapat diselesaikan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 73%, penyebabnya partisipasi para pelanggar dalam menyelesaikan kasusnya masih rendah. Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 57 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	kali	302	174	285	55	341
2.	Jumlah Pelanggaran PERDA	kali	305	174	380	64	467
Persentase Penegakan PERDA		persen	99	100	75	86	73

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum dan Linmas

Pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Aspek Standar Pelayanan Minimal memiliki lima jenis layanan dasar diantaranya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan keseluruhan capaian mencapai 100 persen dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM			
		Target	Persen	Realisasi	Persen
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.042 Jiwa	100	1.042 Jiwa	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	30 Jiwa	100	30 Jiwa	100

3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Jiwa	100	30 Jiwa	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	217 KK	100	217 KK	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	230 Jiwa	100	230 Jiwa	100

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2023

e. Bidang Urusan Sosial

Bidang Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, kinerja pembangunannya dapat dilihat dari Capaian persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan persentase PMKS yang ditangani, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial adalah seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, sehingga oleh karenanya perlu mendapat bantuan sosial.

Selama lima tahun terakhir 2017-2021, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 13,16% tetapi ditahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 42,60% hal ini terjadi karena besarnya anggaran dalam mencakup keseluruhan peserta PMKS. Capaian pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 59 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	jiwa	1.873	854	985	612	1.982
2.	Jumlah PMKS yang Seharusnya menerima bantuan	jiwa	5.237	5.164	4.652	4.652	4.652

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	35,76	16,54	21,17	13,16	42,60
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Persentase PMKS yang tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani adalah seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya (Jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, sehingga oleh karenanya perlu mendapatkan penanganan. Indikator adalah persentase jumlah PMKS yang tertangani terhadap keseluruhan jumlah PMKS yang ada. Hasilnya selama lima tahun terakhir persentase tertinggi didapat di tahun terakhir 2021 yaitu sebesar 42,60% dan terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 13,16%. Capaian secara keseluruhan jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 60 Persentase PMKS yang tertangani
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PMKS tertangani	Jiwa	1.873	854	985	612	1.982
2.	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	5.237	5.164	4.652	4.652	4.652
	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	35,76	16,54	21,17	13,16	42,60

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memiliki lima jenis layanan dasar yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana dengan realisasi secara keseluruhan mencapai 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM			
		Target	Persen	Realisasi	Persen
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	40 orang	100	40 orang	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	16 orang	100	16 orang	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	29 orang	100	29 orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	150 paket	100	150 paket	100

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, 2023

2.3.2 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

a. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase tenaga kerja yang terserap, Keselamatan dan Perlindungan Kerja, merupakan indikator kinerja Bidang Tenaga Kerja dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja

Dalam lima tahun terakhir, Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuatif. Angka TPAK sebesar 66,63% pada tahun 2017 menjadi 71,39% pada tahun 2020 namun mengalami penurunan menjadi 68,98% pada tahu 2021. Kecenderungan ini secara umum menunjukkan semakin banyaknya proporsi Angkatan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar yang memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian

Kabupaten Polewali Mandar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar dibawah.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sejak tahun 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pola yang fluktuatif. TPT pada tahun 2017 sebesar 3,94% dan kemudian menurun menjadi 2,97% pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 sebesar 3,38%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Tren tingkat pengangguran terbuka sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas, sejalan dengan tren peningkatan jumlah pencari kerja dan penurunan jumlah pencari kerja yang diserap lapangan kerja. Dalam artian jumlah pencari kerja yang meningkat setiap tahun disebabkan karena rata-rata jumlah penduduk usia angkatan kerja semakin bertambah sementara daya serap lapangan pekerjaan yang terlihat, belum mampu mengakomodir.

3. Persentase tenaga kerja yang terserap

Tenaga kerja yang diserap adalah pencari kerja terserap terhadap pencari kerja terdaftar dalam pekerjaan menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat. Indikator keberhasilannya adalah 100% jumlah pencari kerja yang terdapat dapat diserap dalam dunia usaha barang dan jasa. Hasilnya selama lima tahun terakhir 2017-2021 menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah tenaga kerja laki-laki yang terserap. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja laki-laki yang terserap sebanyak 124 orang dari jumlah pencari kerja sebanyak 824 orang atau sebesar 15,05%. Di tahun 2021 jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 495 orang sementara yang terserap hanya 16 orang atau 3,23%. Hal ini berbeda dengan kondisi tenaga kerja perempuan dimana pada tahun 2017 sebesar 10,98% yang terserap. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 57,63% dan menurun dari tahun 2019-2021. Data keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Orang	824	1.293	865	531	314	272	283	233	495	189
2	Jumlah Pencari Kerja Terserap	Orang	124	142	124	306	140	62	64	94	16	37
Persentase tenaga kerja yang terserap		Persen	15,05	10,98	14,34	57,63	44,59	22,79	22,61	40,34	3,23	19,57

Sumber data : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Jumlah Penganggur

Berdasarkan data statistik tercatat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 204.236 meningkat hampir 10% pada tahun 2021 yaitu sebesar 226.409 orang. Pada tabel berikut menunjukkan jumlah yang bekerja mengalami peningkatan, meskipun demikian jumlah penganggur juga meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2021 jumlah

penganggur sebanyak 7.644 orang meningkat sebanyak 5% dari jumlah penganggur tahun 2020. Sementara peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2020 meningkat sekitar 1,2% pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 63 Jumlah Penganggur
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	204.236	204.060	214.740	231.686	226.409
2.	Jumlah Bekerja	Orang	196.196	197.589	207.885	224.388	218.765
3.	Jumlah Penganggur	Orang	8.040	6.471	6.855	7.298	7.644

Sumber data: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

5. Keselamatan dan Perlindungan Kerja

Keselamatan dan perlindungan kerja adalah bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjamin keselamatan dan perlindungan dari kebutuhan kerja dan hasil kerja yang diperoleh yang menekankan pada keadilan dan kesejahteraan pekerja. Indikatornya dihitung dengan menjumlahkan perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap jumlah seluruh perusahaan yang ada di suatu wilayah. Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan K3 di Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir 2017-2021 tertinggi ditahun 2017 yaitu dari 235 perusahaan telah 100% menerapkan K3, Persentase terendah terjadi ditahun 2021 yaitu sebesar 33,82%. Data capaian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

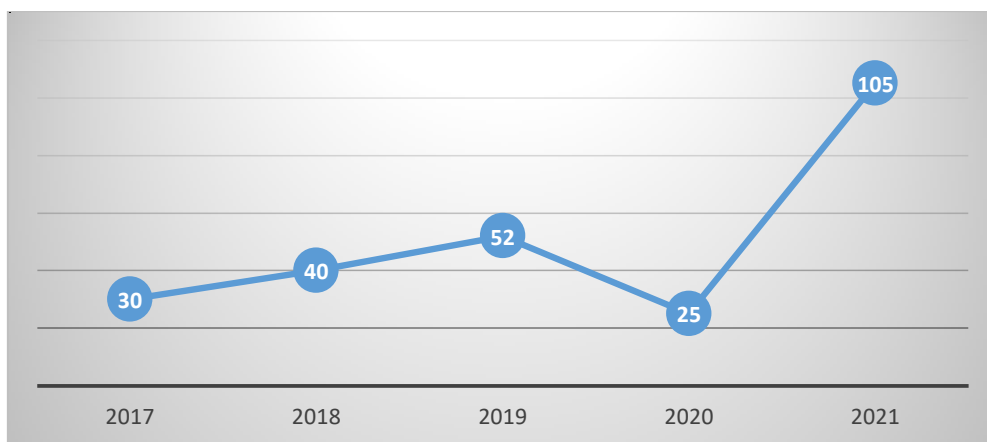
Tabel 2. 64 Keselamatan dan Perlindungan Kerja
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	235	235	358	358	183
2.	Jumlah Perusahaan	235	351	553	553	541
Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan K3		100,00	66,95	64,74	64,74	33,82

Sumber data : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan kerja di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 30 orang pada tahun 2017. Perkembangan selama 2017-2019 meningkat secara signifikan hingga mencapai 52 orang di tahun 2019, kemudian anjlok pada tahun 2020 yang hanya 25 orang. Namun adanya berbagai kebijakan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja pada tahun 2021 menjadi 105 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 28 Jumlah Tenaga Kerja yang sudah mendapatkan Pelatihan Kerja Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Bidang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

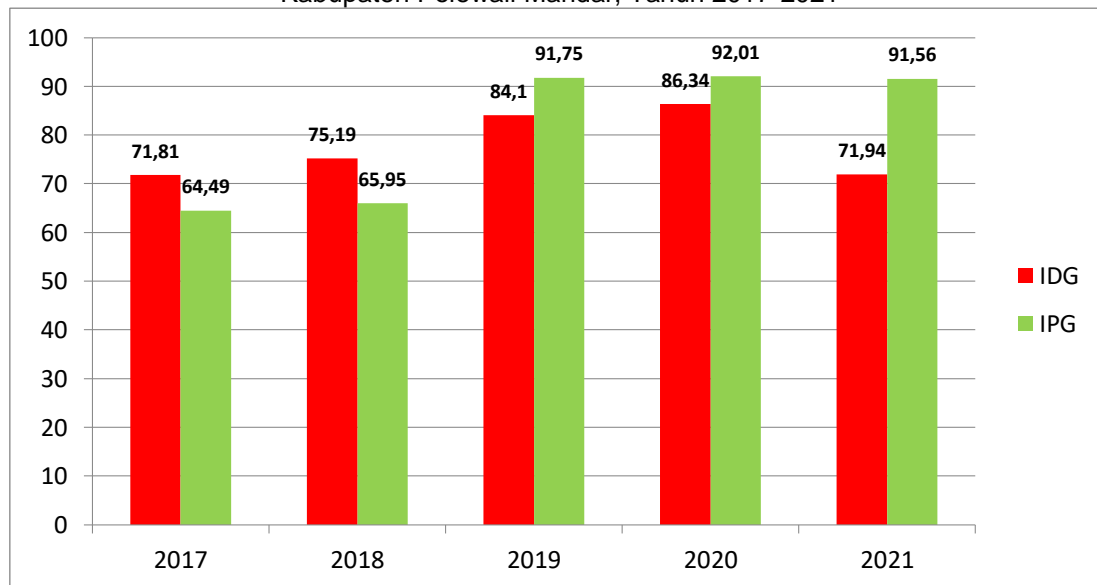
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah Indikator kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan sejauhmana perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah hitungan capaian kemampuan dasar manusia atau Indeks Pembangunan Manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender guna mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Capaian IDG Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2017-2021 berfluktuatif capaian terendah ditahun 2017 yaitu sebesar 71,81%, capaian tertinggi ditahun 2020 yaitu sebesar 86,34% dan

kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 71,94%. Capaian IPG juga berfluktuatif selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2017 yaitu sebesar 64,49%, dan capaian tahun 2020 naik menjadi 92,01%. Secara keseluruhan capaian Indeks IDG dan IPG selama lima tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai dalam pasal 1, UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus baik secara absolut maupun relatif, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT semakin meningkat. Jumlah kasus KDRT meningkat selama periode 2017-2021, yaitu dari 6 kasus tahun 2017 menjadi 63 kasus tahun 2019, ditahun 2017 menjadi 6 kasus, namun mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018 menjadi 50 kasus dan ditahun 2019 63 kasus. Namun pada tahun 2021 menurun secara signifikan menjadi 9 kasus. Hal ini

sejalan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 65 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	6	50	63	3	9
2.	Jumlah Rumah tangga	97.368	98.677	98.929	106.341	106.341
Rasio KDRT terhadap Jumlah RT		0,0001	0,0005	0,0006	0,00003	0,0084

Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar, 2022

c. Bidang Urusan Pangan;

Skor Pola Pangan harapan, Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan adalah indikator Kinerja bidang Pangan dalam urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan harapan

Kualitas konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Berdasarkan data pada periode 2017 sampai dengan tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dimulai dari 79,02% tahun 2017 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 sebesar 86,40%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,6% atau menjadi 77,80%, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 10,07% atau sebesar 87,87%. Berkenaan dengan hal tersebut, penganeekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 66 Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,02	0,69	1,1	0,8	1,02
3	Pangan hewani	20,2	22,74	21,8	14,8	24
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	4	4,6
5	Buah/ Biji berminyak	0,68	1	0,9	0,7	1
6	Kacang-kacangan	3,56	5,02	5,9	2,7	6,8
7	Gula	0,84	1,31	1,1	1,8	1,14
8	Sayur dan Buah	22,72	25,56	25,6	28,2	24,3
Total		79,02	86,32	86,4	77,8	87,87

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan

Berdasarkan data yang diolah oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan menggunakan 3 (tiga) aspek indikator utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kecamatan Balanipa, Tubbi Taramanu, Alu dan Bulu status kewaspadaan Gizi dan Pangan masuk dalam kategori “waspada”, namun ditahun tahun 2021 mengalami penurunan status “waspada” dari 3 (tiga) kecamatan ditahun 2020 menjadi 1 (satu) kecamatan ditahun 2021 dan terdapat 15 (lima Belas) kecamatan masuk kategori “Aman”. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 67 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tinambung	Waspada	Aman	Aman	Aman	Aman
2	Balanipa	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
3	Limboro	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Aman
4	Tubbi Taramanu	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Aman
5	Alu	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Aman

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Campalagian	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
7	Luyo	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
8	Wonomulyo	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
9	Mapilli	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
10	Tapango	<i>Waspada</i>	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
11	Matakali	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
12	Polewali	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
13	Binuang	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
14	Anreapi	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
15	Matangnga	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>	<i>Aman</i>
16	Bulo	<i>Waspada</i>	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>	<i>Waspada</i>	<i>Aman</i>

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

d. Bidang Urusan Pertanahan;

Bidang Pertanahan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dilakukan dengan penertiban administrasi pertanahan melalui pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatannya pertanahan adalah penerbitan Sertifikat Hak milik, Sertifikat Hak Guna Pakai, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Tanah yang ditindaklanjuti.

Hasil kegiatan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dari jumlah tanah yang sudah bersertifikat sejak tahun 2017 sebanyak 6.669 sertifikat hak milik. Setiap tahun jumlah tanah yang bersertifikat hak milik mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2020-2021 yang terbit sebanyak 6.622 sertifikat hak milik, namun tidak berarti terjadi penurunan hasil tertib administrasi pertanahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 68 Jumlah Sertifikat dan Konflik Tanah yang ditindaklanjuti
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Sertifikat Hak Milik	Bidang	6.669	8.255	9.841	6.622	6.622
2	Sertifikat Hak Guna Pakai	Bidang	12	3	3	17	17
3	Sertifikat Hak Guna Bangunan	Bidang	920	1.208	1.496	592	592
4	Konflik Tanah yang ditindaklanjuti	Bidang	-	5	7	10	10

Sumber data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

e. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan, Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani, Cakupan Layanan Persampahan adalah Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup dalam urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologi, merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah, tumbuhan dan tanaman hijau yang ada dapat menyerap kadar karbondioksida (CO_2) di udara serta menghasilkan oksigen (O_2), menurunkan suhu udara dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta menyerap polusi dan meredam kebisingan. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai wadah bersosialisasi bagi warga, tempat berkumpul, pusat evakuasi jika terjadi bencana alam, juga sebagai tempat bermain bagi anak-anak yang semakin sulit bagi mereka temukan terutama di wilayah perkotaan.

Rasio ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat sedikit, namun secara fungsional, masih sangat banyak tanaman atau tumbuhan hijau di kawasan perkotaan yang dapat menggantikan fungsi RTH. Rasio RTH di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 69 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	ha	135,36	135,36	169,03	169,03	169,03
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	ha	433	433	433	433	433
3	Rasio RTH	persen	0,313	0,313	0,39	0,39	0,39

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani

Jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan volume sampah yang dihasilkan perhari yaitu 2,5 l/orang. Pada tahun 2017 jumlah timbulan sampah sebesar 394.831 m³. Dari jumlah tersebut sampah yang tertangani sebesar 152.013 m³ atau sebesar 38,50%. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 menjadi 57,50%. Beberapa TPS3R yang terbangun dan adanya peningkatan armada angkutan sampah memberikan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat pada capaian tahun 2020 yang mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 57,50% sampah tertangani. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 30,41%. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya tampung Tempat Pengelolaan Akhir Sampah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 70 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sampah tertangani	m ³	152.013	185.959	204.58	208.748	141.396
Jumlah timbulan sampah	m ³	394.831	394.833	399.327	363.041	464.890
Persentase sampah tertangani	persen	38,50	47,10	51,23	57,50	30,41

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Cakupan Layanan Persampahan

Layanan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar belum mencakup seluruh wilayah permukiman, baru melayani sebagian wilayah perkotaan di kecamatan yang terletak di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Hal disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Persentase cakupan layanan persampahan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah meningkat dari 40,62% di tahun 2017 menjadi 52,61% di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 71 Cakupan Layanan Persampahan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Area Pelayanan	ha	2.757,93	2.790,50	2.823,07	2.823,07	3.569,08
2	Luas Area Terbangun	ha	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63	6.789,63
3	Persentase cakupan layanan	persen	40,62	41,1	41,58	41,58	52,61

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

f. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Administasi kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan dan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, tercatat pada tahun 2017 Jumlah penduduk sebanyak 516.537 jiwa meningkat menjadi 486.236 jiwa pada tahun 2021. Demikian juga untuk Persentase ketersediaan data base kependudukan, Persentase *enrollment* KTP-e, dan Persentase kepemilikan kartu keluarga serta Persentase kepemilikan akta kelahiran mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 72 Jumlah Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	516.537	521.691	522.738	484.112	486.236

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	:						
	a. Laki-laki	Jiwa	258.234	261.647	262.429	241.400	242.917
		Persen	49,99	50,15	50,20	49,86	49,96
	b. Perempuan	Jiwa	258.303	260.044	260.309	242.712	243.319
		Persen	50,01	49,85	49,79	50,14	50,04
2	Persentase ketersediaan data base kependudukan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase enrolment KTP-e	Persen	80,97	86,6	89,49	94,13	97,02
4	Persentase kepemilikan kartu keluarga	Persen	100	100	96,98	90,74	96,09
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	81,47	76,48	89,47	88,43	90,36

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, 2022

g. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indikator bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa yang lebih dititik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Polewali Mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut :

Tabel 2. 73 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan	167	167	167	167	167
2	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	92	93	86	86	86
3	Jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG)	5	5	6	9	10
4	Jumlah BUMDES	-	143	144	144	144

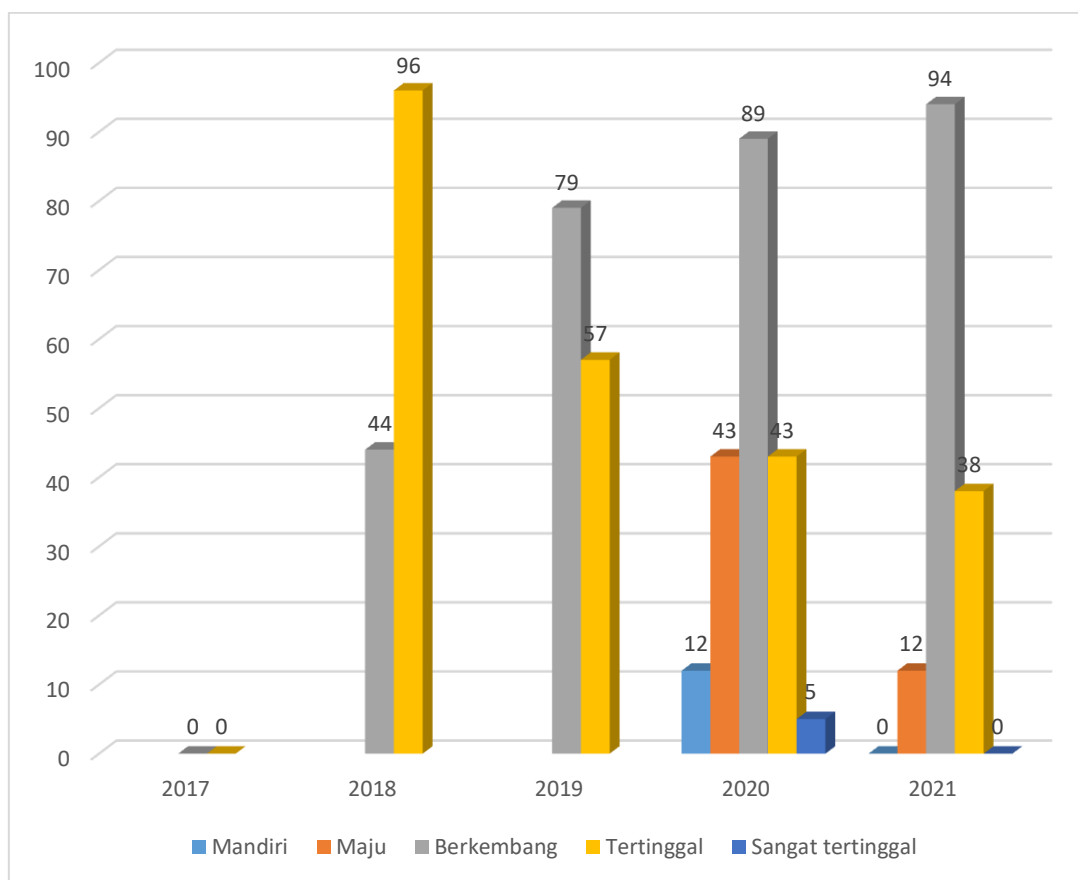
Sumber Data : DPMD Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Pengukuran perkembangan status kemandirian desa melalui analisa dan nilai komposit indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi pemeritahan desa. Status Desa Berdasarkan IDM dikategorikan dengan Status Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Hasil status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir 2017-2021 dari 144 desa menunjukkan peningkatan status Desa tiap tahunnya. Sejak tahun 2017 sampai 2019 sudah tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal, namun ditahun 2020 terjadi penurunan status desa sangat tertinggal sebanyak 5 (lima) tetapi ditahun 2021 kembali mengalami peningkatan status dari sangat tertinggal, pada tahun 2021 desa berkembang mengalami peningkatan sebanyak 5 (lima) dengan status desa maju yang mengalami penurunan sebanyak 31 (tiga puluh satu) ditahun 2021. Secara keseluruhan capaian Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2. 30 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**



Sumber Data : DPMD Kabupaten Polewali Mandar, 2022

h. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan, Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Persentase Peserta KB Aktif sebagai indikator kinerja bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana dalam urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan

Penyuluh Keluarga berencana (KB) adalah Pengawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang diberi tugas tanggung jawab dan kewenangan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana.

Jumlah tenaga penyuluh KB di Kabupaten Polewali Mandar telah terdistribusi pada di 16 kecamatan. Pada tahun 2019 sebanyak 19 orang ditahun 2019 menjadi 20 orang. Jumlah Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)/ Koordinator sebanyak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 74 Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021

No.	Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah PPLKB/ Koordinator	Jumlah PKB/PLKB	Jumlah PPLKB/ Koordinator	Jumlah PKB/PLKB	Jumlah PPLKB/ Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB	Jumlah PPLKB/ Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB	Jumlah PPLKB/ Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB
1	Tinambung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Balanipa	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1
3	Limboro	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
4	Tubbi Taramanu	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
5	Alu	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
6	Campalagian	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
7	Luyo	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
8	Wonomulyo	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
9	Mapilli	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1
10	Tapango	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
11	Matakali	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
12	Polewali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Binuang	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1
14	Anreapi	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
15	Matangnga	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
16	Bulo	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Total		16	4	16	4	16	5	16	3	16	7

Sumber Data : Dinas P3P2AKB Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Persentase Peserta KB Aktif

Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif adalah Keluarga dengan pasangan usia subur yang aktif dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Indikator keberhasilan dengan melihat peningkatan jumlah peserta pasangan usia subur dengan penggunaan alat kontrasepsi KB secara aktif dibanding dengan keseluruhan pasangan usia subur yang ada dalam satu tahun diwilayah Kabupaten Polewali Mandar. Persentase hasil peserta KB aktif selama lima Tahun 2017-2021, terendah ditahun 2017 yaitu sebesar 57,36%

dan tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 81,38%, Hasil capaian secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 75 Persentase Peserta KB Aktif
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB Aktif	orang	37.139	43.973	50.970	49.142	63.926
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	orang	64.743	65.998	67.592	66.635	78.566
3	Persentase Peserta KB Aktif	persen	57,36	66,63	75,40	73,75	81,38

Sumber Data : Dinas P3P2AKB Kabupaten Polewali Mandar, 2022

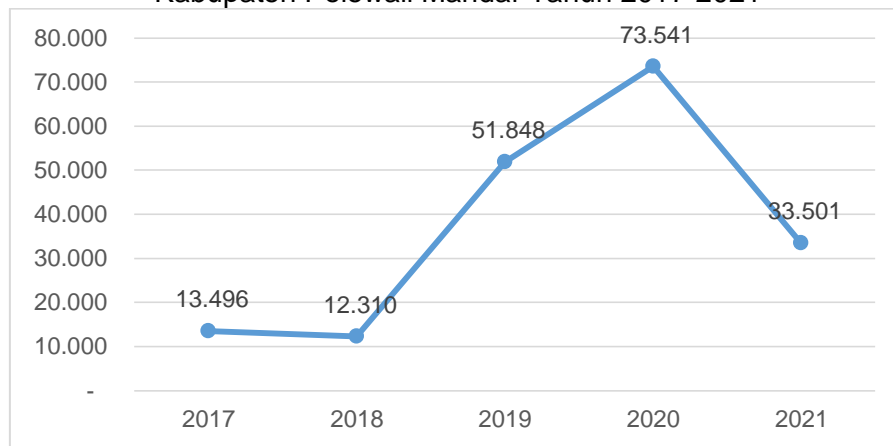
i. Bidang Urusan Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, Rasio Ijin Trayek, dan Jumlah Uji Kir Angkutan Umum serta Angka Kecelakaan lalu lintas adalah Indikator Kinerja bidang Perhubungan dalam urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Bus)

Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar semakin menurun, kondisi ini dapat dilihat dari data jumlah penumpang angkutan umum dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 meningkat dari 7.850 orang di tahun 2017 menjadi 73.541 orang di tahun 2020. Namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 54,45% dari 73.541 orang menjadi 33.501 orang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 31 Penumpang angkutan Umum
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021



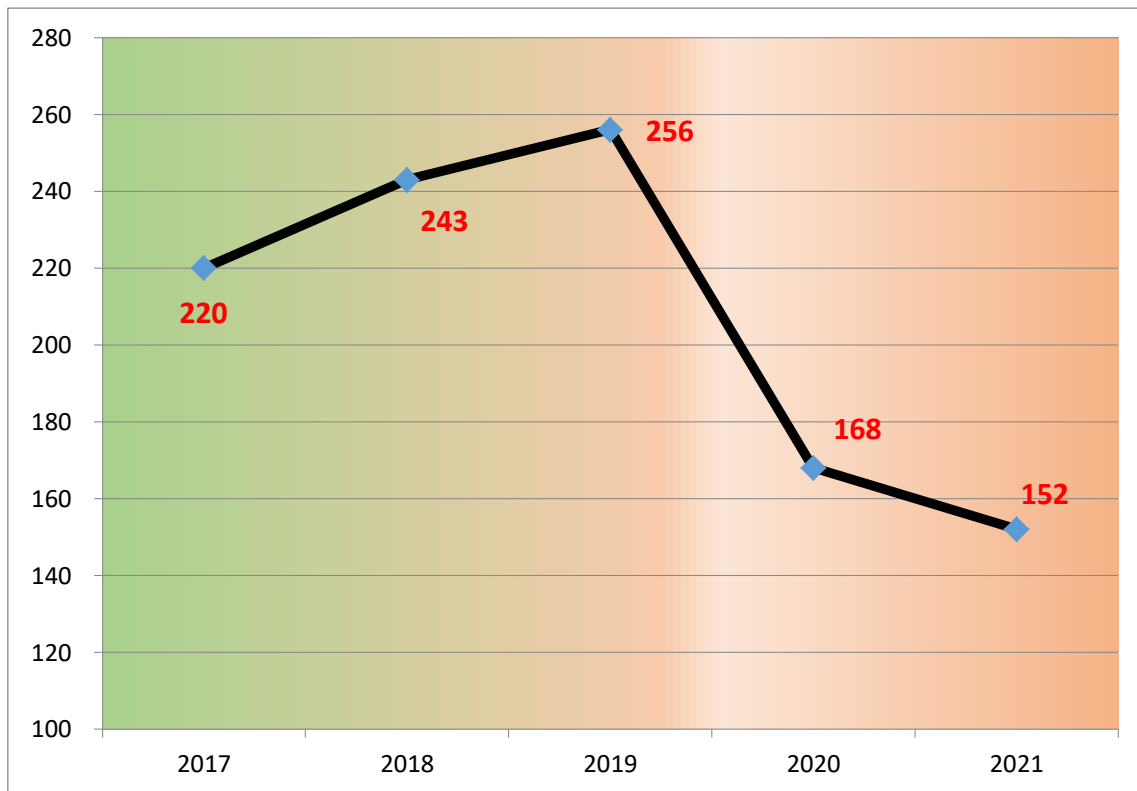
Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) serta kerugian harta benda.

Angka kecelakaan lalulintas di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2017 terjadi 220 kali kejadian kecelakaan. Angka kecelakaan ini terus mengalami peningkatan pertahunnya dan di tahun 2019 terjadi sebanyak 256 kali kejadian. Namun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang signifikan yakni menjadi 152 kali kejadian pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 32 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Polres Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Rasio Izin Trayek

Izin trayek angkutan umum jalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikelompokkan atas angkutan trayek tetap dan teratur dan angkutan tidak dalam trayek yang dikenal sebagai izin operasi. Dapat dilihat rasio izin trayek pada tabel berikut :

Tabel 2. 76 Rasio Izin Trayek terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Unit	1.371	25	38	5	57
Jumlah penduduk	Jiwa	432.692	437.662	442.576	442.576	483.920
Rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk	Unit / Jiwa	0,0032	0,00006	0,00006	0,00001	0,00012

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kir adalah uji kelayakan kendaraan bermotor roda empat, gunanya untuk menilai apakah komponen-komponen kendaraan bermotor tersebut masih layak

untuk berada di jalan raya. Jumlah kendaraan umum di Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan uji kir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 77 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2021
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	1.849	2.059	2.332	2.308	2.874
Jumlah Kendaraan Roda Empat	Unit	4.060	5.091	4.757	4.757	3.571
Persentase Jumlah Uji Kir dengan Jumlah kendaraan	Persen	46,00	40,00	49,02	48.52	80,48

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

j. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika;

Jaringan Komunikasi, Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal, Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal adalah indikator kinerja program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informasi yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi adalah serangkaian interkoneksi antar teknologi yang saling berhubungan satu dengan lainnya, diantaranya jaringan telepon seluler dan jaringan telepon stasioner. Selama periode 2017-2021, jumlah jaringan telepon stasioner tidak bertambah, sedangkan jumlah jaringan telepon seluler bertambah pada tahun 2020 sama dengan data tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 78 Jaringan Komunikasi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jaringan Telepon Seluler	7	5	7	7	7
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	1	1	1	1	1
3	Total Jaringan Komunikasi	8	6	8	8	8

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar (koran) yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 10 jenis, dimana 5 jenis merupakan koran terbitan nasional dan 5 jenis lainnya merupakan koran terbitan lokal. Jenis koran terbitan nasional yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain Harian Fajar, Kompas, Tempo, Tribun Timur dan sindo. Sedangkan koran terbitan lokal yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain, Harian Radar Sulbar, Sulbar Ekspres, Sulbar pos, Koran mandar dan Polewali pos Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 79 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	5	4	5	5	5
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	2	3	5	5	5
3	Total Jenis Surat Kabar	7	7	10	10	10

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Penyiaran Radio/TV Lokal merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yaitu mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Jumlah penyiaran radio dan televisi di Kabupaten Polewali Mandar meningkat dari 16 unit pada tahun 2017 menjadi 20 unit pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 80 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	2	3	2	1	1
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	-	-	-	1	1
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	11	12	15	17	17
5	Total Penyiaran Radio/TV Lokal	14	16	18	20	20

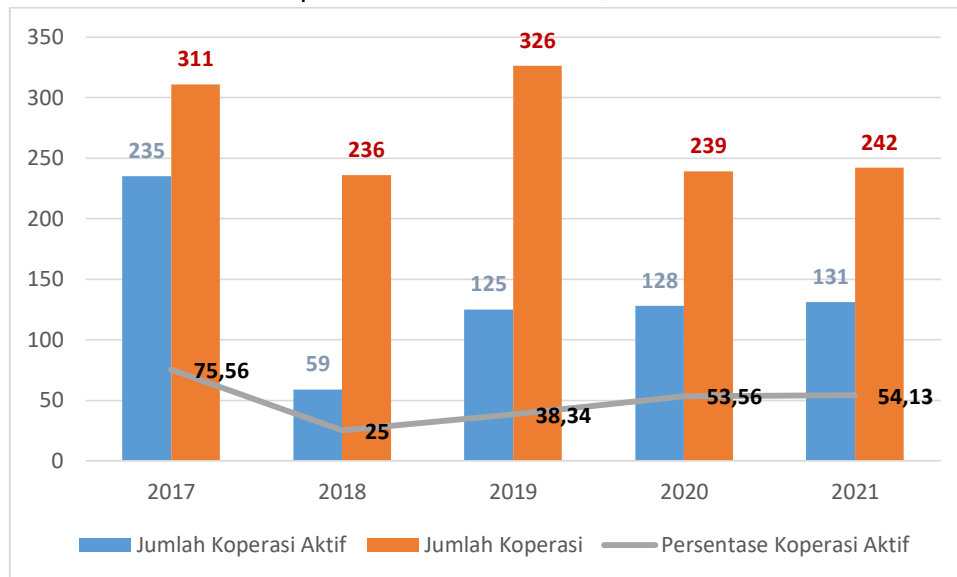
Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2022

k. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Persentase jumlah koperasi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase jumlah

koperasi aktif sebesar 75,56% dan kemudian menurun menjadi 54,13% unit pada tahun 2021. Namun tidak semua koperasi dalam keadaan aktif dan memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.33 Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2022

I. Bidang Urusan Penanaman Modal

Jumlah PMA dan PMDN, jenis dan jumlah izin yang dilayani adalah Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah PMA dan PMDN

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi perekonomian daerah. Pada tahun 2017 jumlah investasi PMDN sebesar Rp148.306.017.594 meningkat menjadi Rp494.552.801.000 tahun 2019. Namun dengan adanya Covid-19 mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 81 Jumlah PMA dan PMDN
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Investasi Penanaman Modal Asing (Rp)	-	-	-	-	-
2.	Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (Rp)	148.306.017.594	184.427.021.413	494.552.801.000	78.957.486.000	79.507/530.000
Total (Rp)		148.306.017.594	184.427.021.413	494.552.801.000	78.957.486.000	79.507.530.000

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani

Jenis dan jumlah izin yang dilayani adalah layanan jenis dan izin yang dilakukan secara terpadu dengan layanan satu pintu dengan Perangkat Daerah Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama Tahun 2017-2021 masih didominasi izin mendirikan bangunan, SIUP, izin praktek perawat dan izin penelitian, total secara izin tertinggi ditahun 2018 yaitu sebanyak 4.990 dan mengalami penurunan menjadi 3.738 pada tahun 2020 menjadi 2.424. Di tahun 2021 terdapat penambahan jenis item Izin sebanyak 9 jenis, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 82 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No	Jenis Izin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	IGTU	429	422	242	-	-
2	IUJK	42	32	59	46	3
3	SIUP	421	422	328	473	370
4	TDP	421	405	58	-	-
5	SIUI	28	19	10	5	5
6	TDG	1	15	10	7	16
7	IMB	1602	1683	1205	1035	1009
8	Izin Pelataran	0	0	-	-	-
9	Izin Reklame	0	0	-	-	-
10	I. Trayek (Karwas))	40	26	3	-	-
11	SIUSP/TDUP	5	18	-	-	14
12	Izin Praktek Dokter	82	89	68	67	138
13	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	16	12	-
14	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	15	16	-
15	Izin Praktek Bidan	67	415	126	109	307

No	Jenis Izin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
16	Izin Praktek Perawat	116	430	154	114	175
17	Izin Usaha Sarana Pariwisata	-	-	-	-	-
18	Izin Apotik	22	12	16	19	23
19	Izin Toko Obat	1	2	-	1	1
20	Izin Pendirian Apoteker	-	-	-	-	-
21	TDU/Penggilingan Padi	20	6	8	2	1
22	Izin Penelitian	651	733	1142	379	896
23	Izin Prinsip	18	28	-	-	-
24	Izin Lokasi	10	2	13	3	1
25	Izin Lingkungan	21	16	22	7	3
26	IUSP	2	7	4	1	-
27	Izin Operasional PAUD/TK	3	102	118	14	-
28	Izin Operasional .PKBM,TBM & LKP	2	14	12	7	-
29	Izin Pendirian Klinik	77	2	3	-	-
30	Izin Mendirikan Rumah Sakit	27	0	-	-	-
31	Izin Terapis Gigi & Mulut	6	3	4	9	-
32	SIP – ATML	8	20	7	7	23
33	Izin Kerja Tehnis Farmasi	2	8	7	4	26
34	Izin Optik	-	2	-	-	-
35	Izin K. REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	-	1	2	-	-
36	Izin Praktik Tenaga Giizi	-	4	3	-	3
37	I. Praktek Radiografer	-	6	6	-	4
38	Izin Operasional. SD DAN SMP	-	1	1	-	
39	Izin Apoteker	-	33	30	30	68
40	Izin Operasional Klinik	-	3	3	-	3
41	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	-	9	9	1	-
42	TDI	-	-	21	-	2
43	Izin Laboratorium Klinik	-	-	1	-	-
44	Izin Praktik Fisioterafis	-	-	3	-	3
45	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatawan	-	-	1	-	-
46	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan Minum	-	-	5	5	-
47	Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi	-	-	3	4	-
48	Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3	-	-	-	1	-
49	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	-	-	-	7	-
50	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	-	-	-	3	-
51	Izin Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	-	-	-	29	-
52	Izin Pendirian Puskemas	-	-	-	1	-

No	Jenis Izin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
53	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	1	-
54	Tanda Daftar Usaha Perjalanan Pariwisata	-	-	-	1	-
55	Surat Pencabutan Izin Apoteker	-	-	-	4	-
56	Izin Praktik Elektromedis	-	-	-	-	2
57	Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	1
58	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	45
59	Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	1
60	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	-	-	-	-	1
61	izin koperasi simpan pinjam	-	-	-	-	3
62	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	79
63	Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	7
64	Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	1
JUMLAH		3.794	4.124	4.990	3.738	3234

Sumber data : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, 2022

m. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83 Persentase organisasi pemuda yang aktif
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemuda Kader	723	723	750	750	6

2	Pemuda Pelopor	120	120	65	65	4
3	Pemuda wirausaha	350	350	400	400	373

Sumber data : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Untuk bidang olahraga, masyarakat Kabupaten Polewali Mandar termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar olahraga, adanya jumlah atlet yang berprestasi di dua tahun terakhir dapat dilihat dari hasil pembinaan beberapa cabang olah raga, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2. 84 Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	34	33	24	18	31
2	Jumlah Cabang Olah Raga	59	59	59	59	59
3	Jumlah Atlet berprestasi	-	40	40	40	18
4	Persentase cabang olah raga yang dibina	57,63	55,93	40,68	30,50	52,54

Sumber data : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022

n. Bidang Urusan Statistik

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Polewali Mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik berupa :

- Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA)
- Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Ketersediaan Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
- Ketersediaan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi

Tabel 2. 85 Indikator Statistik
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Ketersediaan Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
5	Ketersediaan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber data : Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut :

- Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validasi data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, Perangkat Daerah di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data;
- Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
- Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan perundang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi Perangkat Daerah/ Instansi/ Lembaga terkait penanggung jawab data dalam penyediaannya.

o. Bidang Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan dari system gagasan, tindakan, dan juga hasil karya dari manusia untuk memenuhi kehidupan bermasyarakat. Kegiatan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar, berupa Penyelenggaraan festival seni dan budaya, organisasi/kelompok kesenian/kebudayaan yang dibina, Jumlah organisasi kesenian dan budaya

yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya serta Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Perkembangan kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada capaian kinerja urusan kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 2. 86 Indikator Kebudayaan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	1	1	-	-
2	Jumlah organisasi/keompok kesenian/kebudayaan yang dibina	kelompok	22	22	22	22	20
3	Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya	organisasi	29	29	29	29	20

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Penyelenggaraan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Kabupaten Polewali Mandar yang beragam. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 87 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	19	19	19	19	15
2	Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah	19	19	19	19	56
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	27

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

p. Bidang Urusan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengunjung bertambah dari

66.172 orang pada tahun 2017 menjadi 78.559 orang pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung karena adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19.

Jumlah koleksi buku yang tersedia tahun 2017 sebanyak 1.385 buku dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 23.909 buku pada tahun 2021. Sementara jumlah koleksi judul buku pada tahun 2017 sebanyak 191 judul menjadi 8.454 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 88 Jumlah Perpustakaan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021

No.	Jenis Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pengunjung perpustakaan	66.172	72.050	65.860	78.559	1.471
2.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	1.385	3.547	19.233	23.571	23.909
3.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	191	578	7.771	8.408	8.454
4.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah	135	135	135	135	385
5.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,31	0,31	0,31	0,31	0,033

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

q. Bidang Urusan Kearsipan

Pelaksanaan bidang urusan kearsipan di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan jumlah sumberdaya manusia (SDM) dan sarana prasarana masih terbatas. Untuk mengetahui capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 89 Indikator Kearsipan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD	lembaga	12	15	15	-	29
2.	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)	orang	-	-	-	-	-
3.	Jumlah SDM pengelola arsip di LKD	orang	4	6	6	-	6
4.	Box Arsip	unit	990	1.010	1.160	400	1.000

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.3.3 URUSAN PILIHAN

a. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan adalah hasil penangkapan atau budidaya ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air yang ditangkap di panen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Capaian produksi perikanan di Kabupaten Polewali Mandar, tiap tahun mengalami peningkatan dengan capaian ditahun 2021 sebanyak 27.010,74 ton. Semua Jumlah kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tiap tahunnya mendapat pembinaan seratus persen dengan produktivitas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti pada tahun 2021 berhasil mencapai 11.000 ton. Hasil secara keseluruhan Capaian produksi perikanan, jumlah konsumsi ikan dan kelompok binaan nelayan adalah indikator untuk mengetahui kinerja pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 90 Capaian produksi perikanan, jumlah konsumsi ikan dan kelompok nelayan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian produksi Perikanan	ton	25.336	25.388	26.272,19	26.021,56	27.010,74
2.	Capaian Jumlah Konsumsi Ikan	ton	53,90	54,10	55,72	56,1	56,9
3.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	persen	100	100	100	100	100
4.	Produksi	ton	9.800	9.900	10.197	10.197	11.000

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	perikanan kelompok Binaan						
5.	Jumlah kelompok nelayan	klp	275	495	544	670	657

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Bidang Urusan Pariwisata

Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kepariwisata merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti: hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan yang indah dan iklim yang nyaman. Perjalanan kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan dikarenakan adanya upaya pemerintah mengelola dan mengembangkan obyek wisata yang ada sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan. pada tahun 2019 ke 2021 terjadi penurunan yang signifikan dari 450.968 orang menjadi 223.477 orang ditahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pembatasan pergerakan orang antar wilayah akibat merebaknya wabah Pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 91 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

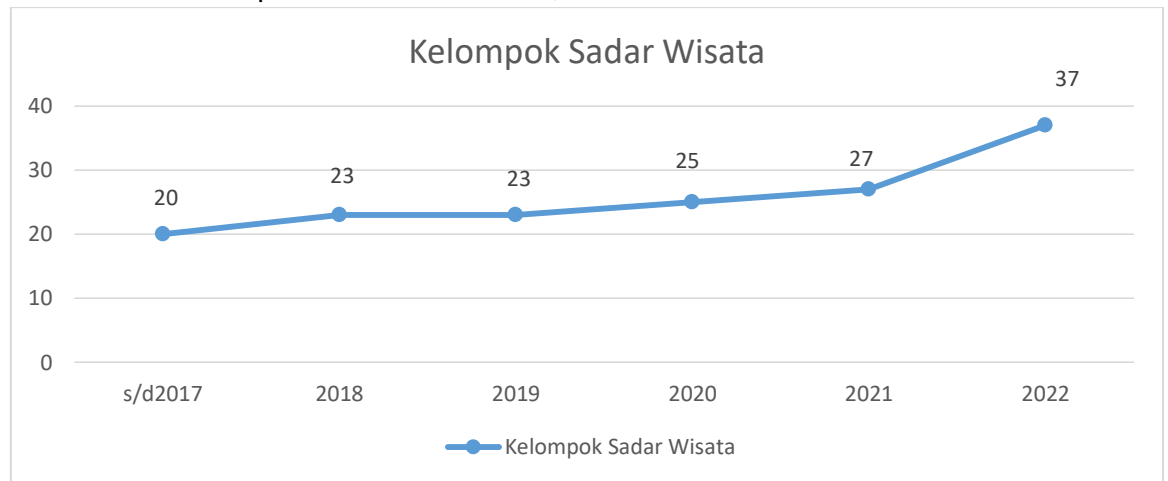
No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Objek Wisata	39	39	40	40	41
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	188	719	589	8	0
3	Kunjungan Wisatawan Domestik (orang)	451.499	220.253	450.968	267.445	223.477

Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Di kabupaten Polewali Mandar terdapat 37 kelompok sadar wisata sampai dengan tahun 2022 yang tersebar di beberapa kecamatan. Kelompok sadar wisata ini mengelola berbagai jenis objek wisata, mulai dari wisata bahari samapai wisata pegunungan. Kelompok ini membentuk komunitas untuk melakukan beberapa inovasi dalam upaya menarik kunjungan wisatawan yang

didampingi oleh Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 2. 34 Jumlah Perkembangan Kelompok Sadar Wisata
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2022



Sumber Data : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, 2022

c. Bidang Urusan Pertanian

1) Tanaman Pangan

Secara umum, volume produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2017-2021 menunjukkan tren positif. Walaupun beberapa komoditas menunjukkan fluktuasi luas areal, namun tetap menunjukkan peningkatan produktivitas. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 92 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Tanaman	Satuan/ Unit	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah						
	Luas Panen	ha	41.583	48.540	38.146	38.844,60	32.738
	Produksi	ton	305.479,20	345.492,10	274.051,11	281.984,42	239.081,60
	Produktivitas	kuintal/ha	73,46	71,18	71,84	72,59	69,2
2	Padi Ladang						
	Luas Panen	ha	7.843	10.571	5.894	7.114,80	5.349,50
	Produksi	ton	31.058,20	40.359,30	23.144,74	27.854,61	21.046,88
	Produktivitas	kuintal/ha	39,6	38,35	39,1	39,2	39,4
3	Jagung						
	Luas Panen	ha	20.446	14.978	25.534	9.359,80	2.464,60

No.	Jenis Tanaman	Satuan/ Unit	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi	ton	87.961,41	64.382,38	110.257,73	40.883,04	11.658,42
	Produktivitas	kuintal/ha	43,02	42,99	43,2	43,7	46,1
4	Kacang Kedelai						
	Luas Panen	ha	729	4.055	2.417	1.943,20	226,60
	Produksi	ton	1.251,77	6.610,51	3.941,23	3.356,13	395,28
	Produktivitas	kuintal/ha	17,17	16,3	16,2	17,3	16,4
5	Kacang Tanah						
	Luas Panen	ha	45	27	136	49	71,10
	Produksi	ton	108,75	64,85	326,66	116,92	172,22
	Produktivitas	kuintal/ha	24:17:00	24,11	24	23,9	24,2
6	Kacang Hijau						
	Luas Panen	ha	354	133	179	309,90	213,10
	Produksi	ton	792,17	295,28	397,09	674,16	472,48
	Produktivitas	kuintal/ha	22,38	22,15	135,9	21,8	21,6
7	Ubi Kayu						
	Luas Panen	ha	168	129	401	710	475,70
	Produksi	ton	2.285,14	1.757,31	5.430,59	9.636,26	6.347,02
	Produktivitas	kuintal/ha	136,02	136,23	135,9	135,7	13,52
9	Ubi Jalar						
	Luas Panen	ha	69	61	224	109	82,70
	Produksi	ton	988,66	879,64	3.172,48	1.559,41	1.181,41
	Produktivitas	kuintal/ha	143,28	144,2	143,7	143,1	14,26

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2) Infrastruktur Pertanian

1. Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan

Berdasarkan data luas lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, tahun 2017 tercatat lahan yang beralih fungsi seluas 25,96 ha mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 seluas 0,83 ha. Peningkatan lahan persawahan yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2021 ini tidak terlalu signifikan, salah satu penyebabnya adalah turunnya jumlah alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman adalah penerapan peraturan daerah alih fungsi lahan bagi kawasan hijau tidak diperkenankan untuk dilakukan alih fungsi lahan dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 2. 93 Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Kondisi Lahan Persawahan	Sat	Luas (Ha)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Beralih Fungsi	ha	25,96	62,58	9,35	1,08	0,83
2	Percetakan Sawah	ha	-	51,00	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Perkembangan Infrastruktur Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produktifitas petani dan meningkatkan mobilitas hasil produksi pertanian ke sentra-sentra pemasaran, maka dibutuhkan infrastruktur pendukung berupa jalan tani dan jaringan irigasi. Sepanjang tahun 2021 telah dibangun jalan tani sepanjang 18.190 meter dan 1.647 meter saluran irigasi tersier untuk sarana pengairan.

Tabel 2. 94 Perkembangan Infrastruktur Pertanian
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Infrastruktur Pertanian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jalan Tani	meter	2.836	777	350	29.631	18.190
2.	Jembatan Tani	unit	2	2	-	-	-
3.	Saluran Irigasi Tersier	meter	4.122	1.747	-	5.327	1.647
4.	Sumber air	unit	-	-	-	27	10
5.	Embung	unit	-	-	-	9	4

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Rasio jalan tani terhadap luas lahan persawahan saat ini adalah 1 : 4.589 yang artinya dalam 4.589 ha persawahan ada 1 kilometer jalan tani, demikian pula rasio lahan persawahan terhadap jaringan irigasi tersier yaitu 1 : 9.218 yang artinya setiap 1 kilometer jaringan irigasi tersier melayani sekitar 9.218 ha lahan persawahan. Kedua rasio ini tentunya masih sangat jauh dari kondisi ideal.

3) Peternakan

1. Jumlah Produksi Komoditi Andalan Peternakan

Komoditi andalan peternakan di Kabupaten Polewali Mandar adalah Sapi dan Kambing, khusus ternak sapi, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat 1 (satu) jenis yaitu sapi bali yang terus mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Untuk jenis sapi brahman selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2017 berjumlah hanya sebanyak 198 ekor hingga tahun 2021 hanya 38 ekor. Produksi daging untuk komoditi ternak sapi lokal jenis sapi bali mengalami fluktuasi, dimana jumlah produksi 405,90 ton per tahun 2017 turun menjadi 300,45 ton tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan menjadi 410,13 ton pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 95 Jumlah Produksi Komoditi Andalan Peternakan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Ternak	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sapi Perah						
	- Jumlah	ekor	-	-	-	-	-
	- Produksi Susu	liter	-	-	-	-	-
2.	Sapi Brahman						
	- Jumlah	ekor	198	59	34	38	38
3.	Sapi Bali						
	- Jumlah	ekor	31.974	32.660	34.812	35.404	35.404
	- Produksi Daging	ton	405,90	390,60	326,25	300,45	410,13
4.	Kambing PE						
	- Jumlah	ekor	79.291	79.861	94.181	80.612	80.612

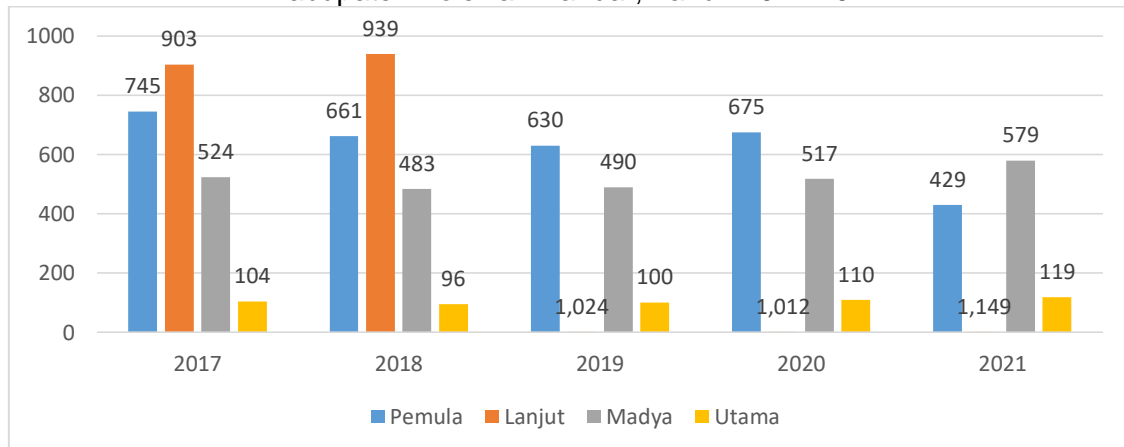
Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Perkembangan Jumlah Kelompok Tani

Salah satu penunjang utama peningkatan produksi hasil pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan) adalah kemampuan Sumber daya Manusia petani dalam mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan kelompok tani. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, bahwa jumlah kelompok tani di Kabupaten Polewali Mandar yang dibina dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 berfluktuasi. Fluktuasi yang terjadi disebabkan beberapa hal yaitu kelompok tani tidak lagi

aktif atau membubarkan diri, rekalkulasi kelompok yang anggotanya juga terdaftar di beberapa kelompok lain, serta pembinaan terhadap klasifikasi kelompok yaitu Pemula, Lanjut, Madya dan Utama. Untuk lebih jelasnya, perkembangan kelompok tani dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4) Perkebunan

Pada tahun 2021, Kakao masih mendominasi produksi dari 7 komoditas, dengan besaran produksi 36.480,55 ton per tahun dengan luas areal 48.925,50 ha. Disusul oleh kelapa dalam 17.497,79 ton Per Tahun dengan luas areal 20.477,04 ha. Komoditas kelapa cenderung stagnan, sementara kakao menunjukkan tren meningkat secara signifikan. Jenis Tanaman lainnya seperti Kopi, cengkeh dan kemiri memiliki produksi yang relatif lebih kecil dan luas areal yang juga kecil. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 96 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Jenis Tanaman	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kelapa Dalam						
	Luas Areal	ha	20.484,86	20.474,86	20.477,04	20.477,04	20.477,04
	Produksi	ton	16.810,80	16.811,17	17.451,50	17.490,54	17.497,79
2.	Kelapa Hibrida						
	Luas Areal	ha	2.712,51	2.667,15	2.665,15	2.665,15	2.665,15
	Produksi	ton	2.403,26	2.396,07	2.536,17	2.536,17	2.398,40
3.	Kopi Robusta						
	Luas Areal	ha	881,35	1.831,35	1.830,29	1.833,79	1.830,46
	Produksi	ton	554,65	681,11	695	699,78	670,57

No.	Jenis Tanaman	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Kopi Arabika						
	Luas Areal	ha	140,64	386,94	386,42	386.42.00	386,42
	Produksi	ton	75,47	120,23	123,15	123,15	123,14
5.	Cengkeh						
	Luas Areal	ha	156,24	518,15	517,76	523.76	523,76
	Produksi	ton	76,25	118,28	123,73	125.81	126,73
6.	Kakao						
	Luas Area	ha	36.729,68	48.930,02	48.929,50	48.929.50	48.925,50
	Produksi	ton	33.519,53	33.220,09	33.435,91	33.475,28	36.480,55
7.	Kemiri						
	Luas Areal	ha	1.779,46	7.061,00	7.055,02	7.055,02	7.055,02
	Produksi	ton	1.743,36	1.795,94	1.834,31	1.834,42	1.836,94

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

d. Bidang Urusan Kehutanan

1. Luas Kawasan Hutan

Tahun 2021 Luas Hutan secara total adalah sebesar 458.706,62 ha di Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan yang paling luas wilayah hutannya adalah Bulu sebesar 66.621,14 ha, sementara yang paling kecil adalah Kecamatan Campalagian yang luasnya hanya 2.984,80 ha. Luas kawasan hutan dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 97 Luas Kawasan Hutan Mandar dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen
1.	Alu	23.932,43	5,22
2.	Anreapi	68.533,77	14,94
3.	Binuang	58.531,99	12,76
4.	Bulu	66.621,14	14,52
5.	Campalagian	2.984,80	0,65
6.	Limboro	24.007,43	5,23
7.	Luyo	4.931,65	1,08
8.	Matakali	29.147,00	6,35
9.	Matangnga	55.520,09	12,10
10.	Polewali	-	-
11.	Tapango	50.288,42	10,96

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen
12.	Tinambung	-	-
13.	Tubbi Taramanu	62.572,59	13,64
Grand Total		458.706,62	100

Sumber Data : Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Luas Kawasan Hutan Produksi

Kecamatan yang memiliki Luas Kawasan Hutan produktif sampai dengan tahun 2021 wilayah Kabupaten Polewali Mandar, persentase terbesar terdapat di kecamatan Bulu dan Matangnga yaitu masing-masing sebesar 31,87% atau 22.928,59 ha dan 23,44% atau 16.865,85 ha dari Total Luas hutan produktif 71.951,75 ha di Kabupaten Polewali Mandar. Persentase terendah terdapat di wilayah kecamatan Luyo yaitu hanya 2,71% atau sebesar 1.946,85 ha dari luas kawasan hutan produksi kabupaten. Secara keseluruhan dari 6 kecamatan yang tercatat memiliki luas kawasan hutan produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 98 Luas Kawasan Hutan Produksi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen
1.	Bulu	22.928,59	31,87
2.	Luyo	1.946,85	2,71
3.	Mapilli	12.374,70	17,20
4.	Matangnga	16.865,85	23,44
5.	Tapango	11.635,30	16,17
6.	Tubbi Taramanu	6.200,46	8,62
Grand Total		71.951,75	100

Sumber Data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Pengembangan komoditi tanaman kehutanan di atas merupakan implikasi dari semakin tingginya laju kawasan hutan kritis yang disebabkan maraknya angka perambahan hutan dan kasus illegal logging akibat tingginya nilai ekonomi komoditi hasil hutan.

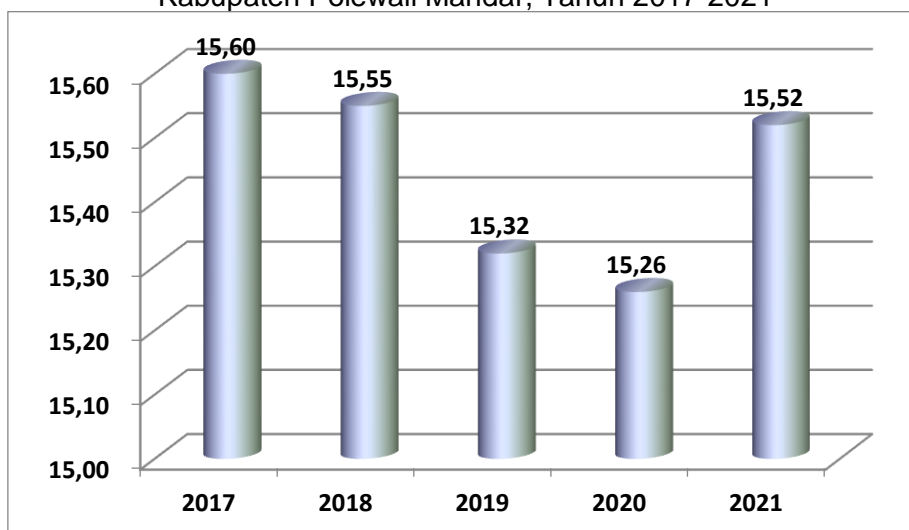
e. Bidang Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Polewali Mandar disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumah tangga. Berdasarkan data dokumen polewali mandar dalam angka BPS Polewali Mandar tahun 2022 pelanggan yang menggunakan listrik PLN adalah 99.011 unit yang terbagi atas rayon polewali sebesar 37.514 unit dan rayon wonomulyo 61.497 unit.

f. Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Capaian kinerja urusan perdagangan di tunjukkan nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang memiliki trend menurun dimana pada tahun 2017 sebesar 15,60% mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 15,26%. Namun pada tahun berikutnya 2021 mengalami peningkatan hingga 15,52% seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 36 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

g. Bidang Urusan Perindustrian

Berbagai aspek yang terkait dengan industri kecil di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah perusahaan sebesar 6.213 unit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6.792 unit. Jumlah industri tersebut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai investasi dan nilai produksi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah produksi tahun 2017 sebesar Rp285.318.018 menjadi Rp326.359.210,9 pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 99 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sentra	Unit	371	371	371	371	371
Jumlah Perusahaan	Unit	6.213	6.239	6.265	6.702	6.792
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	14.312	14.445	14.578	15.437	15.684
Nilai Investasi	(Rp juta)	42.213.924	42.834.674	43.455.424	45.327.474	46.084.474
Nilai Produksi	(Rp Juta)	285.318.018	287.013.468	288.708.918	318.675.210,9	326.359.210,9

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Di Kabupaten Polewali Mandar pengembangan industri kecil baik industri sandang maupun industri pangan mengalami peningkatan persentase yang relatif kecil. Pada tahun 2021 persentase industri sandang 63,40% meningkat pada tahun 2021 menjadi 63,41%. Selain itu industri kerajinan dan penggilingan gabah cenderung stagnan dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 industri kerajinan juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 3,60% pada tahun 2020 menjadi 3,64% pada tahun 2021. Kondisi ini sangat kecil pengaruhnya terhadap kontribusi PDRB pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran. Sehingga diperlukan upaya-upaya dan inovasi untuk dapat meningkatkan pengembangan industri kecil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 100 Persentase Industri Kecil Berdasarkan Komoditi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2018-2021**

NO.	URAIAN	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1.	Industri Sandang (Pemintalan Benang,Pertenunan, pakaian jadi, dll)	persen	63,37	63,38	63,40	63,41
2.	Industri pangan (Makanan dan Minuman Tradisional)	persen	27,07	27,10	27,13	27,135
3.	Industri Kerajinan (kayu, Rotan, bamboo,Gerabah, dll)	persen	3,51	3,60	3,60	3,64
4.	Penggilingan Gabah	persen	0,82	0,82	0,82	0,82
5.	Lainnya (Percetakan, Bahan Bangunan, dll)	persen	5,23	5,10	5,05	5,05

Sumber Data : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

h. Bidang Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih dalam wilayah Indonesia, capaian kinerja layanan umum pada urusan ketransmigrasian di Kabupaten Polewali Mandar setiap tahun telah diprogramkan, diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dimana capaian ditahun 2021 sebanyak 75 KK dari hanya 49 KK pada tahun 2017. Sementara Jumlah Lokasi Transmigrasi baru setiap tahun ditunjuk 1 lokasi Satuan Kawasan Permukiman (SKP). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 101 Jumlah Pemberangkatan Transmigran
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Transmigrasi Umum Swakarya	KK	49	49	78	75	75
2.	Jumlah Lokasi Transmigrasi baru	SKP	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.3.4 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

a. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelarasan secara terpadu dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJM Nasional, RPJMD Sulawesi Barat dengan RPJMD

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, perlu semakin ditingkatkan.

Pelaksanaan perencanaan lima tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Selain dijabarkan dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD, RPJMD juga dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 102 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, (persen)	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran Konsistensi Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, (persen)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar

mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 103 Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	APBD : • Peraturan Daerah • Peraturan Bupati	2 3	1 3	2 3	2 6	1 5
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Daerah • Peraturan Bupati	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Opini Badan Periksa Keuangan (Opini-BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian internal. Hasil capaian Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017-2021.

Tabel 2. 104 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

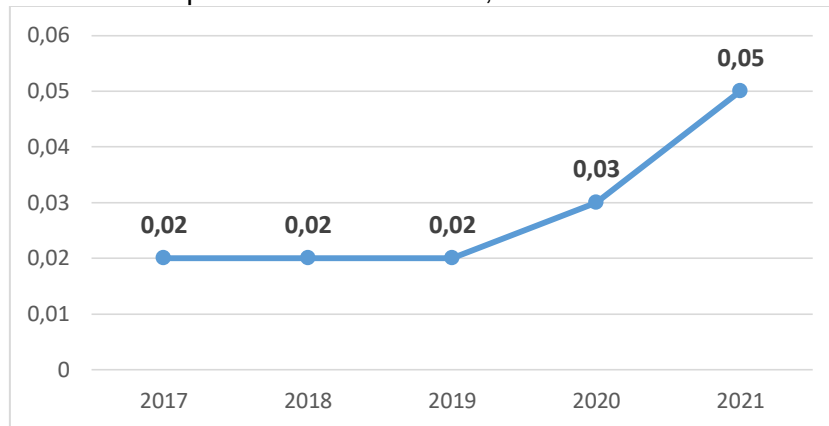
Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Indikator keberhasilan dalam penyusunan APBD adalah 0% yang diartikan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Presentase Belanja SILPA terhadap APBD Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir 2017-2021 mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir dari 0,02% pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,03% pada tahun

2020 lalu kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,05%. Persentase Belanja SILPA terhadap APBD Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut :

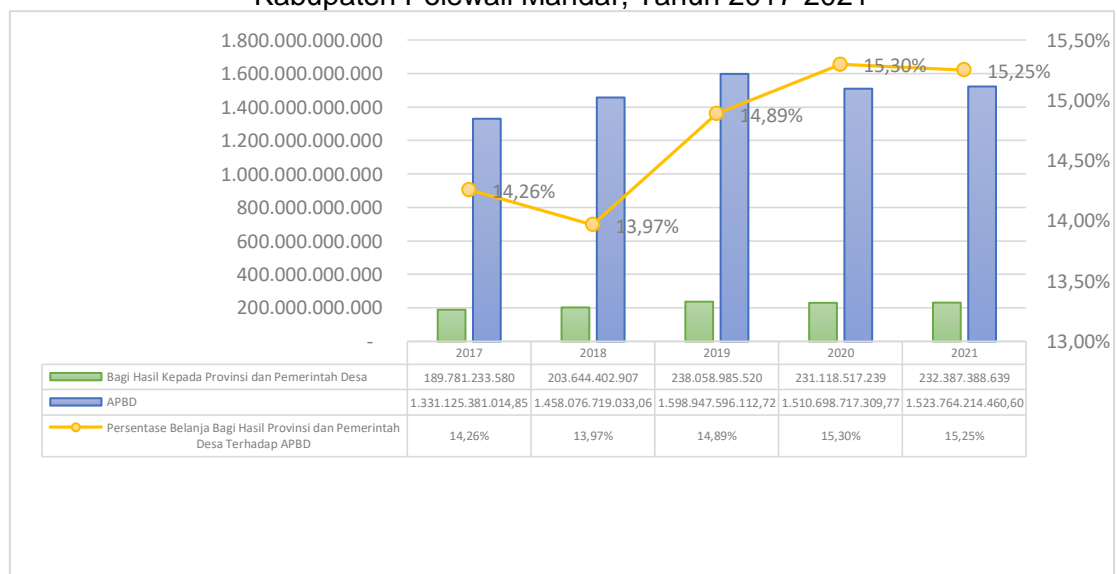
Gambar 2. 37 Persentase Belanja SILPA terhadap Total APBD Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Belanja bagi hasil adalah salah satu komponen dari belanja tidak langsung. Belanja bagi hasil kepada Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Desa Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir 2017-2021, mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sebesar Rp189.781.233.580 menjadi Rp232.387.388.639 di tahun 2021, seperti yang diperlihatkan pada Gambar berikut :

Gambar 2. 38 Belanja bagi hasil kepada Provinsi dan Pemerintah desa Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

c. Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN sebagai Aparat Sipil Negara. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal terhadap jumlah seluruh ASN yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu hanya 315 ASN dari 6.059 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Data ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 105 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	275	291	274	358	315
2.	Jumlah ASN	orang	6.475	6.416	6.486	6.294	6.059
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	4,24	4,53	4,22	5,68	5,19

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

d. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Diklat Jabatan Struktural ASN adalah Diklat Kepemimpinan Jabatan struktural yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, keperibadian dan etika pegawai ASN sekaligus untuk memberikan pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan Negara dan tugas mengenai bidang tugas serta budaya organisasi. Dari jumlah total jabatan struktural ditahun 2020 yang 804 jabatan tidak ada Pejabat ASN yang mengikuti diklat jabatan struktural dikarenakan adanya refocusing anggaran ditahun 2020 akibat pandemi covid-19. Data lima Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 106 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	7	28	13	0	13
2.	Jumlah total jabatan	832	801	804	804	13

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,84	3,50	1,62	0,00	2,51

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

e. Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki kepentingan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun dapat dilihat dari persentase implementasi rencana kegiatan penelitian dan pengembangan berkisar antara 70-120% pertahunnya dan persentase pemanfaatan hasil kegiatan penelitian berkisar 50-70% . Gambaran selama lima tahun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 107 Kinerja penelitian dan pengembangan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	75	114.29	120	107.69
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	15	40	60	70

Sumber Data : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022

f. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Bupati. Ada tiga kinerja sekretariat dewan yang harus dilaksanakan tiap tahunnya yaitu:

1. Tersedianya Dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD;
2. Tersusun dan terintegrasinya Dokumen program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD;
3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam

Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat Dewan DPRD.

Gambaran kinerja Sekretariat Dewan selama lima tahun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 108 Kinerja Sekretariat Dewan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Dokumen program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Dokumen Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	3	3	3	3	3

Sumber Data : Sekertariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.3.5 UNSUR PENGAWASAN

a. Pengawasan

Kinerja Pengawasan adalah Proses kinerja dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. 100 Kinerja Pengawasan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari tiga indikator yaitu persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, persentase temuan APID yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan persentase pengaduan masyarakat atau lembaga lainnya ke APIP yang ditindak lanjuti. Capaian Ketiga indikator 100 kinerja pengawasan terendah sebesar 33% dan tertinggi sebesar 82,75%. Capaian ini masih dibawah standar kepatuhan 100% yaitu setiap rekomendasi BPK, Temuan APIP dan Pengaduan harus dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun

berjalan. Gambaran kinerja pengawasan selama lima tahun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 109 Kinerja pengawasan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti OPD	65,00	70,00	71,95	82,75	73,00
2	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD	70,00	70,00	37,28	37,00	35,56
3	Persentase pengaduan masyarakat/Lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti	60,00	60,00	33,00	33,00	64,00

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator PDRB perkapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti hukum yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, hukum ini ditemukan Engel dari perangkat data survei pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan data BPS diketahui bahwa terjadi peningkatan Konsumsi Rumah tangga perkapita dari tahun 2017 sejumlah Rp37.784.934 menjadi Rp43.435.328 pada tahun 2021. Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 110 Angka Konsumsi rata-rata Rumah tangga Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah/tahun/RT)	37.784.934	40.410.306	40.410.326	44.887.482	43.435.328
Jumlah Rumah Tangga	96.154	97.258	98.350	106.341	107.538
Rasio Konsumsi RT per Kapita	392,96	415,50	410,88	422,11	403,91

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik

tingkat perekonomian penduduk. Seperti hukum yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran

Tabel 2. 111 Angka Konsumsi rata-rata Rumah tangga Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi non pangan (rupiah/tahun/orang)	4.031.064	4.096.392	4.096.387	4.736.565	4.588.684
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah/tahun/RT)	37.784.934	40.410.306	40.410.326	44.887.482	43.435.328
Rasio konsumsi non pangan rumah tangga per kapita	10,67	10,14	10,14	10,55	10,56

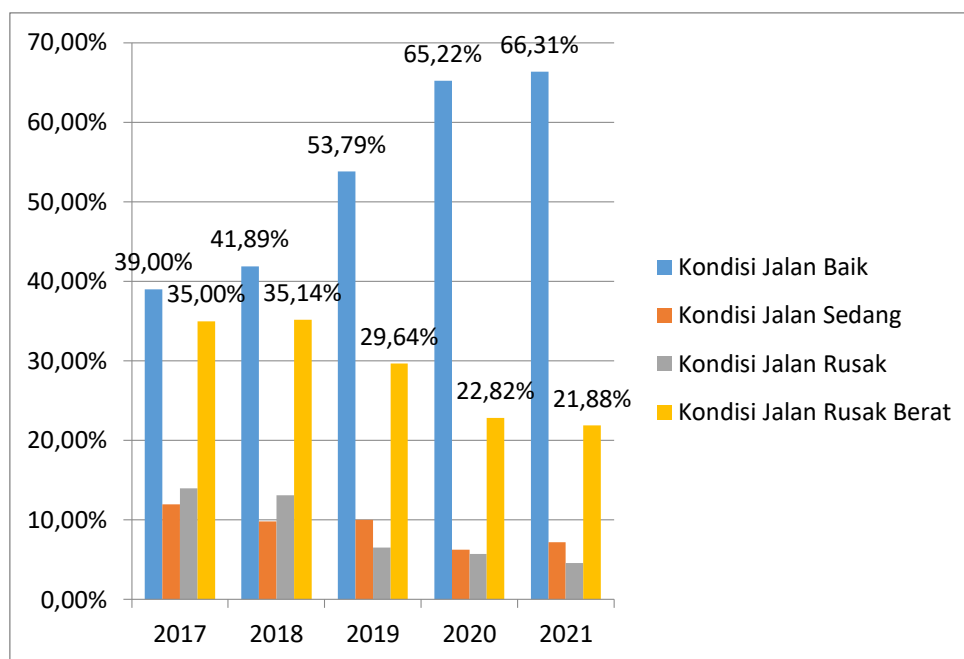
Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Kondisi jalan yang baik di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Panjang jalan di Kabupaten Polewali mandar pada tahun 2021 adalah 874,766 Km dan tercatat pada tahun 2017 kondisi jalan baik sebanyak 39% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 66,31%. Kondisi jalan mantap pada tahun 2017 sebanyak 51% atau sepanjang 446.131 km dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 73,51% atau sepanjang 643,035 Km.

Kondisi jalan rusak di Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 juga mengalami penurunan yang signifikan. Panjang jalan rusak pada tahun 2017 sepanjang 428,635 km turun menjadi 231,731 km pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari total panjang jalan. Gambaran selama lima tahun dapat dilihat pada gambar kondisi jalan kabupaten Polewali Mandar yang disajikan berikut :

Gambar 2. 39 Kondisi Jalan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2022.

2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

a. Perlindungan Konsumen

Jumlah kasus perlindungan konsumen di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2017-2021 berfluktuasi dari 251 Kasus menjadi 325 kasus pada tahun 2021. konsumen tahun 2021 yang mempunyai jumlah terbesar adalah kasus-kasus alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum di tera sebesar 172 kasus, menurun secara signifikan dari tahun 2019 sebanyak 2.123 kasus, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 112 Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No	Kasus Perlindungan Konsumen	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Alat UTTP belum di tera/ tera ulang	162	15	2.123	200	172
2.	Barang Kedaluwarsa (<i>Expired</i>)	58	327	369	101	57
3.	Barang tidak sesuai dengan SNI	-	-	-	-	-
4.	Barang Elektronik tanpa garansi/petunjuk berbahasa Indonesia	7	8	3	1	-

No	Kasus Perlindungan Konsumen	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Cara pencantuman klausul baku	-	-	-	-	-
6.	Kosmetik/ Obat-obatan kadaluarsa dan terindikasi mengandung bahan pengawet	5	-	-	-	-
7.	Makanan/ minuman terindikasi mengandung zat pewarna	1	1	-	-	-
8.	Daging/ikan terindikasi mengandung zat pengawet (borax/formalin)	-	-	-	-	-
9.	Barang/ bahan campuran kue/makanan terindikasi mengandung zat berbahaya (rodamin B)	-	-	-	-	-
10.	Barang dalam keadaan terbungkus (BKDT) tidak sesuai ukuran dan takaran pada label	9	29	68	79	87
11.	Pengaduan dari Konsumen atas penggunaan/pemakaian barang/jasa	9	21	20	20	9
Jumlah		251	1.886	2.583	401	325

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Angka Kriminalitas

Faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi salah satunya adalah tingkat keamanan dan ketertiban. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Angka Kriminalitas di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 sebanyak 205 kasus, menurun menjadi 220 kasus di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah kriminalitas yang terjadi pada tabel berikut :

Tabel 2. 113 Angka Kriminalitas
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

NO.	Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pembunuhan	4	3	5	1	1
2.	Penganiayaan	52	50	96	75	113
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14	6	4	6	11
4.	Pemeriksaan	3		2	1	4
5.	Pencabulan	3	7	3	5	9
6.	Penculikan	6			-	-
7.	Pencurian dengan Kekerasan	2	5	1	-	1
8.	Pencurian Biasa	72	63	42	32	76
9.	Pencurian Kendaraan Bermotor	18	29	25	14	34
10.	Pencurian dengan Pemberatan	7	1	2	7	12
11.	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	2	7	1	3	5
12.	Pembakaran dengan Sengaja	-	-	-	-	-
13.	Narkotika dan Psikotropika	-	-	-	-	60

NO.	Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
14.	Penggelapan	22	19	15	3	19
15.	Korupsi	-	-	-	-	-
16.	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
Jumlah		205	190	196	150	220

Sumber : Polres Kabupaten Polewali Mandar, 2022

c. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi dan unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 jumlah demonstrasi sebanyak 6 kali tetapi ditahun 2018 mengalami peningkatan signifikan menjadi 16 kali. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5 kali. Isu politik dan isu ekonomi menjadi pemicu terjadinya demonstrasi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 114 Jumlah Demonstrasi
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Politik	5	-	4	-	3
2.	Ekonomi	1	16	1	-	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	1	-	-
Jumlah		6	16	6	-	5

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2022

d. Kemudahan Perizinan

Kemudahan Perizinan adalah Layanan perizinan yang keberhasilannya diukur dengan indikator lama mengurus dalam hari, Jumlah persyaratan dokumen dan Biaya Resmi yang dikeluarkan. Dari berbagai Layanan perizinan di Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa layanan IMB memiliki waktu pengurusan lebih lama (7 hari) dibanding layanan perizinan yang lain (rata-rata 2 hari). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 115 Lama Proses Perizinan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks.Rp)
1.	SIUP	3	8	-
2.	TDP	8	16	-
3.	SIUI	8	8	-

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks.Rp)
4.	TDG	3	7	
5.	IMB	4	5	Berdasarkan Perda
6.	IGTU	3	14	Berdasarkan Perda

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, 2022

e. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pengenaan Pajak Daerah adalah jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah yang terdiri dari jumlah pajak yang dikeluarkan, jumlah insentif pajak yang mendukung investasi, jumlah retribusi yang dikeluarkan dan jumlah retribusi yang mendukung iklim investasi. Capaian tahun 2021 pajak yang dikeluarkan sebanyak 11 macam dan jumlah distribusi dikeluarkan sebanyak 17 retribusi sedangkan jumlah insentif pajak dan jumlah retribusi yang mendukung investasi belum menunjukkan hasil yang nyata. Jumlah dan macam Insentif Pajak dan retribusi daerah yang mendukung investasi di Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 116 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11	11	11	11	11
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung investasi	-	-	-	-	-
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	17	17	17	17	17
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

a. Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum, kualitas angkatan kerja/tenaga kerja di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah. Pada tahun 2021 Jumlah angkatan kerja

sebanyak 226.409 jiwa. Dari jumlah tersebut jumlah bekerja sebanyak 218.765 orang yang bekerja atau 96,62%. Sementara yang tidak bekerja atau pengangguran terbuka sebanyak 7.764 orang atau 3,38%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 117 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tidak/belum pernah sekolah +	Jiwa	105.845	106.597	109.918	116.854	111.904
2.	SMP	Jiwa	24.342	24.515	26.360	36.431	29.760
3.	SMA	Jiwa	45.648	45.972	49.767	53.696	58.882
4.	Diploma dan Universitas	Jiwa	20.361	20.505	21.840	24.705	25.863
Jumlah		Jiwa	196.196	197.589	207.885	231.686	226.409

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tingkat atau rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan sebesar 53,16% mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 50,84%. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia angkatan kerja menanggung 51 orang. Penurunan rasio ini juga mengindikasikan membaiknya struktur penduduk yang disebabkan pertumbuhan penduduk usia produktif yang lebih cepat dari pertumbuhan usia tidak produktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 118 Rasio Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	127.049	127.614	128.278	135.123	134.538
2.	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	23.177	23.649	24.188	25.952	28.560
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)	150.226	151.263	152.466	161.075	163.098
4.	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	282.610	286.399	290.110	315.909	320.822
5.	Rasio Ketergantungan (3/4)	53,16	52,82	52,55	50,98	50,84

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dengan bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan berdasarkan 4 (empat) pilar utama yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Gambaran keuangan daerah menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD, dan perkembangan neraca daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa yang lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi

melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan, analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, secara khusus menguraikan perkembangan kinerja pendapatan daerah beserta rincian sumber-sumbernya, belanja daerah beserta belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan pembiayaan daerah beserta dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Bagian ini menyajikan gambaran realiasi komponen – komponen pokok APBD dalam time series lima tahun. Kinerja realisasi APBD Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2017-2021, disajikan berdasarkan komponen-komponen APBD, berupa pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaannya daerah.

a. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, atau merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Analisis pendapatan daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah dimasa yang akan datang.

Realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 2017-2021 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

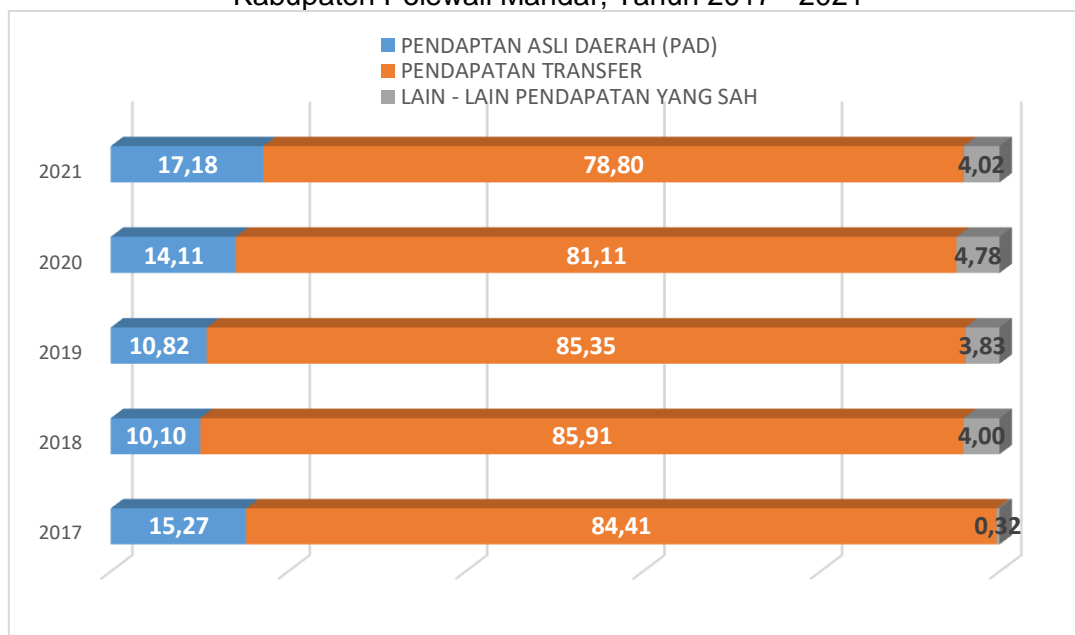
NO.	URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	PENDAPATAN	1.331.125.381.014,85	1.445.622.898.941,37	1.605.308.497.517,72	1.511.670.321.127,31	1.517.057.262.760,70	3,32%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.218.489.797,93	145.969.628.793,81	173.713.736.017,38	213.263.089.512,31	260.705.673.018,70	6,43%
a	Pendapatan Pajak Daerah	18.849.732.901,00	21.670.391.884,00	24.370.100.225,58	25.645.071.245,00	25.645.071.245,00	8,00%
b	Pendapatan Retribusi Daerah	9.074.857.129,00	10.387.671.373,00	12.249.690.554,00	11.716.796.739,00	19.298.257.431,00	20,76%
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.370.943,87	3.819.268.998,00	4.019.024.496,35	3.542.887.063,00	3.488.099.115,00	-0,79%
d	Lain-lain PAD Yang Sah	171.693.528.824,06	110.092.296.538,81	133.074.920.741,45	172.358.334.465,31	212.274.245.227,70	5,45%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.123.651.293.591,92	1.241.877.065.372,56	1.370.062.935.500,34	1.226.152.350.182,00	1.195.396.616.944,00	1,56%
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	958.125.805.552,00	1.022.906.559.600,00	1.130.429.457.452,00	1.012.302.581.907,00	961.122.278.203,00	0,08%
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.775.488.039,92	208.970.505.772,56	37.835.318.048,34	39.293.922.275,00	234.274.338.741,00	11,65%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.255.597.625,00	57.776.204.775,00	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	94,54%
a	Pendapatan Hibah	4.255.597.625,00	57.776.204.775,00	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	94,54%

Sumber Data : Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama periode 2017-2021 mencapai 3,32%. Pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,36%. Secara umum kondisi pendapatan masih menggambarkan kondisi membaik. Pendapatan Daerah meningkat dari Rp1.331 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1,517 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan pendapatan daerah paling tinggi yaitu mencapai 11,05% akibat terjadinya peningkatan pada komponen Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pertumbuhan pendapatan daerah menurun menjadi -6,03% pada tahun 2020 yang merupakan pertumbuhan terendah dalam lima tahun terakhir. Ini terjadi karena adanya kebijakan refocusing akibat pandemi covid-19.

Dinamika pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh perubahan tiga komponen pembentuk pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dari ketiga komponen ini dalam lima tahun terakhir pendapatan dari luar Kabupaten Polewali Mandar yang lebih dominan yaitu dana transfer dari pusat bila dibandingkan dengan pendapatan dari dalam daerah sendiri hal ini dapat digambarkan pada gambar berikut :

Gambar 3. 1 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021



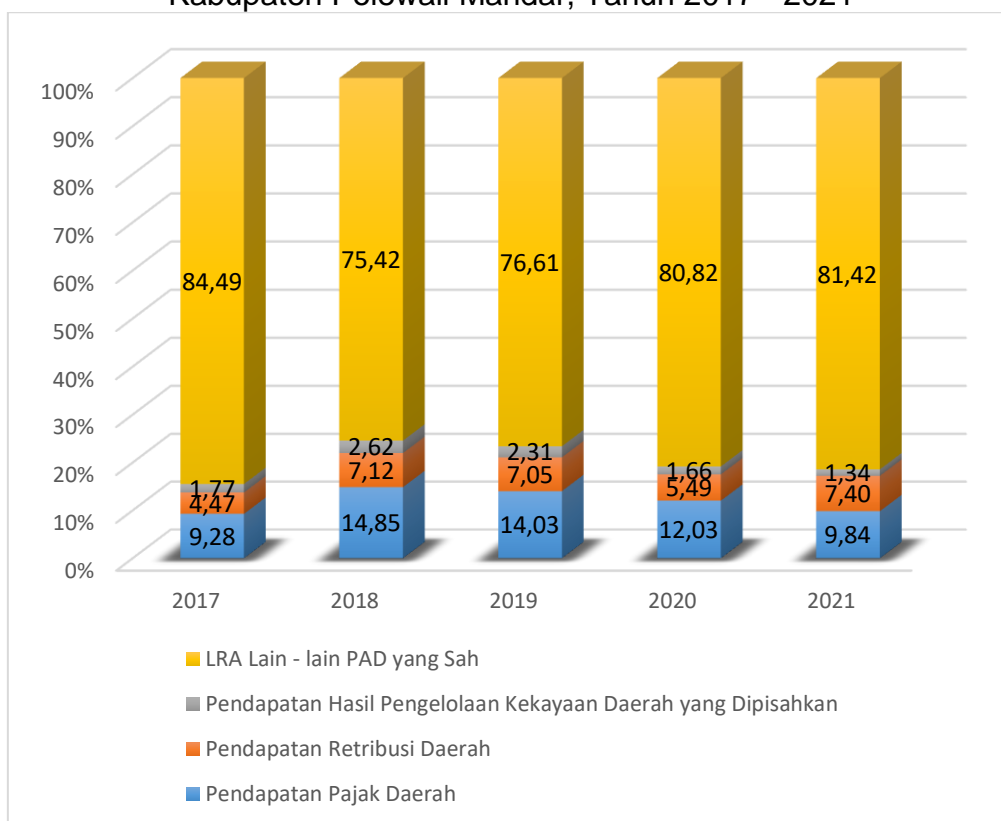
Sumber Data : Diolah dari Data Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Pada tahun 2021 jumlah kontribusi pendapatan transfer sebesar 78,80% terhadap total pendapatan daerah. Meskipun menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir, fakta ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah (pusat). Pada saat yang sama, kontribusi PAD masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 17,18% pada tahun 2021. Namun demikian jumlah kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penjelasan lebih rinci dari setiap komponen pendapatan daerah adalah :

- Pendapatan Asli Daerah

Jika dilihat lebih jauh komponen PAD, kenaikan PAD dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh penambahan semua komponen PAD. Namun Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen PAD yang menunjukkan peran paling dominan. Selama periode tahun 2017-2021, Lain-lain PAD yang Sah meningkat dengan laju yang akseleratif, yaitu dari Rp 171,69 miliar pada tahun 2017 menjadi 212,27 miliar pada tahun 2021. Akibatnya, kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD menjadi sangat signifikan. Kondisi ini menyebabkan seluruh komponen PAD lainnya bersifat fluktuatif pada kontribusi terhadap PAD, dengan laju yang cenderung lambat.

Gambar 3. 2 Proporsi PAD (%)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021



Sumber Data : Diolah dari Data Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

- Pendapatan Transfer

Jika diamati lebih jauh struktur transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer tampak bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan penyumbang terbesar selama periode tahun 2017-2021.

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pendapatan hibah yang terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Gambar 3. 3 Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Diolah dari Data Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

b. Kinerja Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan Jenis Belanja Daerah yang sebelumnya dikenal belanja tidak langsung dan langsung kini berubah menjadi belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Analisis belanja daerah dilakukan dengan mengamati pertumbuhan belanja daerah dan komposisi/struktur belanja daerah dalam lima tahun terakhir.

Berkaitan dengan perkembangan belanja daerah, selama periode tahun 2017-2021 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai 2,99%, dimana komponen belanja operasi yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada komponen belanja lainnya, khususnya belanja operasi yang di dalamnya terdapat komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial Sedangkan belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya tercatat rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni hanya mencapai -5,71% selama periode tahun 2017-2021.

**Tabel 3. 2 Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021**

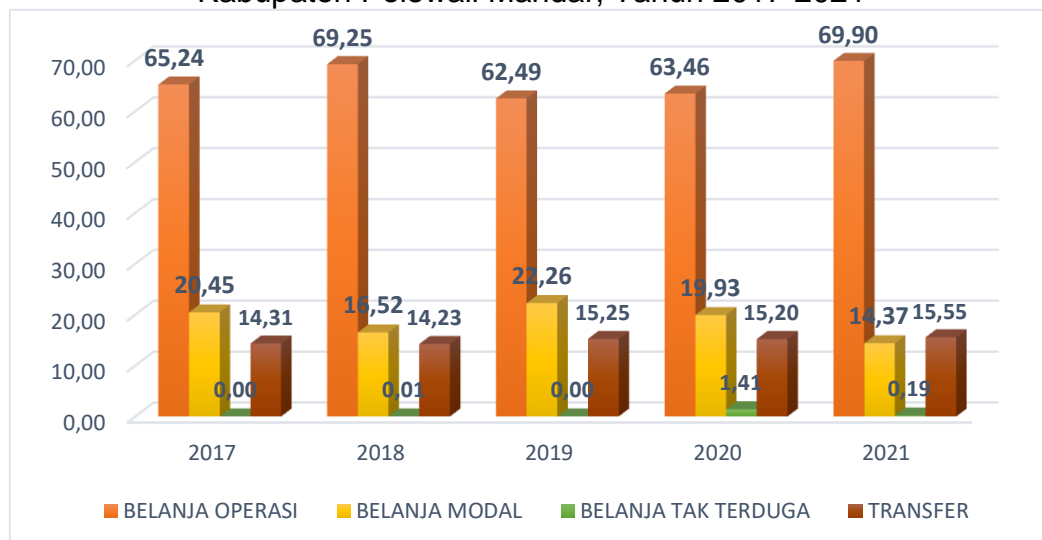
N0.	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan
A	BELANJA	1.328.359.032.532,00	1.443.708.163.523,00	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	1.494.721.491.473,66	2,99%
1.	BELANJA OPERASI	866.558.358.595,55	999.742.086.351,00	983.170.378.108,00	964.538.677.346,00	1.044.751.970.255,66	4,79%
a	Belanja Pegawai	572.691.629.379,00	582.279.552.383,00	613.429.120.954,00	601.699.768.133,00	573.232.463.477,00	0,02%
b	Belanja Barang dan Jasa	265.428.185.605,55	351.715.549.486,00	338.520.260.254,00	340.807.449.146,00	431.240.129.328,00	12,90%
c	Belanja Bunga	3.203.611,00	0	0	0	0	-
d	Belanja Hibah	23.659.840.000,00	60.426.820.482,00	26.214.150.000,00	20.131.250.000,00	38.916.629.738,66	13,25%
e	Belanja Bantuan Sosial	4.775.500.000,00	5.320.164.000,00	5.006.846.900,00	1.900.210.067,00	1.362.747.712,00	-26,91%
2	BELANJA MODAL	271.631.463.605,45	238.450.051.394,00	350.242.695.163,00	302.905.186.325,00	214.738.626.462,00	-5,71%
a	Belanja Modal Tanah	5.913.166.288,00	2.712.468.582,00	15.182.580.830,00	1.426.822.223,00	1.366.737.628,00	-30,66%
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.362.408.805,11	30.697.894.209,00	47.911.334.963,00	92.119.110.371,00	60.149.712.867,00	0,76%
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.449.427.715,00	101.203.140.270,00	129.228.855.183,00	120.929.203.159,00	81.767.134.480,00	11,21%
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.794.391.069,00	95.548.943.554,00	136.780.811.688	78.151.129.816,00	68.152.195.927,00	-17,31%
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.112.069.728,34	8.287.604.779,00	21.139.112.499,00	10.278.920.756,00	3.302.845.560,00	-20,12%
3	BELANJA TAK TERDUGA	45.100.000,00	143.847.450,00	54.000,00	21.459.165.632,00	2.844.016.117,00	181,80%
a	Belanja Tak Terduga	45.100.000,00	143.847.450,00	54.000,00	21.459.165.632,00	2.844.016.117,00	181,80%
B	TRANSFER	190.124.110.331,00	205.372.178.328,00	239.938.442.411,00	231.118.517.239,00	232.386.878.639,00	5,15%
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	342.876.751,00	1.727.775.421,00	1.879.456.891,00	0	2.254.773.433,00	60,14%
a	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	342.876.751,00	1.727.775.421,00	1.879.456.891,00	0	2.254.773.433,00	60,14%
2	TRANSFER BANTUAN	189.781.233.580,00	203.644.402.907,00	238.058.985.520,00	231.118.517.239,00	230.132.105.206,00	4,94%

N0.	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan
	KEUANGAN						
a	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	188.900.729.900,00	202.763.885.027,00	237.170.736.400,00	230.214.805.639,00	230.132.105.206,00	5,06%
b	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	880.503.680,00	880.517.880,00	888.249.120,00	903.711.600,00	0	0,87%

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan fluktuasi, dimana pada tahun 2017, realisasi belanja sebesar Rp1.328 trilyun, kemudian meningkat menjadi Rp1.494, trilyun pada tahun 2021, Pada tahun 2019 adalah tahun yang mengalami realiasi paling tinggi sebesar Rp1.573 trilyun. Selama periode tahun 2017-2021, belanja daerah bertumbuh rata-rata 2,99% per tahun. Porsi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi sebesar 69,90% pada tahun 2021, sementara porsi belanja modal 14,37% pada tahun 2021. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja keuangan Kabupaten Polewali Mandar terus membaik.

Gambar 3. 4 Proporsi Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Diolah dari Data Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

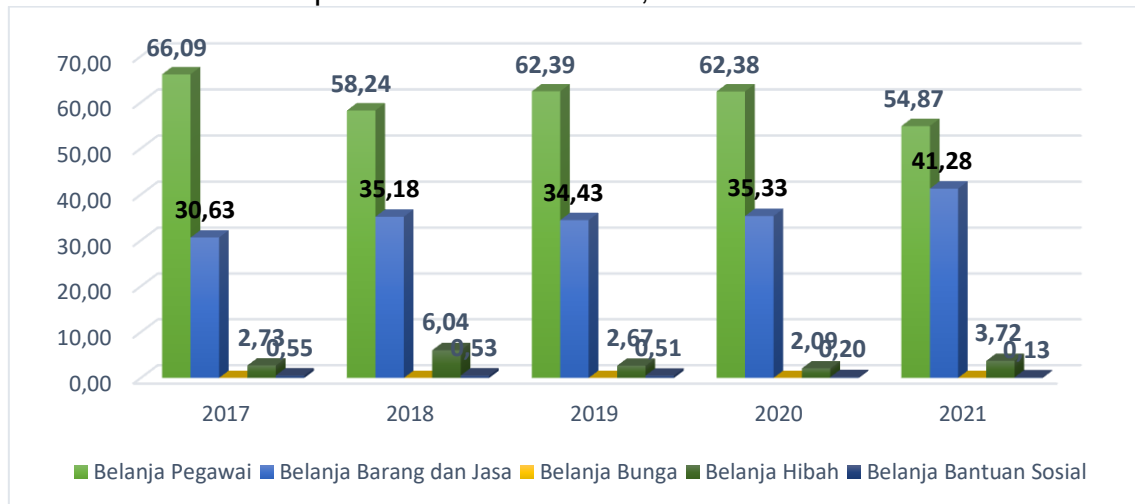
1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi jangka pendek, komponen dari belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah dan bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi untuk lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, dimana pada tahun 2017 jumlah belanja operasi sebesar Rp866,55 milyar yang meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp1.044 trilyun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh belanja pegawai, walaupun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, porsi belanja pegawai cenderung menurun dari

66,09% pada tahun 2017 menjadi 54,87% pada tahun 2021. Pada periode yang sama, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0,10%. Hal ini berarti proporsi terbesar pada belanja operasi masih terserap ke dalam belanja pegawai.

Gambar 3. 5 Proporsi Anggaran Belanja Operasi Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

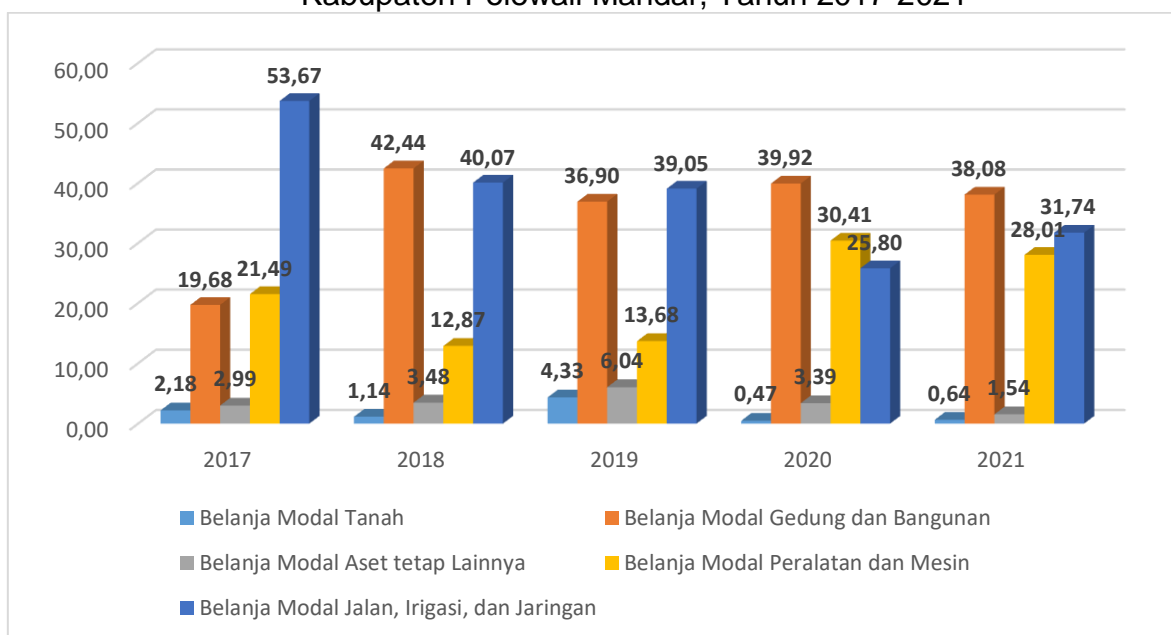


Sumber Data : Data Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari lima jenis belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 belanja modal mengalami penurunan dari Rp271,63 milyar menjadi Rp214,73 milyar atau dalam rata-rata pertumbuhannya -5,71% per tahun.

Gambar 3. 6 Proporsi Komposisi Belanja Modal Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021



Sumber Data : Diolah dari Data Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Proporsi komposisi belanja modal pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami perubahan trend. Pada tahun 2017 proporsi tertinggi pada belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan sebesar 53,67%. Komposisi ini secara perlahan mengalami perubahan dimana pada tahun 2021 proporsi komposisi belanja modal tertinggi pada belanja modal gedung dan bangunan yaitu sebesar 38,08% disusul belanja modal Jalan, irigasi dan jaringan mencapai 31,74%. Sebaliknya, belanja modal tanah meskipun memperoleh alokasi belanja modal terkecil, akan tetapi proporsinya cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebesar 0,64%.

**Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Belanja Modal Menurut Jenisnya
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2022**

No.	Uraian Belanja Modal	2017		2018		2019		2020		2021		2022*	
		Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)
1	Tanah	6.120.996.000,00	96,6	9.379.489.213,00	28,92	15.563.806.000,00	97,55	1.578.411.682,00	90,4	1.366.737.628,00	99,96	5.100.000.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	65.764.402.000,00	88,74	35.629.567.483,00	86,16	54.652.244.807,00	87,67	75.328.738.840,00	122,29	60.149.712.867,00	95,01	56.603.699.668,00	
3	Gedung dan Bangunan	55.371.865.000,11	96,52	102.226.314.000,00	99,00	134.094.416.748,00	96,37	127.931.707.783,00	94,53	81.767.134.480,00	94,53	63.894.097.180,00	
4	Jalan dan Jar. Irigasi	150.949.400.000,73	96,58	96.992.620.400,00	98,51	150.918.528.804,00	90,63	83.361.677.997,55	93,75	68.152.195.927,00	93,21	40.686.940.475,00	
5	Aset tetap lainnya	9.077.678.000,41	89,36	10.250.986.994,00	80,85	21.703.937.284,00	97,4	10.197.046.486,00	100,8	3.302.845.560,00	92,99	3.685.085.055,00	

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022, Ket : *) Data Target

3. Belanja Tak Terduga

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 realisasi Belanja tak terduga mengalami peningkatan yang sangat signifikan hal ini terjadi di tahun 2021 sebesar Rp2.844 milyar dengan nilai rata rata pertumbuhannya diatas 100% atau sebesar 181,80% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penanganan pandemi covid-19.

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tak Terduga Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017–2021

URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Belanja tak terduga	45.100.000,00	143.847.450,00	54.000,00	21.459.165.632,00	2.844.016.117,00	181,80

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

4. Belanja Transfer

Tabel 3. 5 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017–2021

NO.	URAIAN	REALISASI 2017 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan
A	TRANSFER	190.124.110.331,00	205.372.178.328,00	239.938.442.411,00	231.118.517.239,00	232.386.878.639,00	5,43
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	342.876.751,00	1.727.775.421,00	1.879.456.891,00	-	2.254.773.433,00	108,16
a	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	342.876.751,00	1.727.775.421,00	1.879.456.891,00	-	2.254.773.433,00	108,16
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	189.781.233.580,00	203.644.402.907,00	238.058.985.520,00	231.118.517.239,00	230.132.105.206,00	5,22
a	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	188.900.729.900,00	202.763.885.027,00	237.170.736.400,00	230.214.805.639,00	230.132.105.206,00	5,33
b	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	880.503.680,00	880.517.880,00	888.249.120,00	903.711.600,00	-	0,66

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan menjelaskan bahwa dana transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, melihat realisasi belanja transfer lima tahun terakhir terdapat kenaikan tiap tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,43% pertahun, dana Transfer Bantuan keuangan ke desa adalah penyumbang kontribusi terbesar dalam belanja transfer dan diikuti oleh komponen lainnya.

- Kinerja Pembiayaan Daerah

**Tabel 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017–2021**

URAIAN PEMBIAYAAN	TAHUN 2017 (REALISASI) (Rp)	TAHUN 2018 (REALISASI) (Rp)	TAHUN 2019 (REALISASI) (Rp)	TAHUN 2020 (REALISASI) (Rp)	TAHUN 2021 (REALISASI) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.595.328.850,89	26.193.244.305,74	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	30.009.903.199,94	20,49
Penggunaan SILPA	23.595.328.850,89	26.193.244.305,74	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	30.009.903.199,94	20,49
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-				
Penerimaan Piutang Daerah	-	-				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.484.640,00	0	0	0	0	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	49.484.640,00	-				
PEMBIAYAAN NETTO	23.545.844.210,89	26.193.244.305,74	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	30.009.903.199,94	20,55

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Dalam periode tahun 2017-2020, terlihat angka pertumbuhannya sebesar 20,49%, dimana kita dapat melihat pada tahun 2017 terdapat komponen pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49.484.640,00 yaitu pembayaran pinjaman pemerintah daerah.

3.1.2 NERACA DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah daerah salah satunya adalah pembuatan Neraca.

Dengan adanya neraca daerah, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah serta dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Dari data yang tersedia, porsi pertumbuhan terbesar aset pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terdapat pada aset tetap yang meningkat dari Rp1.539,80 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp2.178,87 triliun pada tahun 2021.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Tabel 3. 7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah (Milyar Rupiah)
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
A	ASET	1.761,51	1.945,86	2.248,22	2.350,17	2.421,27	8,28%
1	ASET LANCAR	77,56	108,47	129,31	114,41	109,01	8,88%
a.	Kas	26,8	28,16	59,77	51,57	72,91	28,43%
b.	Piutang	52,42	83,53	69,52	71,26	43,02	-4,82%
c.	Penyisihan Piutang	-14,36	-17,75	-20,29	-23,27	-25,66	15,62%
d.	Beban dibayar di muka	1,88	1,15	1,72	-	-	-4,35%
e.	Persediaan	10,82	13,38	18,59	14,85	18,73	14,70%
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	26,67	25,87	25,94	26,64	38,814	9,84%
a	Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	
a.1	Investasi dalam Dana Bergulir	9,78	9,77	9,74	9,74	9,74	-0,10%
a.2	Penyisihan Dana Bergulir	-9,78	-9,77	-9,74	-9,74	-9,74	-0,10%
b	Investasi Permanen	26,67	25,87	25,94	26,64	38,814	9,84%
b.1	Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan	10,4	10,4	10,4	10,4		0,00%
b.2	Penyertaan Modal Kepada BUMD	16,27	15,47	15,54	16,24		-0,06%
3	ASET TETAP	1.539,80	1.696,13	1.971,82	2.112,32	2.178,87	9,07%
a.	Tanah	309,42	311,68	345,36	347,4	349,15	3,07%
b.	Peralatan dan mesin	267,86	314,09	354,92	457,57	493,08	16,48%
c.	Gedung dan bangunan	724,02	869,46	979,23	1.096,56	1.166,28	12,66%
d.	Jalan, irigasi, dan jaringan	689,57	776,52	920,99	997,91	1.069,35	11,59%
e.	Aset tetap lainnya	10,7	11,83	9,056	9,09	7,53	-8,41%
f.	Konstruksi dalam pengerjaan	20,68	2,19	58,38	26,65	35,08	14,12%
g.	Akumulasi Penyusutan	-482,45	-589,64	-696,12	-822,86	-941,6	18,20%
4	ASET LAINNYA	117,48	115,38	121,15	96,79	94,57	-5,28%
a.	Tagihan penjualan angsuran	15,14	14,25	13,37	12,48	12,45	-4,77%
b.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0	0		0,86	-	
c.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0		-	-	
d.	Aset tak berwujud	1,79	2,01	2,34	2,37	2,36	7,16%
e.	Amortisasi Aset tak berwujud	-1,36	-1,62	-1,73	-1,89	-2,03	10,53%
f.	Aset Lainnya	101,91	100,74	107,17	82,97	81,79	-5,35%
B	KEWAJIBAN	26,97	34,7	40,405	40,701	66,014	25,08%

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,97	34,7	40,405	40,701	66,014	25,08%
a.	Utang kepada pihak ketiga	0	0	0	0,001		
b.	Utang perhitungan pihak ketiga	0,48	1,04	0,007	0		-87,92%
c.	Utang Bunga	0	0	0	0		
d.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0	0	0	0		
e.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0		
f.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0		
g.	Utang Belanja	26,49	33,66	32,856	35,03	58	21,64%
h.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	7,542	5,67	8,01	1,52%
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	
a.	Utang Pemerintah Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
b.	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	
C	EKUITAS DANA	1.734,55	1.911,16	2.207,81	2.309,47	2.355,25	7,95%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (2+3)		1.761,52	1.945,86	2.248,22	2.350,17	2.421,27	8,28%

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Adapun total hutang yang masih menjadi tanggungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada akhir tahun 2021 sebesar Rp66,014 milyar. Beberapa rasio dapat diterapkan untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah, diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang. Rasio likuiditas atau rasio lancar menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang jatuh tempo pada saat ditagih. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan nilai aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 3. 8 Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	persen	287,58	312,59	320,03	281	165
2.	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	persen	240	271	270	245	137
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	persen	1,53	1,78	1,80	2	3
4.	Rasio hutang terhadap modal	persen	1,55	1,82	1,83	2	3

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 2017-2021 tergolong baik, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka lebih dari 1. Angka ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu dekat.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2017-2021, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada dua aspek ini dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Salah satu yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh

aparatus pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam belanja operasi dalam kelompok belanja pegawai dan barang dan jasa meliputi : (1) gaji dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, (4) pemungutan pajak daerah. Sedangkan alokasi belanja langsung, meliputi belanja : (1) honorarium PNS, (2) uang lembur, (3) beasiswa pendidikan PNS, (4) kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek PNS, (5) premi asuransi kesehatan, (6) makanan dan minuman pegawai, (7) pakaian dinas dan atributnya, (8) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (9) perjalanan dinas, (10) perjalanan pindah tugas, (11) pemulangan pegawai, (12) belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dan lain lain). Alokasi belanja daerah tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

**Tabel 3. 9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 394.029.310.063	Rp. 396.719.524.964	Rp. 460.470.210.402	Rp. 464.639.221.118	Rp. 411.707.266.091
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 116.595.753.147	Rp. 132.135.777.095	Rp. 142.348.100.596	Rp. 129.790.498.815	Rp. 143.157.163.339
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	Rp. 3.376.800.000	Rp. 14.238.000.000	Rp. 7.149.717.745	Rp. 7.266.765.000	Rp. 18.368.044.047
4	Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 1.091.477.884	Rp. 1.189.876.169	Rp. 2.024.180.411	-	Rp. 2.254.773.433
5	Belanja Honorarium PNS	Rp. 4.833.035.200	Rp. 3.669.099.000	Rp. 6.092.282.500	Rp. 10.388.512.448	Rp. 1.030.685.000
6	Belanja Uang Lembur	Rp. 1.904.217.500	Rp. 1.650.535.000	-	Rp. 3.283.200	-
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp. 417.500.000	Rp. 410.000.000	Rp. 455.000.000	Rp. 355.000.000	Rp. 400.000.000

No.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis PNS	Rp. 1.189.385.000	Rp 191.427.600	Rp 2.098.967.769	Rp 544.070.210	Rp 2.285.793.006
9	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Rp. 9.244.972.724	Rp 10.704.704.773	-	-	Rp 28.525.764.720
10	Belanja Makanan dan Minuman pegawai	Rp. 33.260.000	Rp 78.818.000	Rp 19.882.721.623	Rp 12.057.025.614	Rp 19.067.301.623
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp. 604.038.000	Rp 1.367.895.000	Rp 736.854.700	Rp 596.464.100	Rp 708.413.982
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp. 762.315.000	Rp 995.447.000	Rp 1.447.418.584	Rp 485.466.800	Rp 991.896.000
13	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 44.594.959.932	Rp 53.587.447.032	Rp 51.158.920.345	Rp 38.271.940.126	Rp 50.410.719.265
14	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	Rp -	Rp 13.255.000	-	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	-	Rp -	-	-	-
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubele, Peralatan dan Perlengkapan dll)	Rp. 309.352.165.691	Rp 238.450.051.394	Rp 143.608.186.097	Rp 126.918.684.756	Rp 214.738.626.462

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Tabel 3. 10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	persentase
1.	Tahun Anggaran 2017	846.201.775.303	1.328.408.517.172	63,70
2.	Tahun Anggaran 2018	855.388.603.027	1.443.708.163.523	59,25
3.	Tahun Anggaran 2019	837.485.815.772	1.333.413.127.271	62,81
4.	Tahun Anggaran 2020	791.316.932.187	1.288.903.029.303	61,39
5.	Tahun Anggaran 2021	893.646.446.968	1.520.021.546.542	58,79

Sumber Data : Diolah dari Data Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Selama periode 2018-2021 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Polewali Mandar cenderung berfluktuasi. Alokasi belanja pada tahun 2018 mencapai 59,25% dari total belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Pada tahun 2019, persentase tersebut meningkat menjadi 62,81%. Sebaliknya, pada tahun 2021 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun sebesar 2,60% atau sebesar 58,79% dibanding dengan tahun 2020 sebesar 61,39%.

Penurunan proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada upaya pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib pelayanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3. 11 Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
A	Belanja Operasi	397.752.190.425,00	412.685.300.385,00	427.445.264.525,00	422.863.176.056,00	431.422.258.938,00	2,07
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	394.029.310.063,00	396.719.524.964,00	418.416.089.889,00	415.596.411.056,00	411.707.206.091,00	1,14
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional Bupati dan Wakil Bupati	3.376.800.000,00	14.238.000.000,00	7.149.717.745,00	7.266.765.000,00	17.460.279.414,00	103,44
3	Belanja Bunga	3.203.611,00	-	-	-		
4	Belanja Bagi Hasil	342.876.751,00	1.727.775.421,00	1.879.456.891,00		2.254.773.433,00	144,22
B	Pembiayaan Pengeluaran	49.484.640,00	-	-	-		
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-		
2	Pembayaran Pokok Utang	49.484.640,00	-	-	-		
TOTAL (A+B)		397.801.675.065,00	412.685.300.385,00	427.445.264.525,00	422.863.176.056,00	431.422.258.938,00	2,07

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintahan daerah pada periode 2019-2024 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 12 Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2022

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:	1.331.125.381.014,85	1.445.622.898.941,37	1.605.308.497.517,72	1.511.670.321.127,31	1.517.057.262.760,70
2	Belanja Daerah	1.328.359.032.532,00	1.443.708.163.523,00	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	1.494.721.491.473,66
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	49.484.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit riil		2.716.863.842,85	1.914.735.418,37	31.956.927.835,72	-8.351.225.414,69	22.335.771.287,04

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Berdasarkan analisis pendapatan dan belanja daerah pada bagian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa pada periode sebelumnya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menganut anggaran defisit pada tahun 2017 dan 2021, kemudian anggaran surplus pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Surplus yang terjadi pada tahun tersebut menggambarkan bahwa seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya. Akan tetapi, di tahun 2021 belanja daerah harus ditutupi dari penerimaan pembiayaan, dengan menggunakan SiLPA tahun lalu.

Tabel 3. 13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	26.312.192.693,34	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	50.746.586.693,60	73.077.849.615,54
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Selama periode 2017-2021, komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Polewali Mandar sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Komponen-komponen penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit tidak nampak signifikan, terdapat komponen penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang bersama-sama SiLPA menutup defisit pada tahun berkenaan.

Dari seluruh komponen penerimaan pembiayaan, SiLPA tahun lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan terbesar. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senantiasa mengalami peningkatan dari Rp26,31 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp73,08 milyar pada tahun 2021.

**Tabel 3. 14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2017 - 2021**

NO.	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021		RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp.000)	% dari SiLPA	(Rp.000)	% dari SiLPA	(Rp.000)	% dari SiLPA	(Rp.000)	% dari SiLPA	(Rp.000)	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	26.312.192.693,74	100,00%	28.107.979.724,11	100%	60.064.907.559,83	100,00%	50.445.653.774,60	100%	73.077.849.615,54	100%	0,37%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-14.898.004.181,08	-56,62%	-21.400.637.704,33	-76%	- 296.522.308,76	-0,49%	27.594.405.490,63	55%	57.015.342.848,60	78%	23,39%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-11.807.075.002,00	-44,87%	-10.230.199.035,49	-36%	-14.291.603.634,71	-23,79%	- 3.268.350.525,00	-6%	- 6.593.651.797,00	-9%	0,13%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 750.422.975,00	-2,85%	- 883.496.100,00	-3%	5.310.026.000,00	8,84%	29.965.120.186,17	59%	56.114.502.618,70	77%	0,33%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya		-		0%				0%			
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	9.643.252.724,00	36,65		0%				0%			
7.	Kegiatan lanjutan	-	-		0%					-	-	-

Sumber Data : Diolah dari Data Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/ pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah periode sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PAD dan dana transfer.

**Tabel 3. 15 Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024**

NO. URUT	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PROYEKSI	
						PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
4	PENDAPATAN	1.605.308.497.517,72	1.510.402.292.756,77	1.517.057.262.760,70	1.421.131.590.378,81	1.506.039.602.012,00	1.506.039.602.012,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.713.736.017,38	211.995.061.141,77	260.705.673.018,70	210.357.898.374,81	222.283.148.450,00	222.283.148.450,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	24.370.100.225,58	24.377.042.874,46	25.645.071.245,00	30.612.219.237,30	33435000000	33435000000
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	12.249.690.554,00	11.716.796.739,00	19.298.257.431,00	11.368.117.056,37	19.038.915.800,00	19.038.915.800,00
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.019.024.496,35	3.542.887.063,00	3.488.099.115,00	3.914.085.096,00	4.347.813.372,00	4.347.813.372,00
04.01.04	Lain-lain PAD Yang Sah	133.074.920.741,45	172.358.334.465,31	212.274.245.227,70	164.463.476.958,14	165.461.419.278,00	165.461.419.278,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.370.062.935.500,34	1.226.152.350.182,00	1.195.396.616.944,00	1.147.376.631.200,00	1.277.756.453.562,00	1.277.756.453.562,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.130.429.457.452,00	1.012.302.581.907,00	961.122.278.203,00	1.098.793.873.424,00	1.226.310.322.615,00	1.226.310.322.615,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	239.633.478.048,34	213.849.768.275,00	234.274.338.741,00	48.582.793.776,00	51.446.130.947,00	51.446.130.947,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	63.397.060.831,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	63.397.060.831,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00

Sumber Data : Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 2 tahun ke depan guna membiayai belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer dalam program-program RPJMD. Belanja daerah Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 16 Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2024**

Uraian	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PROYEKSI	
					PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
BELANJA	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	1.493.754.311.260,66	1.461.063.483.530,50	1.506.039.602.012,00	1.506.039.602.012,00
BELANJA OPERASI	983.170.378.108,00	964.538.677.346,00	1.043.926.381.038,66	1.066.435.143.357,50	1.109.033.750.809,00	1.109.033.750.809,00
Belanja Pegawai	613.429.120.954,00	601.699.768.133,00	573.299.052.386,00	628.605.345.675,00	638.606.484.220,00	638.606.484.220,00
Belanja Bunga			-		-	-
Belanja Subsidi			-		-	-
Belanja Barang dan Jasa	338.520.260.254,00	340.807.449.146,00	430.151.984.202,00	393.834.050.632,50	419.922.176.789,00	419.922.176.789,00
Belanja Hibah	26.214.150.000,00	20.131.250.000,00	38.932.596.738,66	39.872.122.450,00	43.709.789.800,00	43.709.789.800,00
Belanja Bantuan Sosial	5.006.846.900,00	1.900.210.067,00	1.542.747.712,00	4.123.624.600,00	6.795.300.000,00	6.795.300.000,00
BELANJA MODAL	350.242.695.163,00	302.905.186.325,00	214.596.525.466,00	170.731.524.482,00	166.437.563.552,00	166.437.563.552,00
Belanja Tanah	15.182.580.830,00	1.426.822.223,00	1.366.737.628,00	4.710.950.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	47.911.334.963,00	92.119.110.371,00	60.088.093.371,00	61.198.810.268,00	47.625.823.541,00	47.625.823.541,00
Belanja Bangunan dan Gedung	129.228.855.183,00	120.929.203.159,00	81.767.134.480,00	65.250.096.683,00	36.864.513.761,00	36.864.513.761,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.780.811.688,00	78.151.129.816,00	68.152.195.927,00	37.331.885.855,00	77.829.145.016,00	77.829.145.016,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	21.139.112.499,00	10.278.920.756,00	3.222.364.060,00	2.239.781.676,00	3.468.081.234,00	3.468.081.234,00
Belanja Aset Lainnya			-		-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	54.000,00	21.459.165.632,00	2.844.016.117,00	2.124.932.949,00	6.259.928.891,00	6.259.928.891,00
Belanja Tidak Terduga	54.000,00	21.459.165.632,00	2.844.016.117,00	2.124.932.949,00	6.259.928.891,00	6.259.928.891,00
BELANJA TRANSFER	239.938.442.411,00	231.118.517.239,00	232.387.388.639,00	221.771.882.742,00	224.308.358.760,00	224.308.358.760,00
Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.879.456.891,00	-	2.254.773.433,00	3.156.376.342,00	4.762.707.760,00	4.762.707.760,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	238.058.985.520,00	231.118.517.239,00	230.132.105.206,00	218.615.506.400,00	219.545.651.000,00	219.545.651.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Desa	237.170.736.400,00	230.214.805.639,00	230.132.105.206,00	218.615.506.400,00	219.545.651.000,00	219.545.651.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	888.249.120,00	903.711.600,00	-	-	-	-
Jumlah Belanja	1.573.351.569.682,00	1.520.021.546.542,00	1.493.754.311.260,66	1.461.063.483.530,50	1.506.039.602.012,00	1.506.039.602.012,00

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2023

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat tingginya kebutuhan belanja maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk menambah belanja yang masih prioritas.

Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi dengan memperhatikan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembiayaan pokok utang dan penyertaan modal.

Berikut tabel proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3. 17 Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019 – 2024**

NO.	URAIAN	REALISASI				PROYEKSI	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	50.742.078.327,60	73.077.849.615,54	74.174.017.360,00	75.286.627.620,00
	Penggunaan SILPA	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	50.742.078.327,60	73.077.849.615,54	74.174.017.360,00	75.286.627.620,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
01:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	8.756.140.892,00	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	50.742.078.327,60	64.321.708.732,54	74.174.017.360,00	75.286.627.620,00

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2023

3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I (pertama) dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Prioritas II

Prioritas II (kedua) dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.

Prioritas III

Prioritas III (ketiga) dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 3. 18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024**

URAIAN	REALISASI (TAHUN)				PROYEKSI (TAHUN)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas riil			903.545.421.833,04	833.894.415.359,00	816.928.027.992,00	816.928.027.992,00
kemampuan keuangan						
Prioritas I (40%)			361.418.168.733,22	333.557.766.143,60	326.771.211.196,80	326.771.211.196,80
Prioritas II (35%)			316.240.897.641,56	291.863.045.375,65	285.924.809.797,20	285.924.809.797,20
Prioritas III (25%)			225.886.355.458,26	208.473.603.839,75	204.232.006.998,00	204.232.006.998,00

Sumber Data : Diolah dari Data Badan Keuangan dan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2023

BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Kabupaten Polewali Mandar beberapa permasalahan utama/ pokok yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Rendahnya Taraf Hidup

Persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang serius, yang tidak mudah diatasi dan ditanggulangi oleh pemerintah. Berbagai upaya program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya namun kemiskminan masih belum dapat dituntuskan. Masalah kemiskinan mempengaruhi rendahnya taraf hidup masyarakat di kabupaten Polewali Mandar.

Sampai saat ini di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi masalah rendahnya taraf hidup Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar.

Hingga tahun 2021 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat masih dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar.

Terdapat beberapa penyebab permasalahan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin;
- b. Masih Kurangnya Lapangan Pekerjaan;
- c. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- d. Masih rendahnya Skor Pola Pangan Harapan;
- e. Masih rendahnya jumlah Desa Maju dan Mandiri.

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)

Kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai suatu daerah dapat dilakukan dengan mengukur mutu pembangunan tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) komponen antara lain; (1) keberhasilan dalam kesehatannya yaitu dilihat dari kemampuan hidup secara fisik dengan melihat angka harapan hidup; (2) kemampuan untuk merefleksikan keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; (3) Besarnya barang dan jasa yang dapat disediakan oleh masyarakat bagi warganya yaitu dengan melihat paritas daya beli masyarakat. Dengan kata lain Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan tiga dimensi, yaitu (1) Indeks Kesehatan, (2) Indeks Pendidikan, (3) Ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun 2019 pada angka 63,74 menjadi 63,84 pada tahun 2020 dan 64,23 pada tahun 2021.

Meskipun IPM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Polewali Mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, bahkan daerah lainnya di Indonesia.

Terdapat beberapa penyebab permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas pendidikan, ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- b. Masih rendahnya derajat kesehatan, ditandai dengan angka harapan hidup dan masih tingginya prevalensi stunting;
- c. Belum optimalnya pengeluaran perkapita masyarakat yang ditandai dengan Indeks Pengeluaran
- d. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, ditandai dengan indeks pembangunan gender dan predikat kabupaten layak anak.

3) Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal yakni sebesar 1,86. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan disebabkan oleh (1). Masih rendahnya industri pengolahan berbasis bahan baku komoditi pangan yang merupakan unggulan daerah; (2). Masih kurangnya Serapan jumlah tenaga kerja di sektor industri; (3). Tingginya biaya ekonomi Produk industri berdaya saing rendah (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat; (4). Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh (1). Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tambah petani; 2. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir; (3). Menurunnya luas lahan pertanian; (4). Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian; (5). Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan; (6). Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian; (7). Masih sangat tradisionalnya sarana tangkap nelayan; (8). Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; (9). Masih kurangnya jumlah usaha pengolahan hasil perikanan; (10). Belum terintegrasinya pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara hulu dan hilir; (11). Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan; (12). Rendahnya produktivitas hasil hutan.

Pandemi covid-19 pada tahun 2020 akan memberikan dampak yang besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan data BPS 2021, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86% akibat terjadinya perlambatan pada sejumlah sektor ekonomi, yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya.

4) Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

Masalah ketahanan pangan sudah lama menjadi pokok perhatian dan menjadi isu strategis nasional dan daerah, masalah pangan ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dimana dua fenomena tersebut saling terkait dan mempunyai hubungan sebab akibat, bahkan angka kemiskinan dan angka kerawanan pangan sering kali di buat setara. Persoalan kerawanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar saat ini ditunjukkan dengan indikator masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar yang hingga tahun 2021 sebaran penduduk miskin di Sulawesi Barat masih dominan berada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 15,68%.

Berbagai usaha mencegah permasalahan kerawanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan baik melalui program nasional maupun inovasi program lokal daerah yaitu dengan adanya deteksi kerawanan pangan melalui peta rawan pangan daerah untuk melihat kondisi kerawanan pangan di daerah perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data yang diolah oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan menggunakan 3 (tiga) aspek indikator utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan, disimpulkan bahwa status kewaspadaan gizi dan pangan perkecamatan di tahun 2021 terdapat 1 (satu) kecamatan dengan status waspada.

5) Belum Optimalnya Kondisi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu peningkatan kualitas infrastruktur secara merata masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Fokus permasalahan pokok di bidang infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah dan infrastruktur permukiman. Infrastruktur wilayah dimaksud adalah infrastruktur jalan dan infrastruktur jaringan irigasi, sedangkan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur air minum dan sanitasi, jalan lingkungan dan drainase, serta masalah hunian (rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh).

Kondisi kualitas jaringan jalan tahun 2021 mencapai 74,90% dalam kondisi mantap, khusus jaringan jalan kabupaten 73,51 dalam kondisi mantap dari total panjang jalan kabupaten 874 km. Panjang jalan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 522 Tahun 2018 tentang Penetapan ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Polewali Mandar.

Kualitas infrastruktur jaringan irigasi di seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) daerah irigasi, persentasenya baru mencapai 73,04% pada tahun 2021. Kondisi bendung yang sudah tua akan rentan mengalami kerusakan sehingga sangat dibutuhkan pemeliharaan bendung meskipun kondisi bendung di akhir tahun 2020 100% dalam kondisi baik tetapi di awal tahun 2021 dan 2022 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan terjadinya kerusakan bangunan bendung di beberapa titik antara lain bendung riso dan bendung lebani.

Masih belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur permukiman, dimana capaiannya diukur dari persentase akses air minum, akses sanitasi, jalan lingkungan dan drainase serta akses listrik. Pada tahun 2021 Persentase akses air minum mencapai 85,37%. Sementara Akses sanitasi yang layak pada tahun 2021 mencapai 92,14%, luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2021 seluas 280,22 Hektar terdiri dari kewenangan kabupaten seluas 30,02 ha, kewenangan Provinsi 14,96 Hektar dan kewenangan pusat 234,94 ha. Untuk sektor perumahan berdasarkan database

RTLH jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani sebanyak 4.400 unit pada tahun 2021.

Permasalahan yang sangat berkaitan dengan pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga upaya pelestarian sumber daya hutan dan pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem. Antisipasi dini pada sejumlah daerah rawan bencana juga harus menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

6) Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup diukur dari kualitas air, udara dan tutupan lahan. Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup suatu daerah maka digunakan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan angka indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berdasarkan Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa IKLH Tahun 2021 pada angka 66,63. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,59 persen.

7) Belum Optimalnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas birokrasi agar memiliki kemampuan menjalankan pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa kehadiran pemerintahan yang berkualitas, kita tidak mungkin mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan yaitu kesejahteraan masyarakat. Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanahkan dalam peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020, maka Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Untuk mengetahui kualitas Reformasi Birokrasi suatu Instansi, maka Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala setiap tahunnya. Berdasarkan Surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/545/RB.06/2022 tanggal 07 Maret 2022, maka diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali mandar adalah 67,21 atau termasuk Kategori B. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Polewali Mandar, belum memadai. Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi masih dinilai belum optimal yaitu pada area : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Beberapa kondisi yang menggambarkan belum optimalnya kualitas Reformasi Birokrasi tersebut antara lain :

- a. Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 masih berada pada Predikat BB dengan nilai 71,95. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi SAKIP belum optimal;
- b. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih berada pada Level 3,110. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas SPIP Kabupaten Polewali Mandar, masih belum optimal;
- c. Hasil evaluasi pemerintah terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 berada pada indeks 2,71 atau

kategori cukup baik. Capaian ini pun menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum berhasil membangun kematangan tata kelola dan layanan publik berbasis elektronik;

- d. Hasil survei kepuasan pelayanan publik tahun 2021 menghasilkan kategori sangat baik. Meskipun demikian, hasil survei ini sifatnya masih terbatas dan dilakukan internal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik dirasakan masih belum optimal.

Sedangkan permasalahan pembangunan pada level sektoral menurut urusan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar dijabarkan menjadi :

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar :

1. Pendidikan

- Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar (khususnya di daerah terpencil);
- Masih rendahnya partisipasi pendidikan tingkat SMP;
- Belum optimalnya Mutu dan kualitas tenaga kependidikan;
- Masih kurangnya data dan informasi usia wajib belajar yang tidak sekolah.

2. Kesehatan

- Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi;
- Masih tingginya prevalensi anak stunting;
- Masih tingginya angka kesakitan (khususnya penyakit menular);
- Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara optimal;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (khususnya rumah sakit);
- Masih Rendahnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum meratanya kualitas jaringan jalan;
- Masih terdapat ruas jalan yang butuh pembangunan dan penggantian jembatan;
- Belum optimalnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya;

- Masih rendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan sistem irigasi;
- Belum optimalnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi; yang layak terutama pada daerah terpencil dan masyarakat miskin;
- Belum berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan kawasan perkotaan;
- Masih buruknya kondisi drainase lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan terjadinya banjir pada saat musim hujan;
- Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- Masih rendahnya kualitas PSU Perumahan formal;
- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- Belum adanya perda penanganan kawasan kumuh.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya peningkatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan Masyarakat;
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran
- Belum optimalnya penanganan kawasan rawan benca.

6. Sosial

- Masih rendahnya cakupan jaminan sosial;
- Belum optimalnya penyaluran bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah (belum tepat sasaran).
- Belum tersedianya Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan dasar :

1. Tenaga Kerja

- Rendahnya penyerapan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar;
- Rendahnya tingkat pendidikan pengangguran terbuka (pendidikan paling tinggi tamat SLTP);
- Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor non formal;
- Masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan;
- Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar;
- Rendahnya kualitas SDM angkatan kerja (berpendidikan paling tinggi tamat SLTP);
- Masih terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Belum optimalnya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

3. Pangan

- Masih tingginya persentase daerah terkategori waspada pangan;
- Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan local dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- Terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan khusus pertanian organik;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

4. Pertanahan

- Belum optimalnya tertib penataan aset pertanahan milik pemda.

5. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TPS3R;
- Minimnya unit pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan;
- Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik perkotaan yang terkelola.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya kepemilikan KTP Elektronik;
- Belum optimalnya perwujudan tertib administrasi kependudukan;
- Keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan;
- Masih belum meratanya kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Masih adanya desa yang masuk dalam kategori tertinggal;
- Belum Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana desa untuk percepatan pengurangan kemiskinan;
- Masih rendahnya daya kreatifitas dalam inovasi desa;
- Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
- Masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih kurangnya peserta KB aktif;
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan kualitas pengendalian penduduk;
- Belum tercukupinya alat kontrasepsi;
- Terbatasnya sumber daya manusia pengendalian penduduk.

9. Perhubungan

- Minimnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan;
- Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi.

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya cakupan layanan akses telekomunikasi dan informatika;
- Belum adanya standar keamanan informasi;
- Belum adanya standar operasional prosedur pada beberapa layanan IT;
- Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola IT.

11. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

- Masih rendahnya ketersediaan koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM);
- Masih rendahnya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
- Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil;
- Perlunya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi menjadi aktif;
- Kurang optimalnya pertumbuhan wirausaha baru

12. Penanaman Modal

- Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
- Fluktuatifnya waktu yang digunakan dalam pengurusan perizinan;
- Belum optimalnya system pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Belum optimalnya pemantauan kepada pelaku usaha.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;
- Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
- Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;

- Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

14. Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat;
- Belum optimalnya sistem satu data;
- Masih kurangnya tim teknis pengelola database pada sistem satu data;
- Masih rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
- Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mensupply data tepat waktu.

15. Persandian

- Masih rendahnya SDM pengelola persandian;
- Belum optimalnya sistem keamanan informasi.

16. Kebudayaan

- Belum Optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;
- Masih rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, sehingga proses regenerasi pelaku seni budaya belum optimal.

17. Perpustakaan

- Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan daerah;
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap bahan bacaan;
- Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional;
- Kurangnya promosi yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat;
- Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

18. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pelaksanaan manajemen kearsipan daerah;

- Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sumber daya kearsipan yang sesuai standar kearsipan;
- Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;
- Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan :

1. Kelautan dan Perikanan

- Sarana tangkap nelayan yang masih tradisional;
- Masih rendahnya produktivitas perikanan budi daya;
- Masih kurangnya jumlah usaha pengolahan hasil perikanan;
- Belum terintegrasinya pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara hulu dan hilir;
- Masih rendahnya SDM dan tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

2. Pariwisata

- Belum optimalnya manajemen pengelolaan pemasaran destinasi wisata unggulan dan kurangnya pembinaan untuk kelompok sadar wisata;
- Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi;
- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap SDM pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

- Masih terdapat lahan sawah yang belum beririgasi teknis dan tanam hanya sekali dalam setahun;
- Masih terdapat wilayah yang produktivitas padinya berada di bawah standar;
- Rendahnya produktivitas jagung;
- Rendahnya produktivitas kedelai;
- Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian non sawah untuk pengembangan palawija;

- Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- Menurunnya luas lahan pertanian;
- Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.

4. Perdagangan

- Rendahnya kualitas sarana, prasarana dan manajemen pengelolaan perdagangan;
- Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/toko modern;
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
- Kurang terjaminnya perlindungan konsumen dalam penggunaan produk dan standarisasi produk-produk yang dipasarkan;
- Belum optimalnya pelayanan meterologi.

5. Perindustrian

- Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah;
- Masih kurangnya serapan jumlah tenaga kerja di sektor industri;
- Belum berkembangnya sentra-sentra Industri Kecil Menengah;
- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

6. Transmigrasi

- Masih rendahnya serapan jumlah transmigrasi lokal;
- Sarana dan prasarana infrastruktur transmigrasi belum memadai.

4.1.4. Fungsi Penunjang urusan :

1. Pengawasan

- Masih rendahnya rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh OPD;

- Masih rendahnya temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD;
- Belum Optimalnya pengaduan masyarakat/ lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti

2. Perencanaan

- Perubahan Regulasi/aturan terkait perencanaan dan penganggaran yang terbit di pertengahan tahun
- Belum optimalnya rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pelaporan (pengendalian perencanaan) perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu;
- Kualitas dan kuantitas SDM perencana yang belum memadai;
- Belum adanya pejabat fungsional perencana.

3. Keuangan

- Belum optimalnya pelaksanaan e-planning dan e-budgeting saat penyusunan perencanaan;
- Belum Optimalnya Pemasukan Pajak dan Retribusi Daerah yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah;
- Belum konsistennya terhadap schedule tahapan penganggaran anggaran;
- Belum optimalnya sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD.

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Belum optimalnya pemenuhan formasi ASN terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
- Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur;
- Masih terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
- Masih rendahnya ASN yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

5. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan;
- Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan;
- Belum adanya pejabat fungsional perencana;
- Belum adanya pejabat fungsional peneliti;
- Masih minimnya pengembangan SDM kelitbangan.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Polewali Mandar, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Polewali Mandar, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Hasil analisis terhadap isu-isu strategis, akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1 ISU STRATEGIS GLOBAL DAN NASIONAL

1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan pencanangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Bila pada *Millenium Development Goals* (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan.

SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda nasional sehingga idealnya perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanaan pencapaian SDG's tersebut sebelum kemudian diturunkan menjadi agenda daerah. Hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum dan arahan dalam penyesuaiannya dengan RPJMN maupun RPJMD di daerah.

2. Pemanasan Global (*Global Warming*)

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

3. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai *Publik Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kehadiran pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan global secara dramatis yang nyatanya melumpuhkan roda perekonomian global, tak terkecuali Indonesia.

Penyebaran virus Covid-19 yang telah meluas membawa dampak pada perekonomian Indonesia dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Untuk mencegah penularan dan pengeluaran kas, banyak perusahaan, pabrik, dan toko melakukan pengurangan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kelompok pekerja yang paling berdampak karena Covid-19 adalah penduduk perdagangan rendah dan pedagang di jalan bahkan para pekerja diprediksi akan terancam kehilangan pekerjaan terutama dari kelompok pekerja bebas. Disusul terus bertambahnya perusahaan swasta yang tutup dan mengurangi jam kerja. Kondisi seperti ini akan semakin mengalami darurat, karena lonjakan jumlah pengangguran benar-benar terjadi. Pemerintah sudah menghitung dampak terburuk virus Corona dengan memperkirakan angka pengangguran tahun 2020 akan meningkat beriringan sedikitnya lapangan kerja serta peningkatan jumlah angka kemiskinan akibat penyebaran wabah virus Corona yang tak kunjung berakhir.

Dari sektor kesehatan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Reformasi kesehatan pasca pandemi dilakukan melalui orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup yang sehat. Selain itu penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, juga industri obat dan alat kesehatan harus menjadi prioritas. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan secara besar-besaran. Reformasi fundamental juga harus diterapkan dalam hal ketahanan pangan. Kelancaran rantai pasokan makanan

dari hulu produksi sampai hilir distribusi ke seluruh wilayah negeri harus dijamin. Pemerintah pun akan terus meningkatkan efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. Pemerintah tengah membangun cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.

4. Krisis Ekonomi

Bank Dunia atau memperkirakan bahwa 92% negara di dunia akan mengalami krisis pada 2020. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh lumpuhnya perekonomian akibat pandemi Virus Corona Covid-19. Paling tidak ada enam negara yang sudah jatuh ke dalam resesi. Negara tersebut adalah AS, Jerman, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Perancis. Negara-negara ini mengalami resesi karena dua kuartal pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi atau minus dalam dua kuartal. Sebagai contoh Pertumbuhan ekonomi AS minus 32,9% periode April-Juni 2020. Kontraksi ini jauh lebih tajam dari kuartal I yang tercatat minus 5%. Pertumbuhan ekonomi negatif karena semua mesin ekonomi tak bergerak. IMF memperkirakan ekonomi global akan tumbuh -4,9%, lebih rendah 1,9 poin dibanding outlook IMF pada April 2020, yakni -3%. Pandemi Covid-19 membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown.

4.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

1. Pembangunan Inklusif

Pembangunan Inklusif atau Pembangunan untuk semua sangat penting dan mendesak. Beberapa ciri terkandung dalam Pembangunan Inklusif antara lain pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama tetapi bukan tujuan; pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama semua warga negara; pertumbuhan ekonomi disertai kebijakan publik dapat berbuat banyak dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan serta kebijakan dan institusi-institusi sosial non ekonomi seperti jaminan sosial, tata dan kualitas pemerintahan memiliki posisi sama penting dengan kebijakan-

kebijakan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian jumlah pengangguran terbuka masih terus mengalami peningkatan.

Dari hasil survey BPS menunjukkan bahwa Pandemi covid-19 berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, 14,28% penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survey pada bulan Agustus 2018 jumlah pengangguran sebanyak 7.07 juta orang meningkat secara signifikan pada bulan Agustus 2020 menjadi 9.77 juta orang.

Kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

3. Pembangunan Konektivitas wilayah

Kebijakan pembangunan nasional untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan terpencil memberi peluang untuk berkembangnya pembangunan pada daerah-daerah yang sebagian wilayahnya masih terbelakang dan aksesibilitas terbatas, termasuk Polewali Mandar. Keterisolasian dan ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik horizontal sehingga harus diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi juga melalui pengembangan kerjasama antar wilayah.

4. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Prioritas utama pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan,

pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Sasaran makro pembangunan nasional manusia dan masyarakat meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Masyarakat, Indeks Gini, persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, serta kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan. Prioritas ini sangat relevan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang juga menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus kebijakan.

5. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil (pendek) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, posisi prevelansi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara dan peringkat kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara setelah Kamboja.

Berbagai program terkait pencegahan stunting telah diselenggarakan, namun belum berjalan efektif dalam skala yang memadai. Kajian Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar seperti akte kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian ASI eksklusif. Kajian tersebut juga menyimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangat penting dilakukan untuk mencegah stunting dan masalah gizi.

6. Pembangunan Sektor Unggulan

Pembangunan sektor unggulan oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar pembangunan nasional bisa lebih fokus pada sektor yang dapat memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan sektor lainnya. Sasaran pembangunan sektor unggulan, mencakup: (a) kedaulatan pangan, meliputi produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi; (b) kedaulatan energi; (c) maritim dan kelautan, meliputi memperkuat jati diri sebagai Negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; (d) pariwisata dan industri manufaktur; (e) ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, meliputi ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta lingkungan. Prioritas nasional ini sangat relevan dengan konteks Kabupaten Polewali Mandar yang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan.

6. Pemerataan Pembangunan Antar dan Intra Wilayah

Ada keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Upaya ini akan mewarnai pelaksanaan pembangunan nasional dalam lima tahun terakhir. Sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai, mencakup: (a) menurunnya kesenjangan antar kelompok ekonomi; (b) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif, meliputi perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan kurang mampu, pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, dan meningkatnya kualitas dan keterampilan pekerja.

Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah, mencakup: (a) pemerataan pembangunan antar wilayah, meliputi peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan. Kondisi Kabupaten Polewali Mandar yang masih terkategori sebagai daerah tertinggal dan masih memiliki kesenjangan pembangunan antara

wilayah perkotaan dan perdesaan, dapat memperoleh manfaat dari kebijakan nasional ini.

7. Standar Pelayanan Minimum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Untuk setiap jenis urusan, pemerintah daerah perlu menetapkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendesain perencanaan enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip SPM, agar pelayan publik dapat lebih dioptimalkan.

4.2.3 ISU REGIONAL SULAWESI

1. Konektivitas Wilayah

Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI. Sebagai pintu gerbang Sulawesi Barat dalam jalur transportasi Trans Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sangat strategis dalam arus mobilisasi barang dan manusia antar provinsi di Sulawesi. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah sangat penting dilaksanakan.

4.2.4 ISU PROVINSI SULAWESI BARAT

Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026), antara lain :

1. Konektivitas wilayah pulau sulawesi;
2. Konflik perbatasan;
3. Bencana alam di wilayah sulawesi.

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan tahapan keempat dari penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga maka RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan taraf hidup masyarakat. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahap keempat dilakukan Perubahan RPJMD sesuai karena adanya perubahan mendasar yaitu bencana non alam (Pandemi covid - 19); perubahan kebijakan nasional dan perubahan regulasi mendasar.

5.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif dokumen RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama lima tahun.

Selanjutnya dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”

Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Penjelasan Visi RPJMD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera	Polewali Mandar MAJU	Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
	Rakyat SEJAHTERA	Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

5.2 MISI

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Keterkaitan antara empat rumusan misi dengan dua pokok visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019-2024

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Rakyat Sejahtera
2.	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Polewali Mandar Maju
3.	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Polewali Mandar Maju
4.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern	Polewali Mandar Maju

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
 - b. Berkurangnya Pengangguran;
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan;
 - d. Berkembangnya usaha ekonomi lokal
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan;
 - c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas.

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya daya saing usaha industry pengolahan dan

- perdagangan;
- b. Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah;
 - c. Membaiknya Iklim Investasi Daerah
 - d. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan
3. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur.
- Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
 - b. Meningkatnya kualitas infrastuktur jaringan irigasi;
 - c. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.
5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern.
- Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Tabel 5. 3 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 Dengan Sasaran Pembangunan Daerah Polewali Mandar Tahun 2019-2024

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat - Berkurangnya Pengangguran; - Meningkatnya ketahanan pangan; - Meningkatnya kualitas pendidikan; - Meningkatnya derajat kesehatan;
Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak -
Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan - Meningkatnya kualitas infrastuktur jaringan irigasi;

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya saing usaha industry pengolahan dan perdagangan; - Berkembangnya usaha ekonomi lokal - Meningkatkan daya saing usaha pariwisata daerah; - Membaiknya Iklim Investasi Daerah - Meningkatkan pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan
Meningkatnya daya saing ekonomi local	
Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 5. 4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
							Capaian	Capaian	Capaian	Capaian /Target	Target	Target
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS											
				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,14	63,74	63,84	64,23	64,79	64,89	64,99
		Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat		Angka kemiskinan	Persen	15,97	15,60	15,26	15,58	16,39	16,05	15,71
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	15,97	15,60	15,26	15,58	16,39	16,05	15,71
			Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,17	3,01	3,15	3,38	2,16	2,10	2,05
			Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	1,39	5,56	5,56	8,33	31,25	32,62	34,03
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan	Skor	79,02	86,32	77,80	87,87	88,41	89,19	89,96
				Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp.	699.721	830.977	831.350	804.358	850.701	878.711	906.720
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,24	7,40	7,41	7,44	7,60	7,69	7,78
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,05	13,06	13,38	13,39	13,48	13,57
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting	Persen	38,20	39,45	-	36,00	39,26	37,14	35,02
				Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	61,97	62,18	62,38	62,53	62,68	62,86	63,04
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,48	91,75	90,02	91,56	91,59	91,61	91,64
				Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Tanpa Predikat	Tanpa Predikat	Pratama	Tanpa Predikat	Tanpa Predikat	Pratama	Pratama
2	MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH											
		Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas		Pertumbuhan ekonomi	Persen	7,34	6,16	-1,57	1,86	2,44	3,11	3,65

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
							Capaian	Capaian	Capaian	Capaian /Target	Target	Target
			Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,75	6,27	0,84	1,42	1,52	1,63	1,72
			Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	9,16	7,35	0,04	5,54	6,47	6,47	6,82
				Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	6,16	4,80	-2,45	3,65	4,69	4,69	6,84
			Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai investasi	Rp.	1.184.427.021.413	494.552.800.539	99.289.000.000	79.507.530.000	186.523.365.799	373.046.713.598	559.570.070.387
			Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	Orang	214.361	251.266	240.953	223.447	279.308	349.136	436.420
3	MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN											
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur		Indeks infrastruktur	Indeks	63,92	75,41	85,91	87,63	88,73	90,17	91,14
				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Persen	46,74	62,16	71,31	74,90	74,35	75,63
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	Persen	66,44	80,13	83,67	84,84	88,13	89,64	91,14
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	63,50	68,55	69,22	66,63	65,58	67,67	68,19
			Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	63,50	0,69	69,22	66,63	65,58	67,67	68,19
4	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN											
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	58,02	62,18	63,09	67,21	67,55	68,66	69,59

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
							Capaian	Capaian	Capaian	Capaian /Target	Target	Target
		dan modern										
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
							70,17	70,76	71,95	72,43	73,49	74,08
				Opini pengelolaan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Skor	3,038	3,030	3,040	3,110	3,53	3,55	3,65
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,51	2,57	3,30	2,71	3,58	3,62	3,66
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik

Keterangan :
Target
Capaian

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran dan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 terjadi perubahan rumusan strategi dan arah kebijakan. Perubahan Rumusan tujuan, sasaran, strategi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2019-2024 selengkapnya disajikan pada matriks berikut :

Tabel 6. 1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019 – 2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS			
		Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
			Berkurangnya pengangguran	Menciptakan Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten Berdasarkan Kebutuhan Lapangan Kerja Yang Tersedia
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Manajemen Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
				Meningkatkan Minat Masyarakat Gemar Berolahraga
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
2	MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH			
		Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Strategi Pengembangan Inovasi, Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sistem Pertanian Terpadu
			Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Peningkatan Produksi Usaha Industri Pengolahan dan Pengelolaan Usaha Perdagangan
			Membaihnya Iklim Investasi Daerah	Pengembangan Sentra-Sentra Pusat Ekonomi Baru dan Berkembang
			Membaihnya Kinerja Pariwisata	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah
3	MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN			
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-pusat kegiatan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
4	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN			
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah daerah
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 juga mengalami perubahan karena adanya perubahan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Beberapa perubahan arah kebijakan dapat dilihat matriks berikut:

Tabel 6. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS									
		Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran
					Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasis potensi unggulan
					Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasi lokal
			Berkurangnya pengangguran	Menciptakan Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten Berdasarkan Kebutuhan Lapangan Kerja Yang Tersedia	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
					Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerja sektor formal
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Manajemen Pendidikan	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Peningkatan akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
					Penataan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Penataan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Penataan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Pemerataan sarana prasarana pendidikan	Pemerataan sarana prasarana pendidikan	Pemerataan sarana prasarana pendidikan
					Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan	Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan	Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan
					Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses layanan kesehatan	Peningkatan akses layanan kesehatan	Peningkatan akses layanan kesehatan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan
					Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
					Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat			
					Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan			
					Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan Minat Masyarakat Gemar Berolahraga	Peningkatan kualitas keluarga berencana	Peningkatan kualitas keluarga berencana	Peningkatan kualitas keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana
				Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH									
		Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Strategi Pengembangan Inovasi, Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sistem Pertanian Terpadu	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan Inovasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi	Pengembangan Inovasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi	Pengembangan Inovasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi
					Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertanian dan perikanan	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertanian dan perikanan	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertanian dan perikanan			
					Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi			
			Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Peningkatan Produksi Usaha Industri Pengolahan dan Pengelolaan Usaha Perdagangan	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah Serta Peningkatan Promosi Produk	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah Serta Peningkatan Promosi Produk	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah
					Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha			
					Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung			

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
					Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi			
					Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha			
			Membaiknya Iklim Investasi Daerah	Pengembangan Sentra-Sentra Pusat Ekonomi Baru dan Berkembang	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian Kemudahan Berinvestasi dan Peningkatan Kualitas Promosi	Pemberian Kemudahan Berinvestasi dan Peningkatan Kualitas Promosi	Pemberian Kemudahan Berinvestasi dan Peningkatan Kualitas Promosi
			Membaiknya Kinerja Pariwisata	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan
3	MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN									
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-pusat kegiatan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi
					Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan
					Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman		tangga	tangga	tangga	tangga	tangga	tangga
				Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman	Penyehatan lingkungan permukiman	Penyehatan lingkungan permukiman	Penyehatan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman
					Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang
					Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran air	Pengendalian pencemaran air	Pengendalian pencemaran air
								Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian pencemaran udara
					Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan	Peningkatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan	Peningkatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan
4	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN									
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta manajemen aset daerah
					Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah
					Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
					Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya
					Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan transportasi kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan transportasi, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan transportasi kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomi dan politik
					Peningkatan kinerja aparatur melalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	Peningkatan kinerja aparatur melalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	Peningkatan kinerja aparatur melalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi
					Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
					Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

6.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi
2. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
4. Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Berkelanjutan
5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah selanjutnya akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode tahun 2019-2024. Penetapan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2020

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS							
1.1	Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,14%	63,74%	326.861.037.995	63,84%	325.118.714.937	
		Angka kemiskinan	15,97%	15,60%		15,26%		
1.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	15,97%	15,60%	1.556.967.285	15,26%	152.377.200	
1.1.1.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	26,00%	240.990.000	6,73%	68.519.900	Dinas Sosial
1.1.1.2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	2,77%	18,79%	414.742.000	14,28%	15.337.400	Dinas Sosial
		Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	25,00%		25,00%		
1.1.1.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	901.235.285	85,86%	68.519.900	Dinas Sosial
1.1.2	Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,63%	68,12%	1.187.518.599	71,39%	467.238.845	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,17%	3,01%		3,15%		
1.1.2.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor / penggerak pembangunnan	75 orang	75 orang	812.564.099	75 orang	100.533.800	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda wirausaha	30 pemuda	32 Orang		32 Orang		
1.1.2.2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	351 Orang	324.954.500	126	292.209.545	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
		Persentase sarana dan prasarana BLK sesuai standar	45,00%	50,00%		55,00%		
1.1.2.3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	10,90%	50.000.000	3,00%	74.495.500	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1.1.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan	79,02	86,32	834.066.250	77,80	63.324.400	
		Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp 699.721	Rp 830.977		Rp 831.350		
1.1.3. 1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Angka ketersediaan pangan perkapita	2.848 Kkal/Kap/Hari	7020	834.066.250	2.150 Kkal/Kap/Hari	63.324.400	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	44 desa/Kel	45 desa/Kel		30 desa/Kel		
1.1.4	Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	5,56%	487.271.140	5,56%	274.954.000	
1.1.4. 1	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna	Persentase BUMDesa yang berkembang :			214.744.140		25.666.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Berkembang	74,31%	94,44%		2,77%		
		- Maju	25,69%	5,55%		0,00%		
		- Mandiri	0,00%	0,00%		0,00%		
		Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	4,16%		6,25%		
1.1.4. 2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	1 SKP	272.527.000	1 SKP	249.287.800	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,24 Tahun	7,40 Tahun	128.479.708.948	7,41 Tahun	67.498.683.299	
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,02 Tahun	13,05 Tahun		13,06 Tahun		
1.1.5. 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik :			66.007.431.948		63.306.023.010	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
		- SD	80,40%	87,21%		10,00%		
		- SMP	75,00%	75,47%		10,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam kondisi baik :						
		- SD	38,53%	64,91%		5,00%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		- SMP	40,51%	70,93%		5,00%		
1.1.5. 2	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	65,00%	86,19%	5.267.758.700	89,53%	3.868.893.589	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	64,00%	69,61%		5,00%		
		Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi PAUD	78,08%	68,26%		85,00%		
		Angka melek huruf	90,00%	98,13%		98,75%		
1.1.5. 3	Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran	APK SD/MI	100,00%	101,97%	56.883.783.500	101,11%	181.479.000	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
		APK SMP/MTS	100,00%	100,10%		110,73%		
		APM SD/MI	98,17%	98,22%		87,13%		
		APM SMP/MTS	94,03%	94,15%		77,80%		
		Angka putus sekolah SD/MI	0,12%	0,06%		0,10%		
		Angka putus sekolah SMP/MTS	0,64%	0,25%		0,44%		
1.1.5. 4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi :			320.734.800		142.287.700	Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
		- Guru SD/SMP	84,45%	41,50%		86,00%		
		- Tenaga kependidikan SD/SMP	73,86%	96,23%		96,23%		
		Persentase tenaga pendidik yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	0,00%	72,52%		0,00%		
		Persentase sekolah yang terakreditasi	55,00%	52,18%		99,52%		
1.1.6	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	61,97 Tahun	62,18 Tahun	192.132.513.073	62,38%	256.183.453.672	
1.1.6. 1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :			54.307.197.529		49.276.633.588	Dinas Kesehatan
		- Dasar	30,00%	25,00%		25,00%		
		- Madya	60,00%	65,00%		65,00%		
		- Utama	10,00%	10,00%		10,00%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		- Paripurna	0,00%	0,00%		0,00%		
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%		94,00%		
1.1.6. 2	Program Peningkatan Kapabilitas RSUD	Nilai Akreditasi RS	88	88	89.412.245.525	88	151.183.140.638	RSUD
1.1.6. 3	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	198 per 100.000 kelahiran hidup	2.055.411.340	140 per 100.000 kelahiran hidup	2.721.564.390	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		
1.1.6. 4	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik			16.246.469.342		45.524.304.811	Dinas Kesehatan
		- Poskesdes	50,00%	50,00%		100,00%		
		- Pustu	30,00%	30,00%		100,00%		
		- Puskesmas	100,00%	100,00%		100,00%		
		- Alat kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		
		- Puskesmas Keliling	0,00%	0,00%		100,00%		
1.1.6. 5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita stunting	18,82%	23,90%	771.884.705	21,58%	762.233.700	Dinas Kesehatan
1.1.6. 6	Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,15%	595.584.030	1,85%	57.247.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.6. 7	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	75%	10.718.206.615	79,00%	5.649.796.913	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.6.	Program Pencegahan dan	Angka Kesakitan Penyakit						Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
8	Pengendalian Penyakit	Menular :			327.671.000		279.892.000	
		- TB	204 per 100.000 penduduk	213 per 100.000 penduduk		120 per 100.000 penduduk		
		- HIV/AIDS	1 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 Penduduk		0.02 per 1.000 Penduduk		
		- Kusta	1,5 per 10.000 penduduk	1,5 per 10.000 penduduk		1,4 per 10.000 penduduk		
		- Pneumonia Balita	5 per 1.000 balita	58 per 1.000 balita		7 per 1.000 balita		
		- Hepatitis B	3 per 1.000 ibu hamil	3 per 1.000 ibu hamil		12 per 1.000 ibu hamil		
		- Diare	31 per 1.000 penduduk	42 per 1.000 penduduk		20 per 1.000 penduduk		
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular :						
		- Hipertensi	83 per 1.000 penduduk	65 per 1.000 penduduk		25 per 1.000 penduduk		
		- Diabetes Mellitus	19 per 1.000 penduduk	22 per 1.000 penduduk		15 per 1.000 penduduk		
		- Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	0.3 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 penduduk		2 per 1.000 penduduk		
1.1.6. 9	Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	62,00%	66,40%	686.142.400	50,00%	333.799.400	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	332 per 1.000 lansia	144 per 1.000 lansia		324 Per 1.000 lansia		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	10,00%		10,80%		
1.1.6. 10	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :			16.246.469.342		12.591.200	Dinas Kesehatan
		- Tenaga medis	100,00%	100,00%		100,00%		
		- Tenaga para medis	100,00%	100,00%		100,00%		
1.1.6. 11	Program Pengembangan dan Pembinaan Keolahraagaan	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	40 atlet	765.231.245	40 atlit	382.249.532	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1.1.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,75	2.182.992.700	90,02	478.683.521	
		Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tanpa Predikat	Tanpa Predikat		Pratama		
1.1.7. 1	Program Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	90,02	1.091.496.350	90,02	356.873.850	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.7. 2	Program Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tanpa Predikat	Tanpa Predikat	1.091.496.350	Pratama	121.809.671	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH							
2.1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	7,34%	6,16%	19.249.271.908	-1,57%	8.336.678.139	
2.1.1	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	9,16%	7,35%	4.495.281.208	0,04	1.707.247.500	
		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	6,16%	4,80%		-2,45		
2.1.1. 1	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan industri :			149.884.400		1.309.562.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		- Mikro	0,70%	0,80%		0,80		
		- Kecil	0,02%	0,04%		0,04		
		- Menengah	0,001%	0,004%		4,00		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
2.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75,56%	99,60%	159.888.200	16, 10%	28.234.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.1.1.3	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:			586.974.000		41.691.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		- Usaha baru	9,00%	0,99%		8,29%		
		- Mikro - kecil	5,00%	0,33%		0,02%		
		- Kecil - menengah	1,00%	0,02%		0,00%		
2.1.1.4	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2,62%	2.914.478.250	0,00%	102.107.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.1.1.5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	100,00%	20,00%	294.818.858	15,00%	130.056.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.1.1.6	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	25,00%	21,00%	389.237.500	35,00%	95.595.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.1.2	Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	214.361 Orang	251.266 Orang	5.604.193.530	240.953Orang	1.401.735.000	
2.1.2.1	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata	Jumlah wisatawan :			4.949.342.530		1.317.003.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		- Domestik	488.012 orang	500.409 Orang		240.953		
		- Mancanegara	287 orang	394 Orang		0		
		Jumlah destinasi wisata	90 objek	92 Objek		92 objek		
2.1.2.2	Program Pelestarian Budaya	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	654.851.000	100,00%	84.732.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase seni budaya yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%		30,00%		
2.1.3	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah :			334.406.700		111.196.000	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		- PMDN (Rp.000)	1.184.427.021	494.552.800		99.289.000		
		- PMA (Rp.000)	-	-		-		
2.1.3. 1	Program Pengembangan Kemitraan Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah :			334.406.700		111.196.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		- PMDN (Rp.000)	148.306.017	494.552.801		78.957.486		
		- PMA (Rp.000)	-	0		0		
		Jumlah investor	401 investor	351 investor		563 investor		
2.1.4	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	5,75%	6,27%	8.815.390.470	0,84%	5.116.499.639	
2.1.4. 1	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh :			1.249.623.442		495.732.323	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Terampil	40 orang	35 orang		36 orang		
		- Ahli	80 orang	85 orang		84 orang		
2.1.4. 2	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan :			135.817.000		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		- Terampil	2 orang	2 orang		2 orang		
		- Ahli	3 orang	3 orang		3 orang		
2.1.4. 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5,00%	14,00%	4.247.259.000	10,00%	2.329.925.916	Dinas Pertanian dan Pangan
2.1.4. 4	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi :			310.342.100		164.620.400	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Padi	386.031,40 Ton	297.165,85 Ton		434.500,00 Ton		
		- Jagung	87.961,41 Ton	110.257,73 Ton		117.095,00 Ton		
		- Kedelai	1.251,77 Ton	3.941,23 Ton		1.983,30 Ton		
		- Durian	120.053,50 Ton	36.203,00 Ton		128.125,00 Ton		
		- Rambutan	244,10 Ton	279,40 Ton		274,70 Ton		
		- Langsung	1,90 Ton	25.017,10 Ton		27.675,00 Ton		
		- Pisang	374,70 Ton	389,41 Ton		481,25 Ton		
		- Bawang Merah	141,10 Ton	153,70 Ton		192,50 Ton		
		- Cabe	671,80 Ton	672,40 Ton		792,00 Ton		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		- Wortel	1,00 Ton	0,00 Ton		2,03 Ton		
		- Kentang	1,00 Ton	0,00 Ton		2,03 Ton		
2.1.4.5	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah produksi :			800.779.500		303.159.900	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Daging sapi	405,95 Ton	326,25 Ton		462,00 Ton		
		- Daging kambing	32,98 Ton	7,16 Ton		37,80 Ton		
		- Daging unggas	1.499,44 Ton	1.679,24 Ton		1.785,00 Ton		
		- Telur unggas	2.818,97 Ton	3.301,49 Ton		3.150,00 Ton		
2.1.4.6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi :			280.000.000		74.739.200	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kakao	33.220,09 Ton	33.341,88 Ton		42.105,00 Ton		
		- Kelapa	19.732,94 Ton	19.987,67 Ton		25.068,75 Ton		
		- Kopi	801,34 Ton	1.954,00 Ton		1.018,50 Ton		
		- Lada	1,00 Ton	216,09 Ton		10,50 Ton		
- Kemiri	1.743,36 Ton	1.833,39 Ton	1.942,50 Ton					
2.1.4.7	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi :			1.238.822.728		1.179.130.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		- Perikanan budidaya laut	10.526,30 Ton	11.611,25 Ton		14.377,33 Ton		
		- Tambak	12.779,67 Ton	12.939,21 Ton		17.791,54 Ton		
		- Kolam	684,33 Ton	938,66 Ton		1.064,48 Ton		
2.1.4.8	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pesisir	Jumlah produksi perikanan tangkap dan pesisir	25.388,26 Ton	26.272,19 Ton	552.746.700	26.215,00 Ton	569.191.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN							
3.1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Indeks infrastruktur	63,92	75,41	116.407.902.265	85,91	45.572.007.334	
3.1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	233 kejadian	256 Kejadian	1.439.193.700	168 Kejadian	577.395.394	
3.1.1.1	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,39%	87,64%	896.830.700	88,51%	103.264.994	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
3.1.1.2	Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	47,12%	60,00%	246.439.000	46,67%	252.311.300	Dinas Perhubungan
3.1.1.3	Program Pelayanan Transportasi	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	44,88%	51,71%	295.924.000	48,70%	221.819.100	Dinas Perhubungan
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	46,74%	62,16 Persen	89.812.216.167	71,31 Persen	20.396.606.032	
3.1.2.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi :			87.437.639.407		18.774.216.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Sedang	9,84%	10%		5,78		
		- Baik	41,89%	45%		67,51		
3.1.2.2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	63,30%	64,42%	2.174.576.760	64,42%	1.420.732.155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.2.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	58,33%	58,33%	200.000.000	58,33%	201.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	78,86%	8.424.896.856	81,50%	7.016.767.424	
3.1.3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	47,00%	72,95	8.424.896.856	72,95%	7.016.767.424	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase pintu air irigasi dalam kondisi baik	73,36%	75		75,00%		
		Persentase bendung dalam kondisi baik	100,00%	100		100,00%		
3.1.4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	66,44%	80,13%	16.731.595.542	83,67%	17.581.238.484	
3.1.4.1	Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	88,00%	10.863.895.000	83,78%	8.579.238.334	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase akses sanitasi yang layak	82,66%	83,00%		88,22%		
		Persentase akses sanitasi yang aman	0,00%	0		0,00%		
3.1.4.2	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	0	815.880.284	30.32 Ha	1.733.866.600	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
3.1.4. 3	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	43,50%	4.396.350.475	43,50%	4.201.094.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	38%		59,90%		
3.1.4. 4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	655.469.783	14,70%	3.067.038.800	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	6459		6.164 unit		
3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	68,55%	13.690.500.823	69,22%	9.824.049.125	
3.2.1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	68,55%	13.690.500.823	69,22%	9.824.049.125	
3.2.1. 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	27,40%	87.41 % (8.090 ton)	10.473.092.164	76,67%	6.606.391.925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase pengurangan sampah	6,46%	20 % (12.786 ton)		16,86%		
		Persentase penanganan persampahan	20,94%	80% (51.145 ton)		57,50%		
3.2.1. 2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan (2,09)	318.849.413	2.09 (Ringan)	842.863.150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.2.1. 3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	5,08%	2.267.331.264	10,50%	1.996.466.550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.2.1. 4	Program Penataan Ruang	Persentase program pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	34,03%	38,03%	631.227.982	38,03%	378.327.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN							
4.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan	Indeks reformasi birokrasi	58,02	62,18	167.904.516.128	63,09	171.943.753.979	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	Modern							
4.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	167.904.516.128	BB	171.943.753.979	
		Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP		WTP		
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,030		3,040		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,57		3,30		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik		Baik		
4.1.1. 1	Program Peningkatan Akuntabilitas, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	Persentase perangkat daerah dengan predikat reformasi birokrasi baik	11,36%	0,00%	160.308.160	99,64%	348.167.749	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	100,00%	1.248.485.831	100,00%	607.263.600	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	65,00%	85,00%		80,00%		
4.1.1. 3	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	744.839.992	70,00%	271.711.138	Bappeda Litbang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara:						
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase konsistensi kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	65,00%	85,00%		80,00%		
4.1.1. 4	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	55.760.000	20,00%	158.327.700	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang ekonomi antara:						
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang ekonomi antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang ekonomi	65,00%	85,00%		80,00%		
4.1.1. 5	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	1.244.260.142	20,00%	247.541.012	Bappeda Litbang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang sosial budaya antara: - RPJMD dengan RENSTRA - RKPD dengan RENJA Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang sosial budaya antara RENJA dengan RKA Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang sosial budaya	 100,00% 100,00% 100,00% 65,00%	 100,00% 100,00% 100,00% 85,00%	 	 100,00% 100,00% 100,00% 80,00%	 	
4.1.1. 6	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80,00%	90,00%	1.787.710.194	100,00%	903.839.798	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	100,00%		100,00%		
4.1.1. 7	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	30,77%	100,00%	2.426.153.035	56,25%	1.444.705.369	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu	86,67%	55,56%		89,00%		
4.1.1. 8	Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pencairan belanja tepat waktu	95,00%	88,89%	700.647.122	82,00%	226.536.786	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SPM yang lengkap dan benar	86,67%	75,90%		91,11%		
4.1.1. 9	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	88,89%	1.508.679.879	100,00%	427.565.100	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
4.1.1. 10	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase administrasi aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	95,56%	100,00%	843.824.865	97,00%	399.393.800	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	100,00%		90,00%		
4.1.1. 11	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan:		91,11%	1.022.029.502		1.051.266.056	Badan Pendapatan
		- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp. 24.512.383.845,18		Rp 24.372.351.692,46		
		- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp. 12.240.740.554,00		Rp 11.699.799.639,00		
		Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	90,00%		90,00%		
4.1.1. 12	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	20,00%	99,00%	570.029.229	99,93%	279.733.500	Sekretariat Daerah
4.1.1. 13	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,00%	331.922.300	100,00%	445.029.027	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,00%		100,00%		
4.1.1. 14	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	20,45%	2.261.225.993	31,82%	2.194.077.750	Inspektorat
4.1.1. 15	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	61,90%	66,67%	683.150.400	31,82%	140.401.100	Inspektorat
4.1.1. 16	Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	32,00%	48,00%	195.442.320	50,00%	982.620.238	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	Persandian							
4.1.1. 17	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	5,00%	40,00%	430.538.831	57.77%	342.215.307	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
4.1.1. 18	Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	40,37%	160.835.140	66.38%	46.818.400	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
4.1.1. 19	Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	0	146.812.500	0	34.816.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.1.1. 20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Baik	baik	559.047.576	Baik	265.257.228	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.1.1. 21	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	95,00%	1.016.200.004	89,43%	1.273.642.390	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	100,00%		100,00%		
4.1.1. 22	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	76,48%	95,00%	697.479.968	88,43%	842.494.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	61,04%		59,77%		
4.1.1. 23	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Baik	481.115.700	Baik	630.269.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.1.1. 24	Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	72.920.975	100,00%	5.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja
4.1.1. 25	Program Pembinaan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%		100,00%	122.908.600	Satuan Polisi Pamong Praja
4.1.1. 26	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :			383.048.175		4.393.900	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	Pamong Praja	- Dasar	49,19%	50,00%		50,00%		
		- Teknis	1,63%	4,50%		4,50%		
4.1.1. 27	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	48.127.300	81,00%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
4.1.1. 28	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81,00%	88,00%	2.038.482.960	88,00%	1.561.177.140	Satuan Polisi Pamong Praja
4.1.1. 29	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	Persentase desa siaga bencana	29,94%	33,00%	139.763.000	44,00%	92.323.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.1.1. 30	Program Tanggap Darurat Bencana	Waktu tanggap darurat setelah kejadian	72 Jam	72 Jam	232.624.000	276,00	210.602.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.1.1. 31	Program Penanganan Pasca Bencana Alam	Persentase pasca bencana yang tertangani	20,00%	20,00%	55.408.400	40,00%	9.363.940.275	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.1.1. 32	Program Politik Dalam Negeri	Indeks pemahaman politik masyarakat	Baik	100,00%	136.406.500	Baik	38.974.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.1.1. 33	Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik yang tertangani	100,00%	99,00%	302.324.000	30,00%	104.415.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.1.1. 34	Program Pembinaan Bina Ideologi, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Baik	Baik	145.831.900	Cukup	31.896.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.1.1. 35	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	28,84%	30,35	2.723.575.204	26,67%	487.668.475	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4.1.1. 36	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	115.605.073	Sangat Kurang	381.270.902	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4.1.1. 37	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian daerah	Baik	Baik	112.366.976	sangat baik	314.965.655	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcom e)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
4.1.1. 38	Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	99	998.132.978	Baik (87%)	104.857.400	Sekretariat Daerah
4.1.1. 39	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	baik	10.121.342.002	Sangat Baik (99.93%)	8.892.104.779	Sekretariat Daerah
4.1.1. 40	Program Penataan Kehumasan dan Keprotokoleran	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Baik	baik	459.088.400	Sangat Baik (99.76%)	411.671.200	Sekretariat Daerah
4.1.1. 41	Program Harmonisasi Produk Hukum Perundang- undangan	Persentase produk hukum yang harmonis	75%	78%	1.087.795.000	100%	449.375.300	Sekretariat Daerah
4.1.1. 42	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	20,00%	20,00%	20.931.968.156	100,00%	19.598.603.124	Sekretariat DPRD
4.1.1. 43	Program Pelayanan Perpustakaan	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Baik	0	401.761.500	Baik	174.440.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	25,00%	30,00%		100,00%		
4.1.1. 44	Program Penataan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status :			349.977.778		124.538.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Kurang berkembang	36,11%	36,11		36,00%		
		- Berkembang	58,33%	58,33		59,00%		
		- Cepat berkembang	5,56%	5,56		5,00%		
4.1.1. 45	Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	20,00%	32,00%	292.786.600	70,00%	53.684.600	Bappeda Litbang
4.1.1. 46	Program Peningkatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	10.994.316.955	75,00%	20.130.059.935	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.1. 47	Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah	persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22%	22,10%	15.751.184.050	38,07%	1.875.369.523	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4.1.1. 48	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	baik	979.608.968	Baik	310.417.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD tahun ke -				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
4.1.1.49	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	96,00%	51.611.291.157	99,37%	61.607.617.589	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	80,00%		99,37%		
		Persenase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	85,00%		99,37%		
4.1.1.50	Program Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	baik	28.142.279.438	Baik	31.927.584.034	Kecamatan
TOTAL					644.113.229.119		560.795.203.514	

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS														

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Meningka tnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarak at			Indeks Pembangunan Manusia	63,14%	64,23%	409.295.392.3 14	64,68%	438.264.936.8 35	65,05%	388.688.973.8 35	65,43%	388.688.973.8 35		
					Angka kemiskinan	15,97%	15,58%		15,44%		15,20%		14,96%			
		Meningkat nya Kesejahter aan Masyaraka t			Angka kemiskinan	15,97%	15,58%	5.218.205.388	15,44%	5.244.244.800	15,20%	7.763.468.650	14,96%	7.763.468.650		
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	12,00%	192.849.700	33,00%	186.267.800	36,00%	298.122.100	36,05%	298.122.100	Dinas Sosial
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	21%	20,00%	110.000.000	20,46%	717.779.000	22,00%	265.698.500	21,00%	265.698.500	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	710.259.788	71,43%	3.939.566.000	71,43%	3.132.859.400	71,43%	3.132.859.400	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	-	100,00%	89.193.400	100,00%	115.604.850	100,00%	115.604.850	Dinas Sosial
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	83,40%	4.205.095.900	80,13%	93.715.300	80,36%	3.750.000.000	80,60%	3.750.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa	-	-	-	10,41%	-	17,36%	-	24,30%	-	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	-	-	-	2 Dokumen	217.723.300	2 Dokumen	201.183.800	2 Dokumen	201.183.800	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM
		Berkurang nya Pengangg uran			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,17%	3,38%	1.183.512.900	3,19%	1.500.941.600	3,10%	2.119.235.800	2,80%	2.119.235.800		
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	1.250 orang	494.327.000	1.250 orang	116.323.500	1.250 orang	1.303.992.500	1.000 orang	1.303.992.500	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	20,00%	374.186.000	20,00%	395.791.000	22,23%	126.465.800	25,00%	126.465.800	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Berkemba ngnya Usaha Ekonomi Lokal											ESDM	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	75 orang	65 Orang	314.999.900	75 orang	988.827.100	75 orang	688.777.500	75 orang	688.777.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
					Jumlah Pemuda Wirausaha	30 pemuda	25 pemuda		28 pemuda		30 pemuda		35 pemuda	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
					Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	8,33%	313.948.300	9,71%	202.028.100	11,09%	202.379.500	12,47%	202.379.500	
				Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	90,28%		95,14%	77.028.200	100,00%	81.782.400	100%	81.782.400	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	1 SKP	190.000.000	2 SKP	124.999.900	2 SKP	120.597.100	2 SKP	120.597.100	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM
			Meningkat nya Ketahanan Pangan		Skor pola pangan harapan	79,02	87,87	1.200.000.200	88,61	2.696.764.600	89,34	2.666.191.700	90,07	2.666.191.700	
					Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita	Rp699.721	Rp804.358		Rp817.854		Rp824.602		Rp831.350	-	
				Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	11,52%	46%	-	48%	2.000.000.000	49%	2.192.290.000	50,00%	2.192.290.000	Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	79	88	1.164.000.000	89	509.309.900	89	393.811.000	90,07	393.811.000	Dinas Pertanian dan Pangan
					Skor PPH Ketersediaan	69,00	97,00		98,00		99,00		100,00		Dinas Pertanian dan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	27%	26%	36.000.200	25%	187.454.700	24%	80.090.700	23%	80.090.700	Dinas Pertanian dan Pangan
			Meningkat nya Kualitas Pendidika n		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,24 Tahun	7,44 Tahun	120.273.135.9 49	7,45 Tahun	132.051.727.5 15	7,46 Tahun	130.962.350.1 36	7,47 Tahun	130.962.350.1 36	
					Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,02 Tahun	13,38 Tahun		13,47 Tahun		13,57 Tahun		13,66 Tahun		

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
				Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK PAUD	75,00%	82,00%	120.173.136.349	82,00%	131.877.375.615	83,00%	130.590.527.636	88,00%	130.590.527.636	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
					Persentase APK SD/MI	100,00%	99,10%		100,00%		100,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
					Persenatse APK SMP/MTs	100,00%	88,03%		100,00%		100,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
					Persentase APM SD/MI	100,00%	99,10%		100,00%		100,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
					Persentase APM SMP/MTs	77,80%	88,30,%		89,50%		91,70%		92,50%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
					Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,10%	0,09%		0,07%		0,06%		0,06%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
					Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,44%	0,45%		0,40%		0,35%		0,30%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
					Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00%	100,00%		90,00%		90,00%		100,00%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persenatse Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	86%	86,00%	99.999.600	89%	174.351.900	89%	371.822.500	89%	371.822.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
				Meningkatnya Derajat Kesehatan		Prevalensi Stunting	38,20%	36,00%	280.447.098.577	31,80%	296.149.990.220	26,46%	243.938.038.149	21,12%	243.938.038.149					
						Angka Harapan Hidup (AHH)	61,97 Tahun	62,53 Tahun		62,58 Tahun		62,75 Tahun		62,86 Tahun						
							Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :		139.650.944.283	281.377.116.420		232.160.929.799		232.160.929.799	Dinas Kesehatan				
								- Dasar	30,00%							0,00%	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan	
								- Madya	60,00%							60,00%	70,00%	68,00%	64,00%	Dinas Kesehatan
								- Utama	10,00%							21,00%	25,00%	27,00%	30,00%	Dinas Kesehatan
								- Paripurna	0,00%							4,00%	5,00%	5,00%	6,00%	Dinas Kesehatan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%		95,00%		95,00%		100,00%		Dinas Kesehatan
					Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	234 per 100.000 kelahiran hidup		201 per 100.000 kelahiran hidup		168 per 100.000 kelahiran hidup		133 per 100.000 kelahiran hidup	-	Dinas Kesehatan
					Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	10 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup	-	Dinas Kesehatan
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	63%	100%		100%		72%		72%	-	Dinas Kesehatan
					- Poskesdes	50,00%	100,00%		56,00%		58,00%		60,00%		Dinas Kesehatan
					- Pustu	30,00%	100,00%		36,00%		38,00%		40,00%		Dinas Kesehatan
					- Puskesmas	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas Kesehatan
					- Alat kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas Kesehatan
					- Puskesmas Keliling	0,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas Kesehatan
					Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	332 per 1.000 lansia	324 Per 1.000 lansia		293 per 1.000 Lansia		280 per 1.000 lansia		265 per 1.000 lansia		Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
					Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	4,00%		5,00%		6,00%		8,00%		Dinas Kesehatan
					Indeks Kepuasan Layanan RS	76,92%	85,00%	132.562.415.839	86,00%	-	87,00%	-	87,00%	-	RSUD
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Presentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	10,40%	65,00%	513.558.600	65,00%	406.876.000	80,00%	407.186.900	85%	407.186.900	Dinas Kesehatan
					Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	67,00%	35,00%		30,00%		50,00%		55%		Dinas Kesehatan
					Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	0,00%	35,00%		30,00%		50,00%		60%		Dinas Kesehatan
					Persentase tenaga kesehatan, masyarakat dan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	Nakes 3,6 % (25 orang dari 1193 orang), Masyarakat 0,04% (161 dari 431.998 jiwa)	0,00%		Nakes 18,3% Masyarakat 0,11%		Nakes 22,6%, Masyarakat 0,14%		Nakes 30%, Masyarakat 20%		Dinas Kesehatan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62,00%	62,00%	468.752.955	62,00%	177.504.800	62,00%	277.498.500	62%	277.498.500	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.805.640.700	0,00%	3.805.640.700	Dinas Kesehatan
					- Tenaga medis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100%		Dinas Kesehatan
					- Tenaga para medis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100%		Dinas Kesehatan
				Program Pengendalian Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,50%	101.000.000	0,92%	25.000.000	0,82%	125.000.000	0,72%	125.000.000	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	81,38%	5.875.427.000	80,99%	7.408.297.000	84,27%	6.511.768.200	88,27%	6.511.768.200	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-	-	-	80,99%	-	84,27%	218.599.200	88,27%	218.599.200	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	18 atlet	1.274.999.900	55 atlet	6.755.196.000	60 atlet	431.414.850	65 atlet	431.414.850	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkat nya Kualitas Hidup Perempua n dan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,56	659.491.000	91,59	419.240.000	91,61	1.037.309.900	91,64	1.037.309.900	

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tanpa Predikat	Tanpa Predikat		Pratama		Pratama		Pratama		
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,48	91,56	244.240.000	92,54	239.240.000	92,80	500.000.000	93,10	500.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,00%	0,00%	-	92,54%	-	92,80%	52.309.900	93,10%	52.309.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	415.251.000	Madya	180.000.000	KLA	433.000.000	KLA	433.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan khusus Anak	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	0,00%	-	-	-	-	92,80%	52.000.000	93,10%	52.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH														

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Meningka tnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualit as			Pertumbuhan ekonomi	7,34%	1,86%	21.772.138.85 0	3,60%	37.084.779.89 0	4,00%	35.710.484.17 0	4,50%	35.710.484.17 0	
		Meningkat nya Pemerataa n Pertumbu han Sektor Pertanian dan Perikanan			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	5,75%	1,42%	14.920.227.65 0	1,71%	23.517.661.69 0	1,86%	32.429.241.07 0	2,01%	32.429.241.07 0	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi padi	385.851 ton	239.081 ton	959.200.000	335.125 ton	7.545.246.500	347.769 ton	9.968.652.600	360.412 ton	9.968.652.600	Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan	
			Jumlah produksi jagung	64.382 ton	11.658 ton	63.179 ton		74.328 ton		85.476 ton					
			Jumlah Produksi kedelai	6.611 ton	395 ton	5.065 ton		5.430 ton		5.794 ton					
			Jumlah Produksi Buah- Buahan	42.370,7 ton	54.333 ton	58.821 ton		68.853 ton		78.884 ton					
			Jumlah Produksi Sayuran	1.744,7 ton	2.146 ton	2.232 ton		2.319 ton		2.405 ton					
			Jumlah produksi Kakao	33.220 ton	36.480 ton	33.442 ton		33.450 ton		33.458 ton					
			Jumlah produksi Kelapa	19.207 ton	17.497 ton	20.735 ton		21.057 ton		21.379 ton					
			Jumlah Produksi Kopi	188 ton	794 ton	1.038 ton		1.159 ton		1.279 ton					
			Jumlah Produksi Sapi	391 ton	410 ton	371 ton		406 ton		441 ton					
			Jumlah Produksi Kambing	16 ton	8,25 ton	10 ton		11 ton		12 ton					
			Jumlah Produksi Unggas	1.652 ton	1.772 ton	1.874 ton		1.941 ton		2.007 ton					
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	3,7%	12%	6.464.230.980	14%	8.822.875.900	16%	14.107.056.60 0	18%	14.107.056.60 0	Dinas Pertanian Dan Pangan	

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9%	12%	1.974.229.300	13%	395.610.200	14%	440.648.500	15%	440.648.500	Dinas Pertanian Dan Pangan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	100%	503.698.000	100%	239.834.000	100%	619.762.300	100%	619.762.300	Dinas Pertanian Dan Pangan
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	92%	48.000.000	93%	155.500.140	94%	299.846.470	95%	299.846.470	Dinas Pertanian Dan Pangan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	60%	60%	1.541.264.220	65%	1.675.127.100	70%	1.447.292.500	75%	1.447.292.500	Dinas Pertanian Dan Pangan Dinas Pertanian Dan Pangan
					Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-4%	4%		5%		6%		7%		
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	25.388,26 Ton	17.879 ton	1.712.908.000	25.889 Ton	3.110.930.400	26.029 Ton	3.651.729.700	26.161 Ton	3.651.729.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	35.310,24 Ton	33.195 ton	1.424.898.800	33.525 Ton	1.217.721.650	35.625 Ton	1.418.517.400	38.275 Ton	1.418.517.400	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	20%	35%	291.798.350	45%	354.815.800	50%	475.735.000	50%	475.735.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkat nya Daya Saing Usaha Industri Pengolah an dan Perdagang an		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	9,16%	5,54%	4.857.403.000	6,04%	863.103.800	6,13%	1.542.508.500	6,22%	1.542.508.500	
					Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	6,16%	3,65%		3,83%		4,00%		4,17%		
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	0,7%	0,01%	3.392.403.000	2,00%	449.859.800	1,06%	1.132.604.100	2,00%	1.132.604.100	Dinas Perindustrian , Perdaganga n, Koperasi Dan Umkm
					Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,02%	0,00%		1,00%		0,10%		1,00%		Dinas Perindustrian , Perdaganga n, Koperasi Dan Umkm
					Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	0,00%	0,00%		1,00%		1,00%		1,00%		
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	27,27%	30%	1.190.000.000	18%	91.200.000	26,32%	102.161.800	27,27%	102.161.800	Dinas Perindustrian , Perdaganga n, Koperasi Dan Umkm

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	15,00%	0.013%	37.500.000	0,013%	45.600.000	0,019 %	45.145.600	0,028%	45.145.600	Dinas Perindustrian , Perdaganga n, Koperasi Dan Umkm
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	25,00%	54,13%	37.500.000	54,19%	45.600.000	55,24%	49.054.000	57,03%	49.054.000	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20,00	35,00	200.000.000	65,00	230.844.000	75,00	213.543.000	100,00	213.543.000	Dinas Perindustrian , Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
			Meningkat nya Investasi Daerah		Nilai investasi	Rp1.184.427. 021.413	Rp79.507.530.0 00	664.521.000	Rp12.946.179.00 0	667.657.300	Rp79.639.5 40.000	533.517.500	Rp79.661.5 42.000	533.517.500	
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	436	565	341.948.000	570	288.482.300	575	154.342.500	580	154.342.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi daerah	184.427.021.4 13	79.507.530.000	322.573.000	118.450.000.000	379.175.000	140.750.000 .000	379.175.000	165.150.000	379.175.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkat nya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah		Jumlah wisatawan	214.361 Orang	223.447 Orang	1.329.987.200	252.290 Orang	12.036.357.10 0	258.058 Orang	1.205.217.100	263.826 Orang	1.205.217.100	
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	-	-	904.999.900	50%	257.627.300	75%	209.280.800	100%	209.280.800	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	90 objek	41 Objrk	274.999.900	97 obyek	174.859.000	100 objek	145.694.600	110 objek	145.694.600	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah wisatawan :					92.264.700		92.208.900		92.208.900	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
					- Domestik	488.012 orang	1.150.000 orang		1.200.000 orang		1.250.000 orang		1.300.000 orang		Dinas Pemuda Olahraga Dan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
															Pariwisata	
					- Mancanegara	287 orang	350 orang		500 orang		750 orang		1.000 orang		Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	-		100,00%	-	100,00%	339.645.000	100,00%	339.645.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%	119.989.700		100,00%	882.130.700	100,00%	319.425.300	100,00%	319.425.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00%	100,00%	29.997.700		100,00%	69.922.300	100,00%	98.962.500	100,00%	98.962.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	0,00%	0,00%	-		30,00%	10.559.553.100	30,00%	-	30,00%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN															
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur			Indeks infrastruktur	63,92%	87,63%	78.494.378.628	88,14%	62.060.614.934	88,30%	94.233.103.666	88,46%	94.233.103.666		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan			Persentase Jalan dalam kondisi mantap	46,74%	74,90%	50.115.847.728	79,52%	40.037.887.043	79,69%	64.340.678.206	79,86%	64.340.678.206		
			Program Penyelenggaraan Jalan	1).Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	51,73%	78,95%	43.993.304.780	75,16%	35.281.399.925	75,16%	53.438.265.756	77,46%	53.438.265.756	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				2).Persentase jembatan dalam kondisi baik;	63,30%	69,74%		80,39%		80,38%		91,03%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	73,04%	6.122.542.948	81,67%	4.756.487.118	83,22%	10.902.412.450	84,82%	10.902.412.450	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			Indeks infrastruktur permukiman	66,44%	84,84%	28.378.530.900	87,04%	22.022.727.891	87,12%	29.892.425.460	87,20%	29.892.425.460		

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Permukiman												
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	85,37%	15.447.985.400	94,00%	12.479.271.800	100%	10.998.838.800	100,00%	10.998.838.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1).Persentase akses sanitasi yang layak;	82,66%	92,14%	5.297.257.600	96,00%	4.007.819.500	100,00%	9.150.756.300	89,51%	9.150.756.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					2).Persentase akses sanitasi yang aman	0,00%	0,80%		5,00%		10,00%		20,00%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	28,22 Ha	1.096.081.000	21,32 Ha	206.404.650	24,6 Ha	189.849.900	0,0 Ha	189.849.900	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	100%	108.997.800	100%	301.605.500	100%	301.605.500	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	56,01%	4.363.074.700	68,15%	1.477.894.590	75,00%	3.879.065.060	82,69%	3.879.065.060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	60,88%	751.576.600	80,30%	616.456.600	90,50%	1.215.817.150	100,00%	1.215.817.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	232.558.900	33,25%	226.388.200	50,00%	55.249.200	26,70%	55.249.200	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	34,03%	46,00%	540.000.000	50,00%	886.434.100	54,00%	798.399.000	60,00%	798.399.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	Sangat baik	649.996.700	Sangat baik	768.336.600	Sangat baik	569.049.600	Sangat Baik	569.049.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,39%	88,51%	1.902.243.924	92,04%	1.244.724.051	96,55%	2.733.794.950	100,00%	2.733.794.950	Dinas Perhubungan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	55,00%	75,00%	-	71,43%	-	77,14%	-	90,00%	-	Dinas Perhubunga n	
					Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	44,88%	80,48%	-	52,32%	-	54,45%	-	60,00%	-	Dinas Perhubunga n	
		Meningka tnya Kualitas Lingkunga n Hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	66,63%	16.530.865.70 0	67,15%	14.066.961.57 5	67,67%	12.871.158.10 0	68,19%	12.871.158.10 0		
					Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	66,63%	16.530.865.70 0	67,15%	14.066.961.57 5	67,67%	12.871.158.10 0	68,19%	12.871.158.10 0		
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	27,40%	61,98%	14.490.526.10 0	71,09%	7.868.429.875	80,20%	8.569.446.600	89,31%	8.569.446.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan	940.339.600	Ringan	1.950.371.500	Ringan	291.094.300	Ringan	291.094.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	0,39%	1.100.000.000	11,70%	1.121.718.100	13,10%	1.099.943.900	14,50%	1.099.943.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani	-	-	-	-	-	8,90%	22.449.300	8,90%	22.449.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar	-	-	-	0%	-	100%	-	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	-	-	-	100%	356.458.800	100%	131.112.000	100%	131.112.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masvarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	100%	256.831.800	100%	324.142.600	100%	324.142.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penanganan Sampah		-	-	-	2.513.151.500	73,04 %	2.432.969.400	73,04%	2.432.969.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN														
		Terwujud nya pemerint ahan yang bersih, akuntabe l dan modern			Indeks reformasi birokrasi	58,02	67,21	1.021.951.434. 293	67,35	970.945.707.4 94	67,42	974.535.882.2 41	67,50	974.535.882.2 41	
			Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Pemerinta h Daerah		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB	1.021.951.434. 293	BB	970.945.707.4 94	BB	974.535.882.2 41	BB	974.535.882.2 41	
							(71,95)	(72,05)	(72,15)		(72,25)				
						Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP				
						Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,110	3,120		3,130		3,140		
			Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,510	2,710	2,830	2,850	2,870					
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik					
			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	671.275.000	100,00%	659.427.500	100,00%	709.839.600	100,00%	709.839.600	Baliitbangren
					Persentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		Baliitbangren		
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	937.323.100	80,00%	1.019.064.700	100,00%	1.063.042.900	100,00%	1.063.042.900

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antara:										Balitbangren
					- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Balitbangren
					- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Balitbangren
					Persentase konsistensi kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Balitbangren
					Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral Pada Bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65,00%	85,00%		90,00%		95,00%		95,00%		Balitbangren
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	30,77%	70,70%	235.783.314.318	66,67%	223.654.029.346	77,78%	227.978.516.491	90,00%	227.978.516.491	Badan Keuangan
					Persentase pencairan belanja tepat waktu	-	92,00%		85,00%		87,00%		93,00%		Badan Keuangan
					Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Badan Keuangan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar	95,56%	97,78%	407.686.250	97,78%	695.966.000	100,00%	477.366.000	100,00%	477.366.000	Badan Keuangan
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penerimaan:			2.014.912.700		6.831.855.010		6.515.449.760		6.515.449.760	Badan Pendapatan
					- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp. 25.646.675.755		Rp. 27.670.000.000		Rp.28.930.000.000		Rp30.015.000.000		Badan Pendapatan
					- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp. 18.047.357.431		Rp. 15.307.477.600		Rp.16.531.570.000		Rp17.540.800.000		Badan Pendapatan
					Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Badan Pendapatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80,00%	100,00%	683.396.675.054	100,00%	654.982.351.438	100,00%	652.153.066.731	100,00%	652.153.066.731	Seluruh Perangkat Daerah

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Seluruh Perangkat Daerah
				Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	Seluruh Perangkat Daerah		
				Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	Seluruh Perangkat Daerah		
				Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00%	Seluruh Perangkat Daerah		
				Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	79,00%		80,00%		85,00%		90,00%	Seluruh Perangkat Daerah		
				Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	80,00%		77,00%		80,00%		83,00%	Seluruh Perangkat Daerah		
					Persenase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	82,00%	-	85,00%	-	85,00%	-	90,00%	-	Seluruh Perangkat Daerah
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	Sangat Baik	8.096.886.186	Sangat baik	3.865.599.851	sangat baik	3.537.251.000	Sangat Baik	3.537.251.000	Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	-	-	-	30 Kali	4.622.281.051	30 Kali	4.545.160.996	30 Kali	4.545.160.996	Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	55,56%	1.496.215.400	38,64%	2.424.447.100	45,45%	2.216.369.000	53,45%	2.216.369.000	Inspektorat
				Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	61,90%	100,00%	368.154.000	100,00%	340.365.800	100,00%	452.145.200	100,00%	452.145.200	Inspektorat
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	32,00%	54,17%	1.061.142.400	58,00%	1.385.240.100	64,00%	1.423.685.100	71,00%	1.423.685.100	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	5,00%	89,29%	1.723.568.224	64,00%	391.285.100	77,00%	411.389.100	91,00%	411.389.100	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	74,56%	100.100.800	77,00%	159.450.900	77,00%	142.618.800	92,00%	142.618.800	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai	8 opd	19,00%	-	23,00%	16.746.700	28,00%	22.736.300	33,00%	22.736.300	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
				Program Pengelolaan Arsip	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	73,3	50.001.100	65	74.616.700	76	75.396.220	86	75.396.220	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Baik	Sangat Baik	260.052.000	Sangat Baik	174.882.600	Sangat Baik	326.550.000	Sangat Baik	326.550.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	97,02%	1.026.636.600	100,00%	924.522.500	100,00%	879.826.800	100,00%	879.826.800	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	96,09%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	76,48%	100,00%	681.193.320	100,00%	276.626.300	100,00%	269.259.900	100,00%	269.259.900	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	80,52%		90,26%		100,00%		100,00%		Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Sangat Baik	588.743.600	Sangat Baik	231.664.900	Sangat Baik	226.505.500	Sangat Baik	226.505.500	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	73,00%	342.370.985	100,00%	482.220.200	100,00%	416.164.600	100,00%	416.164.600	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :			-		-		-		-	Satuan Polisi Pamong Praja
					- Dasar	49,19%	50,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
					- Teknis	1,63%	4,50%		16,00%		20,00%		23,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pencegahan, Penang gulan, Penyelamatan kebakaran dan Penvelamatan Non	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81,00%	59,00%	4.098.730.608	94,00%	2.367.688.600	100,00%	2.169.153.200	100,00%	2.169.153.200	Satuan Polisi Pamong Praja

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kebakaran											
				Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	29,94%	44,00%	1.661.649.500	67,00%	390.603.100	78,00%	489.773.900	90,00%	489.773.900	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
				72 Jam		72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	
				20,00%		60,00%	-	80,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan Etika Serta Budaya Politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	Baik	Baik	1.056.000.000	Baik	1.002.989.800	Baik	6.108.014.500	Baik	6.108.014.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	398.691.600	100,00%	450.694.600	100,00%	583.219.600	100,00%	583.219.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Baik	Baik	91.000.000	Baik	51.765.800	Baik	70.219.900	Baik	70.219.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas	-	13%	-	16%	112.291.700	18%	15.401.300	18%	15.401.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	-	100%	-	100%	67.128.800	100%	69.709.200	100%	69.709.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	100,00%	14.999.600	100,00%	10.996.900	100,00%	31.549.500	100,00%	31.549.500	Dinas Sosial
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	28,84%	34,08%	1.405.667.900	36,08%	815.708.700	38,20%	903.809.400	41,20%	903.809.400	Badan Kepegawaia n Pendidikan dan Pelatihan
				Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	1.732.373.658	Baik	1.599.851.828	Sangat Baik	1.361.952.900	Sangat Baik	1.361.952.900	Badan Kepegawaia n Pendidikan dan Pelatihan

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Indeks Kepuasan Layanan Adminsistrasi Kepegawaian Daerah	Baik	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Badan Kepegawaia n Pendidikan dan Pelatihan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	Sangat Baik	12.622.896.83 1	Sangat Baik	16.252.501.80 0	Sangat Baik	15.379.941.20 0	Sangat Baik	15.379.941.20 0	Sekretariat Daerah
					Persentase produk hukum yang harmonis	75%	71%	-	95%	-	100%	-	100,00%	-	Sekretariat Daerah
				Program Perekonimian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	20,00%	75,00%	950.000.000	75,00%	974.740.000	95,00%	900.000.000	85,00%	900.000.000	Sekretariat Daerah
					Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sekretariat Daerah
					Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Baik	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sekretariat Daerah
				Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	20,00%	20,00%	22.632.012.00 0	20,00%	15.051.617.80 0	20,00%	23.631.832.10 0	20,00%	23.631.832.10 0	Sekretariat DPRD
				Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Baik	Sangat Baik	295.000.000	Sangat Baik	-	Sangat Baik	1.455.505.950	Sangat Baik	1.455.505.950	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
					Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	25,00%	40,00%		45,00%		50,00%		60,00%		Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status :			703.451.687		373.962.400		417.445.700		417.445.700	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					- Kurang berkembang	36,11%	36,00%		29,86%		27,78%		30,00%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					- Berkembang	58,33%	59,00%		62,50%		63,89%		65,89%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					- Cepat berkembang	5,56%	5,00%		7,64%		8,33%		9,33%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					Persentase BUMDesa yang berkembang :								0,00%		Dinas Pemberdaya an

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)									Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
							Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
															Masyarakat dan Desa
					- Berkembang	74,31%	65,28%		54,86%		40,97%		30,00%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					- Maju	25,69%	8,33%		35,42%		45,14%		50,00%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
					- Mandiri	0,00%	0,00%		9,72%		13,89%		20,00%		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan daerah	20,00%	70,00%	162.901.900	80,00%	315.047.000	100,00%	282.426.000	100,00%	282.426.000	Balitbangren
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	33.395.680.01 5	86,76%	27.619.760.97 0	89,71%	16.632.873.69 3	92,71%	16.632.873.69 3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22%	50,86%	1.724.127.957	79,19%	275.713.900	100,00%	190.714.200	100,00%	190.714.200	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
TOTAL								1.548.044.209. 785		1.522.423.000. 728		1.506.039.602. 012		1.506.039.602. 012	

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan pembangunan daerah didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program pembangunan daerah dan program perangkat daerah.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana program prioritas didalam Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 berisikan indikasi program yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Seluruh rencana program tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan sektoral dan disertai dengan kerangka pendanaan yang dirinci per tahun selama rentang waktu lima tahun ke depan, dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pencapaian target kinerja program (*outcomes*) dimasing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar namun juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan didalam Tabel 7.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar. Program-program prioritas dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Urusan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2020

Tabel 1.1.1. Indikator Kinerja Program, Kondisi Perangkat Daerah dan Rebutanan Pendanaan di Era Otonomi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 - 2020								
NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
	URUSAN WAJIB				493.129.934.683		409.257.976.557	
	TERKAIT PELAYANAN DASAR				440.206.609.296		385.252.316.641	
1	PENDIDIKAN				128.479.708.948		67.498.683.299	DISDIKBUD
1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik :			66.007.431.948		63.306.023.010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- SD	80,40%	87,21%		10,00%		
		- SMP	75,00%	75,47%		10,00%		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam kondisi baik :						
		- SD	38,53%	64,91%		5,00%		
		- SMP	40,51%	70,93%		5,00%		
1.2	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	65,00%	86,19%	5.267.758.700	89,53%	3.868.893.589	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	64,00%	69,61%		5,00%		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi PAUD	78,08%	68,26%		85,00%		
		Angka melek huruf	90,00%	98,13%		98,75%		
1.3	Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran	APK SD/MI	100,00%	101,97%	56.883.783.500	101,11%	181.479.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP/MTS	100,00%	100,10%		110,73%		
		APM SD/MI	98,17%	98,22%		87,13%		
		APM SMP/MTS	94,03%	94,15%		77,80%		
		Angka putus sekolah SD/MI	0,12%	0,06%		0,10%		
		Angka putus sekolah SMP/MTS	0,64%	0,25%		0,44%		
1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi :			320.734.800		142.287.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- Guru SD/SMP	84,45%	41,50%		86,00%		
		- Tenaga kependidikan SD/SMP	73,86%	96,23%		96,23%		
		Persentase tenaga pendidik yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	0,00%	72,52%		0,00%		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase sekolah yang terakreditasi	55,00%	52,18%		99,52%		
2	KESEHATAN				180.053.491.183		250.094.159.727	DINKES
2.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :			54.307.197.529		49.276.633.588	Dinas Kesehatan
		- Dasar	30,00%	25,00%		25,00%		
		- Madya	60,00%	65,00%		65,00%		
		- Utama	10,00%	10,00%		10,00%		
		- Paripurna	0,00%	0,00%		0,00%		
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%		94,00%		
2.2	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	198 per 100.000 kelahiran hidup	2.055.411.340	140 per 100.000 kelahiran hidup	2.721.564.390	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		
2.3	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik			16.246.469.342		45.524.304.811	Dinas Kesehatan
		- Poskesdes	50,00%	50,00%		100,00%		
		- Pustu	30,00%	30,00%		100,00%		
		- Puskesmas	100,00%	100,00%		100,00%		
		- Alat kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020			
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.		
		- Puskesmas Keliling	0,00%	0,00%		100,00%			
2.4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita stunting	18,82%	23,90%	771.884.705	21,58%	762.233.700	Dinas Kesehatan	
2.5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka Kesakitan Penyakit Menular :		327.671.000		279.892.000	Dinas Kesehatan		
		- TB	204 per 100.000 penduduk					213 per 100.000 penduduk	120 per 100.000 penduduk
		- HIV/AIDS	1 per 1.000 penduduk					1 per 1.000 Penduduk	0.02 per 1.000 Penduduk
		- Kusta	1,5 per 10.000 penduduk					1,5 per 10.000 penduduk	1,4 per 10.000 penduduk
		- Pneumonia Balita	5 per 1.000 balita					58 per 1.000 balita	7 per 1.000 balita
		- Hepatitis B	3 per 1.000 ibu hamil					3 per 1.000 ibu hamil	12 per 1.000 ibu hamil
		- Diare	31 per 1.000 penduduk					42 per 1.000 penduduk	20 per 1.000 penduduk
		Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular :							
		- Hipertensi	83 per 1.000 penduduk					65 per 1.000 penduduk	25 per 1.000 penduduk
		- Diabetes Mellitus	19 per 1.000 penduduk					22 per 1.000 penduduk	15 per 1.000 penduduk
		- Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	0.3 per 1.000 penduduk					1 per 1.000 penduduk	2 per 1.000 penduduk

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
2.6	Program Peningkatan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	62,00%	66,40%	686.142.400	50,00%	333.799.400	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	332 per 1.000 lansia	144 per 1.000 lansia		324 Per 1.000 lansia		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	10,00%		10,80%		
2.7	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :			16.246.469.342		12.591.200	Dinas Kesehatan
		- Tenaga medis	100,00%	100,00%		100,00%		
		- Tenaga para medis	100,00%	100,00%		100,00%		
2.8	Program Peningkatan Kapabilitas RSUD	Nilai Akreditasi RS	88	88	89.412.245.525	88	151.183.140.638	RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				126.102.512.403		61.012.511.375	DPUPR
3.1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi :			87.437.639.407		18.774.216.877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Sedang	9,84%	10%		5,78		
		- Baik	41,89%	45%		67,51		
3.2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	63,30%	64,42%	2.174.576.760	64,42%	1.420.732.155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
3.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	58,33%	58,33%	200.000.000	58,33%	201.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	47,00%	72,95	8.424.896.856	72,95%	7.016.767.424	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase pintu air irigasi dalam kondisi baik	73,36%	75		75,00%		
		Persentase bendung dalam kondisi baik	100,00%	100		100,00%		
3.5	Program Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	88,00%	10.863.895.000	83,78%	8.579.238.334	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase akses sanitasi yang layak	82,66%	83,00%		88,22%		
		Persentase akses sanitasi yang aman	0,00%	0		0,00%		
3.6	Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	43,50%	4.396.350.475	43,50%	4.201.094.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	38%		59,90%		
3.7	Program Penataan Ruang	Persentase program pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	34,03%	38,03%	631.227.982	38,03%	378.327.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
3.8	Program Peningkatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	10.994.316.955	75,00%	20.130.059.935	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.9	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	baik	979.608.968	Baik	310.417.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.471.350.067		4.800.905.400	DISRUMKIMTAN
4.1	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	0	815.880.284	30.32 Ha	1.733.866.600	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	655.469.783	14,70%	3.067.038.800	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	6459		6.164 unit		
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.542.579.410		1.693.679.640	SATPOL PP
5.1	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	72.920.975	100,00%	5.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
5.2	Program Pembinaan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%		100,00%	122.908.600	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :			383.048.175		4.393.900	Satuan Polisi Pamong Praja
		- Dasar	49,19%	50,00%		50,00%		
		- Teknis	1,63%	4,50%		4,50%		
5.4	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	48.127.300	81,00%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
5.5	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81,00%	88,00%	2.038.482.960	88,00%	1.561.177.140	Satuan Polisi Pamong Praja
6	SOSIAL				1.556.967.285		152.377.200	DINSOS
6.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	26,00%	240.990.000	6,73%	68.519.900	Dinas Sosial
6.2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	2,77%	18,79%	414.742.000	14,28%	15.337.400	Dinas Sosial
		Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	25,00%		25,00%		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	901.235.285	85,86%	68.519.900	Dinas Sosial
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR				52.923.325.387		24.005.659.916	
7	KETENAGAKERJAAN				374.954.500		366.705.045	DISTRANSNA KER ESDM
7,1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	351 Orang	324.954.500	126	292.209.545	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
		Persentase sarana dan prasarana BLK sesuai standar	45,00%	50,00%		55,00%		
7,2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	10,90%	50.000.000	3,00%	74.495.500	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.182.992.700		478.683.521	DP2KBP3A
8,1	Program Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	90,02	1.091.496.350	90,02	356.873.850	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
8,2	Program Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pra Pratama	1.091.496.350	Inisiasi	121.809.671	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	PANGAN				834.066.250		63.324.400	DISTANPAN
9,1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Angka ketersediaan pangan perkapita	2.848 Kkal/Kap/Hari	7020	834.066.250	2.150 Kkal/Kap/Hari	63.324.400	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	44 desa/Kel	45		30 desa/Kel		
10	PERTANAHAN				15.751.184.050		1.875.369.523	DISRUMKIMTAN
9,2	Program Penataan Pertanahan Pemerintah Daerah	persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22%	22,10%	15.751.184.050	38,07%	1.875.369.523	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11	LINGKUNGAN HIDUP				13.059.272.841		9.445.721.625	DLHK
11,1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	27,40%	87.41% (8.090 ton)	10.473.092.164	76,67%	6.606.391.925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase pengurangan sampah	6,46%	20% (12.786 ton)		16,86%		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase penanganan persampahan	20,94%	80% (51.145 ton)		57,50%		
11, 2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan (2,09)	318.849.413	2.09 (Ringan)	842.863.150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11, 3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	5,08%	2.267.331.264	10,50%	1.996.466.550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.194.795.672		2.746.406.590	DISDUKCAPIL
12, 1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	95,00%	1.016.200.004	89,43%	1.273.642.390	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	100,00%		100,00%		
12, 2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	76,48%	95,00%	697.479.968	88,43%	842.494.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	61,04%		59,77%		
12, 3	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Baik	481.115.700	Baik	630.269.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				564.721.918		150.204.600	DPMD
13, 1	Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna	Persentase BUMDesa yang berkembang :			214.744.140		25.666.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Berkembang	74,31%	94,44		2,77%		
		- Maju	25,69%	5,56		0,00		
		- Mandiri	0,00%	0,00		0,00		
		Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	4,17		6,25%		
13, 2	Program Penataan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status :			349.977.778		124.538.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		- Kurang berkembang	36,11%	36,11		36,00%		
		- Berkembang	58,33%	58,33		59,00%		
		- Cepat berkembang	5,56%	5,56		5,00%		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.313.790.645		5.707.044.413	DP2KBP3A

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
14, 1	Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,15%	595.584.030	1,85%	57.247.500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14, 2	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	75%	10.718.206.615	79,00%	5.649.796.913	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	PERHUBUNGAN				1.439.193.700		577.395.394	DISHUB
15, 1	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,39%	87,64%	896.830.700	88,51%	103.264.994	Dinas Perhubungan
15, 2	Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	47,12%	60,00%	246.439.000	46,67%	252.311.300	Dinas Perhubungan
15, 3	Program Pelayanan Transportasi	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	44,88%	51,71%	295.924.000	48,70%	221.819.100	Dinas Perhubungan

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				430.538.831		342.215.307	DISKOMINFO SP
15, 4	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	5,00%	40,00%	430.538.831	57.77%	342.215.307	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				746.862.200		69.925.200	DISPERINDAG KOP & UKM
17, 1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75,56%	99,60%	159.888.200	16, 10%	28.234.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
17, 2	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:			586.974.000		41.691.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		- Usaha baru	9,00%	0,99%		8,29%		
		- Mikro - kecil	5,00%	0,33%		0,02%		
		- Kecil - menengah	1,00%	0,02%		0,00%		
18	PENANAMAN MODAL				893.454.276		376.453.228	DPMPTSP
18, 1	Program Pengembangan Kemitraan Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi daerah :			334.406.700		111.196.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		- PMDN (Rp.000)	148.306.017	517.654.000		78.941.600		
		- PMA (Rp.000)	-	0		0		
		Jumlah investor	401 investor	351 investor		563 investor		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
18, 2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Baik	baik	559.047.576	Baik	265.257.228	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.577.795.344		482.783.332	DISPOP
19, 1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor / penggerak pembangunan	75 orang	75 orang	812.564.099	75 orang	100.533.800	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda wirausaha	30 pemuda	32 Orang		32 Orang		
19, 2	Program Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	40 atlet	765.231.245	40 atlit	382.249.532	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
20	STATISTIK				160.835.140		46.818.400	DISKOMINFO SP
20, 1	Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Daerah	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	40,37%	160.835.140	66.38%	46.818.400	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
21	PERSANDIAN				195.442.320		982.620.238	DISKOMINFO SP
21, 1	Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	32,00%	48,00%	195.442.320	50,00%	982.620.238	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
22	KEBUDAYAAN				654.851.000		84.732.000	DISDIKBUD
22, 1	Program Pelestarian Budaya	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk	100,00%	100,00%	654.851.000	100,00%	84.732.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		dilestarikan						
		Persentase seni budaya yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%		30,00%		
23	PERPUSTAKAAN				401.761.500		174.440.200	DPK
23, 1	Program Pelayanan Perpustakaan	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Baik	0	401.761.500	Baik	174.440.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	25,00%	30,00%		100,00%		
24	KEARSIPAN				146.812.500		34.816.900	DPK
24, 1	Program Peningkatan Kualitas Kearsipan Pemerintah Daerah	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	0	146.812.500	0	34.816.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
II	URUSAN PILIHAN				17.785.679.008		8.320.112.739	
1	PARIWISATA				4.949.342.530		1.317.003.000	DISPOP
1,1	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata	Jumlah wisatawan :			4.949.342.530		1.317.003.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		- Domestik	488.012 orang	500.409 Orang		240.953		
		- Mancanegara	287 orang	394 Orang		0		
		Jumlah destinasi wisata	90 objek	92 Objek		92 objek		
2	PERTANIAN				6.888.004.042		3.368.177.739	DISTANPAN
2,1	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh	Jumlah penyuluh :			1.249.623.442		495.732.323	Dinas Pertanian dan
		- Terampil	40 orang	35 orang		36 orang		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
	Pertanian	- Ahli	80 orang	85 orang		84 orang		Pangan
2,2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5,00%	14,00%	4.247.259.000	10,00%	2.329.925.916	Dinas Pertanian dan Pangan
2,3	Program Peningkatan Produsi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi :			310.342.100		164.620.400	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Padi	386.031,40 Ton	297.165,85 Ton		434.500,00 Ton		
		- Jagung	87.961,41 Ton	110.257,73 Ton		117.095,00 Ton		
		- Kedelai	1.251,77 Ton	3.941,23 Ton		1.983,30 Ton		
		- Durian	120.053,50 Ton	36.203,00 Ton		128.125,00 Ton		
		- Rambutan	244,10 Ton	279,40 Ton		274,70 Ton		
		- Langsung	1,90 Ton	25.017,10 Ton		27.675,00 Ton		
		- Pisang	374,70 Ton	389,41 Ton		481,25 Ton		
		- Bawang Merah	141,10 Ton	153,70 Ton		192,50 Ton		
		- Cabe	671,80 Ton	672,40 Ton		792,00 Ton		
		- Wortel	1,00 Ton	0,00 Ton		2,03 Ton		
		- Kentang	1,00 Ton	0,00 Ton		2,03 Ton		
		2,4	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah produksi :				
- Daging sapi	405,95 Ton			326,25 Ton	462,00 Ton			
- Daging kambing	32,98 Ton			7,16 Ton	37,80 Ton			
- Daging unggas	1.499,44 Ton			1.679,24 Ton	1.785,00 Ton			
- Telur unggas	2.818,97 Ton			3.301,49 Ton	3.150,00 Ton			
2,5	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah produksi :			280.000.000		74.739.200	Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kakao	33.220,09 Ton	33.341,88 Ton		42.105,00 Ton		
		- Kelapa	19.732,94 Ton	19.987,67 Ton		25.068,75 Ton		
		- Kopi	801,34 Ton	1.954,00 Ton		1.018,50 Ton		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		- Lada	1,00 Ton	216,09 Ton		10,50 Ton		
		- Kemiri	1.743,36 Ton	1.833,39 Ton		1.942,50 Ton		
3	PERDAGANGAN				3.209.297.108		232.163.800	DISPERINDAG KOP & UKM
3,1	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2,62%	2.914.478.250	0,00%	102.107.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3,2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	100,00%	20,00%	294.818.858	15,00%	130.056.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	PERINDUSTRIAN				149.884.400		1.309.562.900	DISPERINDAG KOP & UKM
4,1	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan industri :			149.884.400		1.309.562.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		- Mikro	0,70%	0,80%		0,80		
		- Kecil	0,02%	0,04%		0,04		
		- Menengah	0,001%	0,004%		4,00		
5	TRANSMIGRASI				272.527.000		249.287.800	DISTRANSNA KER ESDM
5,1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	0	272.527.000	1 SKP	249.287.800	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.316.623.928		1.843.917.500	DKP

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
6,1	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	25,00%	21,00%	389.237.500	35,00%	95.595.600	Dinas Kelautan dan Perikanan
6,2	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan :			135.817.000		-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		- Terampil	2 orang	2 orang		2 orang		
		- Ahli	3 orang	3 orang		3 orang		
6,3	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi :			1.238.822.728		1.179.130.100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		- Perikanan budidaya laut	10.526,30 Ton	11.611,25 Ton		14.377,33 Ton		
		- Tambak	12.779,67 Ton	12.939,21 Ton		17.791,54 Ton		
		- Kolam	684,33 Ton	938,66 Ton		1.064,48 Ton		
6,4	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pesisir	Jumlah produksi perikanan tangkap dan pesisir	25.388,26 Ton	26.272,19 Ton	552.746.700	26.215,00 Ton	569.191.800	Dinas Kelautan dan Perikanan
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				79.466.691.777		80.260.627.804	
1	PERENCANAAN				3.293.345.965		1.284.843.450	BALITBANG EN
1,1	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	100,00%	1.248.485.831	100,00%	607.263.600	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPDP	100,00%	100,00%		100,00%		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	65,00%	85,00%		80,00%		
1,2	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	744.839.992	70,00%	271.711.138	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara:						
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase konsistensi kegiatan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	65,00%	85,00%		80,00%		
1,3	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang ekonomi yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	55.760.000	20,00%	158.327.700	Bappeda Litbang
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang ekonomi antara:						
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang ekonomi antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang ekonimi	65,00%	85,00%		80,00%		
1,4	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	1.244.260.142	20,00%	247.541.012	Bappeda Litbang

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD bidang sosial budaya antara:						
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase Konsistensi kegiatan OPD bidang sosial budaya antara RENJA dengan RKA	100,00%	100,00%		100,00%		
		Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang sosial budaya	65,00%	85,00%		80,00%		
2	KEUANGAN				6.501.334.403		3.549.467.111	BAKEU
2,1	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	30,77%	100,00%	2.426.153.035	56,25%	1.444.705.369	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu	86,67%	55,56%		89,00%		
2,2	Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pencairan belanja tepat waktu	95,00%	88,89%	700.647.122	82,00%	226.536.786	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SPM yang lengkap dan benar	86,67%	75,90%		91,11%		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
2,3	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	88,89%	1.508.679.879	100,00%	427.565.100	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		
2,4	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase administrasi aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	95,56%	100,00%	843.824.865	97,00%	399.393.800	Badan Keuangan
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	100,00%		90,00%		
2,5	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan:		91,11%	1.022.029.502		1.051.266.056	Badan Pendapatan
		- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp. 24.512.383.845,1 8		Rp 24.372.351.692,46		
		- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp. 12.240.740.554,0 0		Rp 11.699.799.639,00		
		Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	90,00%		90,00%		
3	KEPEGAWAIAN				2.951.547.253		1.183.905.032	BKPP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
3,1	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	28,84%	30,35	2.723.575.204	26,67%	487.668.475	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3,2	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	115.605.073	Sangat Kurang	381.270.902	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3,3	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian daerah	Baik	Baik	112.366.976	sangat baik	314.965.655	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				292.786.600		53.684.600	BALITBANGREN
4,1	Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	20,00%	32,00%	292.786.600	70,00%	53.684.600	Bappeda Litbang
5	PENGAWASAN				2.944.376.393		2.334.478.850	INSPEKTORAT
5,1	Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	20,45%	2.261.225.993	31,82%	2.194.077.750	Inspektorat
5,2	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	61,90%	66,67%	683.150.400	31,82%	140.401.100	Inspektorat
6	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				35.341.021.725		39.926.664.727	SETDA, BPBD, BAKESBANG POL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
6,1	Program Peningkatan Akuntabilitas, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	Persentase perangkat daerah dengan predikat reformasi birokrasi baik	11,36%	0,00%	160.308.160	99,64%	348.167.749	Sekretariat Daerah
6,2	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	20,00%	99,00%	570.029.229	99,93%	279.733.500	Sekretariat Daerah
6,3	Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	99	998.132.978	Baik (87%)	104.857.400	Sekretariat Daerah
6,4	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	baik	10.121.342.002	Sangat Baik (99.93%)	8.892.104.779	Sekretariat Daerah
6,5	Program Penataan Kehumasan dan Keprotokoleran	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Baik	baik	459.088.400	Sangat Baik (99.76%)	411.671.200	Sekretariat Daerah
6,6	Program Harmonisasi Produk Hukum Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang harmonis	75%	78%	1.087.795.000	100%	449.375.300	Sekretariat Daerah
6,7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	20,00%	20,00%	20.931.968.156	100,00%	19.598.603.124	Sekretariat DPRD
6,8	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	Persentase desa siaga bencana	29,94%	33,00%	139.763.000	44,00%	92.323.000	Badan Penanggulanga

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
								n Bencana Daerah
6,9	Program Tanggap Darurat Bencana	Waktu tanggap darurat setelah kejadian	72 Jam	72 Jam	232.624.000	276,00	210.602.000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
6.10	Program Penanganan Pasca Bencana Alam	Persentase pasca bencana yang tertangani	20,00%	20,00%	55.408.400	40,00%	9.363.940.275	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
6,11	Program Politik Dalam Negeri	Indeks pemahaman politik masyarakat	Baik	100,00%	136.406.500	Baik	38.974.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6,12	Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik yang tertangani	100,00%	99,00%	302.324.000	30,00%	104.415.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6,13	Program Pembinaan Bina Ideologi, Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Baik	Baik	145.831.900	Cukup	31.896.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	KEWILAYAHAN				28.142.279.438		31.927.584.034	KECAMATAN
7,1	Program Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	baik	28.142.279.438	Baik	31.927.584.034	Kecamatan

NO .	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				CAPAIAN	Rp.	Capaian	Rp.	
TOTAL					590.382.305.468.00		497.838.717.100	

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Urusan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 – 2024

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Program, Mendasar, Urangkat Dasar dan Rebutanan 1.0 dan 1.1 Kabupaten 1.0 dan 1.1												
No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	URUSAN WAJIB				552.974.236.262		561.085.632.314		521.948.579.164		519.515.609.764	
	TERKAIT PELAYANAN DASAR				515.143.169.550		512.849.455.288		488.357.909.994		485.924.940.594	
1	PENDIDIKAN				120.273.135.949		132.051.727.515		130.962.350.136		130.962.350.136	
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK PAUD	75,00%	82,00%	120.173.136.349	82,00%	131.877.375.615	83,00%	130.590.527.636	88,00%	130.590.527.636	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase APK SD/MI	100,00%	99,10%	100,00%		100,00%						
	Persentase APK SMP/MTs	100,00%	88,03%	100,00%		100,00%						
	Persentase APM SD/MI	100,00%	99,10%	100,00%		100,00%						
	Persentase APM SMP/MTs	77,80%	88,30,%	89,50%		91,70%						
	Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,10%	0,09%	0,07%		0,06%						
	Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,44%	0,45%	0,40%		0,35%						
	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00%	100,00%	90,00%		100,00%						
1.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	86%	86,00%	99.999.600	89%	174.351.900	89%	371.822.500	89%	371.822.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN				273.195.671.677		281.961.497.220		236.651.255.899		236.651.255.899	
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :			139.650.944.283		281.377.116.420		232.160.929.799		232.160.929.799	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Dasar	30,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
		- Madya	60,00%	60,00%		70,00%		68,00%		64,00%		
		- Utama	10,00%	21,00%		25,00%		27,00%		30,00%		
		- Paripurna	-	4,00%		5,00%		5,00%		6,00%		
		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%		95,00%		95,00%		100,00%		Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	234 per 100.000 kelahiran hidup		201 per 100.000 kelahiran hidup		168 per 100.000 kelahiran hidup		133 per 100.000 kelahiran hidup		
		Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	10 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	63%	100%		100%		72%		72%		Dinas Kesehatan
		- Poskesdes	50,00%	100,00%		56,00%		58,00%		60,00%		
		- Pustu	30,00%	100,00%		36,00%		38,00%		40,00%		
		- Puskesmas	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		- Alat kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		- Puskesmas Keliling	-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	332 per 1.000 lansia	324 Per 1.000 lansia		293 per 1.000 Lansia		280 per 1.000 lansia		265 per 1.000 lansia		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	4,00%		5,00%		6,00%		8,00%		
		Indeks Kepuasan Layanan RS	76,92%	85,00%		86,00%		87,00%		87,00%		RSUD
		2.2	Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Presentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	10,40%	65,00%	513.558.600	65,00%	406.876.000	80,00%	407.186.900	85%

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	67,00%	35,00%		30,00%		50,00%		55%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	-	35,00%		30,00%		50,00%		60%		Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan, masyarakat dan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	Nakes 3,6 % (25 orang dari 1193 orang), Masyarakat 0,04% (161 dari 431.998 jiwa)	0,00%		Nakes 18,3% Masyarakat 0,11%		Nakes 22,6%, Masyarakat 0,14%		Nakes 30%, Masyarakat 20%		Dinas Kesehatan
2.3	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62,00%	62,00%	468.752.955	62,00%	177.504.800	62,00%	277.498.500	62%	277.498.500	Dinas Kesehatan
2.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.805.640.700	0,00%	3.805.640.700	Dinas Kesehatan
		- Tenaga medis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100%		
		- Tenaga para medis	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100%		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				110.671.415.443		90.407.012.703		110.018.447.209		107.585.477.809	
3.1	Program Penyelenggaraan Jalan	1).Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	51,73%	78,95%	43.993.304.780	75,16%	35.281.399.925	75,16%	53.438.265.756	77,46%	53.438.265.756	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												Ruang
		2).Persentase jembatan dalam kondisi baik;	63,30%	69,74%		80,39%		80,38%		91,03%		
3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	73,04%	6.122.542.948	81,67%	4.756.487.118	83,22%	10.902.412.450	84,82%	10.902.412.450	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	85,37%	15.447.985.400	94,00%	12.479.271.800	100%	10.998.838.800	100,00%	10.998.838.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1).Persentase akses sanitasi yang layak;	82,66%	92,14%	5.297.257.600	96,00%	4.007.819.500	100,00%	9.150.756.300	89,51%	9.150.756.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2).Persentase akses sanitasi yang aman	-	0		5,00%		10,00%		20,00%		
3.5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	56,01%	4.363.074.700	68,15%	1.477.894.590	75,00%	3.879.065.060	82,69%	3.879.065.060	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	60,88%	751.576.600	80,30%	616.456.600	90,50%	1.215.817.150	100,00%	1.215.817.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	Baik	Sangat baik	649.996.700	Sangat baik	886.434.100	Sangat baik	798.399.000	Sangat Baik	798.399.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	Sangat baik	649.996.700	Sangat baik	768.336.600	Sangat baik	569.049.600	Sangat Baik	569.049.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.9	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	33.395.680.015	86,76%	27.619.760.970	89,71%	16.632.873.693	92,71%	16.632.873.693	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penanganan Sampah	0,00%	0,00%	-	0,00%	2.513.151.500	73,04 %	2.432.969.400	73,04%	2.432.969.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.533.735.800		635.505.950		4.296.704.600		4.296.704.600	
4.1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	83,40%	4.205.095.900	80,13%	93.715.300	80,36%	3.750.000.000	80,60%	3.750.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan
4.2	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	28,22 Ha	1.096.081.000	21,32 Ha	206.404.650	24,6 Ha	189.849.900	0,0 Ha	189.849.900	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	232.558.900	33,25%	226.388.200	50,00%	55.249.200	26,70%	55.249.200	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4.4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	100,00%	108.997.800	100,00%	301.605.500	100,00%	301.605.500	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.441.101.593		2.849.908.800		2.585.317.800		2.585.317.800	
5.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	73,00%	342.370.985	100,00%	482.220.200	100,00%	416.164.600	100,00%	416.164.600	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :			-		-		-		-	Satuan Polisi Pamong Praja

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		- Dasar	49,19%	50,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		- Teknis	1,63%	4,50%		16,00%		20,00%		23,00%		
		Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	
5.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81,00%	59,00%	4.098.730.608	94,00%	2.367.688.600	100,00%	2.169.153.200	100,00%	2.169.153.200	Satuan Polisi Pamong Praja
6	SOSIAL				1.028.109.088		4.943.803.100		3.843.834.350		3.843.834.350	
6.1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	12,00%	192.849.700	33,00%	186.267.800	36,00%	298.122.100	36,05%	298.122.100	Dinas Sosial
6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	21%	20,00%	110.000.000	20,46%	717.779.000	22,00%	265.698.500	21,00%	265.698.500	Dinas Sosial
6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	710.259.788	71,43%	3.939.566.000	71,43%	3.132.859.400	71,43%	3.132.859.400	Dinas Sosial
6.4	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	-	100,00%	89.193.400	100,00%	115.604.850	100,00%	115.604.850	Dinas Sosial
6.5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	100,00%	14.999.600	100,00%	10.996.900	100,00%	31.549.500	100,00%	31.549.500	Dinas Sosial
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR				37.831.066.712		48.236.177.026		33.590.669.170		33.590.669.170	
7	KETENAGAKERJAAN				868.513.000		512.114.500		1.430.458.300		1.430.458.300	
7.1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	1.250 orang	494.327.000	1.250 orang	116.323.500	1.250 orang	1.303.992.500	1.000 orang	1.303.992.500	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	20,00%	374.186.000	20,00%	395.791.000	22,23%	126.465.800	25,00%	126.465.800	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				659.491.000		419.240.000		1.037.309.900		1.037.309.900	
8.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,48	91,56	244.240.000	92,54	239.240.000	92,80	500.000.000	93,10	500.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
8.2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	-	92,54%	-	92,80%	52.309.900	93,10%	52.309.900	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
8.3	Program Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	415.251.000	Madya	180.000.000	KLA	433.000.000	KLA	433.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
8.4	Program Perlindungan khusus Anak	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	-	-	-	80,00%	-	92,80%	52.000.000	93,10%	52.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
9	PANGAN				1.200.000.200		2.696.764.600		2.666.191.700		2.666.191.700	

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
9.1	Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	11,52%	46%	-	48%	2.000.000.000	49%	2.192.290.000	50,00%	2.192.290.000	Dinas Pertanian dan Pangan
9.2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	79	88	1.164.000.000	89	509.309.900	89	393.811.000	9007,00%	393.811.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Skor PPH Ketersediaan	69	97		98		9900,00%		10000,00%		
9.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	27%	26%	36.000.200	25%	187.454.700	24%	80.090.700	23%	80.090.700	
10	PERTANAHAN				1.724.127.957		275.713.900		190.714.200		190.714.200	
10.1	Program Penatagunaan Tanah	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22%	50,86%	1.724.127.957	79,19%	275.713.900	100,00%	190.714.200	100,00%	190.714.200	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11	LINGKUNGAN HIDUP				16.530.865.700		11.553.810.075		10.438.188.700		10.438.188.700	
11.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	27,40%	61,98%	14.490.526.100	71,09%	7.868.429.875	80,20%	8.569.446.600	89,31%	8.569.446.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.2	program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan	940.339.600	Ringan	1.950.371.500	Ringan	291.094.300	Ringan	291.094.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	0,39%	1.100.000.000	11,70%	1.121.718.100	13,10%	1.099.943.900	14,50%	1.099.943.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar	-	-	-	0%	-	100%	-	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	-	-	-	100%	356.458.800	100%	131.112.000	100%	131.112.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam	-	-	-	100%	256.831.800	100%	324.142.600	100%	324.142.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		pengelolaan lingkungan hidup										
11, 7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang tertangani	-	-	-	-	-	8,90%	22.449.300	8,90%	22.449.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.296.573.520		1.432.813.700		1.375.592.200		1.375.592.200	
12. 1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	97,02%	1.026.636.600	100,00%	924.522.500	100,00%	879.826.800	100,00%	879.826.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	96,09%		100,00%		100,00%		100,00%		
12. 2	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	76,48%	100,00%	681.193.320	100,00%	276.626.300	100,00%	269.259.900	100,00%	269.259.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	80,52%		90,26%		100,00%		100,00%		
12. 3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Sangat Baik	588.743.600	Sangat Baik	231.664.900	Sangat Baik	226.505.500	Sangat Baik	226.505.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				703.451.687		450.990.600		499.228.100		499.228.100	
13. 1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	90,28%		95,14%	77.028.200	100,00%	81.782.400	100%	81.782.400	
13. 2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa	-	-	-	10,41%	-	17,36%	-	24,30%	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. 3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status :			703.451.687		373.962.400		417.445.700		417.445.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												dan Desa
		- Kurang berkembang	36,11%	36,00%		29,86%		27,78%		30,00%		
		- Berkembang	58,33%	59,00%		62,50%		63,89%		65,89%		
		- Cepat berkembang	5,56%	5,00%		7,64%		8,33%		9,33%		
		Persentase BUMDesa yang berkembang :										
		- Berkembang	74,31%	65,28%		54,86%		40,97%		30,00%		
		- Maju	25,69%	8,33%		35,42%		45,14%		50,00%		
		- Mandiri	0,00%	0,00%		9,72%		13,89%		20,00%		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.976.427.000		7.433.297.000		6.855.367.400		6.855.367.400	
14.1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,50%	101.000.000	0,92%	25.000.000	0,82%	125.000.000	0,72%	125.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	81,38%	5.875.427.000	80,99%	7.408.297.000	84,27%	6.511.768.200	88,27%	6.511.768.200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-	-	-	80,99%	-	84,27%	218.599.200	88,27%	218.599.200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	PERHUBUNGAN				1.902.243.924		1.244.724.051		2.733.794.950		2.733.794.950	

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
15. 1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,39%	88,51%	1.902.243.924	92,04%	1.244.724.051	96,55%	2.733.794.950	100,00%	2.733.794.950	Dinas Perhubungan
		Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	55,00%	75,00%	-	71,43%	-	77,14%	-	90,00%	-	Dinas Perhubungan
		Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	44,88%	80,48%	-	52,32%	-	54,45%	-	60,00%	-	Dinas Perhubungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.784.710.624		1.776.525.200		1.835.074.200		1.835.074.200	
16. 1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	5,00%	89,29%	1.723.568.224	64,00%	391.285.100	77,00%	411.389.100	91,00%	411.389.100	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
16. 2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	32,00%	54,17%	1.061.142.400	58,00%	1.385.240.100	64,00%	1.423.685.100	71,00%	1.423.685.100	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				75.000.000		91.200.000		94.199.600		94.199.600	
17. 1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	15,00%	0.013%	37.500.000	0,013%	45.600.000	0,019 %	45.145.600	0,028%	45.145.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
17. 2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	25,00%	54,13%	37.500.000	54,19%	45.600.000	55,24%	49.054.000	57,03%	49.054.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
18	PENANAMAN MODAL				924.573.000		842.539.900		860.067.500		860.067.500	
18. 1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Baik	Sangat Baik	260.052.000	Sangat Baik	174.882.600	Sangat Baik	326.550.000	Sangat Baik	326.550.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. 2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	436	565	341.948.000	570	288.482.300	575	154.342.500	580	154.342.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												Terpadu Satu Pintu
18. 3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi daerah	184.427.021 .413	79.507.530.00 0	322.573.000	118.450.000. 000	379.175.000	140.750.000.0 00	379.175.000	165.150.000	379.175.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.589.999.800		7.744.023.100		1.120.192.350		1.120.192.350	
19. 1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	75 orang	65 Orang	314.999.900	75 orang	988.827.100	75 orang	688.777.500	75 orang	688.777.500	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Pemuda Wirausaha	30 pemuda	25 pemuda		28 pemuda		30 pemuda		35 pemuda		
19. 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	18 atlet	1.274.999.900	55 atlet	6.755.196.000	60 atlet	431.414.850	65 atlet	431.414.850	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
20	STATISTIK				100.100.800		159.450.900		142.618.800		142.618.800	
20. 1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	74,56%	100.100.800	77,00%	159.450.900	77,00%	142.618.800	92,00%	142.618.800	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
21	PERSANDIAN				-		16.746.700		22.736.300		22.736.300	
21. 1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai	8 opd	19,00%	-	23,00%	16.746.700	28,00%	22.736.300	33,00%	22.736.300	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
22	KEBUDAYAAN				149.987.400		11.511.606.100		758.032.800		758.032.800	
22. 1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	339.645.000	100,00%	339.645.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. 2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%	119.989.700	100,00%	882.130.700	100,00%	319.425.300	100,00%	319.425.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. 3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00%	100,00%	29.997.700	100,00%	69.922.300	100,00%	98.962.500	100,00%	98.962.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
22. 4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	0,00%	0,00%	-	30,00%	10.559.553.100	30,00%	-	30,00%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	PERPUSTAKAAN				295.000.000		-		1.455.505.950		1.455.505.950	
23. 1	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Baik	Sangat Baik	295.000.000	Sangat Baik	-	Sangat Baik	1.455.505.950	Sangat Baik	1.455.505.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	25,00%	40,00%		45,00%		50,00%		60,00%		
24	KEARSIPAN				50.001.100		74.616.700		75.396.220		75.396.220	
24. 1	Program Pengelolaan Arsip	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	73,3	50.001.100	65	74.616.700	76	75.396.220	86	75.396.220	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
II	URUSAN PILIHAN				21.072.630.450		25.157.039.690		34.646.515.170		34.646.515.170	
1	PARIWISATA				1.179.999.800		524.751.000		447.184.300		447.184.300	
1.1	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	-	-	904.999.900	50%	257.627.300	75%	209.280.800	100%	209.280.800	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
1.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	90 objek	41 Objrk	274.999.900	97 obyek	174.859.000	100 objek	145.694.600	110 objek	145.694.600	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
1.3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah wisatawan :			-		92.264.700		92.208.900		92.208.900	Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
		- Domestik	488.012 orang	223.447 Orang		1.200.000 orang		1.250.000 orang		1.300.000 orang		
		- Mancanegara	287 orang	0 orang		500 orang		750 orang		1.000 orang		
2	PERTANIAN				11.490.622.500		18.834.193.840		26.883.258.970		26.883.258.970	
2.1	Program Penyediaan dan Pengembangan	Jumlah produksi padi	385.851 ton	239.081 ton	959.200.000	335.125 ton	7.545.246.500	347.769 ton	9.968.652.600	360.412 ton	9.968.652.600	Dinas Pertanian

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Sarana Pertanian											Dan Pangan
		Jumlah produksi jagung	64.382 ton	11.658 ton		63.179 ton		74.328 ton		85.476 ton		Dinas Pertanian Dan Pangan
		Jumlah Produksi kedelai	6.611 ton	395 ton		5.065 ton		5.430 ton		5.794 ton		
		Jumlah Produksi Buah-Buahan	42.370,7 ton	54.333 ton		58.821 ton		68.853 ton		78.884 ton		
		Jumlah Produksi Sayuran	1.744,7 ton	2.146 ton		2.232 ton		2.319 ton		2.405 ton		
		Jumlah produksi Kakao	33.220 ton	36.480 ton		33.442 ton		33.450 ton		33.458 ton		
		Jumlah produksi Kelapa	19.207 ton	17.497 ton		20.735 ton		21.057 ton		21.379 ton		
		Jumlah Produksi Kopi	188 ton	794 ton		1.038 ton		1.159 ton		1.279 ton		
		Jumlah Produksi Sapi	391 ton	410 ton		371 ton		406 ton		441 ton		
		Jumlah Produksi Kambing	16 ton	8,25 ton		10 ton		11 ton		12 ton		
		Jumlah Produksi Unggas	1.652 ton	1.772 ton		1.874 ton		1.941 ton		2.007 ton		
		2.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	3,7%	12%	6.464.230.980	14%	8.822.875.900	16%	14.107.056.600	
2.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9%	12%	1.974.229.300	13%	395.610.200	14%	440.648.500	15%	440.648.500	Dinas Pertanian Dan Pangan
2.4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	100%	503.698.000	100%	239.834.000	100%	619.762.300	100%	619.762.300	Dinas Pertanian Dan Pangan
2.5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	92%	48.000.000	93%	155.500.140	94%	299.846.470	95%	299.846.470	Dinas Pertanian Dan Pangan
2.6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	60%	60%	1.541.264.220	65%	1.675.127.100	70%	1.447.292.500	75%	1.447.292.500	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-4%	4%		5%		6%		7%		

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	PERDAGANGAN				1.390.000.000		322.044.000		315.704.800		315.704.800	
3.1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	27,27%	30%	1.190.000.000	18%	91.200.000	26,32%	102.161.800	27,27%	102.161.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
3.2	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20,00	35,00	200.000.000	65,00	230.844.000	75,00	213.543.000	100,00	213.543.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
4	PERINDUSTRIAN				3.392.403.000		449.859.800		1.132.604.100		1.132.604.100	
4.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	0,7%	0,01%	3.392.403.000	2,00%	449.859.800	1,06%	1.132.604.100	2,00%	1.132.604.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,0%	0,00%		1,00%		0,10%		1,00%		
		Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	0,0%	0,00%		1,00%		1,00%		1,00%		
5	TRANSMIGRASI				190.000.000		342.723.200		321.780.900		321.780.900	
5.1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	1 SKP	190.000.000	2 SKP	124.999.900	2 SKP	120.597.100	2 SKP	120.597.100	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
5.2	Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	-	-	-	2 Dokumen	217.723.300	2 Dokumen	201.183.800	2 Dokumen	201.183.800	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.429.605.150		4.683.467.850		5.545.982.100		5.545.982.100	
6.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	25.388,26 Ton	17.879 ton	1.712.908.000	25.889 Ton	3.110.930.400	26.029 Ton	3.651.729.700	26.161 Ton	3.651.729.700	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6.2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	35.310,24 Ton	33.195 ton	1.424.898.800	33.525 Ton	1.217.721.650	35.625 Ton	1.418.517.400	38.275 Ton	1.418.517.400	Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	20%	35%	291.798.350	45%	354.815.800	50%	475.735.000	50%	475.735.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				975.885.635.397		936.180.328.724		949.444.507.678		949.444.507.678	
1	PERENCANAAN				1.608.598.100		1.678.492.200		1.772.882.500		1.772.882.500	
1.1	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	671.275.000	100,00%	659.427.500	100,00%	709.839.600	100,00%	709.839.600	Balitbangren
		Persentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	937.323.100	80,00%	1.019.064.700	100,00%	1.063.042.900	100,00%	1.063.042.900	Balitbangren
		Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan										

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		dan Pembangunan Manusia antara:										
		- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase konsistensi kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase rata- rata capaian program perencanaan sektoral Pada Bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65,00%	85,00%		90,00%		95,00%		95,00%		
2	KEUANGAN				238.205.913.268		231.181.850.356		234.971.332.251		234.971.332.251	
2.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	30,77%	70,70%	235.783.314.318	66,67%	223.654.029.346	77,78%	227.978.516.491	90,00%	227.978.516.491	Badan Keuangan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase pencairan belanja tepat waktu	-	92,00%		85,00%		87,00%		93,00%		
		Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar	95,56%	97,78%	407.686.250	97,78%	695.966.000	100,00%	477.366.000	100,00%	477.366.000	Badan Keuangan
2.3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penerimaan:			2.014.912.700		6.831.855.010		6.515.449.760		6.515.449.760	Badan Pendapatan
		- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp. 25.646.675.755		Rp. 27.670.000.000		Rp.28.930.000.000		Rp30.015.000.000		
		- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp. 18.047.357.431		Rp. 15.307.477.600		Rp.16.531.570.000		Rp17.540.800.000		
		Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
3	KEPEGAWAIAN				3.138.041.558		2.415.560.528		2.265.762.300		2.265.762.300	
3.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	28,84%	34,08%	1.405.667.900	36,08%	815.708.700	38,20%	903.809.400	41,20%	903.809.400	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3.2	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	1.732.373.658	Baik	1.599.851.828	Sangat Baik	1.361.952.900	Sangat Baik	1.361.952.900	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Indeks Kepuasan Layanan Adminsistrasi Kepegawaian Daerah	Baik	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				162.901.900		315.047.000		282.426.000		282.426.000	
4.1	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase inovasi hasil pengkajian dan	20,00%	70,00%	162.901.900	80,00%	315.047.000	100,00%	282.426.000	100,00%	282.426.000	Balitbangren

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		kelitbangan										
5	PENGAWASAN				1.864.369.400		2.764.812.900		2.668.514.200		2.668.514.200	
5.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	55,56%	1.496.215.400	38,64%	2.424.447.100	45,45%	2.216.369.000	53,45%	2.216.369.000	Inspektorat
5.2	Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	61,90%	100,00%	368.154.000	100,00%	340.365.800	100,00%	452.145.200	100,00%	452.145.200	Inspektorat
6	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				39.412.249.931		34.354.333.400		47.248.111.700		47.248.111.700	
6.1	Program Perekonimian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	20,00%	75,00%	950.000.000	75,00%	974.740.000	95,00%	900.000.000	85,00%	900.000.000	Sekretariat Daerah
		Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sekretariat Daerah
		Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Baik	Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	-	Sekretariat Daerah
6.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	Sangat Baik	12.622.896.831	Sangat Baik	16.252.501.800	Sangat Baik	15.379.941.200	Sangat Baik	15.379.941.200	Sekretariat Daerah
		Persentase produk hukum yang harmonis	75%	71%	-	95%	-	100%	-	100,00%	-	Sekretariat Daerah
6.3	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	20,00%	20,00%	22.632.012.000	20,00%	15.051.617.800	20,00%	23.631.832.100	20,00%	23.631.832.100	Sekretariat DPRD
6.4	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam	29,94%	44,00%	1.661.649.500	67,00%	390.603.100	78,00%	489.773.900	90,00%	489.773.900	Badan Penanggulan dan Bencana

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		menghadapi bencana										Daerah
			72 Jam	72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
			20,00%	60,00%	-	80,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
6.5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan Etika Serta Budaya Politik	Indeks pemahaman politik masyarakat	Baik	Baik	1.056.000.000	Baik	1.002.989.800	Baik	6.108.014.500	Baik	6.108.014.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	398.691.600	100,00%	450.694.600	100,00%	583.219.600	100,00%	583.219.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.7	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Baik	Baik	91.000.000	Baik	51.765.800	Baik	70.219.900	Baik	70.219.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.8	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas	-	13,00%	-	16,00%	112.291.700	18,00%	15.401.300	18,00%	15.401.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.9	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi,ketahan an ekonomi,sosial dan budaya	-	100%	-	100%	67.128.800	100%	69.709.200	100%	69.709.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	KEWILAYAHAN				8.096.886.186		8.487.880.902		8.082.411.996		8.082.411.996	
7.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	Sangat Baik	8.096.886.186	Sangat baik	3.865.599.851	sangat baik	3.537.251.000	Sangat Baik	3.537.251.000	Kecamatan
7.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana prasarana dan	-	-	-	30 Kali	4.622.281.051	30 Kali	4.545.160.996	30 Kali	4.545.160.996	Kecamatan

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		pemberdayaan masyarakat dan kelurahan										
8	PENUNJANG				683.396.675.054		654.982.351.438		652.153.066.731		652.153.066.731	
8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80,00%	100,00%	683.396.675.054	100,00%	654.982.351.438	100,00%	652.153.066.731	100,00%	652.153.066.731	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	100,00%		100,00%		100,00%				
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	100,00%		100,00%		100,00%				
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%				
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%				
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	79,00%		80,00%		85,00%				
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	80,00%		77,00%		80,00%				
		Persenase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	82,00%		85,00%		85,00%				
		TOTAL				1.549.932.502.109				1.522.423.000.728		

Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019 – 2020

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.292.036.700		1.299.130.000
1.1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	44.855.000	100%	44.984.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
1.2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	13.575.000	91,11%	13.646.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
1,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	1.233.606.700	70,00%	1.240.500.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
2	DINAS KESEHATAN				3.541.020.000		3.136.511.000
2,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	451.445.000	100%	40.000.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
2,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	52.040.000	91,11%	52.111.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
2,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	3.037.535.000	70,00%	3.044.400.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
3	DINAS SOSIAL				560.600.000		567.700.000
3,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	20.000.000	100%	20.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
3,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.000.000	91,11%	5.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
3,2	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	535.600.000	70,00%	542.500.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				917.541.500		924.595.000
4,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	27.473.000	100%	27.602.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
4,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	28.622.400	91,11%	28.693.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
4,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	861.446.100	70,00%	868.300.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				525.000.000		532.060.000
5,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	29.500.000	100%	29.629.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
5,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.660.000	91,11%	5.731.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
5,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	489.840.000	70,00%	496.700.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				2.354.640.550		2.361.715.000
6,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	15.957.700	100%	16.086.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
6,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.158.900	91,11%	5.229.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
6,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	2.333.523.950	70,00%	2.340.400.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
7	DINAS PERHUBUNGAN				785.028.000		792.127.000
7,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	17.818.000	100%	17.947.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
7,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	3.709.000	91,11%	3.780.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
7,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	763.501.000	70,00%	770.400.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				601.757.000		608.807.000
8,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	32.695.000	100%	32.824.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
8,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	18.912.000	91,11%	18.983.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
8,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	550.150.000	70,00%	557.000.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				636.080.000		643.180.000
9,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	19.100.000	100%	19.229.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
9,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	8.400.000	91,11%	8.471.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
9,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	608.580.000	70,00%	615.480.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				660.000.000		667.096.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
10,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	16.485.600	100%	16.614.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
10,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	8.031.000	91,11%	8.102.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
10,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	635.483.400	70,00%	642.380.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				461.966.000		469.065.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
11,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	16.085.900	100%	16.214.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
11,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
11,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	445.880.100	70,00%	451.780.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				362.627.500		369.720.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
12,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	28.160.000	100%	28.289.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
12,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	12.810.000	91,11%	12.881.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
12,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	321.657.500	70,00%	328.550.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
13	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				529.450.000		536.545.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
13,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	25.125.000	100%	25.254.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
13,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	3.050.000	91,11%	3.121.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
13,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	501.275.000	70,00%	508.170.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
14	DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				346.800.000		353.900.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
14,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
14,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
14,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	336.800.000	70,00%	342.700.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				414.737.500		421.834.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
15,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	38.729.600	100%	38.858.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
15,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	7.765.200	91,11%	7.836.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
15,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	368.242.700	70,00%	375.140.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				659.864.000		666.954.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
16,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	43.282.710	100%	43.411.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
16,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.182.000	91,11%	5.253.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
16,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	611.399.290	70,00%	618.290.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				474.490.000		481.587.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
17,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	32.387.000	100%	32.516.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
17,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	6.000.000	91,11%	6.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
17,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	436.103.000	70,00%	443.000.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
18	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM				476.240.000		483.332.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
18,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	18.535.000	100%	18.664.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
18,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	4.347.000	91,11%	4.418.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
18,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	453.358.000	70,00%	460.250.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
19	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM				558.078.800		565.170.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
19,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	46.550.000	100%	46.679.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
19,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.500.000	91,11%	5.571.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
19,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	506.028.800	70,00%	512.920.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				387.690.000		394.781.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
20,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	24.111.000	100%	24.240.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
20,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	3.680.000	91,11%	3.751.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
20,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	359.899.000	70,00%	366.790.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
21	BADAN PENDAPATAN				1.057.138.500		1.064.211.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
21,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	27.431.500	100%	27.560.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
21,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	25.880.000	91,11%	25.951.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
21,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	1.003.827.000	70,00%	1.010.700.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
22	BADAN KEUANGAN				1.144.441.800		1.151.499.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
22,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	28.742.900	100%	28.871.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
22,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	132.457.500	91,11%	132.528.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
22,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	983.241.400	70,00%	990.100.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
23	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				681.651.296		688.749.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
23,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	47.070.196	100%	47.199.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
23,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	10.039.900	91,11%	10.110.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
23,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	624.541.200	70,00%	631.440.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
24	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN				1.256.456.978		1.053.555.196

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
24,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	260.316.378	100%	45.823.196
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
24,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	19.204.500	91,11%	19.302.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
24,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	976.936.100	70,00%	988.430.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
25	INSPEKTORAT				479.500.000		486.594.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
25,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	19.390.200	100%	19.519.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
25,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	1.204.000	91,11%	1.275.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
25,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	458.905.800	70,00%	465.800.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				407.400.000		414.520.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
26,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	22.060.000	100%	22.189.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
26,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	5.160.000	91,11%	5.231.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
26,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	380.180.000	70,00%	387.100.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				52.117.134.000		-

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
27,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	-	100%	-
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
27,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	-
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
27,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	52.117.134.000	70,00%	-
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
28	SEKRETARIAT DPRD				7.628.763.000		7.635.005.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
28,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	50.103.000	100%	50.232.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
28,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	19.702.000	91,11%	19.773.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
28,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	7.558.958.000	70,00%	7.565.000.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
29	SEKRETARIAT DAERAH				29.383.295.000		29.389.957.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
29,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	91.477.000	100%	91.606.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
29,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	49.280.000	91,11%	49.351.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
29,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	29.242.538.000	70,00%	29.249.000.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
30	KECAMATAN POLEWALI				364.611.250		371.707.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
30,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	13.845.200	100%	13.974.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
30,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	1.922.600	91,11%	1.993.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
30,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	348.843.450	70,00%	355.740.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
31	KECAMATAN ANREAPI				200.795.000		207.888.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
31,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	18.708.000	100%	18.837.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
31,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
31,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	182.087.000	70,00%	187.980.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
32	KECAMATAN WONOMULYO				407.486.650		414.585.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
32,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	11.605.000	100%	11.734.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
32,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
32,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	395.881.650	70,00%	401.780.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
33	KECAMATAN BINUANG				280.000.000		287.096.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
33,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	13.681.000	100%	13.810.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
33,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	1.755.000	91,11%	1.826.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
33,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	264.564.000	70,00%	271.460.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
34	KECAMATAN MATAKALI				210.000.000		217.100.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
34,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
34,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	14.880.000	91,11%	14.951.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
34,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	185.120.000	70,00%	192.020.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
35	KECAMATAN TAPANGO				243.900.000		250.994.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
35,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	13.514.800	100%	13.643.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
35,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	1.520.000	91,11%	1.591.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
35,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	228.865.200	70,00%	235.760.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
36	KECAMATAN ALU				250.063.000		257.162.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
36,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	14.272.000	100%	14.401.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
36,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	2.070.000	91,11%	2.141.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
36,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	233.721.000	70,00%	240.620.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
37	KECAMATAN LUYO				281.450.500		288.550.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
37,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	28.010.000	100%	28.139.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
37,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
37,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	253.440.500	70,00%	259.340.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
38	KECAMATAN LIMBORO				285.000.000		292.100.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
38,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
38,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
38,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	275.000.000	70,00%	280.900.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
39	KECAMATAN TUBBI TARAMANU				250.000.000		257.095.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
39,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	14.290.000	100%	14.419.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
39,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	3.735.000	91,11%	3.806.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
39,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	231.975.000	70,00%	238.870.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
40	KECAMATAN BULO				218.095.000		225.195.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
40,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	12.325.000	100%	12.454.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
40,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
40,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	205.770.000	70,00%	211.670.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
41	KECAMATAN CAMPALAGIAN				650.821.000		657.920.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
41,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
41,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
41,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	640.821.000	70,00%	646.720.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
42	KECAMATAN TINAMBUNG				489.599.000		496.700.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
42,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
42,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
42,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	479.599.000	70,00%	485.500.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
43	KECAMATAN MAPILLI				277.700.000		284.795.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
43,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	28.325.000	100%	28.454.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
43,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
43,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	249.375.000	70,00%	255.270.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
44	KECAMATAN BALANIPA				249.465.000		256.560.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
44,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	10.000.000	100%	10.129.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
44,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	-	91,11%	1.071.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		91,11%	
44,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	239.465.000	70,00%	245.360.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
45	KECAMATAN MATANGNGA				226.000.000		233.100.000

NO.	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				CAPAIAN	Rp.	CAPAIAN	Rp.
45,1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	11.510.000	100%	11.639.000
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	82%		86%	
45,2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%	600.000	99,11%	671.000
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	88,89%		99,11%	
45,3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	65,00%	213.890.000	70,00%	220.790.000
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		73,00%	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	75,00%		80,00%	
TOTAL					115.586.414.524		63.158.446.196

**Tabel 7. 4 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 – 2024**

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				334.738.896.553		308.703.815.697		320.706.346.753		320.706.346.753
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	334.738.896.553	100%	308.703.815.697	100%	320.706.346.753	100,00 %	320.706.346.753
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS KESEHATAN				80.701.949.067		58.190.253.808		51.876.529.993		51.876.529.993
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	80.701.949.067	100%	58.190.253.808	100%	51.876.529.993	100,00 %	51.876.529.993
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
RSUD HAJJAH ANDI DEPU				23.190.350.331		25.257.549.030		24.718.777.693		24.718.777.693
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	23.190.350.331	100%	25.257.549.030	100%	24.718.777.693	100,00 %	24.718.777.693
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
RSUD WONOMULYO				-		-		3.617.698.196		3.617.698.196
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	-	100%	-	100%	3.617.698.196	100,00 %	3.617.698.196
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00%	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS SOSIAL				2.731.988.957		2.952.888.911		3.250.564.624		3.250.564.624
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.731.988.957	100%	2.952.888.911	100%	3.250.564.624	100,00%	3.250.564.624
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				10.694.782.354		10.923.355.789		10.949.312.912		10.949.312.912
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	10.694.782.354	100%	10.923.355.789	100%	10.949.312.912	100,00 %	10.949.312.912

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				2.887.553.773		3.048.681.569		2.921.601.847		2.921.601.847
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat	80%	100%	2.887.553.773	100%	3.048.681.569	100%	2.921.601.847	100,00 %	2.921.601.847

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	waktu									
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				11.716.064.911		12.192.103.072		12.132.413.153		12.132.413.153

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	11.716.064.911	100%	12.192.103.072	100%	12.132.413.153	100,00 %	12.132.413.153
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DINAS PERHUBUNGAN				3.413.237.474		3.436.871.173		3.297.270.630		3.297.270.630
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.413.237.474	100%	3.436.871.173	100%	3.297.270.630	100,00 %	3.297.270.630
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				5.012.442.092		5.167.794.495		5.181.651.716		5.181.651.716
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	5.012.442.092	100%	5.167.794.495	100%	5.181.651.716	100,00 %	5.181.651.716
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.883.496.591		2.943.720.005		2.783.692.479		2.783.692.479
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.883.496.591	100%	2.943.720.005	100%	2.783.692.479	100,00 %	2.783.692.479
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.034.971.213		2.896.356.995		2.839.125.557		2.839.125.557
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.034.971.213	100%	2.896.356.995	100%	2.839.125.557	100,00 %	2.839.125.557
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.994.615.494		3.798.745.028		4.084.426.709		4.084.426.709
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.994.615.494	100%	3.798.745.028	100%	4.084.426.709	100,00 %	4.084.426.709
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				3.230.527.778		2.878.748.811		2.966.418.886		2.966.418.886
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.230.527.778	100%	2.878.748.811	100%	2.966.418.886	100,00 %	2.966.418.886
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				3.640.232.328		3.727.099.871		3.679.466.643		3.679.466.643
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.640.232.328	100%	3.727.099.871	100%	3.679.466.643	100,00 %	3.679.466.643

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.671.773.808		2.339.264.098		2.788.157.973		2.788.157.973

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.424.733.808	100%	2.339.264.098	100%	2.788.157.973	100,00 %	2.788.157.973
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	247.040.000	96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.441.467.194		2.440.267.083		2.557.227.769		2.557.227.769
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.441.467.194	100%	2.440.267.083	100%	2.557.227.769	100,00 %	2.557.227.769
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				22.246.746.206		21.394.914.403		21.824.752.845		21.824.752.845
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	21.764.126.826	100%	21.394.914.403	100%	21.824.752.845	100,00 %	21.824.752.845
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	482.619.380	96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.259.818.011		4.248.223.273		4.484.122.673		4.484.122.673
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.259.818.011	100%	4.248.223.273	100%	4.484.122.673	100,00 %	4.484.122.673
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM				3.247.710.775		3.157.546.874		3.476.300.583		3.476.300.583
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.869.423.775	100%	3.157.546.874	100%	3.476.300.583	100,00 %	3.476.300.583
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	378.287.000	96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM				4.161.898.382		3.983.565.356		3.993.606.243		3.993.606.243
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.041.899.382	100%	3.983.565.356	100%	3.993.606.243	100,00 %	3.993.606.243
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	119.999.000	96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00%	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2.278.008.096		2.201.765.270		2.440.709.003		2.440.709.003
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.278.008.096	100%	2.201.765.270	100%	2.440.709.003	100,00%	2.440.709.003
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
BADAN PENDAPATAN				6.062.777.105		7.023.465.529		6.007.106.293		6.007.106.293
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	6.062.777.105	100%	7.023.465.529	100%	6.007.106.293	100,00 %	6.007.106.293

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
BADAN KEUANGAN				20.472.061.052		14.754.369.169		15.466.390.228		15.466.390.228
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat	80%	100%	20.472.061.052	100%	14.754.369.169	100%	15.466.390.228	100,00 %	15.466.390.228

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	waktu									
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.208.928.868		4.483.709.442		4.620.022.835		4.620.022.835

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.208.928.868	100%	4.483.709.442	100%	4.620.022.835	100,00 %	4.620.022.835
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN				4.792.034.464		4.825.281.662		4.366.240.262		4.366.240.262
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.705.266.564	100%	4.825.281.662	100%	4.366.240.262	100,00 %	4.366.240.262
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	1.086.767.900	96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
INSPEKTORAT				5.231.083.327		7.719.542.175		8.200.293.111		8.200.293.111
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	5.231.083.327	100%	7.719.542.175	100%	8.200.293.111	100,00 %	8.200.293.111
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.128.375.238		2.263.910.309		2.509.361.557		2.509.361.557
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.128.375.238	100%	2.263.910.309	100%	2.509.361.557	100,00 %	2.509.361.557
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
SEKRETARIAT DPRD				21.159.098.726		32.006.550.313		28.739.575.635		28.739.575.635
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	21.159.098.726	100%	32.006.550.313	100%	28.739.575.635	100,00 %	28.739.575.635
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
SEKRETARIAT DAERAH				65.018.562.929		53.141.029.966		41.478.182.160		41.478.182.160
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	65.018.562.929	100%	53.141.029.966	100%	41.478.182.160	100,00 %	41.478.182.160
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN POLEWALI				9.752.469.117		9.376.559.770		8.412.413.107		8.412.413.107
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	9.752.469.117	100%	9.376.559.770	100%	8.412.413.107	100,00 %	8.412.413.107
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN ANREAPI				2.203.918.591		2.061.721.169		2.212.110.607		2.212.110.607
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.203.918.591	100%	2.061.721.169	2.212.110.607		100,00 %	2.212.110.607

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN WONOMULYO				3.476.662.334		3.293.553.642		3.361.231.999		3.361.231.999
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat	80%	100%	3.476.662.334	100%	3.293.553.642	100%	3.361.231.999	100,00 %	3.361.231.999

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	waktu									
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN BINUANG				1.998.898.214		2.034.809.486		1.856.403.773		1.856.403.773

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	1.998.898.214	100%	2.034.809.486	100%	1.856.403.773	100,00 %	1.856.403.773
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
KECAMATAN MATAKALI				2.154.470.708		2.192.180.153		2.225.537.383		2.225.537.383
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.154.470.708	100%	2.192.180.153	100%	2.225.537.383	100,00 %	2.225.537.383
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN TAPANGO				2.312.430.697		2.074.891.824		2.275.311.238		2.275.311.238
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.312.430.697	100%	2.074.891.824	100%	2.275.311.238	100,00 %	2.275.311.238
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN ALU				1.926.220.557		1.678.909.841		1.907.951.560		1.907.951.560
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	1.926.220.557	100%	1.678.909.841	100%	1.907.951.560	100,00 %	1.907.951.560
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN LUYO				2.375.350.429		2.185.852.381		2.310.461.593		2.310.461.593
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.375.350.429	100%	2.185.852.381	100%	2.310.461.593	100,00 %	2.310.461.593
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN LIMBORO				2.552.575.326		2.499.355.865		2.651.492.040		2.651.492.040
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.552.575.326	100%	2.499.355.865	100%	2.651.492.040	100,00 %	2.651.492.040
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN TUBBI TARAMANU				2.241.433.631		2.193.688.584		2.276.290.594		2.276.290.594
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.241.433.631	100%	2.193.688.584	100%	2.276.290.594	100,00 %	2.276.290.594
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN BULO				240.958.200		222.614.100		1.228.305.478		1.228.305.478
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	240.958.200	100%	222.614.100	100%	1.228.305.478	100,00 %	1.228.305.478

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN CAMPALAGIAN				3.754.685.283		4.054.869.795		3.956.372.154		3.956.372.154
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat	80%	100%	3.754.685.283	100%	4.054.869.795	100%	3.956.372.154	100,00 %	3.956.372.154

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	waktu									
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN TINAMBUNG				3.135.382.754		3.251.927.296		3.301.217.767		3.301.217.767

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.135.382.754	100%	3.251.927.296	100%	3.301.217.767	100,00 %	3.301.217.767
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
KECAMATAN MAPILLI				3.344.506.493		3.299.976.261		2.183.060.468		2.183.060.468
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.344.506.493	100%	3.299.976.261	100%	2.183.060.468	100,00 %	2.183.060.468
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN BALANIPA				2.573.230.554		2.792.024.645		2.588.098.745		2.588.098.745
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.573.230.554	100%	2.792.024.645	100%	2.588.098.745	100,00 %	2.588.098.745
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	
KECAMATAN MATANGNGA				292.379.400		299.897.400		1.449.461.264		1.449.461.264
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	292.379.400	100%	299.897.400	100%	1.449.461.264	100,00 %	1.449.461.264
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%		95,56%		97,78%		100,00 %	

NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00%		80,00%		85,00%		90,00%	
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00%		77,00%		80,00%		83,00%	
	Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00%		85,00%		80,00%		90,00%	

**Tabel 7. 5 Indikasi Rencana Program Penunjang Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Per Perangkat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 – 2024**

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				334.738.896.553		308.352.139.987		320.706.346.753		320.706.346.753
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	334.738.896.553	100%	308.352.139.987	100%	320.706.346.753	100,00 %	320.706.346.753
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
2	DINAS KESEHATAN				80.701.949.067		58.171.761.887		51.876.529.993		51.876.529.993
2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	80.701.949.067	100%	58.171.761.887	100%	51.876.529.993	100,00 %	51.876.529.993
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
2	RSUD HAJJAH ANDI DEPU				23.190.350.331		25.257.549.030		24.718.777.693		24.718.777.693
2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	23.190.350.331	100%	25.257.549.030	100%	24.718.777.693	100,00 %	24.718.777.693
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
2	RSUD WONOMULYO				-		-		3.617.698.196		3.617.698.196
2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	-	100%	-	100%	3.617.698.196	100,00 %	3.617.698.196
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
3	DINAS SOSIAL				2.731.988.957		2.952.888.911		3.250.564.624		3.250.564.624
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.731.988.957	100%	2.952.888.911	100%	3.250.564.624	100,00 %	3.250.564.624
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				10.694.782.354		10.850.355.789		10.949.312.912		10.949.312.912
4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	10.694.782.354	100%	10.850.355.789	100%	10.949.312.912	100,00 %	10.949.312.912
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				2.887.553.773		3.048.681.569		2.921.601.847		2.921.601.847
5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.887.553.773	100%	3.048.681.569	100%	2.921.601.847	100,00 %	2.921.601.847
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				11.716.064.911		12.192.103.072		12.132.413.153		12.132.413.153
6.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	11.716.064.911	100%	12.192.103.072	100%	12.132.413.153	100,00 %	12.132.413.153
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
7	DINAS PERHUBUNGAN				3.413.237.474		3.436.871.173		3.297.270.630		3.297.270.630
7.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.413.237.474	100%	3.436.871.173	100%	3.297.270.630	100,00 %	3.297.270.630
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				5.012.442.092		5.172.794.495		5.181.651.716		5.181.651.716
8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	5.012.442.092	100%	5.172.794.495	100%	5.181.651.716	100,00 %	5.181.651.716
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.883.496.591		2.962.219.776		2.783.692.479		2.783.692.479
9.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.883.496.591	100%	2.962.219.776	100%	2.783.692.479	100,00 %	2.783.692.479
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.034.971.213		2.890.707.495		2.839.125.557		2.839.125.557
10.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.034.971.213	100%	2.890.707.495	100%	2.839.125.557	100,00 %	2.839.125.557
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				3.994.615.494		3.798.745.028		4.084.426.709		4.084.426.709
11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.994.615.494	100%	3.798.745.028	100%	4.084.426.709	100,00 %	4.084.426.709
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				3.230.527.778		2.878.748.811		2.966.418.886		2.966.418.886
12.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.230.527.778	100%	2.878.748.811	100%	2.966.418.886	100,00 %	2.966.418.886
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
13	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				3.640.232.328		3.727.099.871		3.679.466.643		3.679.466.643
13.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.640.232.328	100%	3.727.099.871	100%	3.679.466.643	100,00 %	3.679.466.643
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
14	DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.671.773.808		2.339.264.098		2.788.157.973		2.788.157.973
14.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.424.733.808	100%	2.339.264.098	100%	2.788.157.973	100,00 %	2.788.157.973
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	247.040.000	96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.441.467.194		2.440.267.083		2.557.227.769		2.557.227.769
15.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.441.467.194	100%	2.440.267.083	100%	2.557.227.769	100,00 %	2.557.227.769
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				22.246.746.206		21.394.914.403		21.824.752.845		21.824.752.845
16.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	21.764.126.826	100%	21.394.914.403	100%	21.824.752.845	100,00 %	21.824.752.845
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	482.619.380	96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.259.818.011		4.248.223.273		4.484.122.673		4.484.122.673
17.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.259.818.011	100%	4.248.223.273	100%	4.484.122.673	100,00 %	4.484.122.673
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
18	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM				3.247.710.775		3.175.098.574		3.476.300.583		3.476.300.583
18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.869.423.775	100%	3.175.098.574	100%	3.476.300.583	100,00 %	3.476.300.583
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	378.287.000	96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
19	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM				4.161.898.382		3.983.565.356		3.993.606.243		3.993.606.243
19.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.041.899.382	100%	3.983.565.356	100%	3.993.606.243	100,00 %	3.993.606.243
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	119.999.000	96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2.278.008.096		2.388.818.563		2.440.709.003		2.440.709.003
20.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.278.008.096	100%	2.388.818.563	100%	2.440.709.003	100,00 %	2.440.709.003
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
21	BADAN PENDAPATAN				6.062.777.105		7.024.685.529		6.007.106.293		6.007.106.293
21.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	6.062.777.105	100%	7.024.685.529	100%	6.007.106.293	100,00 %	6.007.106.293
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
22	BADAN KEUANGAN				20.472.061.052		15.254.369.169		15.466.390.228		15.466.390.228
22.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	20.472.061.052	100%	15.254.369.169	100%	15.466.390.228	100,00 %	15.466.390.228
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
23	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.208.928.868		4.483.709.442		4.620.022.835		4.620.022.835
23.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	4.208.928.868	100%	4.483.709.442	100%	4.620.022.835	100,00 %	4.620.022.835
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
24	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN				4.792.034.464		4.841.359.029		4.366.240.262		4.366.240.262
24.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.705.266.564	100%	4.841.359.029	100%	4.366.240.262	100,00 %	4.366.240.262
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%	1.086.767.900	96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
25	INSPEKTORAT				5.231.083.327		7.719.542.175		8.200.293.111		8.200.293.111
25.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	5.231.083.327	100%	7.719.542.175	100%	8.200.293.111	100,00 %	8.200.293.111
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.128.375.238		2.263.910.309		2.509.361.557		2.509.361.557
26.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.128.375.238	100%	2.263.910.309	100%	2.509.361.557	100,00 %	2.509.361.557
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
27	SEKRETARIAT DPRD				21.159.098.726		32.006.550.313		28.739.575.635		28.739.575.635
27.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	21.159.098.726	100%	32.006.550.313	100%	28.739.575.635	100,00 %	28.739.575.635
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
28	SEKRETARIAT DAERAH				65.018.562.929		52.024.952.599		41.478.182.160		41.478.182.160
28.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	65.018.562.929	100%	52.024.952.599	100%	41.478.182.160	100,00 %	41.478.182.160
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
29	KECAMATAN POLEWALI				9.752.469.117		9.325.751.481		8.412.413.107		8.412.413.107
29.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	9.752.469.117	100%	9.325.751.481	100%	8.412.413.107	100,00 %	8.412.413.107
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
30	KECAMATAN ANREAPI				2.203.918.591		2.061.721.169		2.212.110.607		2.212.110.607
30.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.203.918.591	100%	2.061.721.169	2.212.110.607		100,00 %	2.212.110.607
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
31	KECAMATAN WONOMULYO				3.476.662.334		3.293.553.642		3.361.231.999		3.361.231.999
31.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.476.662.334	100%	3.293.553.642	100%	3.361.231.999	100,00 %	3.361.231.999
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
32	KECAMATAN BINUANG				1.998.898.214		2.034.809.486		1.856.403.773		1.856.403.773
32.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	1.998.898.214	100%	2.034.809.486	100%	1.856.403.773	100,00 %	1.856.403.773
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
33	KECAMATAN MATAKALI				2.154.470.708		2.255.988.442		2.225.537.383		2.225.537.383
33.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.154.470.708	100%	2.255.988.442	100%	2.225.537.383	100,00 %	2.225.537.383
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
34	KECAMATAN TAPANGO				2.312.430.697		2.074.891.824		2.275.311.238		2.275.311.238
34.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.312.430.697	100%	2.074.891.824	100%	2.275.311.238	100,00 %	2.275.311.238
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
35	KECAMATAN ALU				1.926.220.557		1.853.532.258		1.907.951.560		1.907.951.560
35.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	1.926.220.557	100%	1.853.532.258	100%	1.907.951.560	100,00 %	1.907.951.560
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
36	KECAMATAN LUYO				2.375.350.429		2.185.852.381		2.310.461.593		2.310.461.593
36.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.375.350.429	100%	2.185.852.381	100%	2.310.461.593	100,00 %	2.310.461.593
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
37	KECAMATAN LIMBORO				2.552.575.326		2.499.355.865		2.651.492.040		2.651.492.040
37.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.552.575.326	100%	2.499.355.865	100%	2.651.492.040	100,00 %	2.651.492.040
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
38	KECAMATAN TUBBI TARAMANU				2.241.433.631		2.193.688.584		2.276.290.594		2.276.290.594
38.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.241.433.631	100%	2.193.688.584	100%	2.276.290.594	100,00 %	2.276.290.594
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
39	KECAMATAN BULO				240.958.200		222.614.100		1.228.305.478		1.228.305.478
39.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	240.958.200	100%	222.614.100	100%	1.228.305.478	100,00 %	1.228.305.478
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
40	KECAMATAN CAMPALAGIAN				3.754.685.283		4.054.869.795		3.956.372.154		3.956.372.154
30.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.754.685.283	100%	4.054.869.795	100%	3.956.372.154	100,00 %	3.956.372.154
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
41	KECAMATAN TINAMBUNG				3.135.382.754		3.251.927.296		3.301.217.767		3.301.217.767
41.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.135.382.754	100%	3.251.927.296	100%	3.301.217.767	100,00 %	3.301.217.767
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
42	KECAMATAN MAPILLI				3.344.506.493		3.299.976.261		2.183.060.468		2.183.060.468
42.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	3.344.506.493	100%	3.299.976.261	100%	2.183.060.468	100,00 %	2.183.060.468
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
42	KECAMATAN BALANIPA				2.573.230.554		2.792.024.645		2.588.098.745		2.588.098.745
43.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	2.573.230.554	100%	2.792.024.645	100%	2.588.098.745	100,00 %	2.588.098.745
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
44	KECAMATAN MATANGNGA				292.379.400		299.897.400		1.449.461.264		1.449.461.264
44.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80%	100%	292.379.400	100%	299.897.400	100%	1.449.461.264	100,00 %	1.449.461.264
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	92%		96%		100%		100,00 %	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %	
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33 %		95,56 %		97,78 %		100,00 %	

NO .	NAMA OPD/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDI SI KINER JA AWAL RPJMD (TAHU N 2018)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				Capai an	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	75,00 %		80,00 %		85,00 %		90,00 %	
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	75,00 %		77,00 %		80,00 %		83,00 %	
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	80,00 %		85,00 %		80,00 %		90,00 %	
TOTAL				706.587.025.385		654.982.351.438		652.153.066.731		652.153.066.731	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019-2024.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian/Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	63,14	63,74	63,84	64,23	64,79	64,89	64,99
2	Angka kemiskinan	Persen	15,97	15,6	15,26	15,68	16,39	16,05	15,71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,97	3,01	3,15	3,38	2,16	2,10	2,05
4	Skor Pola Pangan Harapan	Point	79,02	86,32	86,40	87,87	88,41	89,19	89,96
5	Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita	Rp.	699.721	8.598	831.350	804.358	850.701	878.711	906.720
6	Persentase desa maju dan mandiri	Persen	1,39	5,56	8,33	5,56	31,25	32,64	34,03
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,24	7,4	7,41	7,44	7,60	7,69	7,78
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,02	13,05	13,06	13,38	13,39	13,48	13,57
9	Prevalensi stunting	Persen	38,2	39,45	-	36,00	39,26	37,14	35,02
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	61,97	62,18	62,38	62,53	62,68	62,86	63,04
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,48	91,75	90,02	91,56	91,59	91,61	91,64
12	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya
13	Pertumbuhan ekonomi	Persen	7,34	6,16	-1,57	1,86	2,44	3,11	3,65
14	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	8	6,27	0,84	1,42	1,52	1,63	1,72
15	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,42	7,35	0,04	5,54	6,47	6,63	6,82
16	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,55	4,8	-2,45	3,65	4,69	5,88	6,84
17	Nilai investasi	Rp.	148.306.01	494.552.801.000	78.957.486.000	79.507.530.000	186.523.356.799	373.046.713.598	559.570.070.397

No.	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian/Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
			7						
18	Jumlah wisatawan	Orang	488.299	450.968	800.300	223.447	279308,75	349.136	436.420
19	Indeks infrastruktur	Indeks	63,92	78,13	82,51	87,63	88,73	90,17	91,52
20	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	46,74	63,83	73,29	78,95	74,35	75,63	76,91
21	Indeks infrastruktur permukiman	Persen	66,44	80,13	83,67	86,87	88,13	89,64	91,14
22	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	63,50	68,55	69,22	66,63	65,58	67,67	68,19
23	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	58,02	62,18	63,09	67,21	67,55	68,66	69,59
24	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B [66,12]	BB [70,17]	BB [70,76]	BB [71,95]	BB [72,43]	BB [73,49]	BB [74,08]
25	Opini pengelolaan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Skor	3,038	3,03	3,04	3,11	3,53	3,55	3,65
27	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,51	2,57	3,3	2,71	3,58	3,62	3,66
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik

Keterangan

	CAPAIAN
	TARGET

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2021-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	7,34	1,86	3,60	3,11	3,65
1.2	Persentase penduduk miskin	15,97	15,58	15,44	16,05	15,71
1.3	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	63,14	64,23	64,68	64,89	64,99
1.4	Angka rata-rata lama sekolah	7,24	7,44	7,45	7,69	7,78
1.5	Angka harapan lama sekolah	13,02	13,38	13,47	13,48	13,57
1.6	Angka harapan hidup	61,97	62,53	62,58	62,86	63,04
1.7	Prevalensi balita stunting	38,20	36,00	34,50	37,14	35,02
1.8	Tingkat pengangguran terbuka	3,17	3,38	3,19	2,10	2,05
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.10	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,1	17,55	18,25	18,39	19,09
1.11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,02	87,87	88,61	89,19	89,96
1.13	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	5,75	1,42	1,71	1,63	1,72
1.14	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	9,16	5,54	6,04	6,63	6,82

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
1.15	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	6,16	3,65	3,83	5,88	6,84
URUSAN WAJIB						
TERKAIT PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN					
1.1	Persentase APK PAUD	75,00%	82,00%	82,00%	83,00%	88,00%
	Persentase APK SD/MI	100,00%	99,10%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase APK SMP/MTs	100,00%	88,03%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase APM SD/MI	100,00%	99,10%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase APM SMP/MTs	77,80%	88,30, %	89,50%	91,70%	92,50%
	Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,10%	0,09%	0,07%	0,06%	0,06%
	Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,44%	0,45%	0,40%	0,35%	0,30%
	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00%	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%
1.2	Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	86%	86,00%	89%	89%	89%
1.3	Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN					
2.1	Persentase puskesmas dengan status akreditasi :					
	- Dasar	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- Madya	60,00%	60,00%	70,00%	68,00%	64,00%
	- Utama	10,00%	21,00%	25,00%	27,00%	30,00%
	- Paripurna	-	4,00%	5,00%	5,00%	6,00%
	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%	95,00%	95,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	234 per 100.000 kelahiran hidup	201 per 100.000 kelahiran hidup	168 per 100.000 kelahiran hidup	133 per 100.000 kelahiran hidup
	Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	10 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	63%	100%	100%	72%	72%
	- Poskesdes	50,00%	100,00%	56,00%	58,00%	60,00%
	- Pustu	30,00%	100,00%	36,00%	38,00%	40,00%
	- Puskesmas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	- Alat kesehatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	- Puskesmas Keliling	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	332 per 1.000	324 Per 1.000 lansia	293 per 1.000 Lansia	280 per 1.000	265 per 1.000
		lansia			lansia	lansia
	Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	4,00%	5,00%	6,00%	8,00%
	Indeks Kepuasan Layanan RS	76,92%	85,00%	86,00%	87,00%	87,00%
2.2	Presentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	10,40%	65,00%	65,00%	80,00%	85%
	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	67,00%	35,00%	30,00%	50,00%	55%
	Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	-	35,00%	30,00%	50,00%	60%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Persentase tenaga kesehatan, masyarakat dan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	Nakes 3,6 % (25 orang dari 1193 orang), Masyarakat 0,04% (161 dari 431.998 jiwa)	0,00%	Nakes 18,3% Masyarakat 0,11%	Nakes 22,6%, Masyarakat 0,14%	Nakes 30%, Masyarakat 20%
2.3	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62,00%	62,00%	62,00%	62,00%	62%
2.4	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi :	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- Tenaga medis	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	- Tenaga para medis	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3.1	1).Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	51,73%	78,95%	75,16%	75,16%	77,46%
	2).Persentase jembatan dalam kondisi baik;	63,30%	69,74%	80,39%	80,38%	91,03%
3.2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	73,04%	81,67%	83,22%	84,82%
3.3	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	85,37%	94,00%	100%	100,00%
3.4	1).Persentase akses sanitasi yang layak;	82,66%	92,14%	96,00%	100,00%	89,51%
	2).Persentase akses sanitasi yang aman	-	0	5,00%	10,00%	20,00%
3.5	Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik	40,41%	56,01%	68,15%	75,00%	82,69%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
3.6	Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik	35,00%	60,88%	80,30%	90,50%	100,00%
3.7	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik
3.8	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik
3.9	Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	67,65%	75,00%	86,76%	89,71%	92,71%
3.10	Persentase Penanganan Sampah	0,00%	0,00%	0,00%	73,04 %	73,04%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4.1	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (Total RTLH)	83,40%	80,13%	80,36%	80,60%
4.2	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	28,22 Ha	21,32 Ha	24,6 Ha	0,0 Ha
4.3	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	11,70%	14,70%	33,25%	50,00%	26,70%
4.4	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	73,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :					
	- Dasar	49,19%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	- Teknis	1,63%	4,50%	16,00%	20,00%	23,00%
	Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.2	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	81,00%	59,00%	94,00%	100,00%	100,00%
6	SOSIAL					
6.1	Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	12,00%	33,00%	36,00%	36,05%
6.2	Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan	21%	20,00%	20,46%	22,00%	21,00%
6.3	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	59,18%	71,43%	71,43%	71,43%	71,43%
6.4	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.5	Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
7	KETENAGAKERJAAN					

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
7.1	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	1.250 orang	1.250 orang	1.250 orang	1.000 orang
7.2	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	20,00%	20,00%	22,23%	25,00%
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,48	91,56	92,54	92,80	93,10
8.2	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	-	92,54%	92,80%	93,10%
8.3	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA
8.4	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	-	-	80,00%	92,80%	93,10%
9	PANGAN					
9.1	Persentase cadangan pangan masyarakat	11,52%	46%	48%	49%	50,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
9.2	Skor PPH Konsumsi	79,02	87,87	88,61	89,34	90,07
	Skor PPH Ketersediaan	69,00	97,00	98,00	99,00	100,00
9.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	27%	26%	25%	24%	23%
10	PERTANAHAN					
10.1	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	22,22%	50,86%	79,19%	100,00%	100,00%
11	LINGKUNGAN HIDUP					
11.1	Persentase sampah yang terkelola	27,40%	61,98%	71,09%	80,20%	89,31%
11.2	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
11.3	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	0,39%	11,70%	13,10%	14,50%
11.4	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar	-	-	0%	100%	100%
11.5	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	-	-	100%	100%	100%
11.6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	-	-	100%	100%	100%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
12.1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	97,02%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	96,09%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
12.2	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	76,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	80,52%	90,26%	100,00%	100,00%
12.3	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
13.1	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	90,28%	95,14%	100,00%	100%
13.2	Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa	-	-	10,41%	17,36%	24,30%
13.3	Persentase desa dengan status :					
	- Kurang berkembang	36,11%	36,00%	29,86%	27,78%	30,00%
	- Berkembang	58,33%	59,00%	62,50%	63,89%	65,89%
	- Cepat berkembang	5,56%	5,00%	7,64%	8,33%	9,33%
	Persentase BUMDesa yang berkembang :					
	- Berkembang	74,31%	65,28%	54,86%	40,97%	30,00%
	- Maju	25,69%	8,33%	35,42%	45,14%	50,00%
	- Mandiri	0,00%	0,00%	9,72%	13,89%	20,00%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
14.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	1,50%	0,92%	0,82%	0,72%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
14.2	Persentase peserta KB aktif	67,00%	81,38%	80,99%	84,27%	88,27%
14.3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-	-	80,99%	84,27%	88,27%
15	PERHUBUNGAN					
15.1	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	86,39%	88,51%	92,04%	96,55%	100,00%
	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	55,00%	75,00%	71,43%	77,14%	90,00%
	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	44,88%	80,48%	52,32%	54,45%	60,00%
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
16.1	Persentase perangkat daerah yang informatif dan komunikatif	5,00%	89,29%	64,00%	77,00%	91,00%
16.2	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis elektronik	32,00%	54,17%	58,00%	64,00%	71,00%
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
17.1	Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	15,00%	0,013%	0,013%	0,019 %	0,028%
17.2	Persentase Koperasi Aktif	25,00%	54,13%	54,19%	55,24%	57,03%
18	PENANAMAN MODAL					

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
18.1	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
18.2	Jumlah Investor	436	565	570	575	580
18.3	Nilai realisasi investasi daerah	184.427.021.413	79.507.530.000	118.450.000.000	140.750.000.000	165.150.000
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
19.1	Jumlah Pemuda Pelopor	75 orang	65 Orang	75 orang	75 orang	75 orang
	Jumlah Pemuda Wirausaha	30 pemuda	25 pemuda	28 pemuda	30 pemuda	35 pemuda
19.2	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	18 atlet	55 atlet	60 atlet	65 atlet
20	STATISTIK					
20.1	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	74,56%	77,00%	77,00%	92,00%
21	PERSANDIAN					
21.1	Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai	8 opd	19,00%	23,00%	28,00%	33,00%
22	KEBUDAYAAN					
22.1	Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.2	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.3	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
22.4	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%
23	PERPUSTAKAAN					
23.1	Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Persentase komunitas literasi yang aktif ditingkat desa	25,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%
24	KEARSIPAN					
24.1	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	73,3	65	76	86
II	URUSAN PILIHAN					
1	PARIWISATA					
1.1	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	-	-	50%	75%	100%
1.2	Jumlah destinasi wisata	90 objek	41 Objrk	97 obyek	100 objek	110 objek
1.3	Jumlah wisatawan :					
	- Domestik	488.012 orang	223.447 Orang	1.200.000 orang	1.250.000 orang	1.300.000 orang
	- Mancanegara	287 orang	0 orang	500 orang	750 orang	1.000 orang
2	PERTANIAN					
2.1	Jumlah produksi padi	385.851 ton	239.081 ton	335.125 ton	347.769 ton	360.412 ton
	Jumlah produksi jagung	64.382 ton	11.658 ton	63.179 ton	74.328 ton	85.476 ton
	Jumlah Produksi kedelai	6.611 ton	395 ton	5.065 ton	5.430 ton	5.794 ton
	Jumlah Produksi Buah-Buahan	42.370,7 ton	54.333 ton	58.821 ton	68.853 ton	78.884 ton

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Jumlah Produksi Sayuran	1.744,7 ton	2.146 ton	2.232 ton	2.319 ton	2.405 ton
	Jumlah produksi Kakao	33.220 ton	36.480 ton	33.442 ton	33.450 ton	33.458 ton
	Jumlah produksi Kelapa	19.207 ton	17.497 ton	20.735 ton	21.057 ton	21.379 ton
	Jumlah Produksi Kopi	188 ton	794 ton	1.038 ton	1.159 ton	1.279 ton
	Jumlah Produksi Sapi	391 ton	410 ton	371 ton	406 ton	441 ton
	Jumlah Produksi Kambing	16 ton	8,25 ton	10 ton	11 ton	12 ton
	Jumlah Produksi Unggas	1.652 ton	1.772 ton	1.874 ton	1.941 ton	2.007 ton
2.2	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	3,7%	12%	14%	16%	18%
2.3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9%	12%	13%	14%	15%
2.4	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	100%	100%	100%	100%
2.5	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	92%	93%	94%	95%
2.6	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	60%	60%	65%	70%	75%
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-4%	4%	5%	6%	7%
3	PERDAGANGAN					
3.1	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	27,27%	30%	18%	26,32%	27,27%
3.2	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20,00	35,00	65,00	75,00	100,00
4	PERINDUSTRIAN					
4.1	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	0,7%	0,01%	2,00%	1,06%	2,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,0%	0,00%	1,00%	0,10%	1,00%
	Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	0,0%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5	TRANSMIGRASI					
5.1	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	1 SKP	1 SKP	2 SKP	2 SKP	2 SKP
5.2	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
6.1	Jumlah total produksi perikanan tangkap	25.388,26 Ton	17.879 ton	25.889 Ton	26.029 Ton	26.161 Ton
6.2	Jumlah total produksi perikanan budidaya	35.310,24 Ton	33.195 ton	33.525 Ton	35.625 Ton	38.275 Ton
6.3	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	20%	35%	45%	50%	50%
III	FUNGSI PENUNJANG URUSAN					
1	PERENCANAAN					
1.1	Persentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
	Persentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar	100,00%	20,00%	80,00%	100,00%	100,00%
	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antara:					
	- RPJMD dengan RENSTRA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	- RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase konsistensi kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA Pada bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral Pada Bidang infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	65,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
2	KEUANGAN					

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
2.1	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	30,77%	70,70%	66,67%	77,78%	90,00%
	Persentase pencairan belanja tepat waktu	-	92,00%	85,00%	87,00%	93,00%
	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.2	Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar	95,56%	97,78%	97,78%	100,00%	100,00%
2.3	Jumlah penerimaan:					
	- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp. 25.646.675.755	Rp. 27.670.000.000	Rp.28.930.000.000	Rp30.015.000.000
	- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp. 18.047.357.431	Rp. 15.307.477.600	Rp.16.531.570.000	Rp17.540.800.000
	Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	KEPEGAWAIAN					
3.1	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	28,84%	34,08%	36,08%	38,20%	41,20%
3.2	Indeks Profesionalitas Aparatur	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
4.1	Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan	20,00%	70,00%	80,00%	100,00%	100,00%
5	PENGAWASAN					

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
5.1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	55,56%	38,64%	45,45%	53,45%
5.2	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	61,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
6.1	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu	20,00%	75,00%	75,00%	95,00%	85,00%
	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6.2	Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Persentase produk hukum yang harmonis	75%	71%	95%	100%	100,00%
6.3	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6.4	Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	29,94%	44,00%	67,00%	78,00%	90,00%
		72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam	72 Jam
		20,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
6.5	Indeks pemahaman politik masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Capaian	Target	Target	Target
6.6	Persentase potensi konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.7	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	KEWILAYAHAN					
7.1	Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan	Baik	Sangat Baik	Sangat baik	sangat baik	Sangat Baik
7.2	Jumlah pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	-	-	30 Kali	30 Kali	30 Kali
8	PENUNJANG					
8.1	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	86,67%	93,33%	95,56%	97,78%	100,00%
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	79,00%	80,00%	85,00%	90,00%
	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	65,00%	80,00%	77,00%	80,00%	83,00%
	Persenase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	75,00%	82,00%	85,00%	85,00%	90,00%

BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Dokumen ini memuat realisasi tahun 2019-2020 dan rencana 2022-2023. RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan tahun 2019-2024.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Periode Tahun 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar. Penyusunan RKPD masa transisi (Tahun 2024) atau setelah RPJMD periode tahun 2019-2024 berakhir, tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi (tahun 2024) tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024-2029).

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Polewali Mandar mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi perangkat daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Bupati Polewali Mandar berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;

3. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Penyusunan RKPD, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
5. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- 6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- 7. Seluruh perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 8. Evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dilakukan setiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka diperlukan: (i) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah; (ii) Kepala Balitbangren menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya; (iii) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya; dan (iv) Kepala Balitbangren menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan berkoordinasi kepada seluruh perangkat daerah.